



Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA BARAT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA BARAT

Tim Penulis : Mardjani Martamin (Ketua)
Alwir Darwis, Syafruddin, Buchari Nurdin, Refrizal
M, Nur Jaul, Larandi A. Tamin, Zamasri, Muslim
(Anggota)

Penyunting : Mardanas Safwan, Sutrisno Kutoyo

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisi dan Dokumentasi kebudayaan
Daerah.

Jakarta 1986

Edisi I 1986

Diterbitkan ulang oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai
Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta 1997

Edisi II 1997

Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

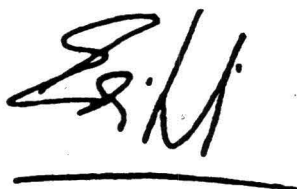
Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan. dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dari pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta. November 1997

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

Prof Dr. Edi Sedyawati

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat* adalah satu diantara hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985 Proyek Tersebut menerbitkannya pada tahun 1986 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian tentang pertumbuhan pendidikan di Sumatera Barat, mulai dari pendidikan tradisional, pendidikan Barat abad ke-19, pendidikan formal abad ke-20 sampai pendidikan zaman Jepang dan Indonesia pada masa kemerdekaan.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "biasa baca" dan "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memperolehnya. Sementara itu, persediaan buku hasil cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instansional.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mempercayai Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebarluasan buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kebudayaan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, November 1997

**Pemimpin Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top left, followed by a horizontal line, and ending with a small flourish on the right.

Soejanto, B.Sc.

NIP. 130 604 670

KATA SAMBUTAN

Kita menyambut dengan rasa gembira, bahwa Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat mulai Tahun Anggaran 1981/1982 telah mendapat kepercayaan dari Pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menerbitkan 2 (dua) judul naskah Kebudayaan Daerah yaitu :

1. Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Sumatera Barat
2. Permainan Rakyat Daerah Sumatera Barat.

Untuk tahun 1982/1983 diterbitkan pula 1 (satu) judul naskah yakni : Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat.

Ketiga naskah ini adalah hasil penelitian Tim Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat Tahun Anggaran 1980/1981 yang lalu dan telah disempurnakan oleh Tim penyempurnaan naskah di pusat sehingga dapat diterbitkan dalam bentuk yang sekarang ini.

Selesainya naskah-naskah ini adalah berkat bimbingan yang diberikan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen P dan K Republik Indonesia. Di samping itu disebabkan karena adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama pihak Perguruan Tinggi (IKIP Padang), Pemerintah Daerah, dan Lembaga-lembaga

Pemerintah lainnya, serta Badan-badan swasta yang ada hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional.

Kiranya naskah-naskah ini akan merupakan tambahan informasi tentang khazanah budaya bangsa dalam berbagai bentuknya seperti tradisi, adat istiadat, cerita rakyat, sejarah, geografi budaya karena belum semuanya dapat diinventarisasikan dan diteliti. Di samping itu penerbitan ini semoga merupakan suatu kegiatan pengembangan kebudayaan terutama dalam hal perbukuan dan perpustakaan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Padang, Desember 1997

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P
DAN K
PROPINSI SUMATERA BARAT**

AMIR ALI
NIP. 130015160

DAFTAR ISI

	Halaman
Sembutan Direktur Direktorat Jenderal	v
Pengantar Cetakan Kedua	vii
Kata Sambutan	ix
Daftar Isi	xi
Pendahuluan	1
Bab I. Pendidikan Tradisional	
1.1 Pengaruh Agama Hindu dan Budaya	23
1.2 Pengaruh Adat Minangkabau	24
1.2.1 Alam Minangkabau	24
1.2.2 Pendidikan Adat Minangkabau	25
1.2.2.1 Pendidikan Calon Penghulu	25
1.2.2.2 Pendidikan Adat Minangkabau Bagi Pemuda Perantau	38
1.2.2.3 Pendidikan Bela Diri	31
1.2.2.4 Pendidikan Pengobatan	36
1.2.2.5 Pendidikan Tukang	39
1.2.2.6 Pendidikan Sastra	40
1.2.2.7 Pendidikan Lain	46

1.2.2.8	Tokoh Guru	46
1.2.3	Perkembangan Pendidikan Adat Minangkabau Sesudah Masuknya Pengaruh Barat	48
1.3	Pengaruh Agama Islam	50
1.3.1	Pendidikan Islam Sebelum Abad Ke-17	50
1.3.2	Pendidikan Islam Di Sumatera Barat Pada Akhir Abad Ke-17 Sampai Pertengahan Abad Ke-19	52
1.3.2.1	Pengajian Al-Quran	56
1.3.2.2	Pengajian Kitab	58
1.3.3	Pendidikan Islam Sampai Awal Abad Ke-20	60
Bab II.	Pendidikan Barat	
2.1	Pengaruh Jaman VOC	67
2.2	Pendidikan Belanda Pada Abad Ke-19	67
Bab III.	Pendidikan Pada Abad Ke-20	
3.1	Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda	75
3.2	Pendidikan Pergerakan Nasional	82
3.2.1	Motivasi	82
3.2.1.1	Motivasi Nasional	82
3.2.1.2	Motivasi Keagamaan	84
3.2.2	Kelembagaan	86
3.2.2.1	Sekolah Adabiah	86
3.2.2.2	Madrasah School	89
3.2.2.3	Madrasah Diniah	89
3.2.2.4	Arabiah School	91
3.2.2.5	Sekolah Thawalib	92
3.2.2.6	Pendidikan Islam Di Luar Sekolah	100
3.2.2.7	Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI)	104
3.2.2.8	Muhammadiyah	108
3.2.2.9	Persatuan Muslimin Indonesia (Permi)	116
3.2.2.10	INS Kayutanam	120
3.2.2.11	Kerajinan Amai Setia	137
3.2.2.12	Taman Siswa	140
3.2.2.13	Training College	143
3.2.3	Tokoh dan Pemikirannya	144
3.2.3.1	Syekh Haji Abdullah Ahmad	144
3.2.3.2	Rohana Kudus	147

3.2.3.3	Syekh Haji Muhammad Thaib Umar	149
3.2.3.4	Syekh Abdul Karim Amarullah	150
3.2.3.5	Syekh Muhammad Jamil Jambek	152
3.2.3.6	Zainuddin Labai El-Yunusi	154
3.2.3.7	Syekh Ibrahim Musa Parabek	156
3.2.3.8	Syekh Daud Rasyidi	157
3.2.3.9	Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo	162
3.2.3.10	Haji Udin Rahmani	164
3.2.3.11	Muhammad Syafei	166
Bab IV	Pendidikan Zaman Jepang Dan Indonesia	
	Merdeka	
4.1	Pendidikan Zaman Pendudukan Jepang	169
4.1.1	Pendidikan Pemerintah	169
4.1.2	Pendidikan Swasta	173
4.2	Pendidikan Indonesia Merdeka	174
Daftar Sumber		181
Lampiran-lampiran		187

PENDAHULUAN

A. LATAR BUDAYA MASYARAKAT

1. Minangkabau dan Sistem Pemerintahannya

Untuk keperluan tulisan ini yang dimaksud dengan daerah Minangkabau adalah daerah Administrasi Republik Indonesia yang dinamakan Propinsi Sumatera Barat¹⁾. Demikian juga dengan suku bangsa Minangkabau adalah suku bangsa yang berasal dan bertempat tinggal di daerah Sumatera Barat. Dalam tulisan ini suku bangsa Minangkabau itu juga disebut dengan orang Minangkabau. Hal ini perlu diketahui, karena ada perbedaan arti antara Minangkabau Lama dengan Minangkabau yang dimaksudkan di atas.

Wilayah Minangkabau Lama lebih luas dari wilayah Propinsi Sumatera Barat yang sekarang. Waktu itu wilayahnya meliputi : Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau, dan sebahagian Propinsi Jambi. Dalam tulisan ini masalah yang menyinggung Propinsi Riau dan Jambi tidak akan dibicarakan, karena sudah ada tim lain yang mengerjakannya.

Daerah Minangkabau secara garis besar terdiri atas dua bahagian, yaitu *darek* dan *rantau*.

1) Khusus untuk tulisan ini tidak dimasukkan daerah dan suku bangsa Mentawai yang secara teritorial termasuk wilayah Kabupaten Padang-Pariaman, salah satu kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat. Alasan untuk tidak memasukkan adalah karena masalah Mentawai sudah sangat khusus, oleh sebab itu, sebaiknya dilakukan penelitian sendiri untuk mengungkapkan masalahnya.

Darek²⁾ adalah daerah inti Minangkabau yang terdiri dari tiga daerah yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limpuluhkota. Dalam daerah Administratif Propinsi Sumatera Barat ketiga daerah itu menjadi : Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Orang Minangkabau sendiri menyebutnya dengan istilah *Luhak Nan Tigo* (Luhak yang tiga). Dalam Tambo Minangkabau daerah Luhak Nan Tigo inilah yang disebut dengan istilah *Alam Minangkabau*. Menurut Tambo Minangkabau dan menurut apa yang dipercayai orang Minangkabau sampai sekarang, pada **Luhak Nan Tigo inilah dahulu nenek moyang orang Minangkabau** mula-mula mendirikan *koto*, *dusun*, *nagari* sampai menjadi Luhak Nan Tigo.

Daerah rantau adalah daerah tempat orang Minangkabau mencari penghidupan sambil bermukim buat sementara. Di daerah rantau ini orang Minangkabau berusaha untuk mendapatkan penghasilan dalam bermacam-macam usaha. Apabila penghasilannya sudah dirasa cukup terkumpul, mereka akan pulang kembali ke kampungnya untuk menyerahkan hasil pencaharian tersebut kepada keluarganya atau kepada saudaranya atau kepada saudaranya atau untuk membuat sebuah rumah untuk anak gadisnya serta untuk lain keperluan. Harta pencaharian itu dapat dipergunakan menurut kemauannya, karena tidak akan menyinggung harta pusaka yang merupakan harta milik bersama suatu kaum.

Daerah rantau Minangkabau pertama adalah daerah sepanjang sungai yang berhulu pada Bukit Barisan dalam daerah Luhak Nan Tigo dan bermuara ke Selat Malaka atau Laut Cina Selatan. Sungai itu adalah seperti : Batang Sinamar dan Batang Lampasi di Luhak Limpuluhkota; Batang Agam, Batang Antokan, dan Batang Palupuh di Luhak Tanah Datar yang kesemuanya itu membentuk Sungai Rokan dan Sungai Kampar. Daerah sepanjang aliran sungai itulah yang menjadi daerah rantau pertama orang Minangkabau dahulu. Dengan demikian hampir seluruh daerah Riau dan sebahagian daerah Jambi menjadi daerah rantau orang Minangkabau dahulu. Dengan demikian

2) *Darek* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi darat, tetapi artinya tidak sama lagi, karena *darek* hanya khusus untuk menyebutkan daerah inti Minangkabau saja, dan tidak semua daratan yang menjadi daerah Minangkabau. Darat mempunyai arti yang lebih luas dari *darek*.

hampir seluruh daerah Riau dan sebagian daerah Jambi menjadi daerah rantau orang Minangkabau. Sampai sekarang ini, apabila kita menelusuri asal-usul beberapa keluarga yang ada di daerah Riau dan Jambi, masih dapat dicari hubungannya dengan beberapa keluarga di daerah darek, daerah asli Minangkabau.

Kemudian daerah rantau itu meluas ke daerah Pesisir Barat Sumatera Barat, seperti : Tiku, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan lain-lain, bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia.

Menurut letak geografis, daerah Riau merupakan daerah rantau orang dari Luhak Limapuluhkota, sedangkan sebahagian daerah Jambi serta daerah Pesisir Barat Sumatera Barat merupakan daerah rantau orang dari Luhak Tanah Datar dan Luhak Agam.

Daerah Sumatera Barat yang berada antara Luhak Nan Tigo dengan daerah rantau, seperti daerah Sawah Lunto Sijunjung di sebelah Timur, daerah Solok- Muara Labuh di sebelah Tenggara, daerah Sicicin - Lubuk Alung di sebelah Barat dinamakan daerah : *Ikua rantau kapalo darek* (ekor rantau kepala darat) yang merupakan daerah peralihan dari daerah Minangkabau asli dengan daerah rantau. Penduduk di daerah itu masih dapat mengkaji kembali asal-usulnya ke daerah Luhak Nan Tigo, hal mana masih merupakan kebanggaan bagi mereka, lebih-lebih yang ternyata berasal dari golongan yang terpandang di daerah asalnya itu.

Sebelum kedatangan pengaruh Hindu ke Sumatera Barat kira-kira abad ke-13 dan ke-14, orang Minangkabau hidup di lingkungan negerinya masing-masing, yang diperintah dengan musyawarah untuk mencari mufakat menurut adat Minangkabau. Dalam hal ini kata-kata adatnya mengatakan sebagai berikut :

"

Nagari bakaampek suku (nagari berkeempat suku)

Dalam suku babuah paruik (dalam suku mempunyai "paruik")

Kampung ado tuonya³⁾ (kampung mempunyai ketua)

Rumah diagiah batungganai (Rumah mempunyai tungganai)

....."

3) I.H. Dt. R. Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Sekretariat LK Sumatera Barat, Padang, 1968, hal. 109.

Arti dari kata-kata adat itu adalah bahwa pada setiap nagari harus ada sekurang-kurangnya empat buah suku⁴⁾ dan masing-masing kepala suku secara bersama-sama memerintah nagari tersebut berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam sebuah suku terdapat pula beberapa *paruik*, yaitu suku keturunan langsung yang dihitung dari pihak perempuan seperti : nenek - ibu - anak perempuan - cucu perempuan, dan seterusnya. Ke dalamnya juga termasuk saudara laki-laki dari perempuan-perempuan itu, yaitu : saudara laki-laki nenek, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki anak perempuan, saudara laki-laki cucu perempuan, dan seterusnya. Biasanya sebuah paruik hanya terdiri dari paling banyak empat generasi : nenek, ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan. Mereka hidup dalam satu rumah kepunyaan bersama yang dinamakan *rumah gadang*. Anggota satu paruik mempunyai suku yang sama, misalnya apabila seorang nenek mempunyai suku Piliang, maka seluruh keturunannya mempunyai suku Piliang pula. Masing-masing suku mempunyai seorang kepala yang dinamakan *penghulu* atau juga disebut *ninik mamak*.

Selanjutnya kampung mempunyai seorang ketua yang akan menjalankan atau mengurus masalah kampung tersebut. Pada waktu dahulu selalu terdapat empat buah kampung yang saling berdekatan, yaitu kampung orang-orang Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Keempat kampung inilah yang membentuk sebuah nagari yang diperintah oleh empat orang kepala suku yang sekaligus juga menjadi kepala kampung masing-masing. Dengan demikian pengertian kampung di sini sama dengan pengertian suku, bukanlah kampung dalam arti teritorial.

Setiap rumah gadang mempunyai pula seorang kepala yang dinamai *tungganai* yang juga disebut sebagai *mamak rumah*. Yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah rumah yang ditempati secara bersama mulai dari nenek, saudara perempuan nenek, ibu, saudara perempuan itu, anak-anak perempuan, dan anggota keluarga yang laki-laki yang belum kawin. Rumah bersama ini dinamakan rumah gadang.

4) Pengertian suku hampir sama dengan klen, anggota suku mempunyai pertalian secara genealogis. Dengan sendirinya anggota suku menganggap dirinya kelompok kekeluargaan dan berhubungan erat, karena masing-masing menganggap sebagai saudara kandung. Suku yang pertama di Minangkabau hanya empat buah : Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Dari suku yang empat inilah kemudian bercabang menjadi ratusan suku seperti sekarang ini. Jadi, pengertian suku sama dengan pengertian marga di Tapanuli.

Yang ditunjuk sebagai tungganai adalah anggota keluarga laki-laki yang tertua atau anggota keluarga laki-laki lain yang ditunjuk secara bersama oleh seluruh anggota keluarga rumah gadang tersebut.

Apabila sebuah rumah gadang sudah terlampaui penuh, maka beberapa anggota keluarga yang mampu, diperkenankan membuat sebuah rumah biasa untuk ditempatinya sekeluarga (ayah, ibu dan anak-anaknya). Rumah yang demikian tidak ada tungganai, melainkan hanya ibu kepala rumah tangga saja. Sebab dinamakan ibu kepala rumah tangga adalah karena rumah itu dibuat untuk anggota keluarga yang perempuan, walaupun yang membuat suaminya sendiri. Tungganainya tetap berada di rumah gadang, kecuali anggota keluarga yang pindah itu sudah membuat pula sebuah rumah gadang sebuah lagi, karena pindah secara bersama-sama pula atau sudah memenuhi syarat untuk itu.

Bagaimana cara keempat suku memerintah nagari, pepatah adat Minangkabau mengatakan sebagai berikut :

Kamanakan barajo ka mamak,	(Kemenakan beraja kepada mamak).
Mamak barajo ka panghulu	(Mamak beraja kepada penghulu)
Panghulu barajo ka mupakat,	(Penghulu beraja kepada mufakat).
Mupakat barajo ka nan bana,	(Mufakat beraja pada kebenaran).
Bana berdiri sandirinyo,	(Kebenaran berdiri sendiri nya).
Nan dimakan alua jo patuik.⁵⁾ (Yang menurut alur dan patut).	

Pepatah adat Minangkabau ini dapat diartikan bahwa kemenakan tunduk kepada mamak sebagai kepala keluarga. Selanjutnya mamak tersebut tunduk pula pada penghulu atau ninik mamak, yaitu seseorang yang telah diangkat oleh seluruh anggota keluarga sebagai kepala

5) I. H. Dt. R. Penghulu, *Ibid.*, hal. 79.

suku atau kepala kaumnya. Penghulu tunduk pula pada mufakat, artinya walaupun dia sudah diangkat untuk mengepalai suatu kaum/suku, dia tidak dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan harus menjalankan apa yang telah disepakati sebelumnya. Kata mufakat itulah yang menuntunnya bertugas sebagai kepala suku, sedangkan apa yang dimufakati itu harus berdasarkan kepada hal yang benar, yang memang sudah harus demikian menurut hukum Tuhan atau hukum alam yang tidak dapat dibantah kebenarannya, atau sekurang-kurangnya kebenaran yang dapat diterima oleh seluruh anggota yang hadir dalam menetapkan mufakat itu.

Yang dikatakan alur dan patut itu tidak sama artinya bagi seluruh nagari, karena adanya perbedaan pandangan yang diakui oleh adat Minangkabau yang dikatakan dalam pepatah : *"Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya"*.

Dengan demikian cara memberi *alur* atau menterjemahkan alur dan patut itu sangat tergantung pada pandangan dan tafsiran masing-masing nagari. Itulah sebabnya nagari di Sumatera Barat diperintah secara otonomi yang sangat luas, sehingga nagari itu tidak mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi di luar batas nagarnya sendiri.

Secara teoritis pengertian alur dan patut itu sama untuk seluruh daerah Minangkabau, misalnya untuk ungkapan : *"bulek aia dek pembuluh, bulek kato dek mupakat, picaklah buliah dilayangkan, bulek lah buliah digolongkan"* (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, picak dapat dilayangkan, bulat dapat digelindingkan). Arti ungkapan ini sama untuk seluruh daerah Minangkabau, tetapi dalam pelaksanaannya apa yang bulat itu tidaklah sama untuk masing-masing nagari, misalnya ada yang bulat kecil seperti kacang-kacang atau kelereng, ada yang bulat panjang seperti tongkat pramuka, ada yang bulat besar seperti bola kaki atau bola dunia, dan sebagainya. Semuanya itu dikatakan bulat, tetapi bentuk bulatnya tidak sama. Hal itu sangat tergantung pada masing-masing nagari untuk menterjemahkannya. Hanya saja kalau salah satu pengertian itu sudah dimufakati, maka akan dijalankan dan tidak seorangpun lagi dari anggota keluarga atau anak nagari yang dapat melarangnya. Hukum pelanggaran adalah dibuang sepanjang adat.

Kedatangan pengaruh Hindu tidak merubah keadaan yang demikian itu. Secara umum pengaruh Hindu terasa di Minangkabau hanya pada waktu raja yang berkuasa seorang raja yang kuat seperti Adityawarman. Sesudah raja itu meninggal, maka pengaruhnya makin lama makin hilang, karena adat Minangkabau muncul kembali. Adityawarman merupakan seorang raja yang besar dan berkuasa penuh atas kerajaannya, banyak prasasti yang ditinggalkan menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Tetapi Putera Mahkota yang bernama Ananggawarman tidak sempat lagi memerintah, karena telah digantikan oleh orang Minangkabau sendiri yang dibantu oleh "*Basa Ampat Balai*"⁶⁾.

Sebaliknya pengaruh agama Islam membawa perubahan secara fundamental terhadap adat Minangkabau. Tetapi sejak kapan pengaruh Islam memasuki tubuh adat Minangkabau secara pasti, masih sukar dibuktikan.

Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat Minangkabau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat Minangkabau diganti dengan aturan agama Islam. Hal itu dapat terjadi, karena sebetulnya antara adat Minangkabau dengan ajaran agama Islam tidak terdapat pertentangan. Ajaran Agama Islam menambahkan aturan adat Minangkabau yang hanya memperhatikan alam dan manusia yang menghuninya, sedangkan masalah ke Tuhanan dan hari kemudian tidak terdapat.

Hal pokok yang berubah dari adat Minangkabau sesudah masuknya pengaruh ajaran agama Islam, anatara lain seperti yang disebutkan oleh pepatah adat : "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*" artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Pengaruh agama Islam sangat besar terhadap adat Minangkabau, karena sendi-sendinya yang dirubah. Agama Islam melengkapi yang kurang, membetulkan yang salah, mengulas yang singkat, mengurangi yang berlebihan,

6). *Basa Ampek Balai* (Besar Empat Balai) merupakan Dewan Menteri di Kerajaan Minangkabau dahulu. Mereka terdiri dari empat orang, yaitu Datuk Bandaharo di Sungai Tarab, Mangkudum di Sumanik, Tuan Kadi di Padang Ganting, Indomo, di Suruaso. Kedudukan mereka kira-kira sama dengan Menteri Koordinator yang sekarang, karena masing-masing dibantu lagi oleh empat Datuk yang mempunyai tugas khusus. Di samping itu masih ada seorang lagi yang bertindak sebagai Menteri Pertahanan, yaitu Tuan Gadang di Batipuh. Masing-masing Datuk sebagai pembidang tugasnya masing-masing. (Baca : I Dt. Sangguno Dirajo, hal 79 - 80; Syamsuddin St. Rajo Endah, hal. 19 - 20 dan 141 M. Rasyid Manggis Dt. Rajo Penghulu, hal. 11 - 12).

sehingga adat Minangkabau tidak menyimpang dari kebenaran sejati dan adat yang seperti itulah yang dijalankan di Sumatera Barat sampai saat ini.

Masuknya pengaruh Barat membawa pengaruh pula terhadap struktur pemerintahan nagari. Untuk mengepalai satu nagari di Sumatera Barat, Belanda mengangkat salah seorang penghulu yang tertua dalam nagari tersebut dengan pangkat Penghulu Kepala, sedangkan para penghulu yang lain dalam nagari itu diangkat menjadi pembantu Penghulu Kepala.⁷⁾

Cara memerintah juga mengalami perubahan yang mendasar, Penghulu Kepala diberi kekuasaan yang lebih besar oleh Belanda agar dapat memerintah anak buahnya dengan lebih leluasa. Yang harus dijalankan oleh Penghulu Kepala bukan lagi kesepakatan bersama anak buahnya (anggota kaumnya), melainkan adalah apa yang diperintahkan Belanda. Untuk menjalankan perintah Belanda itulah seorang Penghulu Kepala diberi kekuasaan yang besar oleh Belanda dengan bantuan polisi Belanda. Apabila ada yang membantah, Panghulu Kepala tinggal memberitahukan saja pada Belanda, kemudian polisi Belanda akan menindaknya dengan segera.

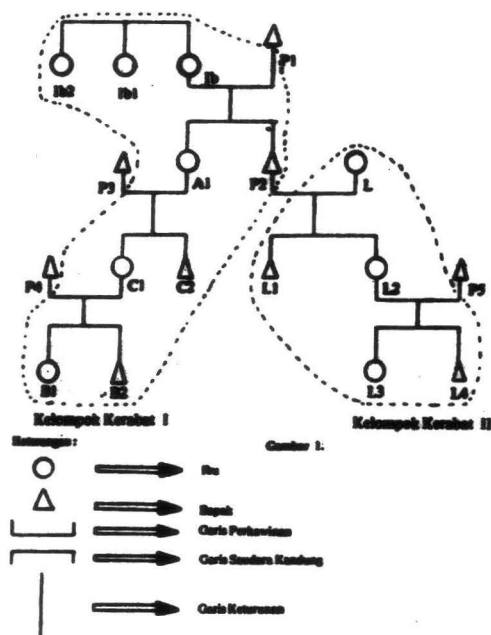
Pengaruh Belanda mulai merusak struktur dan moral adat Minangkabau. Terhadap seorang Penghulu Kepala, rakyat tidak lagi segan dan hormat, melainkan takut karena ada kekuasaan Belanda di belakangnya. Rakyat, termasuk anak kemenakannya sendiri; mulai tidak menghargai lagi seorang penghulu yang bekerja untuk Belanda, karena perbuatan dan tindakannya tidak sesuai lagi dengan aturan adat Minangkabau. Penghulu Kepala dan para pembantunya tidak lagi melindunginya anak kemenakannya, tetapi sering menindas anak kemenakannya untuk kepentingan Belanda. Hubungan sakral yang ada selama ini antara ninik mamak (penghulu) dengan anak kemenakan sudah mulai hilang. Ninik mamak yang berkerja untuk kepentingan Belanda tidak lagi dihargai oleh kemenakan, sedangkan tugas ninik mamak antara lain adalah untuk menjaga dan melindungi anak kemenakan.

7) Penghulu Kepala di Sumatera Barat pada waktu Belanda masih berkuasa, kedudukannya kira-kira sama dengan Wali Nagari atau Lurah sekarang. Mereka biasanya dipanggilkan oleh penduduk dengan sebutan "*Angku Palo*" atau "*Innyiek Palo*"

2. Sistem Kekerabatan

Prinsip sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah "*matrilineal descend*", yang menghitung anggota kekerabatan melalui garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini ada beberapa prinsip yang diperhitungkan, yaitu :

- a. Keturunan dihitung melalui garis ibu, artinya segala macam hak dan kewajiban dalam keluarga hanya diperhitungkan melalui garis keturunan ibu. Seorang suami dalam keluarga dianggap orang luar, dia tidak termasuk anggota keluarga isterinya dan tidak mempunyai hak atas harta pusaka isterinya. Namun demikian dia mempunyai kewajiban untuk ikut mengerjakan harta pusaka isterinya untuk kepentingan anak-anaknya. Hasil usaha itu tidak boleh dibawanya ke rumah orang tuanya, karena hal itu berarti akan memindahkan milik isterinya ke rumah orang lain, dan untuk jelasnya baiklah lihat gambar berikut ini :



Gambar 1

Lingkaran I merupakan satu kelompok kekeluargaan, begitu juga lingkaran II merupakan satu kelompok keluarga yang lain pula. P1, P3, L4, dan P5 tidak termasuk ke dalam anggota kelompok kerabat I dan II, karena mereka merupakan anggota kelompok kerabat yang lain, walaupun mereka merupakan ayah dari anak salah satu kelompok kerabat tersebut. Seorang ayah di Minangkabau menjadi orang asing di rumah anak isterinya. Hal ini dapat terjadi karena keanggotaan kekerabatan hanya dihitung menurut garis keturunan ibu saja. Kalau diperhatikan gambar tersebut, maka yang termasuk anggota kerabat I adalah : Ib, Ib1, Ib2, A1, P2, C1, C2, B1, dan B2.

- b. Suku dihitung menurut garis keturunan ibu, dalam gambar, apabila Ib mempunyai suku Piliang, maka suku A1, P2, C1, C2, B1, dan B2 semuanya mempunyai suku Piliang pula. Dengan demikian, maka suku P1, P3, dan P4 harus lain dari suku Piliang, sebab kalau sama-sama bersekutu Piliang mereka tidak boleh kawin, karena masih dianggap bersaudara.
- c. Menurut adat kekuasaan yang sebenarnya terletak di tangan ibu, dalam gambar kekuasaan itu terletak pada Ib, Ib1, Ib2, A1, C1, dan B1, artinya hak milik keluarga kelompok I di tangan mereka dengan Ib sebagai penguasa pertama. Selanjutnya secara berturut-turut apabila Ib sudah meninggal, penguasa hak milik keluarga jatuh ke tangan A1, C1, B1 dan seterusnya. Tetapi dalam kenyataannya yang mengepalai hak milik tersebut, termasuk mengepalai seluruh keluarga itu, bukanlah seorang ibu, melainkan salah seorang dari anggota laki-laki keluarga itu, biasanya ditunjuk yang tertua, misalnya P2 dalam gambar 1. Selanjutnya kalau P2 meninggal dunia, maka akan ditunjuk menurut urutan C2, B2 dan seterusnya. Kepada keluarga yang ditunjuk itu berkuasa bukanlah untuk dirinya sendiri atau untuk anak-anaknya, melainkan untuk kepentingan anggota keluarga yang wanita beserta anak-anaknya. P2 dalam gambar yang ditunjuk sebagai kepala keluarga adalah untuk memelihara harta milik bersama dan untuk melindungi seluruh anggota keluarga kerabat I. Dalam hal ini P2 dinamakan "*mamak rumah*". Apabila P2 diangkat menjadi penghulu ia sebagai mamak kepala waris, ia tidak saja akan mengepalai

keturunan Ib, tetapi juga akan mengepalai keturunan saudara Ib, yaitu keturunan Ib1 dan Ib2. Dialah kepala seluruh keluarga besar itu yang akan mewakili seluruh kepentingan mereka.

- d. Perkawinan bersifat matriloal, artinya suami mendatangi dan bertempat tinggal di rumah isterinya, ia tidak menjadi anggota kelompok kerabat isterinya. Walaupun ia akan selamanya bertempat tinggal di sana; ia tetap orang asing di sana.
- e. Harta dan gelar pusaka diwariskan dari mamak kepada kemenakan, dalam gambar dapat dilihat bahwa P2 akan mewariskan segala kekuasaan dan harta pusaka yang dikepalainya kepada C2. Selanjutnya C2 akan mewariskannya pula nanti kepada B2. Dengan demikian P2 tidak boleh mewariskan kekuasaan dan harta pusaka itu kepada L1, L2, L3, dan L4, yaitu anak dan cucunya, karena anak dan cucunya itu sudah merupakan anggota kerabat lain.
- f. Anggota-anggota kelompok kerabat I semuanya merasa bersaudara kandung, senasib, sehinu, semalu. Mendapat malu salah seorang anggota kerabat itu, berarti semua anggota kerabat itu juga merasa mendapat malu, karena itu harus diatasi dan diselesaikan secara bersama.

Aturan adat itu akan kelihatan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih pada upacara adat seperti : perkawinan, kematian, peminangan, pertunangan, pengangkatan penghulu, turun mandi, dan sebagainya. Begitu juga akan kelihatan dalam masalah pendidikan anak-anak, mencari jodoh, mencari pekerjaan, membuat rumah, dan lain-lain. Sistem kekerabatan beserta hukum adat menguasai seluruh kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak seorangpun orang Minangkabau yang dapat ke luar dari lingkungan hukum adat itu. Asal bernama orang Minangkabau mereka akan terlihat di dalamnya.

Sebelum datang dan kuatnya pengaruh pendidikan Barat di Minangkabau keadaan ini berjalan dengan baik, tetapi sesudah kuatnya pendidikan Barat, pelaksanaan sistem kekerabatan serta hukum adat mulai kendor dijalankan, terutama di kota-kota besar. Pengaruh ayah dalam keluarga Minangkabau makin lama makin besar terhadap

anaknya. Sekarang kelihatan bahwa anak tidak mau tahu dengan mamaknya sendiri, lebih-lebih apabila si mamak itu mempunyai pendidikan yang jauh lebih rendah dari pendidikan ayahnya sendiri. Namun demikian sendi-sendi pokok dari hukum adat itu mesih belum dapat dilangkahi oleh orang Minangkabau yang bagaimanapun tinggi pendidikannya.

3. *Adat Minangkabau.*

Secara garis besar adat Minangkabau terdiri dari dua bahagian besar, yaitu adat Laras Koto-Piliang dan Bodi Caniago. Pengertian laras sama dengan hukum⁸⁾. Menurut Tambo Minangkabau⁹⁾ Laras Koto-Piliang dibuat oleh Datuk Katumanggungan dan Laras Bodi-Caniago dibuat oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Dibuat berarti kedua adat itu merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari kedua orang tokoh adat itu.

Walaupun belum dapat dibuktikan secara ilmiah, tetapi seluruh Tambo dan seluruh orang Minangkabau (dahulu dan sekarang) mempercayai dengan penuh keyakinan, bahwa kedua orang tokoh adat tersebut merupakan pendiri adat Minangkabau. Kedua adat itu, disebut adat Minangkabau, hidup dengan subur dan kokohnya di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat dari dahulu sampai sekarang. Berdasarkan pada pusaka yang diwariskan secara lisan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat, maka dapatlah diterima bahwa adat Minangkabau itu dibuat oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang.

Adat Minangkabau demikian kuat dan kokohnya hidup dalam masyarakat Sumatera Barat, sehingga sendinya tidak dapat digoyahkan oleh bermacam pengaruh. Unsur kebudayaan luar yang datang lambat laun dipengaruhi oleh adat Minangkabau, karena adat itu sangat sensitif terhadap pengaruh dari luar dan segera akan mengadakan reaksi apabila

8) Pengertian laras yang lain adalah daerah geografis yang biasanya disebut dengan istilah Klarasan. Klarasan dikepalai oleh seorang Laras (sama dengan Regent bahasa Belanda). Daerah klarasan ini hanya ada pada waktu pemerintahan Hindia Belanda dahulu saja, sekarang tidak ada lagi. Daerah klarasan lebih kecil dari daerah Kabupaten.

9) Tambo Minangkabau yang mana saja dan ditulis oleh siapa saja akan menulis hal yang sama mengenai masalah ini.

terjadi pembenturan terhadap unsur pokoknya. Itulah sebabnya adat Minangkabau itu dapat bertahan sampai sekarang tanpa banyak mengalami perubahan¹⁰⁾. Boleh dikatakan bahwa adat Minangkabau masih hidup seperti yang digariskan oleh kedua orang pendirinya.¹¹⁾.

Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatihan Nan Sebatang adalah dua orang bersaudara, satu ibu lain ayah. Menurut adat Minangkabau, kedua orang itu adalah saudara kandung, karena dalam adat Minangkabau unsur ayah tidak diperhitungkan dalam menghitung pertalian anggota kekerabatan satu kaum atau keluarga.

Ayah Datuk Katumanggungan berasal dari orang berdarah luhur atau berdarah raja, sedangkan ayah Datuk Perpatih Nan Sebatang berasal dari rakyat biasa. Kedua perbedaan asal-usul keturunan ini sangat penting dikemukakan, karena perbedaan darah tersebut akan menyebabkan dalam sistem adat yang mereka turunkan. Tetapi walaupun ada sedikit perbedaan antara kedua adat yang mereka turunkan itu, unsur persamaannya masih banyak dari perbedaannya.

Prinsip Laras Koto-Piliang adalah apa yang disebut dengan istilah adatnya : *titik dari ateh* yang berarti jatuh dari atas, segala sesuatu yang akan dijalankan oleh para pendukung adat tersebut datang dari atas, dari pimpinan, dari Penghulu Pucuk.¹²⁾ Tetapi sebelum sesuatu keputusan dijalankan harus dimusyawarahkan dahulu dengan para anak buahnya¹³⁾, yang telah ditunjuk sebagai wakil keluarga. Setelah dimusyawarahkan dan didapat kata sepakat tentang sesuatu yang akan dijalankan, berulah hasil kesepakatan itu dikeluarkan oleh Penghulu Pucuk. Apabila sudah dikeluarkan secara resmi, maka harus disetujui oleh semua anggota keluarga yang bersangkutan dan harus dijalankan.

10) Perubahan di sini dimaksudkan, perubahan terhadap unsur-unsur pokoknya, seperti : "Kemenakan beraja kepada mamak", "Waris dijawab (diterima) pusaka ditolong", "Negeri bakaampek suku dan sebagainya.

11) Dalam kehidupan sehari-hari memang telah mengalami perubahan banyak sedikitnya terutama dalam hal-hal yang kurang praktis dan efisien dalam kehidupan, sudah mulai ditingkatkan untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam kehidupan. Hal ini tidak berarti bahwa sendi-sendi pokoknya ikut berubah pula.

12) Dalam adat Laras Koto-Piliang kedudukan penghulu bertingkat-tingkat. Penghulu Pucuk adalah penghulu yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu kaum, sedangkan penghulu yang lain merupakan pembantu.

13) Pengertian anak buah adalah sama dengan anak kemenakan atau seluruh anggota keluarga dari kaum.

Selama berlangsung musyawarah untuk menetapkan kesepakatan, anak kemenakan yang tidak ikut berunding diperbolehkan mendengarkan jalannya perundingan itu, di dalam atau diluar tempat musyawarah tersebut, bahkan mereka dibenarkan mengeluarkan buah pikiran dan pendapatnya, asal disalurkan melalui wakil keluarga yang ikut menjadi anggota musyawarah saat itu¹⁴⁾.

Prinsip adat Laras Bodi-Caniago adalah seperti apa yang disebutkan dalam istilah adat Minangkabau : *Mambasuik dari bumi* (membersit dari bumi), yaitu segala sesuatu yang akan dilaksanakan datangnya dari anak buah (anak kemenakan) dan dimusyawarahkan bersama. Dalam musyawarah wakil keluarga tidak diadakan, karena semua anggota keluarga yang hadir boleh berbicara dalam mencari kesepakatan itu.

Perbedaan lain terlihat pada kedudukan penghulu. Pada laras Koto-Piliang terdapat kedudukan penghulu yang tinggi dan yang rendah, ada Penghulu Pucuk (yang pengepalai beberapa orang penghulu dalam satu kaum) dan ada penghulu biasa. Tempat duduknya dalam rumah adat atau balirung sewaktu diadakan pertemuan atau musyawarah adat berada pula menurut tinggi rendah kedudukan masing-masing. Makin tinggi kedudukan penghulu, makin terhormat kedudukannya dalam pertemuan itu. Dalam sebuah rumah gadang tempat yang terhormat adalah anjung yang terdapat di ujuang kanan dan ujung kiri. Pepatah adat mengatakan, "*bajanjang naik, batanggo turun*" (berjenjang naik, bertangga turun), artinya segala urusan adat diurus menurut tingkat tertentu mulai dari penghulu biasa sampai pada Penghulu Pucuk. Penghulu Pucuk yang akan memberi kata putus mengenai berbagai masalah.

Pada adat Laras Bodi-Caniago tidak terdapat tingkatan penghulu, semua penghulu sama kedudukannya dalam mengurus masalah adat. Istilah adatnya adalah "*duduk samo randah, tagak samo tinggi*" (duduk sama rendah, tegak sama tinggi), kedudukan dalam pertemuan juga tidak ada bedanya.

14) Wakil keluarga biasanya adalah mamak rumah. Seorang penghulu biasanya secara otomatis menjadi anggota musyawarah suatu kaum. Apabila penghulu tidak berkesempatan hadir, maka ditunjuk wakilnya.

Perbedaan lain juga dapat dilihat pada rumah gadang dan balai adat. Rumah gadang dan balai adat Laras Kota-Piliang lantainya mempunyai tingkat dan tingkat yang paling tinggi terdapat di kiri kanan bangunan yang dinamakan *anjung*. Di tengah rumah juga ada tingkat yang lebih rendah dari anjung dan dinamai *bandua*, dan terakhir baru lantai biasa. Yang dapat duduk pada masing-masing tingkat adalah orang yang mempunyai kedudukan. Rumah gadang dan rumah adat Bodi-Caniago lantainya rata saja dari ujung ke ujung, tidak terdapat tingkat.

Perbedaan itu sebahagian besar akan terlihat pada upacara adat, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu kelihatanya. Pertemuan antara kedua adat tersebut karena merupakan pusaka Minangkabau yang tidak banyak mengalami perubahan secara fundamental dari dahulu sampai sekarang. Di dalam adat Minangkabau yang diwariskan secara tradisional terdapat segala sesuatu yang mengatur tata kehidupan, seperti : sistem sosial, dan sistem kehidupan lainnya. Orang Minangkabau hidup di dalam lingkungan adatnya dimanapun mereka berada, dan hal ini berlaku untuk menganut adat Koto-Piliang maupun adat Bodi-Caniago.

Adat Minangkabau pada pokoknya ada empat macam yang mempunyai sifat universal bagi orang Minangkabau, yaitu :

- a. **"Adat nan sabana adat"**¹⁵⁾, yaitu segala sesuatu yang sudah seharusnya mesti begitu dan kebenarannya bersifat mutlak, misalnya adat air membasahi, adat api membakar, adat sakit diobati, dan sebagainya. Adat merupakan sifat-sifat alam atau undang-undang alam yang mutlak kebenarannya.
- b. **"Adat nan teradat"**,¹⁶⁾ adalah adat yang berdasarkan kenyataan terdapatnya perbedaan menurut keadaan dan situasi setempat. Dalam hal ini istilah adatnya adalah : *"lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*. Dengan demikian adat yang teradat dari suatu daerah mungkin saja tidak sama dengan adat teradat di daerah lain di Minangkabau, walaupun mereka hanya berbatasan nagari saja.

15) Adat yang sebenarnya adat.

16) Adat yang teradat.

- c. **"Adat nan diadatkan,"**¹⁷⁾ adalah adat yang didasarkan atas mufakat menurut alur dan patut. Sesudah dimufakati, akan jadi peraturan hidup yang mengikat setiap anggota masyarakat.
- d. **"Adat Istiadat"** adalah seluruh kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang sudah berlaku secara tradisional dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ke dalam adat yang empat itu dapat dimasukkan seluruh adat yang terdapat dan berlaku di Minangkabau serta berlaku umum untuk semua orang Minangkabau.

Di samping itu adat tersebut, masih ada undang-undang (peraturan) yang berlaku umum pula bagi seluruh orang Minangkabau. Undang-undang ini terutama berlaku untuk mengatur pemerintahan yang jumlahnya empat macam, yaitu :

- a. Undang-undang Nagari yang dikatakan pepatah adat sebagai berikut : *"Bamusajik, babalai, basawah, baladang, batapian tampek mandi, balabuah nan pasa, bagalanggan"*. (bermesjid, berbalairung, bersawah, berladang, bertepian tempat mandi, bergelanggan).¹⁸⁾ Undang-undang ini merupakan syarat untuk adanya suatu nagari. Suatu daerah tempat tinggal baru dapat dikatakan suatu nagari apabila sudah memenuhi syarat tersebut di atas.
- b. Undang-undang isi nagari dikatakan pepatah adat sebagai berikut:
*"Hutang babaia, piutang batarimo, salah batimbang, mati bakubua, sakik basilau, mati bajanguak, alek bapanggia, nan elok baimbauan, nan buruak baamburan, datang bajapuik, pai baanta. Salah cotok malantiangkan, salah makan maluahkan, salah ambiak mengumbali, salah ka Tuhan mintak tobat, salah ka manusia mintak maaf, sasek suruik talangkah kembali."*¹⁹⁾

Artinya : hutang dibayar, piutang diterima kembali, salah dihukum, mati dikuburkan, sakit dilihat, mati dijenguk, pesta diundang, yang baik berhimbauan, yang buruk

17) Adat yang diadatkan.

18) dan 19) I.H. Dt. R. Penghulu, *Pokok-pokok pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bahagian I, Sekretariat LKAAM Sumatera Barat, Padang, 1968, hal. 96.

ber hamburan, datang dijemput, pergi diantar, salah mematok dibuangkan, salah memakan dimuntahkan, salah menganbil dikembalikan, salah kepada Tuhan minta tobat, salah kepada manusia meminta maaf, salah langkah surut kembali.

Undang-undang ini bertujuan mengatur kehidupan dalam nagari yang bersangkutan supaya segala sesuatu berjalan dengan lancar dan teratur menurut semestinya. Misalnya apabila seseorang yang berhutang, dia harus membayar sesuai perjanjian yang telah diperbuat : apabila seseorang salah mengambil milik orang lain, dia harus mengembali kannya walaupun tidak seorangpun yang mengetahui kejadian tersebut, dan begitu selanjutnya. Dengan demikian kehidupan dalam nagari dapat berjalan dengan taratur dan aman.

- c. Undang-undang Luhak dan Rantau pepatah adatnya mengatakan sebagai berikut :

"Luhak bapanghulu rantau barajo (luhak berpenghulu rantau beraja), artinya yang mengepalai daerah Luhak (Luhak Nan Tigo) adalah para penghulu kepada suku, sedangkan yang mengepalai daerah rantau adalah seorang raja. Raja yang dimaksudkan di sini bukanlah seorang raja yang mempunyai sebuah kerajaan dengan segala kebesaran seorang raja, tetapi dia sama saja dengan seorang penghulu di daerah Luhak, hanya saja dinamakan seorang raja. Undang-undang Luhak dan Rantau ini menunjukkan susunan masyarakat Minangkabau dalam tingkatan hirarkhi pemerintahannya. Tingkatan itu menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam lingkungan tertentu dan daerah tertentu.

- d. Undang-undang yang dua puluh terdiri dari dua bagian, yaitu :
1. Undang-undang yang delapan, yaitu aturan untuk menghukum orang yang membunuh, mencuri, merampok, membakar, menyamun, menipu, dan sebagainya. Pepatah adat berbunyi sebagai berikut :

Dago-dagi memberi malu, (memfitnah)
Sumbang salah laku perangai, (pengadu)

Samun saka tagak di bateh, (menyamun)
Umbuak umbi budi marangkak, (menipu)
Curi maliang tuluang dinding, (mencuri)
Tikam bunuah padang badarah, (membunuh)
Sia baka sabatang suluah, (membakar)
Upah racun batabuang sayak²⁰⁾. (meracun)

Undang-undang yang delapan ini adalah untuk menghukum orang yang sudah jelas kesalahannya dengan tanda bukti kesalahan.

2. Undang-undang yang dua belas untuk mengadili dan menghukum seseorang yang tertuduh. Ada dua belas macam tuduhan perlu diadili untuk ditetapkan hukumnya seperti yang disebutkan dalam pepatah berikut :

"Anggang lalu atah jatuh,
Pulang pagi babasah-basah,
Bajalan bagageh-gageh,
Kecindorongan mato rang banyak,
Dibawo ribuaik dibawo angin,
Dibawo pikek dibawo langau,
Tatukiak jajak mendaki,
Bajua bamurah-murah,
Batimbang jawab ditanyoi
Bauriah bak sipasin,
Lah bajajak bak bakiak²¹⁾.

Artinya : Engkau lalu antah jatuh, pulang pagi berbasah-basah, berjalan cepat-cepat, sudah jelas pada mata orang banyak, dibawa ribut dibawa angin, dibawa burung dibawa lalat, terdorong jejak menurun, tertukik jejak mendaki, menjual bermurah-murah, berselisih faham ditanyai, berbekas seperti jejak anak capung, sudah berjejak seperti jejak burung air.

20) I. H. Dt. R. Penghulu, op. cit., hal. 117

21) I. H. Dt. R. Panghulu, *Ibid.*, ioc. cit.

Salah satu saja dikerjakan dari dua belas macam pekerjaan itu sudah mendatangkan kecurigaan orang ramai yang memungkinkan orang itu dituduh berbuat sesuatu yang tidak baik. Tuduhan itu harus diadili secara terbuka supaya jelas salah atau tidaknya tuduhan itu. Misalnya "*anggang lalu atah jatuh*" adalah tuduhan terhadap seseorang yang berbuat lempar batu sembunyi tangan; "*pulang pagi berbasah-basah*" akan menimbulkan tuduhan yang bermacam-macam, karena yang bersangkutan sepanjang malam berkeliaran di luar rumah dan baru pulang pagi harinya. Apabila pada malam tersebut ada orang yang kemalingan atau dirampok, maka tuduhan otomatis akan jatuh pada orang yang pulang pagi itu. Tuduhan itu harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan Kerapatan Adat. Demikianlah seterusnya dan setiap tuduhan harus diadili supaya anggota masyarakat mengetahui kejadian yang sebenarnya dan tidak menimbulkan kegelisahan.

Undang-undang ini berlaku untuk kedua adat Minangkabau, Koto-Piliang dan Bodi-Caniago, dan berlaku untuk Luhak dan rantau.

Sesudah Belanda berkuasa secara berangsur-angsur undang-undang tersebut diubah oleh Belanda secara paksa, terutama yang menyangkut masalah pengaturan pemerintahan nagari-nagari. Pemerintah Hindia Belanda mulai memperlakukan peraturan untuk seluruh desa yang berada di bawah kekuasaannya. Walaupun demikian masih banyak peraturan adat tetap dilaksanakan orang Minangkabau dengan risiko menghadapi Belanda. Apabila sudah terpaksa betul baru mereka mengikuti peraturan desa yang ditetapkan Belanda itu. di dalam zaman kemerdekaan, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara masih boleh berlaku di Sumatera Barat seperti yang terdapat dalam hukum adat Minangkabau, terutama untuk mengadili masalah adat yang timbul di masyarakat.

Ketentuan adat Minangkabau itu besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan di Sumatera Barat, karena sampai sekarang orang Sumatera Barat masih menjalankan adat tersebut.

B. Perkembangan Pendidikan Secara Garis Besar

Pendidikan tradisional menurut adat Minangkabau sudah berjalan di Sumatera Barat sebelum kedatangan orang Hindu, yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi melalui latihan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan berjalan lama, karena faktor waktu tidak begitu dihiraukan, karena ukuran berhasil tidaknya pendidikan dinilai melalui dapat tidaknya dikuasai peraturan adat dan keahlian menyelesaikan soal kehidupan.

Untuk dapat menguasai pengetahuan dan praktek adat yang demikian luas dan ruwet dengan cara tersebut diperlukan waktu yang lama melalui macam-macam segi kehidupan. Seorang Penghulu memerlukan waktu lama untuk menguasai seluruh adat dan hukum adat. Tukang ukir memerlukan waktu praktek mengukir yang lama untuk menjadi seorang tukang ukir yang betul-betul ahli di bidangnya.

Perkembangan pendidikan sewaktu pengaruh Hindu masuk ke Sumatera Barat belum jelas diketahui, karena dari prasasti peninggalan Adityawarman²²⁾ yang sudah terbaca tidak satu pun yang membicarakan masalah pendidikan. Berdasarkan agama yang dianut oleh Adityawarman, yaitu Budha Tantrayana, dapat diperkirakan bawah masalah pendidikan pada waktu itu di Sumatera Barat tidak akan jauh berbeda dengan pendidikan yang berlaku pada zaman Kertanegara di Jawa yang sama-sama menganut agama Budha Tantrayana. Pada waktu itu kehidupan agama sangat mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. Diduga perkembangan pendidikan di Sumatera Barat sewaktu pengaruh Hindu berkuasa (zaman Adityawarman) sama seperti pendidikan yang berlaku di Jawa pada zaman Kertanegara.

Pendidikan Islam pertama di Sumatera Barat dilakukan oleh pedagang Islam dari Aceh. Sesudah Islam mulai berkembang, maka pendidikan Islam mulai dilaksanakan di surau untuk pertama kalinya di Sumatera Barat dimulai oleh Sheikh Burhanuddin di Ulakan,

22) Adityawarman merupakan salah seorang raja di Indonesia yang paling banyak meninggalkan prasasti tentang dirinya. Sembilan belas buah yang telah terbaca dan masih 13 buah lagi yang sedang dipelajari. Mungkin masih ada beberapa buah lagi yang belum diketemukan, karena penyelidikan secara intensif sedang dirintis.

Pariaman. Hal tersebut berjalan sampai akhir abad ke 10, dengan masuknya pengaruh aliran baru dalam Islam dari Mekah dan Mesir ke Sumatera Barat.

Gerakan pembaharuan Islam mulai dilaksanakan pada awal abad ke-20 dengan munculnya tokoh muda sebagai pembaharu pendidikan Islam dan munculnya sekolah Islam dengan sistem kelas, seperti Sekolah Adabiah, Thawalib, Diniah, dan lain-lain. Mulai tahun 1930 corak pendidikan Islam di Sumatera Barat mengalami perubahan, di mana tujuan pendidikan dikaitkan dengan tujuan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, yang berjalan sampai masuknya Balatentara Jepang.

Di samping itu pada pertengahan abad ke-19 mulai didirikan sekolah gubernemen Belanda pertama di kota Padang dengan nama "*Gouvernement Inlandsche School*" atau "Sekolah Kelas Dua". Sesudah sekolah tersebut banyaklah didirikan oleh pemerintah Belanda sekolah lainnya seperti *Kweekschool*, *Volkschool*, *Vervolgschool*, "Sekolah Kelas Satu", *Sekolah Normal*", "*Sekolah Schakel*", dan lain-lain.

Tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Sumatera Barat di samping dipengaruhi oleh aliran baru Islam dari Mekah dan Mesir, juga sistem pendidikan Hindia Belanda yang banyak pengaruhnya, akhirnya sangat menonjol, yang mulai pada awal abad ke-20.

Bersamaan dengan meningkatnya pergerakan Nasional Indonesia, muncul pula sekolah swasta, seperti Taman Siswa. INS, Muhamma diyah, dan lain-lainya sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan Belanda yang lebih banyak untuk kepentingan mereka.

Di waktu tentara Jepang berkuasa corak pendidikan di Sumatera Barat pada umumnya mengalami perubahan yang besar. Semua nama sekolah diubah dengan bahasa Jepang, yang dijadikan mata pelajaran wajib di setiap sekolah. *Seikere* (menghormat menghadap ke Jepang) harus dilakukan setiap pagi oleh guru dan murid sekolah secara bersama *Taiso* (senam masal) diwajibkan pada murid sekolah. Pada pemuda Sumatera Barat, termasuk murid sekolah, dilatih dengan latihan kemiliteran, seperti : *Seinendan*, *Bogodan*, *Heiko*, *Giyugun*,

dan lain-lain yang semuanya ditujukan untuk kepentingan peperangan Jepang, yaitu Perang Asia Timur Raya.

Walaupun pendidikan pada zaman Jepang banyak memberikan hal yang merugikan terhadap Sumatera Barat, namun ada beberapa hal baik yang perlu dicatat. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan merupakan bahasa resmi di kantor dan dalam pertemuan. Perkembangan bahasa Indonesia dalam waktu singkat mengalami kemajuan. Hal itu menyebabkan timbulnya rasa persatuan di kalangan rakyat, tambahan lagi tempaan mental dan semangat yang diberikan Jepang tanpa sengaja, mempercepat dan timbulnya wujud persatuan itu. Pendidikan yang diberikan Jepang mempercepat matangnya usaha kemerdekaan Indonesia, suatu hal yang tidak disadari oleh penguasa Jepang di Sumatera Barat.

Pada zaman kemerdekaan, kebijaksanaan pendidikan sudah diatur secara sentral yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Pada masa ini seluruh kebijaksanaan pendidikan diatur oleh bangsa Indonesia yang disesuaikan dengan aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia. Seluruh Rakyat Indonesia diberi hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pendidikan, hal yang tidak akan mungkin dicapai pada masa sebelum kemerdekaan. Untuk mewujudkan masalah tersebut didirikanlah sarana pendidikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan, daya dan dana yang tersedia. Guru-gurupun dihasilkan dengan tumpuan untuk perbaikan mutu pendidikan dan mengejar ketinggalan bangsa Indonesia dalam segala bidang.

BAB I PENDIDIKAN TRADISIONAL

1.1 Pengetahuan Agama Hindu Dan Budha

Di Sumatera Barat hanya ditemui pengaruh Budhisme tetapi pengaruh itu hanya terdapat di daerah Jambi yang dahulu menjadi wilayah Minangkabau Timur.¹⁾ Budhisme yang berkembang pada waktu itu adalah Budha Hinayana yang terlihat pada abad ke-6 dan ke-7²⁾. Kemudian pada akhir abad ke-7 sampai akhir abad ke-11 terlihat pula pengaruh Budha Mahayana.

Pengaruh Budha yang sangat jelas terlihat di Sumatera Barat pada masa Adityawarman berkuasa, sekitar tahun 1347 berpusat di daerah Sungai Langsat, Sungai Dareh, Rambahan, Padangroco, yang kesemuanya terdapat di daerah Minangkabau Timur.

Pada tahun 1349 Adityawarman memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah pedalaman, yaitu Pagaruyung, di kota Batusangkar sekarang dan disitulah kemudian muncul Kerajaan Pagaruyung, Adityawarman adalah penganut agama Budha Tantrayana seperti yang tercatat pada prasasti Suroaso I (1357)³⁾.

1) Drs. M.D. Mansoer, dkk., *Sejarah Minangkabau*, Bhartara Jakarta 1970, hal 43.

2) *Ibid.*, hal. 41

3) *Ibid.*, hal. 63

Dari sekian banyak prasasti yang ditinggalkan Adityawarman seperti Prasasti Bandar Bapahat, Prasasti Suroaso II, dan lain-lainnya tidak dapat memberikan gambaran bagaimana sistem pendidikan yang berlaku pada waktu itu, karena tidak satupun di antaranya yang menjelaskan masalah tersebut. Namun demikian kita menduga bahwa pendidikan pada waktu itu sama dengan sistem pendidikan yang berlaku di Jawa sewaktu raja Kartanegara berkuasa, karena keduanya sama-sama menganut agama Budha Tantrayana.

Walaupun Adityawarman seorang raja besar terbukti dengan adanya prasasti yang dapat menunjukkan kebesarannya di Kerajaan Minangkabau Pagaruyung, tetapi pengaruh kebudayaan Budha tidak begitu mendalam pada masyarakat Sumatera Barat. Kekuasaan Adityawarman memang besar, tetapi dalam struktur adat Minangkabau dia tetap sebagai orang menantu.

Di Minangkabau kedudukan seorang menantu adalah ibarat abu di atas tunggul, sedikit saja ada angin bertiup abu itu akan terbang. Sebagai seorang menantu atau seorang *semando*, Adityawarman tetap merupakan orang pendatang dalam masyarakat Minangkabau. Dia tidak mempunyai suku, tidak mempunyai hak atas tanah.

Sebaliknya, anak-anaknya sudah merupakan orang Minangkabau dan hidup seperti orang Minangkabau. Itulah sebabnya bekas peninggalan pengganti Adityawarman, tidak terlihat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

1.2 Pengaruh Adat Minangkabau

1.2.1 Alam Minangkabau

Suku bangsa Minangkabau menyebut seluruh daerah aslinya dengan sebutan *Alam Minangkabau*. Pengertian Alam Minangkabau itu sudah diajarkan kepada anak-anak semenjak kecil oleh mamaknya, atau oleh anggota keluarga lainnya. Tetapi sekarang pengertian alam Minangkabau itu hanya tinggal dalam Tambo Alam Minangkabau, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari pengertian itu sudah tidak dipergunakan lagi. Sekarang untuk menamakan Alam Minangkabau disebut dengan nama Sumatera Barat karena di daerah itulah orang

Minangkabau sebahagian besar bertempat tinggal. Di dalam daerah itulah orang Minangkabau hidup dengan peraturan adat selalu dipegang teguh. Namun demikian pengaruh pengertian Alam Minangkabau masih terasa terutama dalam kata-kata adat yang diucapkan pada waktu upacara adat.

1.2.2 Pendidikan Adat Minangkabau

1.2.2.1 Pendidikan calon Penghulu

Pendidikan adat Minangkabau tidak dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan tertentu, karena di dalam adat Minangkabau tidak dikenal adanya sistem yang demikian. Penghulu adalah suatu jabatan dalam adat Minangkabau yang mengepalai suatu kaum atau suatu suku, yang diangkat oleh anggota kaumnya secara musyawarah dan mufakat dalam kerapatan adat kaum tersebut. Oleh karena itu, seorang penghulu diharuskan mengetahui tentang adat Minangkabau dengan baik, karena kepadanya akan diserahkan memegang kekuasaan adat tertinggi dalam kaum tersebut. Dialah yang akan menjaga pelaksanaan adat di dalam kaumnya itu. Tanpa pengetahuan adat yang baik seorang penghulu tidak akan dapat mengatur kaumnya dengan sempurna.

Kedudukan penghulu merupakan kedudukan yang turun-temurun melalui garis keturunan ibu (matrilineal). Kedudukan seorang penghulu tidak dapat diturunkan kepada anak, tetapi kemenakannya. Seorang anak di Minangkabau tidak masuk anggota kaum ayahnya, tetapi masuk ke dalam kaum ibunya.

Dalam satu kaum kedudukan penghulu hanya dapat dipegang oleh seorang anggota laki-laki saja, kecuali apabila jumlah anggota kaum itu sudah besar. Untuk itu dapat diangkat seorang Penghulu baru, yang masih merupakan cabang dari kaumnya semula. Hal ini dapat terjadi biasanya apabila anggota suatu kaum yang pergi merantau sudah sangat banyak jumlahnya di suatu tempat. Untuk mengatur anggota kaumnya itu diperlukan seorang penghulu pula di sana, dengan sepengetahuan Penghulu asalnya mereka dapat mengangkat seorang Penghulu baru yang merupakan pecahan dari kaum asalnya dan masih tunduk ke penghulu asalnya.

Pendidikan seorang calon Penghulu sudah dimulai semenjak kecil, apalagi apabila kemenakan yang berhak menggantikan itu hanya seorang saja. Pendidikan diberikan secara lisan dan melalui praktek adat dalam kehidupan sehari-hari.

Biasanya pendidikan diberikan oleh seorang Penghulu kepada kemenakannya pada malam hari. Waktu itu penghulu menjelaskan segala sesuatu tentang adat seperti : kewajiban seorang Penghulu terhadap kaumnya atau anak kemenakannya, berapa jumlah harta pusaka dan di mana saja letaknya, pantangan seorang Penghulu, silsilah kaum, bagaimana cara mengelola kaum beserta harta pusakanya, untuk apa saja harta pusaka itu dapat dipergunakan. Dijelaskan semua seluk beluk adat Minangkabau dan kaum mereka sendiri. Pengetahuan adat itu diberikan sedikit demi sedikit, kemenakan yang dengan patuh mendengarkan pelajaran mamaknya itu diharuskan mengetahui (hafal) seluruh kata-akta adat (pepatah) yang diajarkan itu. Proses pendidikan seorang calon Penghulu memakan waktu yang lama. Selama seorang penghulu masih hidup dia belum boleh digantikan, kecuali apabila dia sudah uzur betul.

Sewaktu seorang Penghulu menjelaskan tentang adat kepada calon penggantinya, kemenakan yang lain boleh mendengarkan, karena semua kemenakan laki-laki Penghulu itu pada dasarnya boleh menggantikannya, hanya saja biasanya urutan pengganti itu sudah ditetapkan secara alamiah, yaitu kepada kemenakan tertua atau kepada salah seorang kemenakan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga tersebut karena sesuatu kelebihanannya.

Apabila seorang Penghulu keburu meninggal, sedangkan pendidikan bagi calon penggantinya masih belum memadai, maka pengganti itu dapat menanyakan masalah adat kepada orang tua dalam kaum tersebut atau kepada salah seorang penghulu lain yang masih dekat hubungannya. Semua orang tua Minangkabau pada dasarnya mengetahui tentang seluk beluk adatnya secara umum, walaupun dia sendiri tidak menjadi seorang penghulu, bahkan sering terjadi seorang bukan penghulu pengetahuan adatnya sama dengan seorang penghulu.

Apabila yang meninggal adalah calon pengganti Penghulu, maka calon akan pindah kepada kemenakan berikutnya yang berada pada

urutan kedua sesudah yang meninggal. Oleh karena itulah sewaktu seorang Penghulu menjelaskan tentang adat kepada calon penggantinya, kemenakan yang lain dibolehkan mendengarkannya.

Tempat melaksanakan pendidikan adat tidak ditetapkan pada suatu tempat, tetapi dapat saja dilakukan pada rumah adat kaum tersebut, di rumah kemenakannya, di balai adat, sewaktu istirahat kerja di rumah, atau sambil duduk-duduk sore. Yang perlu diperhatikan adalah jangan mengajar seorang kemenakan di depan umum atau sedang bermain judi. Waktu penyelenggaraan pendidikan adat itu juga tidak ditentukan, dan mengenai waktu tidak diperhitungkan.

Karena pendidikan adat itu diberikan secara lisan, maka sering terjadi tanya jawab antara penghulu dengan kemenakannya, bahkan kadang-kadang terjadi perdebatan. Keadaan yang demikian memberikan hasil-hasil yang positif dalam pendidikan itu, karena kemenakan betul-betul dapat menguasai masalah adat secara mantap.

Semenjak pengaruh agama Islam sudah masuk ke Minangkabau, maka pendidikan adat yang dilakukan secara lisan mulai ada perubahannya, karena sebahagian adat itu ada yang ditulis dalam huruf Arab Melayu. Tambo Minangkabau yang ada sekarnag kebanyakan mulai ditulis abad ke-15, atau ke-16. Sesudah itu pengetahuan adat diberikan secara tertulis, tatapi hanya terbatas kepada orang yang pandai tulis baca tulisan Arab Melayu. Waktu itu adat sudah dibaca oleh orang yang tidak ada hubungan dengan masalah penggantian penghulu, seperti para ulama Islam yang kebanyakan tidak akan menjadi penghulu. Walaupun pengetahuan adat sudah ada yang dituliskan, namun pendidikan secara lisan masih berjalan terus sampai sekarang. Pendidikan secara lisan dapat bertahan sampai sekarang antara lain disebabkan karena tidak semua inti dan makna adat itu yang dapat diwariskan secara tertulis, banyak masalah adat yang harus dijelaskan dengan lisan. Peraturan adat secara teoritis memang dapat diberikan secara tertulis, tetapi masalah yang menyangkut praktek adat harus diberikan melalui pengalaman dalam praktek.

Pendidikan adat melalui praktek biasanya dilakukan pada upacara adat seperti : upacara *batagak penghulu* (penggantian penghulu) upacara perkawinan, upacara *batagak rumah* (mendirikan rumah),

dan lain-lain. Dalam upacara adat itu kemenakan disuruh penghulunya untuk memperhatikan jalannya upacara adat dari awal sampai selesai atau kemenakan disuruh penghulunya untuk mewakilinya. Kemenakan tersebut betul-betul ikut memegang peranan dalam upacara adat itu dan dapat membandingkan pengetahuan adat yang diperolehnya secara lisan dengan pelaksanaan yang sesungguhnya. Apabila dia sudah menjadi Penghulu dia tidak akan canggung lagi menjalankan tugasnya.

Dengan cara lisan dan praktek adat itulah pada umumnya adat Minangkabau diwariskan kepada generasi berikutnya. Walaupun cara ini memakan waktu yang lama, tetapi sebaliknya pengetahuan adat yang diperoleh betul-betul mantap. Dengan demikian materi adat yang diwariskan kepada generasi berikutnya itu dapat diberikan secara wajar tanpa adanya unsur paksaan.⁴⁾

1.2.2.2 Pendidikan adat Minangkabau bagi Pemuda Perantau

Struktur dan sistem adat Minangkabau memberikan kekuasaan yang penuh kepada ninik mamak⁵⁾ atau Penghulu sebagai kepala waris, kepala kaum, atau kepala suku sampai dengan meninggalnya. Harta pusaka dikerjakan dan diusahakan untuk kepentingan wanita dan anak-anaknya yang masih belum dewasa. Para pemuda Minangkabau seolah-olah merasa tidak berkuasa di dalam kaumnya yang menyebabkan mereka merasa kurang diperhatikan dalam lingkungan keluarganya. Perasaan yang demikian menyebabkan banyak pemuda Minangkabau yang tidak betah diam dalam lingkungan keluarganya dan di kampungnya. Dalam usaha mengatasi perasaan yang demikian atau untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang diperlukan, kebanyakan pemuda Minangkabau pergi merantau ke tempat lain di luar kampungnya di mana mereka dapat lebih leluasa berbuat sesuatu menurut kemauan dan kehendak mereka sendiri tanpa mendapat halangan atau pengawasan yang terus menerus dari keluarganya. Kepergian itu hanya untuk sementara saja, bukan untuk tetap menetap.

-
- 4) Selanjutnya dapat dibaca karangan Datuk Batuah Sango, *Tambo Alam Minangkabau*. Percetakan Limbago Payakumbuh, yang menjelaskan secara terperinci bagaimana proses pergantian seorang Penghulu di Minangkabau.
- 5) Tidak semua mamak yang dapat menjadi Penghulu sekaligus tetapi seorang mamak tetap menjadi kepala terhadap kemenakannya.

Biasanya di tempat baru itu ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan kekayaan dengan kerja keras. Apabila kekayaan yang terkumpul sudah banyak mereka akan kembali ke kampungnya dengan membawa hasil usahanya yang sudah terkumpul. Dengan demikian mereka menunjukkan bahwa mereka juga dapat berbuat seperti orang tuanya, bahkan mungkin dapat lebih dari mereka. Pada mulanya merantau disebabkan oleh masalah yang disebutkan di atas, dan baru kemudian ada beberapa motif yang menyebabkan orang Minangkabau pergi merantau seperti sekarang.

Sebelum para pemuda itu pergi merantau, mereka dibekali dengan beberapa macam pengetahuan yang dapat dijadikan modal hidup, supaya jangan sampai hidup terlunta-lunta di rantau. Pengetahuan yang diberikan meliputi adat Minangkabau, yang diberikan secara lisan oleh mamaknya, antara lain : seluk beluk adat, cara hidup, cara berdagang, memburuh, dan sebagainya. Sesudah semua dijelaskan, terakhir dikunci dengan nasehat, bahwa semua usaha dapat dilakukan. Pertama sekali yang dilakukan adalah mencari lipatan dan sesudah itu baru berusaha.

Pemberian pengetahuan seperti itu sudah merupakan kewajiban bagi seorang mamak terhadap kemenakannya dengan tujuan kepergian kemenakannya itu atas pengetahuan mamaknya dan supaya kemenakan tidak terlantar di rantau orang.

Sebaliknya seorang pemuda tidak akan diizinkan mamaknya untuk pergi merantau sebelum dianggap sudah menguasai adat secara umum dan memiliki suatu keterampilan khusus. Pemuda yang demikian dianggap akan terlantar hidupnya di daerah rantau dan kalau hal tersebut sampai terjadi, maka yang akan dapat malu adalah mamaknya atau seluruh anggota keluarganya. Seorang pemuda yang merantau harus merupakan tenaga kerja yang sudah siap dan sanggup hidup secara mandiri di manapun mereka berada, karena bekal secara mandiri di manapun mereka berada, karena bekal untuk hidup di rantau itu sudah dimilikinya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Itu pulalah sebabnya kebanyakan pemuda Minangkabau jauh lebih berhasil di rantau dari pada di kampung halamannya sendiri.

Pemberian pengetahuan keterampilan khusus sebelum seorang pemuda pergi merantau dianggap penting, mengingat bahwa pemuda itu selama di kampungnya merupakan seorang pemuda yang hidup berkecukupan, segala, sesuatu kebutuhan hidup mereka sudah disediakan oleh keluarganya, walaupun di rantau mereka akan hidup sendiri.

Pendidikan adat dan keterampilan khusus diberikan oleh mamaknya beberapa bulan sebelum seseorang pergi merantau. Pendidikan adat diberikan secara lisan, sedangkan kepandaian khusus diberikan melalui praktek kerja. Biasanya seorang pemuda sudah dilatih mamaknya dalam berbagai bidang usaha, sekurang-kurangnya di bidang usaha yang dilakukan oleh mamaknya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang mamak menjadi tukang kayu, maka kemenakan sudah dilatih semenjak kecil dalam usaha dan pekerjaan tukang kayu tersebut. Dengan demikian sewaktu akan pergi merantau pemuda itu hanya akan menerima pengetahuan tentang adat Minangkabau saja. Pengetahuan adat seorang pemuda perantau tidak selengkap pengetahuan adat seorang pemuda yang akan menjadi Penghulu. Pada pokoknya pemuda perantau hanya akan mendapat dasar-dasar umum adat Minangkabau serta bagaimana hidup di rantau supaya jangan terlantar. Sebagai seorang Minangkabau dia harus mengetahui secara umum tentang adat.

Waktu dan tempat untuk memberikan pendidikan adat bagi pemuda perantau tidak merupakan masalah dapat saja berlangsung pada setiap ada kesempatan, sedangkan waktu yang dibutuhkan cukup beberapa hari saja, tidak selama waktu yang dibutuhkan seorang calon Penghulu.

Sampai dengan pertengahan abad ke-19 rantau orang Minangkabau masih terbatas pada beberapa daerah saja seperti daerah Riau, Jambi, Negeri Sembilan di Malaysia. Tetapi mulai pertengahan abad ke-19, sudah meluas ke daerah lain di wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri seperti Mesir dan Mekah. Rantau ke Mekah biasanya adalah untuk menunaikan ibadah Haji sambil menuntut ilmu pengetahuan dengan bermukim di sana selama beberapa tahun. Merantau ke tempat lainnya pada waktu itu adalah untuk menambah ilmu.

1.2.2.3 Pendidikan Bela Diri

Dahulu kebanyakan pemuda Minangkabau diberi pendidikan bela diri dengan silat yang dibagi dua macam yaitu *galuik* yaitu silat bela diri dan *silat tari* yang dipergunakan untuk pertunjukan pada upacara adat Minangkabau. Silat bela diri mengutamakan gerak untuk membela diri dari serangan musuh, sedangkan silat tari mengutamakan gerakan yang indah dan berirama.

Silat bela diri dapat diikuti oleh setiap pemuda Minangkabau asal dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh guru atau perkumpulan. Biasanya setiap nagari di Minangkabau ada sebuah perkumpulan silat bela diri yang diikuti oleh pemuda dari nagari yang bersangkutan. Perkumpulan silat bela diri dinamakan sesuai dengan nama gurunya, atau nama tempat di mana perguruan itu didirikan.

Guru silat bela diri biasanya seorang yang sudah terkenal keahliannya dan sudah sering dibuktikan dalam menjaga keamanan kampungnya.

Tingkatan murid diatur menurut keahlian masing-masing atau lama mereka belajar silat, makin lama seorang belajar makin tinggi tingkat kepandaianya. Murid yang baru masuk dilatih oleh murid yang sudah lama sedang guru silat jarang turun tangan melatih murid baru ini. Pelaksanaan pendidikan atau latihan silat sehari-hari diatur oleh *Guru Tuo* (guru tua) yaitu murid yang telah dipercayai betul oleh gurunya dan sudah memiliki kepandaian silat yang tinggi. Di samping beberapa orang guru tua ini, masih ada beberapa orang murid lagi yang berkepandaian setingkat di bawahnya yang bertindak sebagai pembantu guru tua dan biasanya dipilih dari murid yang pandai dan bersedia membantu.

Tempat melakukan silat bela diri biasanya tempat yang agak jauh letaknya dari kampung atau rumah penduduk supaya jangan mengganggu ketenteraman. Untuk keperluan itu dibuat sebuah pondok dan di depan pondok itu dibuat sebuah lapangan kecil tempat latihan.

Latihan diadakan pada malam hari dan biasanya pada saat terang bulan, karena penerangan lampu tidak cukup. Mula-mula yang berlatih adalah murid baru masuk selama kira-kira dua jam yang dimulai

sesudah sembahyang magrib. Sesudah itu mulai berlatih murid yang agak pandai kira-kira dua jam pula. Selajutnya baru dimulai latihan murid yang sudah pandai termasuk guru-guruk tua. Latihan terakhir ini biasanya diikuti oleh murid-murid yang menjadi pembantu guru tersebut. Di waktu inilah guru silat itu ikut melatih dengan memberikan petunjuk terhadap gerakan-gerakan murid-muridnya yang masih kurang tepat. Kadang-kadang guru hanya memberi petunjuk dari luar tempat latihan yang berlangsung sampai subuh.

Latihan bagi murid yang akan tamat belajar langsung dipimpin oleh guru silat dan tidak boleh dilihat oleh murid lainnya.

Waktu latihan tidak dilakukan setiap hari secara terus menerus, kecuali pada setiap bulan terang latihan dimulai pukul 19.00 sampai subuh. Di waktu cahaya bulan mulai redup, latihan hanya untuk murid yang sudah pandai saja, karena pada waktu itu pandangan mata sudah kurang fungsinya dan digantikan dengan pendengaran dan perasaan. Siang hari latihan tidak diadakan, karena mereka perlu bekerja untuk kebutuhan hidup.

Dalam pendidikan silat bela diri ini tidak dipungut bayaran selain daripada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada awal pendidikan, misalnya : kain putih satu kabung (kira-kira 2,5 yard) atau kain sarung sebuah, beras dua gantang (4 liter), sebuah pisau atau sepotong besi, dan sebagainya. Persyaratan ini bermacam-macam bentuk dan rupanya dan hal itu sangat tergantung pada ketetapan guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, persyaratan tersebut berbedabeda untuk setiap perkumpulan, ada yang berat dan ada yang ringan, tetapi semuanya tidak ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Apabila seorang guru silat ternyata sangat susah kehidupannya, maka murid-muridnya yang berada akan memberikan bantuan ala kadarnya secara sukarela.

Seorang murid yang dianggap sudah cukup mahir diberikan ujian terakhir, yang tidak disadari oleh yang akan diuji. Ujian itu dilakukan oleh murid lainnya secara bergantian, tetapi hanya bagi yang berani saja, sebab dalam ujian tersebut murid yang akan menguji betul-betul harus berkelahi secara sungguhan sehingga yang diujipun harus membalasnya secara bersungguh-sungguh pula. Sesudah itu diadakan

latihan bersama dengan murid yang telah tamat terlebih dahulu. Murid yang diuji tidak mengetahui bahwa dia sedang diuji, karena kepadanya tidak pernah dikatakan sama sekali. Dia mungkin sudah merasa karena kawan berlatihnya melakukan gerakan yang membahayakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga apabila tidak dihadapi secara serius mungkin saja dia akan mendapat cedera. Kalau sudah dianggap cukup barulah guru sendiri yang turun menguji murid tersebut dan ujian ini dilakukan pada malam hari di mana batas pandangan pada waktu itu hanya kira-kira sejauh sepuluh senti meter saja. Unsur pendengaran sangat penting, biasanya waktu ujian tidak ditetapkan secara pasti, tetapi dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak disengaja.

Proses ujian guru memberitahukan pada murid yang bersangkutan bahwa ilmu silat yang dimilikinya di anggap sudah cukup. Murid sudah merasa bahwa tidak lama lagi dia akan diuji, tetapi kapan waktu ujian akan dilaksanakan tidak diketahui. Pada suatu ketika guru menyuruh murid tersebut mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah biasa dilakukannya misalnya pergi ke rumah teman gurunya untuk mengatakan sesuatu dan harus segera kembali. Tempat yang akan dituju dipilih yang agak jauh sehingga murid tersebut terpaksa pulang pada malam harinya. Di waktu pulang itulah guru menghadang muridnya tanpa diketahui oleh murid itu. Terjadilah perkelahian yang seru antara guru dan murid, murid tidak tahu siapa yang menghadangnya, tetapi serangan yang diterima datang secara bertubi-tubi sehingga dia terpaksa melakukan perlawanan sungguh-sungguh. Apabila gurunya menganggap ujian itu sudah cukup dan murid itu sudah dapat dinyatakan lulus, maka dengan cara tertentu guru akan menghindari dari muridnya seolah-olah orang melarikan diri karena tidak kuat menghadapi lawan yang tangguh. Bahwa penghadangan itu merupakan ujian terakhir bagi dirinya dia sendiri juga tidak mengetahui seluruhnya dilakukan serba kebetulan dan secara wajar. Beberapa hari kemudian setelah gurunya memberitahukan bahwa dia telah selesai belajar dan sudah dilakukan ujian terhadapnya pada tengah malam buta sewaktu terjadi hadangan terhadap dirinya. Di waktu itulah murid mengetahui bahwa yang menghadangnya itu adalah gurunya sendiri. Kalau sekiranya pada waktu itu murid tersebut tidak berlaku sungguh-sungguh, mungkin dia akan dinyatakan belum lulus.

Ujian tersebut dimaksudkan supaya murid selalu siap setiap waktu, karena musuh datangnya tidak akan memberitahukan terlebih dahulu. Yang tidak boleh dilakukan oleh murid itu adalah mencari musuh dengan sengaja atau mencari gara-gara untuk menimbulkan keributan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tetapi apabila musuh itu datang sendiri tidak boleh dielakkan, walaupun akan berakibat korban nyawa sekalipun.

Apabila seorang murid sudah dinyatakan lulus, dia akan menjadi seorang ahli silat yang disegani dan kedudukannya sudah dianggap sama dengan gurunya. kepadanya sudah diizinkan untuk membuka perkumpulan silat tersendiri, tetapi hal itu biasanya jarang terjadi, karena murid yang bersangkutan merasa tidak mau melangkahi gurunya. Oleh karena itu, biasanya murid yang sudah tamat akan lebih suka menjadi pembantu gurunya di perkumpulan silat gurunya itu. Pembantu guru silat yang begini besar kekuasaannya, gurunya sudah mempercayakan segala masalah perguruan tersebut kepadanya. Dia sudah diberi wewenang untuk memberikan ujian akhir kepada salah seorang murid yang akan tamat belajar dan apa yang diputuskannya akan diterima langsung oleh gurunya.

Dengan cara demikian maka pembantu guru silat itu makin lama makin banyak dan hal ini akan mengharumkan nama perkumpulan dan mengalmirnya murid memasuki perguruan silat itu. Semakin banyak murid suatu perkumpulan silat semakin tinggi derajat gurunya dalam pandangan masyarakat, lebih-lebih lagi kalau murid-murid selalu melakukan perbuatan baik untuk keamanan kampungnya. Tidak jarang terjadi kedudukan seorang guru silat sama tingginya dengan kedudukan seorang ulama Islam. Tetap sebaliknya ada pula yang dianggap sebagai perusak ketenteraman masyarakat karena perbuatan muridnya yang sangat tercela. Di samping itu ada pula perkumpulan silat yang didirikan oleh seorang ulama, yang sekaligus mengajar mengaji, dan menjadi guru silat. Biasanya guru silat yang begini banyak muridnya, karena di samping kepandaian silat mereka juga mendapat pengetahuan agama Islam. Namun demikian tidak semua murid yang ikut mengaji ikut belajar silat, tetapi murid-murid yang belajar silat semuanya ikut belajar mengaji di sana.

Seorang ahli silat yang sudah mencapai puncak keahlian tidak akan menimbulkan kekacauan terhadap masyarakat, mereka selalu menjaga ketenteraman kampungnya dan ikut mengatasi bahaya yang menimpa daerahnya. Tetapi keributan dalam masyarakat sering ditimbulkan oleh ahli-ahli silat tanggung, misalnya belum tamat belajar sudah keluar dari perguruan atau dikeluarkan karena sesuai kesalahan yang tidak dapat dimaafkan seperti : merampok, memperkosa, dan membunuh. Orang semacam itulah yang sering mendatangkan kekacauan dalam suatu daerah dengan macam-macam keributan, dan ikut mendiskriditkan suatu perkumpulan.

Tidak semua murid perkumpulan yang dapat lulus dari ujian akhirnya, karena persyaratan sangat berat, di samping harus mempunyai kepandaian silat yang tinggi mereka juga harus memiliki mental yang baik. Khusus mengenai mental ini murid sudah diteliti oleh gurunya mulai masuk belajar. Kalau ternyata watak si murid tidak baik, dia tidak akan diberikan ujian atau sebelum selesai belajar sudah disarankan untuk keluar saja karena kepandaian silat justru tidak berguna baginya selain dari akan mendatangkan huru hara saja di kemudian hari. Guru itulah yang akan menentukan apakah seorang murid dapat diberi pelajaran lanjutan atau tidak atau harus dikeluarkan.

Kalau memang sudah ternyata bahwa seorang murid sudah jelas tidak akan dapat belajar silat bela diri dengan baik, maka kepadanya akan diberikan silat tari saja. Untuk menetapkan ini seluruhnya terserah kepada guru yang bersangkutan dan tidak seorangpun yang dapat membantahnya.

Pendidikan silat tari biasanya diberikan kepada murid yang tidak menjadi ahli silat bela diri atau kepada murid yang dianggap gurunya tidak mampu mempelajari silat bela diri dengan baik. Tetapi orang yang betul-betul ahli dalam silat tari adalah seorang ahli silat bela diri yang sudah mahir dalam gerakan, karena mereka sudah terbiasa dengan gerakan tersebut, bahkan sudah terbiasa dengan gerakan yang paling sulit sekalipun. Jarang sekali seorang ahli silat bela diri yang tidak mahir pula dalam silat tari, sebaliknya seorang yang hanya mahir dalam silat tari saja belum tentu mahir pula dalam silat bela diri. Bagi ahli silat bela diri dapat dikatakan bahwa silat tari itu merupakan

selingan saja apabila mereka sudah terlampau letih berlatih silat bela diri. Untuk silat tari latihannya tidak bersinggungan satu sama lain seperti latihan silat bela diri, mereka hanya menari-nari saja tetapi dengan memakai gerakan-gerakan silat bela diri. Yang diutamakan dalam gerakan ini adalah unsur keindahan gerakannya, bukan gerakan untuk berkelahi.

1.2.2.4 Pendidikan Pengobatan

Ilmu pengobatan tradisional Minangkabau biasanya juga merupakan ilmu yang turun temurun. Berbeda dengan pewarisan harta pusaka atau gelar pusaka, maka ilmu pengobatan dapat diwariskan kepada anak di samping kepada kemenakan atau cucu. Tidak semua orang tepat untuk dapat mewarisi ilmu pengobatan yang sering dipanggil *tukang ubek* (tukang obat) yang ahli dalam hal pengobatan. Istilah dukun biasanya dipergunakan untuk dukun beranak, baru kemudian dipergunakan untuk panggilan seorang yang punya keahlian dalam pengobatan tradisional.

Cara mewariskan pengobatan itu memakan waktu lama, seorang anak yang dianggap mampu mewarisi atau menggantikan seorang dukun, mulai kecil sudah dilatih dengan bermacam-macam ilmu tentang pengobatan, dan pengertian tentang bermacam istilah dalam pengobatan. Kemudian anak disuruh mencari daun-daun ramuan obat sebagai pembantu dukun tersebut. Anak sekaligus sudah berkenalan secara baik dengan macam-macam ramuan obat yang harus diketahui apabila sudah menjadi dukun. Walaupun dia hanya bertugas sebagai pencari ramuan dan pembantu si dukun, tetapi proses pendidikan sudah mulai berjalan dengan agak mendalam, karena untuk mengenal macam-macam daun obat-obatan itu yang jumlahnya tidak sedikit memang merupakan suatu hal yang agak sulit dilakukan dalam masa yang singkat. Di samping itu pembantu sekaligus juga harus mengetahui ramuan mana yang tepat untuk suatu penyakit. Hal ini dilakukan pembantu sewaktu dia masih belum dewasa. Apabila anak sudah mulai meningkat dewasa kepadanya diajarkan bagaimana cara memantra-mantra obat, karena pengobatan tradisional itu dilakukan dengan cara demikian. Ramuan yang tidak dimantra tidak akan dapat menyembuhkan penyakit, karena begitulah kepercayaan yang anut dalam pengobatan tradisional.

Cara memberikan mantra itu dimulai dengan memantrai penyakit yang ringan-ringan terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan mantra untuk penyakit berat. Apabila anak dianggap sudah mampu menguasai mantra, kepadanya kadang-kadang disuruh oleh dukun untuk mengobati penyakit yang ringan. Kalau tugas itu sudah dapat dilakukan beberapa kali dengan baa, maka secara berangsur kepada anak diberi kesempatan untuk mengobati penyakit yang berat. Seluruh tugas itu dilakukan anak di bawah pengawasan dan atas nama dukun. Walaupun dia sudah pandai mengobati orang sakit namun anak itu masih belum dapat melakukan pengobatan sendiri selama dukun masih ada. Suatu kepercayaan dalam masalah perdukunan di Minangkabau, yaitu apabila seorang dukun masih hidup, pengobatannya tidak akan mempan dilakukan oleh anak atau kemenakannya. Apabila dukun itu meninggal dunia, maka pengobatan yang mujarab itu langsung saja berpindah kepada salah seorang dari anak atau kemenakan yang tertua yang selama ini menjadi mudirnya. Sedangkan anak atau kemenakan yang lain akan bertindak sebagai pembantu saja. Kalau anak atau kemenakan yang lain memaksakan untuk mengobati orang sakit, pengobatannya itu tidak akan mampu menyembuhkan penyakit. Barangkali ada semacam ilmu khusus yang diturunkan kepada yang telah ditunjuknya sebagai ahli waris yang tidak diturunkan kepada murid yang lain. Di situlah barangkali letak rahasia seorang dukun, dan tanpa ilmu itu pengobatan tidak akan berhasil. Yang dapat menjadi dukun tetap hanya seorang saja dari, sekian banyak anak dan kemenakannya. Kadang-kadang ilmu pengobatan itu tidak turun kepada anak atau kemenakan, tetapi kepada cucu dari dukun tersebut. Hal itu tergantung kepada si dukun itu dan yang jelas ilmu itu tidak akan diberikan kepada anggota keluarga lain, kecuali dalam keadaan yang mendesak, misalnya kalau dukun itu menghadapi kepunahan atau apabila tidak seorangpun di antara anak kemenakannya yang berbakat untuk menjadi seorang dukun. Dalam hal demikian dukun akan mencari pewarisnya dari lingkungan keluarga lain. Dalam kenyataan jarang terjadi seorang dukun mencari pengganti pada keluarga lain.

Ada juga dukun yang mempunyai harimau jadi-jadian yang dipergunakan dalam membantu pelaksanaan pengobatan. Dukun

demikian bukan saja mampu menyembuhkan orang sakit, tetapi juga mampu mendatangkan penyakit terhadap seseorang asal ada orang lain yang memintanya.

Di samping itu ada juga dukun yang hanya mempunyai ilmu pengobatan yang hanya mendatangkan penyakit saja kepada orang lain. Ilmu yang begini biasanya tidak begitu disukai orang banyak sedangkan dukunnya dibenci atau disisihkan oleh masyarakat. Cara mendapat ilmu pengobatan yang buruk ini dilakukan dengan jalan bertapa digunung-gunung yang angker yang jarang didatangi manusia. Betapa itu dalam istilah Minangkabau dinamakan "*batarak*". Langganan dukun yang begini biasanya terdiri dari orang yang kurang benar jalan hidupnya, yang suka membuat keonaran, mencari, merampok, berjudi, dan sebagainya. Kalau seseorang sudah kena penyakit yang dibuatkannya itu, yang dapat mengobatinya adalah dukun itu sendiri. Apabila orang datang kepadanya minta pengobatan dia akan pasang tarif tinggi sebagai imbalannya. Atau dia menerima upah yang tinggi dari seseorang untuk mendatangkan penyakit kepada seseorang lainnya. Dukun yang begini sangat ditakuti oleh masyarakat, yang biasanya bertempat tinggal jauh dari kampung. Penyampaian ilmu yang demikian dilakukan secara rahasia, karena caranya yang berbeda dari biasa, juga persyaratanya kurang masuk akal.

Ilmu pengobatan tradisional pada waktu ini kalah dengan pengobatan modern. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pendidikan pengobatan tradisional terhenti. Di luar ibu kota kecamatan pengaruh pengobatan tradisional masih kuat, apalagi di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian.

Sekarang, orang Sumatera Barat sudah mengobati penyakit yang dideritanya kepada dokter, bahkan ada kecenderungan orang berobat dengan dokter spesialis. Puskesmas yang terdapat di kecamatan dibanjiri oleh masyarakat yang ingin berobat, demam sedikit saja mereka sudah pergi ke Puskesmas dari pada pergi ke dukun.

Dewasa ini terdapat pula dukun yang berpraktek di kota-kota tetapi dengan tujuan mencari uang saja atau bahkan untuk menipu.

1.2.2.5 Pendidikan Tukang

Tukang adalah orang yang ahli dalam membuat peralatan dari kayu (tukang kayu) dari bahan batu (tukang batu), dari besi (pandai besi) dan membuat ukiran (tukang ukir). Setiap kepandaian tersebut menghendaki keahlian khusus untuk menguasainya. Tanpa latihan yang cukup kepandaian ini tidak mudah dimiliki seseorang dan cara mewariskan harus melalui latihan yang cukup.

Kepandaian seperti ini tidak merupakan kepandaian "pusaka", tetapi biasanya diturunkan kepada anak atau kemenakan juga. Kepandaian itu dapat diturunkan kepada beberapa orang yang masih merupakan anak atau kemenakan. Yang dapat mencapai tingkat kepandaian tinggi biasanya hanya satu orang dan yang lain hanya akan menjadi pembantu yang satu orang ini.

Pendidikan tukang dilakukan melalui latihan dalam praktek pekerjaan yang sebenarnya dan tempat khusus untuk mendidik tukang tidak ada. Kalau seorang tukang mendapat borongan pekerjaan, maka tempat itulah yang dijadikan tempat melatih atau mendidik calon tukang yang bertindak sebagai pembantu dari tukang itu. Pendidikan di mulai dengan pekerjaan yang mudah lebih dahulu dan kemudian pekerjaan yang halus dan lebih khusus.

Pendidikan ini memakan waktu lama, baru betul-betul ahli di bidangnya. Masalah waktu tidak begitu menjadi perhatian, yang penting bagaimana kepandaian itu dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pendidikan memakan waktu yang lama sekali.

Dalam pendidikan ini tukang hanya memberikan pola satu kali saja kepada pembantunya dan selanjutnya pembantu itulah yang mengembangkannya. Pola yang diberikan merupakan patokan saja, sedangkan pembantu dapat mengembangkan menjadi beberapa pola baru yang tergantung pada kemampuan mencipta dari pekerja itu. Apabila tidak dapat menciptakan pola baru, maka tukang itu tidak akan mengalami kemajuan dalam pertukangan. Tetapi sebaliknya apabila dapat membuat bermacam-macam pola atau variasi, maka dia dapat mencapai keahlian yang tinggi dalam ilmu pertukangan. Biasanya murid yang begini yang dibimbing dengan sungguh-sungguh

oleh gurunya, karena dari dia dapat diharapkan timbul pewaris yang baik yang dapat mengembangkan ilmu pertukangan di kemudian hari.

Pendidikan tukang tradisional seperti ini sampai sekarang masih terdapat di daerah-daerah yang jauh dari pengaruh pendidikan seperti daerah yang terpencil. Tukang-tukang yang beginipun masih banyak dan masih berfungsi di daerahnya masing-masing, karena tidak adanya masuk penambahan tukang yang telah mendapat pendidikan khusus.

1.2.2.6 Pendidikan Sastra

Pendidikan sastra tradisional juga diwariskan dengan cara tradisional. Sastra tradisional Minangkabau adalah sastra lisan yang terdiri dari bermacam-macam bentuk seperti : pepatah - petiti, pantun atau pantun adat, dan kaba.

Orang Minangkabau pada setiap pertemuan resmi seperti pada upacara adat atau pertemuan adat selalu mengemukakan maksudnya dengan kata adat yang banyak mengandung arti kiasan, karena orang Minangkabau dahulu mengemukakan pendapatnya dengan kata kiasan yang tersimpul dalam kata adat yang penuh irama, penerima juga akan menjawab pula dengan kata-kata adat.

Untuk menangkap pengertian yang dikemukakan lawan berbicara harus memiliki keterampilan khusus yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman.

Perlu dikemukakan beberapa contoh kata adat yang dipergunakan pada upacara adat :

1) Sekapur Sirih :

*"Assalamualaikum kato disabuik, sambah jo salam mairingi, dek taufik kato tak dapek, dek suko kato dorong, ibu bapo dapek cilakonyo, nini mamak buliah malunyo. Alam Minangkabau manangguangkan. Bari maaf barilah ampun, kato kok salah dek menyambuik, rundiang kok salah manutuakan, disabuik kato rang tuo, disabuik tutua rang daulu, indak dapek disabuikan namo indak mungkin diimbaukan gala, tando biti indak marupo, tahun hijarat tak basuo, "*⁶⁾

6) Djafri Datuk Bandaro Lubuk Sati, wawancara, Juli 1980, Padang.

Terjemahannya :

Assalamualaikum kata disebut, sembah dan salam mengiringi, karena takut tak dapat, suka taka terdorong, ibu bapa yang akan mendapat celakanya, ninik mamak mendapat malunya Alam Minangkabau yang menanggungkan. Beri maaf berilah ampun, kalau salah menyebut kata, kalau khilaf menuturkan rundingan, yang akan disebut kata orang-orang tua, akan disebut tutur orang dahulu, yang tidak dapat disebutkan namanya, yang tidak mungkin diimbaukan gelarnya, karena tanda bukti tidak ada, tahun hijratnya tidak bertemu,

Kata-kata adat ini biasanya dipergunakan sebagai pembukaan sebelum mengatakan, sesuatu, misalnya untuk menguraikan adat Minangkabau. Dengan sendirinya kata-kata ini berisi dalam pembukaan dan permintaan maaf kalau apa yang akan disebutkan itu tidak tepat, maktumlah apa yang akan disebutkan itu adalah apa yang dikatakan orang-orang tua dahulu yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Barangkali di antara yang hadir banyak yang lebih mengetahuinya.

2) Pembukaan Rundingan :

"Malah Datuk, sungguahpun datuk sorang nan taimbau, nan disabuik namo dan dipanggia gala, rundiang tatuju ka si pangkalan, sagalo niniak dengan mamak, ampek jinik ipa bisan, kuduang karatan simpang balahan, urang sumando manyumando, nan duduk sahamparan, non badiri sapamatang, nan mandapek samo balabo, nan kailangan samo marugi, tacicia samo manjapuik, non taserak samo mangampuangkan, nan sabondong ilia non sabandong mudiak,

Tapi sabalum disampaikan nan dimakasui, mamacah nan diama, lai ko buliah ambo batanyo, nan bak sakarang iko kini, lah buliah ko ambo manyabuik, mambuka kato dengan rundingan, manyampaikan nan dimukasui, non manampuah jalan nan huruih, manyabuik kato nan bana. Sakian sajo sambah dari ambo pulang maalum pado datuk,"

Terjemahan :

Hai, datuk, sungguhpun datuk sendiri yang dipanggil, yang disebutkan nama dan dipanggilkan gelarnya, rundingkan tertuju kepada seluruh anggota keluarga tuan rumah : ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, tua muda, impar bisan, menantu, pokoknya seluruh anggota keluarga dari tuan rumah yang senasib sepenanggungan, dan seterusnya

Tetapi sebelum menyampaikan apa yang dimaksudkan, sebelum mengemukakan apa yang diniatkan dari semula, terlebih dahulu bolehkan saya bertanya dalam keadaan yang sekarang ini, yaitu apakah sudah tepat saatnya untuk saya mengemukakan segala yang dimaksudkan dengan kedatangan ke sini. Hanya sekian pertanyaan dan mohon dijawab dengan segera supaya jangan lama kami menunggu.

Maksud kata-kata ini antara lain adalah tamu ingin menyampaikan sesuatu kepada tuan rumah, tetapi sebelumnya dia menanyakan terlebih dahulu apakah suasana dan situasi sudah memungkinkan untuk itu dan apakah tuan rumah sudah siap menerimanya.

Yang tidak disebutkan di sana adalah apakah seluruh keluarga tuan rumah sudah mupakat dengan tujuan pertemuan kita ini agar jangan terjadi bantahan di kemudian hari terhadap apa yang akan dibicarakan maupun yang akan disepakati. Pertanyaan ini harus dijawab tuan rumah, kalau tidak maka perundingan belum dapat dimulai.

Di dalam pertemuan resmi seperti pesta perkawinan, segala yang akan dikerjakan harus dimulai dengan persembahan kata adat terlebih dahulu, misalnya untuk membuka perundingan, untuk memulai makan, untuk minum sesudah makan, untuk minta izin pulang sesudah perundingan, dan sebagainya. Misalnya walaupun makanan telah tersedia secara lengkap di hadapan para tamu, tetapi kalau belum disilakan tuan rumah dengan dipersembahkan kata persembahannya, makanan itu tidak akan disentuh oleh tamu tersebut, meskipun makanan itu akan terletak saja selama beberapa jam. Orang yang berbuat sesuka hatinya saja dalam pertemuan itu dianggap kurang sopan atau kurang adat dan hal ini dapat saja menggagalkan perundingan.

Bersahutan kata-kata adat itu dinamakan dengan istilah : *basisambah*. Orang yang boeh mendatangkan sembah itu tidak boleh sembarangan harus salah seorang dari Penghulu yang hadir sebagai wakil dari tamu atau tuan rumah yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu, seorang Penghulu harus pandai mempersembahkan kata-kata adat.

Pendidikan *basisambah* ini dilakukan secara berangsur-angsur, sama dengan pendidikan adat Minangkabau, karena adat terletak di dalam kata-kata adat itu. Mewariskan adat sama artinya dengan mewariskan kata-kata adat itu kepada pewaris, keterampilan berkata secara pasih dan lancar hanya dapat dikuasai melalui praktek pasambahan adat. Kata adat persembahan itu harus dikuasai secara keseluruhan dan harus diketahui makna yang tersirat secara mendalam. Sangat sukar menjawab kata persembahan yang ditujukan kepada seseorang apabila dia tidak mengetahui arti yang tersirat dari kata yang dikemukakan itu, apalagi kalau seorang Penghulu sengaja memberi kata yang berbelit-belit dalam pembicaraan yang panjang pada hal tujuan-tujuannya hanya sedikit. Kalau tidak arif dalam hal ini maka seorang Penghulu mungkin saja mendapat malu di depan umum, suatu hal yang sangat hina dalam pandangan orang Minangkabau.

Walaupun kata adat persembahan itu banyak yang akan diingat, tetapi bagi orang yang berbakat hal itu tidak merupakan kesukaran, apalagi cara mendapatnya dilakukan secara berangsur-angsur. Yang menjadi inti kata-kata adat itu tidak terlalu banyak untuk diingat, tetapi variasinyalah yang banyak. Biasanya variasi kata yang menyebabkannya enak didengar itulah yang dipermainkan oleh Penghulu dalam basisambah, bahkan kadang-kadang isinya hanya terselip sedikit saja di dalam kembangan kata yang banyak itu sehingga sangat sukar menangkap artinya, tetapi justru di situlah seni persembahan adat.

Sampai sekarang basisambah ini masih dilaksanakan di Sumatera Barat, karena itu sudah sama dengan pelaksanaan upacara adat Minangkabau. Segala sesuatu dalam acara resmi upacara adat itu dilakukan dengan basisambah terlebih dahulu. Basisambah tidak akan hilang

dari Sumatera Barat selama orang masih memegang teguh adat. Sekarang banyak anak muda Sumatera Barat yang mulai tidak tertarik lagi dengan basisambah, karena mereka menganggap kurang praktis dan mubazir, banyak waktu terbuang dengan hasilnya sangat sedikit.

Di samping basisambah, ada jenis sastra lisan Minangkabau yang lain, yaitu yang dinamakan "*bakaba*", yaitu menceritakan suatu masalah atau peristiwa sambil bernyanyi. Pada mulanya yang dikabakan (diceritakan) itu adalah mengenai adat Minangkabau, kemudian cerita rakyat Minangkabau juga ikut dikabakan. Sekarang istilah *bakaba* sama dengan menceritakan suatu cerita rakyat dengan mendendangkannya.

Khusus di daerah Lima Puluh Kota *bakaba* dinamakan dengan istilah *basijobang* dan isi cerita yang dikabakan hanya berasal dari cerita *Anggun Cik Tunggal Si Megat Jabang*. Istilah *basijobang* juga berasal dari nama ini, yaitu dari nama *Jabang*, sehingga kata kerjanya menjadi *Basijobang*.

Pendidikan *bakaba* sama dengan pendidikan yang lain, murid yang berkeinginan menjadi ahli kaba akan selalu mengikuti gurunya ke mana dia pergi berkata. Sementara guru berkaba murid itu menyimak dengan tekun seluruh kata-kata dan irama lagu yang dinyanyikan gurunya, karena dengan jalan itulah dia dapat menirukannya. Lembaga pendidikan khusus untuk itu tidak diadakan, seorang menjadi ahli kaba memerlukan waktu yang lama.

Sekarang di Lima Puluh Kota *basijobang* merupakan salah satu profesi dalam kehidupan masyarakat. Sayang jumlah orang yang pandai *basijobang* sangat sedikit dan tidak berkembang, padahal di dalamnya tersimpan kekayaan adat Minangkabau yang tidak ternilai harganya.

Di samping *basisambah* dan *bakaba* jenis sastra lisan Minangkabau pada waktu dahulu adalah "*berbalas pantun*". Hal ini kebanyakan dilakukan oleh anak muda yang sedang dilanda masa puber, terutama di kalangan muda mudi. Dengan *berbalas pantun* mereka berusaha mengemukakan isi hati masing-masing yang bersifat romantis. *Berbalas pantun* biasanya dilakukan antara pria dari suatu nagari dengan gadis dari nagari lain. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar

untuk bermain saja, bukan untuk bersungguh-sungguh, sekedar buat pengisi waktu senggang saja.

Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa buah di antara pantun itu :

Pria : *"Anyuiklah kayu bakabuang-kabuang,
kayu non datang dari padang,
sakabuang tingga di pulau,
pulau banamo bantuak taji,
tanamlah kacang jo bijonyo.*

*Adik lah nyato nan rang kampuang,
kami lah jaleh nak rang dagang,
kok lai suko bawo bagurau,
kok indo sisiahkan kami,
dagang nak pulang ka hinonyo".*

(hanyutlah kayu berkabung-kabung,
kayu yang datang dari padang,
sekabung tinggal di pulau,
pulau bernama Bentuk Taji,
tanamlah kacang dengan bijinya.

*Adik sudah nyata orang kampung (di sini)
kami sudah nyata orang dagang,
kalau suka bawalah bergurau,
kalau tidak sisihkan (kucilkan) kami,
supaya kembali ke asalnya).*

Gadis *"Kok iyo kayu dari padang,
padang banamo asa mulonyo,
apokoh padang darek sajo,
ataukoh padang basisusuik,
bantangkan malah ateh sago.*

*Kok iyo tuan anak dagang,
dagang dari mano mulonyo,
apokoh dagang larek sajo,
ataukoh dagang bamukasui,
tarangkan malah bakeh ambo."*

(Kalau betul kayu dari padang,
 padangkan bernama asal mulanya,
 apakah padang darat saja,
 atau kah padang padang berkurang-kurang,
 bantangkanlah di atas naga,

Kalau betul tuan anak dagang,
 dagang dari mana asal mulanya,
 apakah dagang dengan ada maksud (tertentu)
 terangkanlah kepada saya).

Pendidikan pantun mudah dilakukan, yaitu dengan langsung mempraktekkan dengan teman bermain, karena yang dipentingkan adalah tujuan dari pantun itu, sampirannya dapat diambilkan dari keadaan yang sedang dihadapi pada waktu itu, sehingga banyak pantun yang dapat dibuat setiap hari. Berbalas pantun ini pada waktu dahulu digamari anak muda, karena merupakan salah satu jalan melepaskan diri dari rasa keterikatan keluarga.

1.2.2.7 Pendidikan lain

Ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan, tata negara dan hukum, sudah diatur dalam adat Minangkabau, karena adat merupakan seluruh pegangan hidup dalam masyarakat. Mewariskan adat sama dengan mewariskan seluruh cara hidup masyarakat kepada generasi berikutnya, yang dilakukan dengan cara tradisional. Lembaga pendidikan khusus, metoda pendidikan, sistem penyampaian pendidikan, guru yang khusus tidak terdapat dalam pendidikan tradisional, semuanya disampaikan secara lisan dan melalui pengalaman yang lama dalam kehidupan sehari-hari. Sistem tradisional merupakan suatu sistem di mana segala aturan dan pengaturan tertentu tidak terdapat. Segala sesuatu dilaksanakan oleh yang mengajarkan menurut kemauannya sendiri.

1.2.2.8 Tokoh Guru

Istilah guru baru dikenal di Minangkabau sesudah masuknya pengaruh Hindu/Budha dan Islam yang di dalam ajaran mereka telah mengenal tokoh guru.

Yang dikenal adalah istilah penghulu atau nini mamak yang merupakan seorang pemimpin, pendidik, hakim, cendekiawan dan alim ulama yang berlaku terhadap anak kemenakannya. Seorang Penghulu adalah seorang guru sejati, karena seluruh fungsi guru sudah dijalankan oleh mereka. Tokoh guru yang pertama dan utama di Minangkabau adalah Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang, tokoh pendiri adat Minangkabau.

Kedua orang pemikir dan pendiri adat itu dihormati dan dimuliakan oleh orang Minangkabau sampai sekarang dengan jalan mengikuti semua ajaran adat yang mereka turunkan. Ajaran pokok kedua tokoh adat itu sampai sekarang masih dipertahankan sebagaimana mulanya, walaupun terdapat sedikit perubahan pada kulitnya saja. Dari kedua mereka itulah segala macam peraturan hidup dan hubungan antara manusia diperoleh dan diterima.

Tokoh guru berikutnya adalah seluruh Penghulu karena mereka itulah langsung menerima warisan kedua Datuk pendiri adat itu sebagai pemegang dan pemelihara adat di Minangkabau. Mereka berkewajiban mewariskan kepada anak kemenakan supaya adat itu dapat dilanjutkan terus-menerus. Seorang Penghulu adalah juga seorang guru yang dapat penghormatan tinggi dalam masyarakat karena menurut adat tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain seorang Penghulu. Mereka adalah orang yang didahulukan selangkah dalam segala hal, orang yang *"tinggi tampak jauh dokek jolong basuo"*, *hujan tampek bataduah, pameh tampak balinduang*.

Pada dasarnya mereka hanya menyampaikan dan melanjutkan yang mereka terima mengenai adat itu kepada generasi berikutnya. Mereka dapat melakukan penyesuaian dengan tidak merubah prinsip adat Minangkabau itu. Untuk penyesuaian itu adat sudah mengaturnya sebagai berikut :

"Sakali aia gadang sekali tapian baranjak" (sekali air bah, sekali tepian beralih). Karena derasnya arus tidak dapat ditahan dan dialirkan oleh sungai sehingga merubah tepinya. Yang berubah hanya pinggirnya saja menurut keadaan yang datang, deras datangnya arus banyak perubahan pinggirnya itu, kecil arus yang datang sedikit pula perubahannya. Adat Minangkabau tidaklah merupakan ajaran adat yang kaku, karena berdasarkan pengalaman yang didapat diadakan

koreksi terhadap sesuatu ketentuan yang telah ada dengan tidak melakukan perubahan terhadap dasar-dasarnya.

Supaya adat tetap segar dan aktual, maka fatwa berikut mengatakan "*mancaliak contoh ka nan sudah mancaliak tuah ka nan manang*" (melihat contoh kepada yang lampau, melihat tuah kepada yang menang). Segala yang akan dilakukan sebaiknya meneladani apa-apa yang telah pernah dilakukan, yang baik diikuti dan yang buruknya dibuang. Adat yang dipakai itu selalu baru dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman.

Dalam penyesuaian itulah mungkin kelihatan dan timbul pemikiran baru dari penghulu yang banyak menimbulkan salah tafsir dengan mengatakan bahwa adat Minangkabau sudah berubah. Tetapi sebenarnya bukanlah perubahan yang terjadi, melainkan penyesuaian sesuai dengan kehendak adat itu yang ditemui dalam fatwa adat : "*Dari niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan, patah tumbuah ilang baganti, pusako baitu juo.*" (Dari nenek turun kepada mamak, dari mamak turun kepada kemenakan, patah tumbuh hilang berganti, namun pusaka demikian juga). Walaupun terjadi penyesuaian dalam tubuh adat, namun adat itu tidak akan berubah dasarnya."Tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas."

Tokoh guru lainnya adalah "mamak", saudara laki-laki ibu dalam satu keluarga yang diangkat menjadi kepala keluarga. Dia bertindak sebagai pendidik, menunjuk mengajari kemenakannya atau anak saudara perempuannya. Tokoh mamak mendapat tempat yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Minangkabau.

Pendidikan tradisional Minangkabau tidak sama dengan keadaan Sumatera Barat yang sekarang, karena pendidikan itu seluruhnya terjadi zaman dahulu.

1.2.3 Perkembangan Pendidikan Adat Minangkabau sesudah masuknya pengaruh Barat.

Semenjak berkuasanya pemerintah Hindia Belanda di Indonesia yang dimulai awal abad ke-19, pengaruhnya terhadap pendidikan adat

Minangkabau besar sekali. Beberapa fungsi adat disesuaikan dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dan kedudukan penghulu dipergunakan untuk kepentingan mereka. Belanda membiarkan berjalannya proses pendidikan adat Minangkabau secara tradisional, tetapi para Penghulu tidak lagi merupakan orang yang terhormat lagi di dalam nagarnya. Mereka sekarang telah menjadi petugas Belanda, yang menjadi bawahan Belanda. Pengaruh ini tidak baik terhadap pendidikan adat Minangkabau anak kemenakan Penghulu itu makin lama tidak mau lagi menghormati Penghulunya, karena mereka menghambakan diri untuk kepentingan Belanda. Dengan berkurangnya pandangan anak kemenakan terhadap dirinya, akhirnya apa yang dikatakan Penghulu itu tidak didengar dan dituruti lagi oleh anak kemenakannya.

Keadaan itu bertambah buruk lagi dengan terjadinya Perang Minangkabau pada abad ke-19 di mana Belanda merangkul sebahagian Penghulu adat untuk menindas anak kemenakannya sendiri. Sebahagian Penghulu dimanja oleh pemerintah Hindia Belanda, sedangkan sebahagian yang tidak mau bekerja sama selalu ditindas.

Di samping itu Belanda menyediakan pendidikan dan kedudukan yang lebih baik dalam pemerintahan Belanda bagi para pemuda yang memihak mereka. Statusnya dalam masyarakat, baik sosial maupun ekonomi agak lebih baik dari sebahagian besar pemuda lainnya, termasuk Penghulunya sendiri. Keadaan demikian makin mengurangi pandangan orang terhadap Penghulu, karena kemenakan yang lebih baik status sosialnya dari mereka sendiri, anak kemenakan itu tidak menghiraukan Penghulunya. Para Penghulu tidak dapat berbuat sesuatu, karena mereka belum tentu dalam menjamin kehidupan anak kemenakannya itu sebaik kehidupan yang diperolehnya dari Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda sengaja merubah beberapa ketentuan adat Minangkabau seperti : "*Kemenakan seperintah mamak*", oleh Belanda dijadikan bahwa seluruh rakyat Minangkabau berada di bawah perintah Hindia Belanda. Peraturan pemerintah nagari harus disamakan dengan peraturan pemerintahan desa yang berlaku di daerah lain. Peraturan adat makin tidak berlaku lagi di daerahnya sendiri, karena

sudah diganti secara berangsur-angsur oleh pemerintah Hindia Belanda.

Adat dengan peraturannya mulai tidak dipatuhi lagi secara sadar oleh sebahagian pendukungnya. Unsur pimpinan masyarakat Minangkabau yang selama ini dihormati mulai tidak dipatahui lagi, karena adanya pihak Belanda yang selalu bersedia memberikan bantuan asal bekerja untuk mereka.

Pengaruh kebudayaan Belanda terhadap adat Minangkabau berlangsung secara paksa. Secara sepiantas lalu memang banyak terlihat perubahan terhadap adat Minangkabau, tetapi pada kenyataannya hal yang berubah hanya menyentuh kulitnya saja. Ketika pemerintah Hindia Belanda dikalahkan balatentara Jepang, kehidupan adat Minangkabau hidup kembali. Sesudah Indonesia merdeka peraturan adat tetap dijalankan, karena pemerintah Indonesia menjamin perkembangan unsur kebudayaan daerah di seluruh Indonesia. Sekarang adat Minangkabau itu hidup dengan subur di tengah masyarakat Sumatera Barat, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan nasional yang masih berlangsung.

1.3 Pengaruh Agama Islam

1.3.1 Pendidikan Islam sebelum Abad ke-17

Corak pendidikan Islam yang pertama di Sumatera Barat sama saja dengan corak pendidikan Islam pertama di daerah-daerah lain di Indonesia. Pendidikan Islam yang pertama itu lebih cocok dinamakan penyebaran agama Islam beserta ajarannya oleh pedagang Islam yang berdagang ke Pesisir Barat Sumatera, termasuk di dalamnya daerah Pesisir Barat.

Antara akhir abad ke-13 dan awal abad ke-16 di pulau Sumatera terdapat kerajaan-kerajaan Islam : Pasai, Perlak, Samudra, dan lain-lain yang semuanya terletak di bagian utara pulau Sumatera. Mulai tahun 1514 berdiri pula Kerajaan Islam Aceh sampai tahun 1904.⁷⁾

7) Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1960, hal. 10.

Pada zaman kejayaan Kerajaan Aceh abad ke-15 dan ke-16, pedagang Aceh menguasai hampir seluruh bandar dagang di Pesisir Barat pulau Sumatera. Pedagang Islam inilah yang menyebarkan agama Islam di Pesisir Barat Sumatera Barat.

Agama Islam menyuruh kepada setiap penganutnya untuk menyampaikan seruan Islam kepada siapa saja dan di mana saja mereka berhubungan. Itulah sebabnya setiap penganut Islam sekaligus merupakan penyebar agama Islam. Untuk menyebarkan agama Islam tidak membutuhkan tempat yang khusus, cukup sewaktu bercakap-cakap secara kekeluargaan.

Pedagang Islam Aceh, di samping melakukan hubungan dagang, sekaligus juga menyebarkan agama Islam yang dilalui dalam beberapa tahap. Mula-mula mereka berusaha mengajak para pemimpin atau para Penghulu suku setempat menjadi penganut Islam, kemudian diikuti oleh rakyat.

Tahap berikutnya dalam penyebaran agama Islam adalah orang yang menjadi relasi dagang mereka, orang yang bertempat tinggal di sekitar tempat mereka. Tidak jarang dilakukan hubungan perkawinan antara pedagang Islam dengan rakyat setempat apabila mereka mau memeluk agama Islam.

Pedagang Islam Aceh, di samping pedagang yang ulet berniaga, mereka juga merupakan orang yang pandai bergaul. Ajaran Islam yang mereka siarkan mereka berikan melalui contoh perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merupakan orang yang sopan-santun, ramah-tamah, menepati janji, mempercayai sesama manusia, adil, pengasih, pemurah, menghormati adat istiadat setempat, berbudi pekerti baik, seperti sifat orang muslim yang disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka merupakan pencerminan dari ajaran agama Islam. Apabila penduduk sudah tertarik dengan kehalusan dan kebaikan tingkah laku mereka itu, baru mereka mulai memberikan ajaran agama Islam, dengan mengucapkan dua kalimat shahadat yang pertama kali. Sesudah itu resmilah orang tersebut menjadi penganut agama Islam dan masalah ibadah selanjutnya tergantung dari orang itu. Penyebaran agama Islam itu terjadi dengan damai dan keadaan yang demikian berlangsung sampai pada bahagian pertama abad ke-17.

Penyebaran agama Islam dilakukan secara besar-besaran pada abad ke-15 dan abad ke-16 di waktu kerajaan Aceh menguasai hampir seluruh perdagangan di Pesisir Barat pantai Sumatera.

1.3.2 Pendidikan Islam di Sumatera Barat pada Akhir Abad ke-17 sampai Pertengahan Abad ke-19.

Pendidikan Islam di Sumatera Barat telah mulai tahun 1680. Kerajaan Aceh merupakan salah satu pusat pengembangan agama Islam serta ajarannya di Sumatera pada abad ke-17. Banyak murid yang datang ke Aceh untuk menuntut dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang Islam, yang datang dari seluruh pelosok Indonesia, dan dari luar negeri.

Salah seorang diantaranya berasal dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat, yang menuntut ilmu pada Syekh Abdulrauf, seorang ulama yang terkenal pada waktu itu di Aceh yang sangat mendalam ilmunya tentang Islam, muridnya datang dari segala penjuru. Setelah murid dari Ulakan tadi tamat belajar, dan diberi gelar Syekh Burhanuddin, yang kembali ke Ulakan dan pada tahun 1680 mendirikan sebuah surau di sana. Surau itu dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Islam, yang banyak didatangi murid dari seluruh daerah Sumatera Barat.

Mula-mula yang menjadi murid Syekh Burhanuddin adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar surau itu, kemudian dari daerah Sumatera Barat lainnya.

Di Sumatera Barat dahulu, orang laki-laki dewasa yang belum kawin tidak biasa tidur di rumah orang tuanya pada malam hari. Tempat yang dipilih adalah balai pertemuan yang terdapat di daerah itu, dan di tempat inilah berkumpul pemuda yang masih bujangan pada malam hari untuk tidur bersama-sama.

Setelah Islam masuk ke Sumatera Barat, tempat itu adat yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, kemudian tempat itulah yang bernama surau kemudian harinya, karena musyawarah dalam bahasa Arab disebut syurau atau asyura menjadi surau saja.⁸⁾

8) Sidi Gazalba, *Mesjid*, C.V. Antara, Jakarta, MCMLXII, hal. 24.

Sidi Gazalba yang telah mempelajari masalah ini secara mendalam mengatakan sebagai berikut :

”Surau atau langgar yang mula-mula, merupakan unsur kebudayaan asli, setelah Islam masuk menjadi bangunan Islam. Dahulu tempat ini bertujuan sebagai tempat bertemu, berkumpul, berapat, dan tempat tidur pemuda-pemuda yang bersifat daerah. Pada masyarakat Mentawai yang masih dalam keadaan asli, bangunan sejenis masih menjalankan fungsi dan kepercayaan asli.⁹⁾

Sesudah agama Islam berkembang di Sumatera Barat surau tidak lagi diambil dari tempat pertemuan itu, melainkan sudah didirikan khusus oleh guru agama Islam (Syekh, Tuanku atau Ulama) dan khusus sebagai tempat pengajian. Fungsinya sebagai tempat tinggal masih tetap, yaitu sebagai tempat tinggal guru mengaji dan tempat bermalam bagi murid laki-laki atau pemuda lainnya.

Tempat yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan merupakan sebuah surau dan merupakan surau yang pertama di Sumatera Barat. Hal itu berdasarkan pada fungsinya yang sudah merupakan sebuah surau yang dikenal pada akhir abad ke-19. Pada waktu itu fungsi surau adalah sebagai pusat pendidikan agama Islam, tempat beribadat serta sebagai tempat tinggal, yang berkembang di Sumatera Barat selama abad ke-17, ke-18, dan ke-19.

Syekh Burhanuddin bukanlah pembawa Islam pertama ke Sumatera Barat, karena jauh sebelumnya sudah ada pedagang Aceh yang menyebarkannya, di samping Syekh Burhanuddin di Ulakan ada pula seorang yang begelar Syekh Burhanuddin yang meninggal di Kuntu Kampar pada tahun 1191. Tetapi Syekh Burhanuddin yang meninggal di Kuntu Kampar itu bukanlah seorang Ulama Islam yang tinggal menetap pada suatu tempat, melainkan berpindah-pindah.¹⁰⁾

Syeh Burhanuddin yang meninggal di Kuntu Kampar itu datang dari tanah Arab melalui Aceh masuk ke Sumatera Barat. Mengajar di Batuhampar - Payakumbuh selama 10 tahun, Kumpulan Bonjol selama 5 tahun, Ulakan selama 11 tahun, Kuntu Kampar selama 15 tahun sampai dia meninggal di sana pada tahun 1191.

9) *Ibid.*, hal. 291

10) Mahmud Yunus, *op. cit.*, hal. 17.

Agama Islam sudah mulai masuk ke Sumatera Barat kira-kira pertengahan abad ke-12 yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin yang meninggal di Kuntu Kampar. Pada abad berikutnya disebarkan oleh pedagang Islam yang datang dari arah utara Sumatera Barat. Pendidikan Islam pada waktu itu belum diselenggarakan pada tempat khusus.

Syekh Burhanuddin Ulakanlah yang pertama mendirikan sebuah suratu sebagai pusat pendidikan agama Islam, yang berkembang di Sumatera Barat.

Sebelum awal abad ke-19 banyak praktek agama Islam yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Antara ajaran agama Islam dengan adat setempat tidak terlihat lagi batasnya yang tegas, seperti pertarungan besar pada acara mengadu ayam yang dinamakan "*menyabuang*",¹¹⁾. Kebiasaan mabuk-mabukan dalam upacara adat, menganggap keramat seorang guru, percaya kepa takhyul, meminta berkat pada kuburan orang terkenal, dan berbuat syirik, jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada tahun 1803 tiga orang haji pulang dari Mekah, yaitu : Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka tidak setuju melihat praktek agama Islam yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Timbul pikiran mereka untuk memperbaharui keadaan tersebut, rakyat harus dididik untuk dapat menjalankan ajaran Islam mereka jalankan dengan keras, langsung memerintahkan penghentian seluruh kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tindakan tersebut menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat, terjadi pembenturan antara kebiasaan yang telah menjadi darah daging anggota masyarakat di satu pihak dengan perintah penghentiannya yang keras di pihak lain. Akhirnya timbullah pertentangan antara golongan adat sebagai pendukung kebiasaan itu dengan golongan agama yang berkeinginan menjalankan ajaran agama Islam secara murni menurut Al-Quran dan Hadis Nabi. Timbullah perang saudara

11) Di Sumatera Barat secara mengadu ayam ada dua macam, yaitu "*menyabuang*", yang mempergunakan taji (pisau kecil dengan ukuran 1 cm dan 5 cm panjang yang tajam kedua belah matanya) pada kakinya. Dalam Menyabung diadakan pertarungan besar di antara jago masing-masing, hampir semua yang hadir menyaksikan ikut bertaruh. Yang kedua dinamakan "*mamupuah*", yaitu mengadu ayam seperti biasa, yang dilaksanakan untuk memenuhi kegemaran yang telah menjadi kebiasaan turun temurun.

antara sesama orang Minangkabau, yaitu antara penganut agama Islam yang berhaluan keras dengan penganut adat yang memegang teguh kebiasaannya. Tetapi yang keluar sebagai pemenang dari perang itu bukan salah dari kedua pihak, melainkan orang Belanda yang sedang berusaha menanamkan kekuasaannya di Sumatera Barat.

Gagasan pembaharuan dari ketiga orang itu ditujukan terhadap penyimpangan ajaran Islam oleh para penganutnya sendiri waktu itu di Sumatera Barat. Tetapi, karena caranya sangat keras, akibatnya sangat lain yang diharapkan, walaupun akhirnya beberapa tujuan pembaharuan tercapai juga, tetapi korban jiwa sudah banyak. Semenjak itu seluruh daerah Minangkabau praktis dapat dikuasai oleh Belanda tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Namun demikian ide pembaharuan dari ketiga orang haji dapat dikatakan sebagai ide pembaharuan pertama di bidang pendidikan Islam di Sumatera Barat.

Selanjutnya ide pembaharuan pendidikan agama Islam kedua datang dari Syekh Ahmad Khatib yang lahir di Bukittinggi pada tahun 1855¹²⁾. Kemudian Syekh Ahmad Khatib menetap di Mekah dan diangkat dan diangkat sebagai Imam Mazhab Syafei di Masjidil Haram serta sebagai guru pendidikan agama. Ide pembaharuan dalam pendidikan Islam tidak dijalankannya sendiri, melainkan diberikan melalui murid-muridnya yang belajar ke Mekah sambil menunaikan ibadah Haji. Di antara muridnya itu terdapat tiga orang pemuda yang penuh semangat, yaitu Abdul Karim Amarullah, Muhammad Jamil Jambek, dan Abdullah Ahmad. Ketiga orang itu berasal dari Sumatera Barat, dari Jawa bernama Ahmad Dahlan yang kemudian menjadi pendiri Muhammadiyah. Ketiga orang murid asal Sumatera Barat itulah yang menjadi pelopor pembaharuan pendidikan Islam di Sumatera Barat dengan cara mereka masing-masing. Tetapi walaupun caranya berbeda tujuannya tetap yaitu pembaharuan dalam pendidikan Islam.

Pada dasarnya pendidikan Islam pada waktu itu terbagi atas dua bagian, yaitu :

- a. Pengajian Al-Quran
- b. Pengajian Kitab

12) Baca karangan Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Cetakan ketiga, Jayamurni, Jakarta 1967, hal. 154-160.

1.3.2.1 Pengajian Al-Quran

Sistem yang dipergunakan dalam pengajian Al-Quran adalah guru duduk di tengah surau sedangkan murid duduk mengelilinginya dalam satu lingkaran atau guru duduk di sebelah ujung surau, murid duduk mengelilingi dalam bentuk setengah lingkaran.

Dalam posisi yang demikian guru menyebutkan pelajaran dan murid mengulangi bersama-sama. Setiap pelajaran diucapkan guru dengan menyanyikan menurut irama lagu pembacaan Al-Quran. Murid secara bersama menirukan apa yang diucapkan gurunya, termasuk irama lagunya.

Pengajian Al-Quran dibagi atas dua bahagian :

1. Tingkat Rendah

- a. Mula-mula murid diperkenalkan dengan huruf Al-Quran seperti alif, ba, ta, tsa, jim, sampai hafal luar kepala, dan sesudah hafal semuanya baru ditunjukkan huruf.
- b. Sesudah murid mengenal huruf semuanya dengan baik, dilanjutkan memperkenalkan tanda baca seperti "garis atas" (a), "garis bawah" (i), "garis depan" (u), "dua garis atas" (an) "dua garis bawah" (in), "dua garis depan" (un), tanda mati, tanda tasdik, tanda pendek, dan tanda panjang.

Mula-mula guru menyebutkan tanda baca tanpa melihat hurufnya dan murid mengulangi yang disebutkan guru, dan sebagai contoh dapat dikemukakan sebutan guru.

guru : alif di atas a
 alif di bawah i
 alif di depan u
 a - i - u

sesudah itu murid mengulangi bersama-sama

guru : alif dua di atas an
 alif dua di bawah in
 alif dua di depan un
 an - in - un dan seterusnya.

Pengenalan tanda baca itu sampai sekarang masih dilaksanakan pada beberapa daerah di Sumatera Barat.

- c. Apabila tanda baca sudah diketahui dan dimengerti oleh murid serta dapat menyebutkannya, pelajaran berikutnya dilanjutkan dengan membaca Juz Amma yang dimulai dengan Al-Fatihah, Surat Annas sampai dengan Surat Waddhuha. Pada pase ketiga sudah mulai diberikan secara perorangan. Di waktu seorang murid mendapat giliran, murid lainnya boleh meneruskan bacaannya beramai-ramai yang diucapkan dengan keras, sehingga suasana pengajian menjadi ribut, tetapi pelajaran dapat berlangsung terus.
- d. Sesudah dapat membaca Juz Amma tanpa melihat Al-Quran, maka barulah dimulai membacaa Al-Quran mulai dari Surat Al-Baqarah (Juz 1) sampai tamat Juz ke-30. Bagi murid yang belum lancar membaca Al-Quran, tidak akan di-khatam (ditamatkan) pengajian Al-Quranya, tetapi bagi murid yang dapat dan lancar membacanya segera dilakukan khatam Quran bagi mereka sebagai tanda tamat pengajian.

2. Tingkat Atas

Sesudah Tingkat Rendah selesai, maka kepada murid diperkenankan melanjutkan pelajaran ke tingkat atas melalui upacara Khatam Quran. Pada Tingkat Atas diajarkan tajwid, yaitu aturan membaca Al-Quran yang betul, lagu pembacaan Al-Quran. Lagu kasidah sebagai pembantu memudahkan mempelajari lagu Al-Quran, dan barzanji. Tamatan Tingkat atas menghasilkan Qari yang baik yang selanjutnya sudah dibolehkan mengajar pada ruang Pengajian Al-Quran.

Pengertian tingkat dalam Pengajian Al-Quran hanyalah sekedar membedakan isi pelajaran saja. Mereka secara keseluruhan mengaji di tempat yang sama dalam satu ruangan, tidak dipisah dalam bentuk kelas. Biasanya murid tingkat atas sebelum memulai pengajiannya sendiri, ikut membantu murid tingkat rendah secara perorangan, artinya mereka merupakan sistem sukarela bagi tingkat rendah.

Tingkat rendah dapat diselenggarakan pada setiap surau, tetapi tingkat atas hanya dapat diselenggarakan apabila pada suatu surau ada Qarinya, yang telah menamatkan pengajian tingkat atas. Setiap pendidikan tingkat atas selalu ada tingkat rendahnya.

Apabila seorang Qari sudah terkenal baik bacaan Al-Quran nya, maka kepadanya akan banyak datang orang belajar baik dari daerah sekitar maupun dari daerah lain di Sumatera Barat.

Di samping mengajarkan membaca Al-Quran, juga diajarkan cara mengerjakan sembahyang, keimanan, juga sifat Tuhan Yang Duapuluh. Pelajaran akhlak juga tidak ketinggalan, yang diberikan melalui kisah dan cerita nabi-nabi.

Lama pengajian Al-Quran tergantung pada kemauan dan kecepatan seorang murid menyelesaikan pelajarannya. Adakalanya seorang murid secara formal sudah menyelesaikan pelajaran, tetapi masih mempunyai beberapa kekurangan, misalnya dalam soal pembacaan dan lagu Al-Quran, murid tersebut dapat saja mengulang kembali pada tingkat yang diinginkannya sampai dia merasa puas dengan hasil yang dicapainya.

1.3.2.2 Pengajian Kitab.

Pengajian Kitab yang dipelajari adalah ilmu Syaraf, Nahu, Fikih, dan Tafsir; yang diajarkan adalah arti dari kalimat Al-Quran tersebut. Cara mengajarkan ilmu tersebut ialah dengan bergantian, mula-mula diajarkan ilmu Syaraf saja. Apabila ilmu ini sudah dikuasai baru diajarkan ilmu Nahu dan kemudian ilmu Fikih.

Murid yang telah tamat Pengajian Kitab, sudah menguasai tentang agama Islam secara mendalam ditambah dengan pengetahuan gramatika bahasa Arab. Hampir semua pelajaran tersebut hafal dengan lancar di luar kepala, termasuk ayat Quran, dan hadis nabi.

Sebagai kriteria buat menentukan berhasilnya seorang murid pengajian Kitab adalah : (1) hafal seluruh materi pelajaran, (2) dapat menyebutkan bahasa Arabnya dengan tepat, (3) dapat mengatakan dan menerangkan artinya, (4) dapat menguraikan maksud dan maknanya bagi kehidupan manusia, (5) lancar berbahasa Arab. Setelah tamat belajar dengan kriteria tersebut mereka diberi gelar Syekh.¹³⁾

13) Kalau diperhatikan ilmu pengetahuan Islam yang dimiliki oleh seorang Syekh pada waktu itu, maka gelar dapat disamakan dengan gelar seorang Guru Besar sekarang.

Sebelum tahun 1900 banyak ulama Islam Sumatera Barat terkenal sebagai hasil pendidikan Islam semacam itu, pengetahuan mereka tentang Islam tidak kalah dengan pengetahuan ulama Islam abad ke-20, bedanya pada cara menerapkan agama dalam kehidupan masyarakat. Di antara ulama Islam Sumatera Barat, yang terkenal sebagai hasil pendidikan Islam sebelum tahun 1900 adalah :

- 1). Syekh Abdullah Khatib, Ladang Lawas, Bukittinggi
- 2). Syekh M. Jamil Tungkar, Batusangkar
- 3). Syekh Tuanku Kolok, Sungayang, Batusangkar
- 4). Syekh Abdul Manaf Padang Ganting, Batusangkar
- 5). Syekh M. Saleh, Padang Kandis, Suliki, Payakumbuh
- 6). Syekh Abdullah, Padang Japang, Payakumbuh
- 7). Syekh Ahmad, Alang Lawas, Padang
- 8). Syekh Amarullah, Maninjau, Bukittinggi ¹⁴⁾.

Di samping menghasilkan ulama besar, pendidikan Islam pada masa ini juga menghasilkan pimpinan masyarakat yang dihormati dan dipatuhi. Untuk mendapat predikat ulama Islam terkenal memerlukan waktu lama, karena harus dipraktekkan dalam masyarakat terlebih dahulu. Penilaian yang diberikan masyarakat itu sukar didapat dengan segera.

Sebagai guru mereka tidak saja mendidik orang lain, tetapi juga anak mereka, yang biasanya juga mejadi ulama besar di kemudian hari. Syekh Ahmad, Alang Lawas, Padang mendidik anaknya Syekh Abdullah Ahmad yang kemudian terkenal sebagai salah seorang tokoh pembaharu pendidikan Islam Sumatera Barat dengan Sekolah Adabiah (*Adabiah School*). Syekh Abdul Karim Amarullah dididik langsung oleh ayahnya Syekh Amarullah, Maninjau. Hampir seluruh Syekh mendidik sendiri anak mereka dan semuanya berhasil dengan baik.

Pada akhir abad ke-19 banyak ulama Islam Sumatera Barat yang belajar ke Mekah dan pada awal abad ke-20 mereka sudah kembali lagi ke Sumatera Barat, dan langsung mengajar di surau yang sudah ada.

14) Mahmud Yunus, *op. cit.*, hal, 44

Sistem pendidikan Islam di Sumatera Barat pada masa ini dinamakan Sistem Pendidikan Surau, karena pusat pendidikannya adalah surau tersebut.

1.3.3 Pendidikan Islam sampai Awal Abad ke-20

Pada akhir abad ke-19 sudah ada ulama Islam Sumatera Barat yang kembali dari Mekah, yang membawa perubahan terhadap pendidikan Islam.

Jumlah mata pelajaran mulai pertengahan abad ke-19 sampai akhir abad ke-19 bertambah banyak dari masa sebelumnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang didapat oleh para Syekh. Cara penyampaian mata pelajaran tidak satu-satu lagi, melainkan sudah diberikan beberapa mata pelajaran sekaligus, seperti sistem sekolah sekarang.

Buku yang dipelajari murid sudah semakin banyak, sebelum pertengahan abad ke-19 hanya dipergunakan satu buku untuk satu mata pelajaran. Sesudah pertengahan abad ke-19 untuk satu mata pelajaran sudah dipergunakan beberapa buah buku pelajaran, sedangkan pada akhir abad ke-19 untuk pelajaran Nahu saja sudah dipergunakan 6 atau 7 buah buku pelajaran.

Mulai pertengahan abad ke-19 sudah banyak Qari tamatan Mekah, sedangkan sebelumnya hampir semua Qari tamatan Sumatera Barat. Qari tamatan Mekah mempunyai murid lebih banyak dari Qari tamatan Sumatera Barat. Penilaian ini hanya didasarkan karena mereka tamatan luar negeri.

Pada dasarnya tidak banyak perbedaan antara Pengajian Al-Quran sebelum pertengahan abad ke-19 dengan akhir abad ke-19. Tetapi pada pengajian kitab terdapat perbedaan besar yang merupakan perkembangan pendidikan Islam. Sebelum pertengahan abad ke-19 jumlah mata pelajaran hanya 4 buah saja, tetapi kemudian menjadi 12 buah, yaitu ilmu Nahu, Syaraf, Fikih, Tafsir, Hadis, Musthalah Hadis,

Mantik, Maani, Bayan, Badik, dan Usul Fikih.¹⁵⁾ Kadang-kadang ditambah lagi dengan ilmu Tasauf.¹⁶⁾

Sebelum akhir abad ke-19 pengajian terdapat dua tempat, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Pada tingkat rendah cara mengajar hampir sama dengan sebelum abad ke-19 : murid diajar satu per satu, dan jumlah mata pelajaran lebih banyak. Guru menyebutkan pelajaran murid mengikutinya dan selajutya menghafalkan seperti yang diucapkan gurunya. Guru yang mengajar pada tingkat rendah adalah guru bantu, yaitu murid tingkat tinggi yang mendapat kepercayaan Syekhnya, biasanya dipanggil "Engkau Muda" atau "Alim Muda" atau "Guru Tua". Yang memakai predikat "Tua" adalah murid yang hampir selesai pendidikan dan dapat bertindak dalam pelaksanaan pendidikan dan dapat bertindak dalam pelaksanaan pendidikan atas nama Syekhnya. "Alim Muda" setingkat di bawah "Guru Tua", sedangkan "Engku Muda" tingkatan guru bantu yang paling bawah.

Pada tingkat tinggi cara mengajar sudah berbeda, dalam dua jam pelajaran guru sudah menerangkan dua atau tiga pelajaran sekaligus. Murid tidak lagi dihadapi satu per satu, melainkan secara bersama-sama dan cara mengajar dinamakan sistem halaqah, guru membaca dan menerangkan pelajaran, sedangkan murid menyimak saja. Sebelum pelajaran dimulai murid diharuskan membaca pelajaran tersebut lebih dahulu dan sewaktu guru menerangkan murid mencocokkan pengertian yang diperolehnya dari hasil bacaan sebelumnya. Keterangan guru lebih penting karena murid menyesuaikan pemahamannya dengan apa yang telah diterangkan. Apabila pemahaman bertentangan dengan keterangan guru, maka keterangan guru itulah yang dipakai. Selama guru mengajar tidak diadakan tanya jawab, murid belajar sendiri, kemudian guru menerangkan arti pelajaran tersebut.

Setiap pelajaran yang diberikan dan diterangkan guru merupakan kelanjutan pelajaran sebelumnya. Dalam sistem halaqah murid disuruh

15) *Nahu* = ilmu yang mempelajari menetapkan tanda baca di akhir kata atau kalimat; *Syaraf* = ilmu yang mempelajari asal-usul suku kata; *Fikih* = ilmu hukum; *Muthalah Hadis* = sanad hadis; *Mantik* = retorika; *Maani* = keindahan bahasa; *Bayan* = cara memberi makna; *Badik* = kehalusan tatabahasa; *Usul Fikih* = dasar-dasar hukum.

16) Muhamad Yunus, *op. cit.*, hal. 46

belajar sendiri dan sekali atau dua kali sehari mereka menyesuaikan pemahamannya dengan keterangan yang diberikan guru sewaktu pelajaran sedang berlangsung pada sistem halaqah ini masing-masing murid memiliki kitab yang sama dengan yang sedang diajarkan gurunya, sehingga mereka dapat menyimak dengan sungguh-sungguh keterangan gurunya.

Biasanya guru membacakan bahasa Arab lebih dahulu, sesudah itu baru menjelaskan artinya dan makna serta maksud pelajaran dalam kehidupan masyarakat. Sementara guru menjelaskan murid mengambil tempat di sekeliling guru atau duduk setengah melingkar di depan gurunya dengan bersila.

Murid tingkat tinggi terdiri dari guru bantu dan murid tingkat rendah yang dianggap mampu mengikuti pelajaran karena sangat pandai. Dasar meletakkan murid di tingkat tinggi adalah kemampuan murid itu bukan pada umur atau lama belajar.

Untuk mengetahui kemampuan seorang murid terhadap penguasaan materi pelajaran, ialah menugaskan murid itu menjadi guru bantu pada tingkat rendah. Apabila kemampuannya telah diakui oleh murid yang diajarnya dan oleh Syekhnya sendiri maka murid tersebut dianggap tamat pelajarannya. Ijazah yang diperolehnya adalah pengakuan orang lain atas kemampuannya menjadi guru atau keahliannya menjelaskan pelajaran kepada orang lain. Pengakuan Syekh merupakan wisuda bagi yang bersangkutan, karena sesudah itu dia sudah resmi tamat belajar.

Dengan bentuk ujian yang demikian sedikit sekali murid yang berhasil, sebahagian tetap tinggal di sana sampai tua atau kembali ke kampungnya untuk menjadi guru mengaji biasa. Namun demikian murid yang begini pada hari tuanya nanti juga akan dapat menjadi seorang Syekh, tergantung dari kemampuannya mengajar atau berdakwah. Gelar Syekh akan diberikan oleh penduduk di tempatnya mengajar atau oleh muridnya. Kadang-kadang gelar Syekh diperolehnya ketika sudah berumur tua sekali, sekedar penghargaan atas jasanya.

Seorang Syekh dalam mengajar tidak menerima gaji, karena mereka mengajar karena Allah semata, bukan untuk mencari penghasilan. Seorang Syekh mendirikan surau atau mengajar biasanya dengan biaya sendiri, kecuali kalau ada sumbangan anak negeri setempat berupa zakat dan fitrah. Tetapi kalau Syekh yang sudah terkenal banyak menerima zakat fitrah, terutama dari bekas muridnya, sehingga dengan zakat fitrah itu, ia dapat memberikan biaya bagi beberapa orang muridnya yang tidak mampu.

Muridnya tidak membayar uang mengaji atau uang sekolah. Segala keperluan mereka, mereka siapkan dan cari sendiri. Bagi murid yang betul-betul tidak mampu atau tidak dibiayai oleh keluarganya, akan menjadi "*pakiah*" yang sekali atau dua kali seminggu meminta derma ke kampung-kampung guna keperluan hidupnya selama mengaji. Kadang-kadang dengan sekali pergi minta derma itu sudah mendapat hasil untuk dua minggu atau sebulan biaya hidupnya. Tetapi pekerjaan "*pakiah*" ini dilakukan apabila memang sudah tidak ada lagi jalan lain. Surau dengan Syekhnya yang sudah terkenal jarang mengizinkan muridnya menjadi *pakiah*, karena zakat fitrah yang diterimanya sudah lebih dari cukup untuk membiayai hidup murid.

Pada masa ini pendidikan Islam masih berpusat di surau-surau sistem pendidikan dinamakan sistem surau seperti sistem pendidikan sebelumnya. Bedanya terletak pada penyelenggaraan tingkat rendah dan tingkat tinggi, keduanya sudah dipisahkan ruang belajarnya, walaupun tidak dibatasi oleh kelas, tetapi jam pelajaran yang berlainan saja. Sistem pendidikan pada masa ini peralihan dari sistem surau kepada sistem sekolah.

Syekh yang menjadi guru agama adalah orang yang sudah kembali dari Mekah dan Mesir yang sudah mulai banyak jumlahnya. Hasil pendidikan Mekah dan Mesir, di samping membawa ilmu pengetahuan ke Sumatera Barat juga membawa buku-buku dan faham baru yang berkembang tentang Islam dan ajarannya. Majalah Al Manar yang terbit di Mesir sudah menjadi langganan Syekh itu dan menjadi bacaan pula bagi muridnya. Dengan demikian pandangan mereka menjadi luas dan mejadi orang yang haus akan sesuatu yang baru. Sistem pendidikan Islam yang selama ini dilaksanakan di Sumatera Barat

mereka pandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sekarang, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan.

Pembaharuan yang mereka inginkan bukan hanya di bidang pendidikan Islam tetapi pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Mereka merupakan orang yang terbuka dan bersedia menerima pendapat orang lain yang lebih baik dari pendapat mereka.

Berbeda dengan hasil pendidikan Islam sebelumnya, bahwa para ulama Islam fanatik dan sukar menerima pendapat orang lain, maka pada masa ini, sebagai hasil pembaharuan pendidikan Islam, mereka sudah berpandangan luas dan bersifat terbuka.

Masa berlakunya pembaharuan ini lebih pendek dari masa periode sebelumnya, tetapi dalam waktu yang relatif pendek itu terjadi dasar-dasar pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena pandangan mereka sudah mulai terbuka dan luas, banyak di antara mereka sudah melihat bagaimana pendidikan Islam dilaksanakan di luar negeri, terutama di Mekah dan Mesir.

Di antara Syekh atau ulama yang dihasilkan pendidikan Islam pada masa ini antara lain adalah :

- a. Syekh Muh. Thaib Umar (1874-1920), Sungayang
- b. Syekh H. Abdullah Ahmad (1878-1933), Padang, pendiri Pendidikan *Adabiah Scholl* di Padang tahun 1909 yang sekarang sudah berkembang mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai ke tingkat SMA.
- c. Syekh H. Abdul Karim Amarullah (1879-1945), Maninjau, salah seorang Pimpinan surau Jembatan Besi yang banyak jasanya dalam pembaharuan pendidikan Islam. Surau itu sampai sekarang masih berdiri dengan Ruang Pendidikan Thawalib Padang Panjang.
- d. Syekh M. Jamil Jambek (1860-1947), Bukittinggi, dengan Surau Tengah Sawah Bukittinggi yang sampai sekarang masih ada dengan nama Mesjid Tengah Sawah.
- e. Syekh H. Sulaiman Ar-Rasuli, Bukittinggi dengan Surau Candung Baso Bukittinggi, sekarang bernama Tarbiah Islamiah.

- f. Syekh H. Ibrahim Musa, Parabek, Bukittinggi yang terkenal dengan Surau Parabek yang sampai sekarang masih ada.
- g. Syekh H. M. Jamil Jaho, Padang Panjang dengan Surau Jaho di Padang Panjang, yang sekarang bernama Tarbiah Islamiah.
- h. Syekh H. Abbas Abdullah, Padang Japang, Payakumbuh dengan Surau Padang Japang yang sampai sekarang masih ada dengan nama Darul Funum Abbasiah.
- i. Syekh H. Abdul Wahid, Tabek Gadeng, Padang Japang, Payakumbuh dengan Surau Tabek Gadang yang sekarang bernama Tarbiah Islamiah.
- j. Syekh M. Saad, Mungkar, Payakumbuh dengan Surau Mungkar.
- k. Syekh H. Mustafa Abdullah, saudara Syekh H. Abdullah Padang Pajang.¹⁷⁾
- l. Syekh Daud Rasyidi (1880-1948)¹⁸⁾.

Itulah beberapa orang Syekh yang dihormati dan dipatuhi serta diikuti ajaran-ajarannya oleh rakyat Sumatera Barat. Surau mereka banyak didatangi oleh orang yang ingin memperdalam ilmu tentang Islam yang datang dari seluruh pelosok Sumatera Barat. Beberapa orang Syekh terkenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat seperti Syekh H. Sulaiman Ar-Rasuli, dan Syekh H.M. Jamil Jambek.

Pendidikan Islam pada masa ini selain melahirkan guru-guru besar di bidang agaman Islam dan pemimpin masyarakat Sumatera Barat, juga melahirkan tokoh pejuang kemerdekaan yang gigih berjuang.

17) Mahmud Yunus, *op. cit.*, hal. 50

18) H.M.D. Datuk Palimo Kayo, *Riwayat Ringkas Daud Rasyidi (1880-1948)* ketikan khusus setebal 11 halaman.

BAB II

PENDIDIKAN BARAT

2.1 Pengaruh Zaman VOC

Tugas utama VOC hanyalah dalam usaha dagang, karena itu masalah pendidikan daerah luar Pulau Jawa kurang mendapat perhatian mereka. Tercatat pada tahun 1779 murid-murid VOC di pantai barat Pulau Sumatera hanya sebanyak 37 orang saja.¹⁾ Sesudah itu tidak ada berita lagi mengenai pendidikan VOC di Sumatera Barat.

Tiga puluh tujuh orang murid yang terdapat pada tahun 1779 di pantai Barat Sumatera menunjukkan kurangnya perhatian mereka terhadap bidang pendidikan, karena jauh sebelumnya mereka juga berkuasa di daerah ini. Selama satu abad berkuasa di daerah itu hanya mempunyai murid sebanyak 37 orang, merupakan suatu pekerjaan yang sebetulnya dihadapi tidak dengan sungguh-sungguh dan memang pokok perhatian VOC pada waktu itu hanya kepada perdagangan.

2.2 Pendidikan Belanda Pada Abad Ke-19

Perusahaan dagang Belanda yang bernama *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tanggal 1 Januari 1800 terpaksa

1) Sumarsono Mestoko dkk., *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Jakarta. hal. 43.

dibubarkan oleh Pemerintah Belanda. Semenjak itu seluruh daerah Indonesia menjadi tanah jajahan Kerajaan Belanda yang diurus oleh suatu badan yang bernama *Aziatische Raad*. Seluruh kekayaan perusahaan VOC dan seluruh hutang piutagnya jatuh ke tangan Kerajaan Belanda yang pada saat itu masih berstatus sebagai *Bataafsche Republiek* yang tunduk kepada Perancis.²⁾ Pemerintah Kerajaan Belanda mengirim Mr. Herman Daendels ke Indonesia sebagai Gubernur Jenderal yang baru pada tahun 1808. Daendels yang terkenal cakap, berusaha mengatur pertahanan Indonesia dengan tangan besi. Tetapi bagaimanapun dia berusaha tidak dapat menahan serbuan Inggris yang pada saat itu merupakan suatu negara yang kuat di dunia. Pertahanan yang telah diatur Daendels dengan mudah dapat dipatahkan oleh Inggris, sehingga Inggris mulai tahun 1811 berkuasa selama lima tahun. Indonesia beralih menjadi jajahan Inggris, di bawah pengawasan Lord Minto, yaitu Gubernur Jenderal Inggris untuk jajahannya di Asia Selatan-Tenggara yang berkedudukan di Kalkuta. Faffles sebagai Wakil Gubernur Jenderal Inggris dengan pangkat Letnan Jenderal yang berkedudukan di Batavia menjadi penguasa di Indonesia sampai 1816.

Tetapi karena perkembangan politik di Eropa yang masih belum stabil, maka tanggal 12 Maret 1816 Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda oleh John Fendall yang menggantikan Raffles.

Sama halnya dengan daerah-daerah lain yang sudah dikuasai oleh Belanda, maka di Sumatera Barat mulai disusun administrasi pemerintahan. Dalam melengkapi tenaga yang cakap menjalankan roda pemerintahan, Belanda mulai mendirikan lembaga pendidikan untuk mendidik tenaga untuk mengerjakan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

Belanda berpendapat untuk memajukan pemerintahan, tenaga bumiputera yang diangkat menjadi kepala pemerintahan berdasarkan keturunan dan kharisma seperti "*Regent*", tidak dapat lagi dipertahankan dan harus segera diganti tenaga yang cakap dan dididik khusus untuk itu. Oleh karena itu, Belanda merasa perlu untuk

2) Prof. Dr. R. Supomo, Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid I, Percetakan Jembatan, Jakarta 1954, hal. 39-40.

mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia khususnya Sumatera Barat.

Tujuan mendirikan lembaga pendidikan oleh Belanda terutama bukan untuk kepentingan orang Indonesia, tetapi sesungguhnya adalah untuk kepentingan mereka, yaitu untuk mengisi jabatan rendah dalam pemerintahan dan untuk mengisi tenaga pada perusahaan swasta Belanda. Belanda mengeluarkan peraturan bahwa yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah maupun kepala daerah setempat seperti Kepala Nagari, harus memenuhi syarat pendidikan menurut ukuran Barat, terutama untuk menjadi Kepala pemerintahan di nagari. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (*onderneming*), pertambangan, dan pabrik diperlukan tenaga terdidik yang cakap tetapi murah. Dengan demikian lembaga pendidikan yang pertama-tama didirikan untuk orang Indonesia adalah lembaga pendidikan rendah.

Hal tersebut sesuai dengan landasan ideal pendidikan pada zaman Hindia Belanda yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah berusaha untuk tidak memihak kepada salah satu agama tertentu.
2. Pendidikan tidak diusahakan untuk dapat hidup selaras dengan lingkungan, tetapi supaya anak didik di kelak kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi untuk kepentingan pemerintah.
3. Sistem persekolahan disusun menurut perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa.
4. Pada umumnya pendidikan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elite sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia.

Berdasarkan tujuan itu mereka mendirikan lembaga pendidikan, yang dapat diterima di sekolah adalah anak golongan tertentu saja, misalnya pemimpin masyarakat atau tokoh terkenal yang disenangi Belanda. Yang dapat diterima di sekolah Belanda adalah anak dari orang yang diharapkan Belanda mau bekerja sama untuk kepentingan

Belanda. Keadaan itu mendorong timbulnya sekolah swasta yang didirikan orang yang kurang menyukai Belanda itu, seperti golongan Islam. Mereka membuka sekolah swasta sebagai reaksi terhadap tindakan Belanda di bidang persekolahan.

Landasan pendidikan di Sumatera Barat semasa pemerintahan Hindia Belanda tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sekolah yang pertama terdapat di Sumatera Barat terletak di kota Padang yang didirikan pada tahun 1856, yaitu "*Gouvernement Inlansche School*" atau Sekolah Kelas Dua.³⁾ Sistem tingkatan Sekolah Kelas Dua diterima pada kelas V yaitu kelas tertinggi menurut ukuran sekarang. Pada waktu itu kelas V itulah yang merupakan kelas terendah, murid yang naik kelas akan memasuki nomor kelas yang makin rendah atau menurun, yaitu naik ke kelas IV, III, II, dan I.

Tiga tahun kemudian Belanda mendirikan pula sekolah di Bukittinggi yang bernama *Kweekschool* atau lebih dikenal dengan nama "*Sekolah Raja*" di Sumatera Barat pada waktu itu, karena itulah satu-satunya sekolah yang tertinggi. Anak-anak yang diterima adalah anak dari orang terpandang, seperti Kepala Nagari, Laras (suatu jabatan yang kira-kira sama dengan *Regent* atau Camat sekarang), atau anak dari pegawai-pegawai Belanda. Anak rakyat biasa tidak akan dapat masuk sekolah ini, walaupun tinggi tingkat kecerdasannya.

Sekolah Raja merupakan sekolah yang dipandang tinggi oleh rakyat Sumatera Barat. Semua murid memakai pakaian yang rapi dengan dasi. Murid Sekolah itu dipandang tinggi kedudukannya oleh masyarakat, apalagi kalau sudah memegang suatu jabatan pada pemerintahan. Murid itu memperlihatkan tingkah laku yang berbeda, mereka menganggap dirinya orang yang mulia di tengah masyarakat. Murid sekolah tersebut membentuk kelompok sendiri dalam masyarakat. Mereka memisahkan diri dari pergaulan masyarakat yang mereka anggap orang rendah yang tidak setaraf dengan mereka. Belanda berhasil menanamkan suatu rasa yang merupakan bibit perpecahan dalam masyarakat, yang kemudian memperlihatkan diri dengan nyata.

3) A. Mukhsis Dt. Bandaro Basa, *Perkembangan Pendidikan di Sumatera Barat* (belum dicetak), hal. 123.

Tetapi terlepas dari itu, adanya Sekolah Raja merupakan suatu keuntungan dan kesempatan baik bagi masyarakat Sumatera Barat. Tidak semua murid mau memenuhi keinginan Belanda, banyak di antara mereka dapat melihat kenyataan bahwa mereka disekolahkan terutama untuk kepentingan Belanda. Pelajaran yang mereka peroleh membuka mata mereka terhadap keburukan pemerintahan Belanda di Indonesia. Bacaan mereka tentang keadaan dunia luar menyebabkan mereka mengetahui bagaimana baiknya keadaan bangsa yang tidak terjajah.

Didirikannya Sekolah Raja adalah untuk mendidik guru, tamatan sekolah itu akan ditugaskan menjadi guru pada sekolah yang dibuka Belanda kemudian di Sumatera Barat, tenaga guru Belanda kurang untuk memenuhi jumlah sekolah. Untuk menampung pembukaan sekolah pemerintah Belanda mempersiapkan guru lebih dahulu.

Perkembangan Sekolah Raja makin lama makin ditingkatkan mutunya oleh Belanda. Selama sebelas tahun dari pembukaannya bahasa Belanda belum diajarkan, karena murid yang diterima pada mulanya anak yang belum kenal bahasa Belanda. Pada tahun 1865, bahasa Belanda mulai diajarkan, murid sekolah tersebut bertambah bangga, karena mereka sudah pandai mempergunakan bahasa asing. Derajat mereka di tengah masyarakat bertambah tinggi. Pada tahun 1871, bahasa Belanda sudah merupakan bahasa wajib yang harus dipelajari oleh semua murid dan harus lulus dengan baik, tamatan Sekolah Raja harus padai berbahasa Belanda sehari-hari. Selanjutnya empat belas tahun kemudian bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di Sekolah Raja, sekolah itu bertambah tinggi dipandang masyarakat, mereka mempersamakan murid dengan orang Belanda. Dengan berkembangnya kepandaian berbahasa Belanda di sekolah itu, maka penerimaan muridnya makin ditingkatkan, saringan masuk makin diperketat.

Sewaktu bahasa Belanda sudah merupakan bahasa Wajib di Sekolah Raja, sekolah lain yang lebih rendah tingkatannya sudah banyak didirikan oleh Belanda seperti sekolah : *Valksschool*, *Vervolgschool*, *Sekolah Kelas Satu*, dan beberapa sekolah kejuruan dari *Vervolg School*, tetapi semenjak awal abad ke-20 yang dapat

diterima masuk Sekolah Raja hanya murid yang berasal dari tamatan Sekola Kelas Satu.

Dengan bertambah tingginya mutu masuk Sekolah Raja itu, bertambah tinggi pula pandangan masyarakat. Terhadap sekolah yang lebih rendah tingkatannya, sudah tinggi pandangan masyarakat, apalagi terhadap Sekolah Raja.

Bagi murid Sekolah Raja yang sudah bekerja pada pemerintah Belanda berkecukupan hidupnya hanya dari gaji yang diterima. Belanda seolah-olah memberi angin kepada mereka dengan mengangkat derajat mereka. Kenyataannya keadaan ini memang disengaja oleh Belanda untuk tetap menanamkan rasa perpecahan di kalangan rakyat.

Tamatan Sekolah Raja juga dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengisi jabatan pada pemerintahan atau dipekerjakan di tempat lain yang ditentukan oleh Belanda. Dengan demikian tamatan Sekolah Raja makin mendapat angin, karena mereka juga mulai dapat memegang kekuasaan pemerintahan, walaupun kekuasaan itu bukan menentukan.

Tamatan Sekolah Raja juga diangkat sebagai jaksa pada pengadilan Belanda (*Landraad*). Mereka itu bukan saja ditempatkan di Sumatera Barat, tetapi juga di daerah lain di Sumatera seperti Medan, dan Palembang.

Dari 28 orang tamatan Sekolah Raja angkatan pertama, hanya 12 orang saja yang dipekerjakan sebagai guru, yang selebihnya dipekerjakan pada berbagai bidang pemerintahan. Belanda membutuhkan tenaga bukan guru jauh lebih banyak dari tenaga guru. Tamatan Sekolah Raja juga diangkat sebagai pengawas gudang, pegawai perusahaan dagang Belanda.

Tamatan Sekolah Raja tidak kalah pintar dari bangsa Belanda, semua tugas yang diberikan kepada mereka dapat diselesaikan dengan baik. Keanan itu menimbulkan rasa harga diri mereka, menimbulkan kesadaran dan menghapus perasaan rendah diri. Di bidang administrasi pemerintahan hasil kerja orang Sumatera Barat lebih baik dari orang Belanda.

Akibat sampingan dari dibukanya sekolah Belanda adalah munculnya golongan terpelajar dengan hati dan mata yang telah terbuka melihat kepincangan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda selama ini di Indonesia. Mereka dapat melihat kemelaratan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan menumbuhkan cara berfikir yang kritis. Timbul daya kritik yang tajam terhadap pemerintah Belanda di Sumatera Barat mengenai adanya kemiskinan dan kesengsaran hidup masyarakat Sumatera Barat yang oleh Belanda selama ini dидiamkan saja. Daya kritik itu mereka lontarkan pada bangsa asing yang sedang berkuasa dan terhadap pelaksanaan adat Minangkabau yang dilakukan oleh para pemimpin adat. Walaupun mereka sudah merupakan orang terdidik, tetapi dalam struktur adat Minangkabau mereka hanya tergolong kepada anak kemenakan yang harus patuh kepada mamaknya yang belum mendapat pendidikan Barat.

Pengaruh lain adalah timbulnya kegairahan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, karena dengan ilmu yang mereka dapat di sekolah yang masih rendah saja sudah mendatangkan manfaat pada mereka, apalagi kakau dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bertambah besar, kalau perlu keluar daerah Sumatera Barat seperti ke Jawa atau keluar negeri sekalipun. Ongkos pendidikan sudah cukup dari gaji yang mereka terima, sedangkan beberapa fasilitas lain akan diperoleh, karena mereka adalah pegawai pemerintah Hindia Belanda.

Dari mereka yang berfikir maju itu lahir pejuang kemerdekaan Indonesia yang rela berkorban untuk kepentingan kemerdekaan. Mereka inilah yang akan menjadi pelopor mendobrak kekuasaan Belanda dari Indonesia. Pada waktu itu mereka hanya dapat berdiam diri saja, karena jumlah mereka belum banyak dan tidak semua tamatan Sekolah Raja yang berfikiran maju demikian. Banyak juga di antaranya yang betul-betul bekerja dengan Belanda dan tidak mau ikut dengan perjuangan bangsanya.

Tujuan Belanda pada mulanya mendirikan sekolah hanyalah untuk memantapkan administrasi pemerintahan yang memerlukan tenaga terdidik. Kepada mereka juga diharapkan untuk menjadi golongan yang akan muncul menentang adat Minangkabau dan kekuatan

golongan agama Islam dalam masyarakat Sumatera Barat yang telah merupakan suatu kekuatan yang menghalangi maksud Belanda menanamkan kekuasaan. Mereka dipersiapkan dengan pendidikan Barat yang bertentangan dengan hidup golongan adat dan kaum agama di Sumatera Barat. Tetapi kenyataannya, mereka mulai dapat melihat keburukan Belanda dan kesengsaraan hidup bangsanya.

Pada saat itu mereka terpaksa diam saja, karena mereka belum merupakan golongan yang kuat yang dapat meruntuhkan kekuasaan Belanda yang telah tertanam kuat di Sumatera Barat. Pada lahirnya mereka merupakan petugas pemerintah Belanda, tetapi pada batinnya mereka merupakan embrio kekuatan baru yang pada saatnya muncul menjadi pelopor dalam perjuangan. Pada akhir abad ke-19 sudah terlihat munculnya embrio pelopor kemerdekaan yang berasal dari anak asuhan Belanda.

BAB III

PENDIDIKAN PADA ABAD KE-20

3.1 Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda

Sampai dengan akhir tahun 1917 di Sumatera Barat Sekolah Raja merupakan sekolah tertinggi. Di samping Sekolah Raja sekolah lain juga dibuka, tetapi jumlahnya masih terbatas. Lokasinya hanya meliputi Kota Padang dan Bukittinggi, sedangkan pada kota-kota lain belum dibangun sama sekali. Pemerintah Hindia Belanda dalam mendirikan sekolah memperhitungkan sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah di Sumatera Barat dengan berangsur-angsur walaupun rakyat sangat membutuhkan pendidikan tersebut, terutama yang tinggal di desa-desa. Bagi mereka untuk pergi belajar ke Bukittinggi dan Padang tidak mungkin, karena kehidupan belum memungkinkan. Biaya sekolah belum terjangkau oleh rakyat biasa, dan dengan demikian orang yang mendapat pendidikan hanya terbatas.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Belanda pada tahun 1848, ialah setiap keresidenan di Indonesia harus didirikan sebuah sekolah dasar untuk "Bumiputra". Di Sumatera Barat peraturan itu baru dijalankan pada tahun 1953 dengan mendirikan sebuah Sekolah Kelas Dua di Padang. Peraturan berikutnya pada tahun 1892 menetapkan bahwa Sekolah Dasar untuk golongan Bumiputra harus didirikan pada setiap ibukota Keresidenan, Kabupaten, Kewedanaan, dan pada pusat

kegiatan kerajinan, perdagangan atau tempat yang dianggap perlu. Ketentuan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat, karena baru pada tahun 1912 didirikan *Volksschool* yang pertama untuk daerah Sumatera Barat. Sekoah ini tingkatnya lebih rendah dari Sekolah Kelas Dua yang telah didirikan di Padang, karena tingkatan pendidikannya hanya terdiri dari tiga tahun. Di Sumatera Barat *Volksschool* lebih dikenal dengan nama Sekolah Desa. Sekolah yang harus didirikan pada setiap ibukota Keresidenan, Kabupaten, Kewedanaan, dan lain-lain bukanlah Sekolah Desa itu, melainkan Sekolah Kelas Satu, yang diperuntukan bagi anak pemuka masyarakat, tokoh terkemuka, atau anak orang terpandang.

Vervolgschool pertama kali didirikan di Sumatera Barat baru tahun 1916, terutama pada tempat yang sudah ada beberapa *Volksschool*. Dengan dibukanya *Sekolah Sambungan*, yaitu nama *Vervolgschool* di Sumatera Barat, maka Sekolah Desa yang semula hanya untuk tiga tahun ajaran dijadikan dua tahun, sesudah itu mereka dapat melanjutkan di *Sekolah Sambungan*. Walaupun teorinya tamatan Sekolah Desa dua tahun dapat melanjutkan ke Sekolah Sambungan, namun kenyataannya yang dapat melanjutkan hanya anak orang yang dipilih, anak desa yang dapat melanjutkan ke Sekolah itu terbatas sekali.

Pada tahun 1916 Sekolah Raja menerima calon murid dari tamatan *Vervolgschool*, karena semejak tahun 1910 Sekolah Kelas Satu sudah didirikan, walaupun jumlahnya sedikit. Hal ini makin menyempitkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi orang kebanyakan di Sumatera Barat, lebih-lebih sekolah yang agak tinggi tingkatannya. Belanda masih tetap membiarkan sebahagian besar orang Sumatera Barat tidak mendapat pendidikan. Politik Etis tidak dijalankan secara baik di Sumatera Barat oleh Belanda.

Namun demikian pada tahun 1916 dibuka *Normaalschool* di Padang Panjang, terutama bagi anak Sekolah Desa yang tidak dapat lagi melanjutkan ke Sekolah Raja. Tiga tahun sesudah didirikan Sekolah Normal didirikan pula Sekolah Normal Khusus untuk wanita pada tahun 1921 dengan mengambil tempat di Padang Panjang. Kemudian didirikan pula sebuah sekolah dengan nama *Schakelschool* yang pertama, lama tahun ajarannya 5 tahun dengan memakai bahasa Belanda adalah sebagai bahasa pengantar :

Urutan pendirian sekolah di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut :

- 1853 : didirikan pertama kali sekolah di Padang yaitu *Gouvernements Inlandsche School* (Sekolah Kelas Dua).
- 1856 : di Bukittinggi didirikan *Kweekschool* yang lebih dikenal dengan nama Sekolah Raja.
- 1910 : Didirikan pertama kali *Gouvernements Inlandsche de Eerste Klasse* (Sekolah Kelas Satu).
- 1912 : Didirikan *Volkschool* yang pertama kali yang terkenal dengan nama Sekolah Desa.
- 1916 : Buat pertama kali dibuka *Vervolgschool*. Juga didirikan pertama kali *Normaalschool* di Padang Panjang.
- 1918 : Didirikan Sekolah Normal khusus untuk wanita di Padang Panjang.
- 1921 : Didirikan *Schakelschool* yang pertama di Padang Panjang.

Walaupun Belanda agak terlambat mendirikan sekolah, namun pada awal abad ke-20 sudah banyak terdapat sekolah, terutama sekolah Kelas Dua.

Untuk mendapatkan gambaran sekolah di Sumatera Barat dapat dilihat pada daftar berikut ini :

Sekolah di	Jumlah Murid		Perbandingan tiap 100 laki-laki
	Laki-laki	Perempuan	
Padang, Sekolah No. 1	196	18	9
Padang, Sekolah No. 2	222	7	3
Padang, Sekolah No. 3	203	17	8
Padang, Sekolah No. 4	211	10	5
Padang, Sekolah No. 5	215	9	4
Tarusan	193	16	8
Asam Kumbang	67	7	10
Painan	123	15	12
Kambang	209	7	3

1	2	3	4
Balai Selasa	212	17	8
Indrapura	204	—	—
Padang Panjang	222	29	13
Kayu Tanam	117	25	14
Pariaman	209	47	22
Bukittinggi yang tinggal di luar	185	22	12
Bukittinggi	174	47	27
Palembayan	176	13	7
Matur	210	56	27
Maninjau	239	56	23
Kota Kecil	176	3	2
Lubuk Basung	154	25	10
Tiku	192	19	10
Lubuk Sikaping	229	34	15
Bonjol	194	31	16
Rao	88	7	8
Talu	180	28	16
Sasak	147	28	19
Air Bangis	123	26	21
Payakumbuh	125	37	17
Pakon Rabaa	127	16	13
Suliki	195	18	9
Kota Baharu	61	4	7
Bangkinang	125	3	2
Solok	174	28	16
Singkarak	145	12	8
Sirukam	136	5	4
Alahan Panjang	195	18	9
Muara Labuh	173	14	8
Sawah Lunto	167	31	19
Tanjung Ampalu	197	18	9
Sijunjung	230	29	13
Batusangkar	270	35	13

1	2	3	4
Simabur	145	4	3
Buo	194	14	7
Balai Tengah	165	21	13
Jumlah	8144	924	11=5
<i>Sekolah Kelas Satu</i>			
Padang	189	19	10
Bukittinggi	159	31	19
Payakumbuh	140	29	14
Solok	167	19	11
Jumlah	657	89	14
Total	8801	1015	11½ = 12 ¹⁾

Berdasarkan kutipan di atas dapat dilihat bahwa pada abad ke 20, tepatnya menurut keadaan tanggal 31 Desember 1913, Sekolah Kelas Dua, Kelas Satu sudah banyak terdapat di Sumatera Barat, terutama Sekolah Kelas Dua. Tetapi kalau melihat jumlah murid sebanyak 9816 orang belum mencerminkan kemajuan. Sesudah 60 tahun sekolah pertama didirikan masih belum sampai setengah prosen (0,49%) penduduk Sumatera Barat yang mendapat pendidikan rendah. Jika jumlah murid kelas rendah itu ditambah dengan jumlah murid kelas yang lebih tinggi, akan mencapai angka setengah prosen saja.

Untuk dapat mendirikan Sekolah Desa, yang derajatnya lebih rendah dari Sekolah Kelas Dua nagari yang berkeinginan, harus menyediakan persyaratan yang berat, seperti mempersiapkan tanah, gedung, perabot, dan alat sekolah serta gaji guru. Persyaratan ini sangat berat bagi nagari pada waktu itu, jangankan membangun sebuah sekolah untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang berada di sekitar tempat tinggal mereka sudah terasa berat. Nagari yang sanggup

1). Ny. Maria Ulfah Santoso SH dan Dr. Ny. T.O. Ihromi SH. MA., Ed., *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Gajah Mada University Perss, 1978, hal.222-223.

mendirikan sekolah pada waktu itu sekarang menjadi ibu kota Kecamatan/Kabupaten. Dari dahulu tempat itu merupakan tempat yang sudah maju dan pusat keramaian atau pusat kegiatan dari beberapa nagari. Baru nagari yang mendirikan sebuah sekolah tidak merupakan beban yang berat, karena dapat dipikul secara bersama-sama.

Di samping sekolah tersebut didirikan juga sekolah khusus untuk orang Cina dengan nama *Hollands Chinese School* (HCS) dan *Ambonsche School* untuk orang Ambon yang tinggal di Sumatera Barat pada waktu itu, kedua sekolah tersebut terdapat di Padang. Orang Ambon yang tinggal di Padang karena menjadi serdadu Belanda, sedangkan orang-orang Cina adalah orang yang telah menetap di daerah ini. Pada waktu itu mereka mendapat perlakuan yang agak baik dibandingkan dengan orang Sumatera Barat karena mereka banyak menolong orang Belanda dan juga sifat orang Cina di Sumatera Barat selalu memihak yang sedang berkuasa. Orang Cina diizinkan oleh pemerintah Hindia Belanda membuat Pendidikan sendiri sesuai dengan kebiasaan leluhur mereka, hanya mereka diharuskan memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah itu.

Sifat dan ciri pendidikan zaman Hindia Belanda bersifat intelektualistis dan verbalisme. Sifat intelektualisme sesuai dengan sistem pendidikan yang dikenal Belanda pada waktu itu, sedangkan sifat yang verbalisme untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan terhadap bangsa Indonesia, meniru tanpa memikirkan baik buruknya. Walaupun Belanda tidak sungguh-sungguh untuk mendidik bangsa Indonesia, tetapi dengan hasil pendidikan itupun pada akhirnya Belanda dapat dikalahkan.

Hollandsch Inlandsche School (HIS) didirikan di Padang dan Bukittinggi, orang Belanda dan Indonesia yang berasal dari orang bangsawan, pegawai Belanda atau orang yang terpandang dalam masyarakat Sumatera Barat, seperti keluarga Tuanku Laras, Demang dan Jaksa.

Pendidikan rendah yang diselenggarakan Belanda di Sumatera Barat, pada umumnya dapat dibagi sebagai berikut :

1. Yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar :

- a. Sekolah Rendah Eropa (ELS) yang diperuntukkan bagi orang Belanda, keturunan Belanda, orang Timur Asing, dan orang-orang terkemuka.
- b. Sekolah Cina-Belanda (HCS) khusus untuk orang keturunan Cina dan boleh juga keturunan Timur Asing.
- c. Sekolah Bumiputera-Belanda (HIS) untuk keturunan Indonesia asli yang dipilih menurut asal keturunannya.

Sekolah tersebut di atas termasuk Sekolah Kelas Satu dan lama belajarnya 7 tahun.

2. Yang memakai bahasa daerah (Melayu) sebagai bahasa pengantar:
 - a. Sekolah Bumiputera (*Inlandsche School*) yaitu Sekolah Kelas Dua yang lama pendidikannya 5 tahun.
 - b. Sekolah Desa (*Volks School*) lama pendidikannya 3 tahun.
 - c. Sekolah Sambungan (*Vervolgschool*) yaitu lanjutan dari Sekolah Desa lama pendidikannya 2 tahun.

Semua jenis sekolah itu diperuntukkan bagi orang Indonesia atau Bumiputera.

3. Sekolah Peralihan (*Schakelschool*) yaitu peralihan dari Sekolah Desa 3 tahun ke HIS 7 tahun.²⁾

Pada waktu itu oleh Belanda penggolongan masyarakat itu dilakukan atas dasar keturunan dan status yang dibagi sebagai berikut:

1. Pembagian penduduk menurut hukum tahun 1848 :
 - a. Golongan Eropa
 - b. Golongan yang dipersamakan dengan Eropa
 - c. Golongan Bumiputera
 - d. Golongan yang dipersamakan dengan Bumiputera

Pada tahun 1920 disederhanakan sebagai berikut :

- a. Golongan Eropa
- b. Golongan Bumiputera
- c. Golongan Timur Asing

2). Sumarsono Mestoko dkk., *Pendidikan di Indonesia Dari Zaman ke zaman*, Dep. P dan K BP3K, Jakarta, hal. 66.

2. Pembagian penduduk menurut keturunan dan status :
 - a. Golongan Bangsawan (Aristokrat) dan Pemimpin Adat
 - b. Golongan Pemimpin Agama
 - c. Golongan Rakyat Biasa

Ketiga golongan ini terdiri dari orang Indonesia asli.³⁾

Berdasarkan penggolongan inilah pendidikan diatur oleh Belanda, masing-masing golongan sudah tertentu sekolah yang boleh dimasukinya. Golongan Bumiputera tidak boleh masuk ELS dan HCS, tetapi sebaliknya Golongan Eropa boleh saja masuk ke mana mereka suka, hanya saja biasanya mereka merasa hina bergaul dengan golongan Bumiputra. Mereka sengaja memelihara jarak dengan golongan Bumiputra dengan memasuki sekolah yang khusus buat mereka.

Kemudian, di Payakumbuh didirikan sekolah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang lama pendidikannya 3 tahun atau ada juga yang 4 tahun. Sekolah ini Sekolah Dasar yang diperluas atau juga setingkat dengan SMP sekarang. Selanjutnya juga dibuka Sekolah Menengah Umum yang *Algemeene Middelbare School* (AMS) yang lama pendidikannya 3 tahun pula. Sekolah ini boleh dimasuki oleh Golongan Bumiputra atau Golongan Timur Asing.

Di Sumatera Barat sekolah yang paling tinggi pada waktu itu adalah AMS. Di samping sekolah umum juga dibuka sekolah Kejuruan, seperti Sekolah Pertukangan dan Sekolah Pertanian di Bukittinggi, Sekolah Teknik di Padang dan Bukittinggi, sekolah Kejuruan Wanita di Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh.

3.2 Pendidikan Pergerakan Nasional

3.2.1. Motivasi

3.2.1.1 Motivasi Nasional

Pendirian sekolah menimbulkan golongan baru di dalam masyarakat Sumatera Barat, yaitu "Golongan Intelektual Barat", yang merupakan orang cerdas pandai. Kebanyakan mereka bekerja pada

3). *Ibid.*, hal. 65-66

pemerintahan Belanda dan mendapat beberapa fasilitas. Pada dasarnya mereka tidak memperoleh perlakuan yang wajar dari pemerintah Hindia Belanda. Mereka adalah aparat bagi Belanda dalam memantapkan pemerintahan dan memperkuat kedudukannya.

Di antara golongan Intelektual Barat itu ada yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan Belanda dan hidup menurut cara orang Belanda.

Sementara itu ada golongan yang tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda dan menentang kekuasaan Belanda dan orang Barat. Tetapi sebaliknya mereka mengagungkan adat kebiasaan dan kebudayaan Timur. Dari golongan inilah muncul tokoh pergerakan nasional Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tidak puas melihat sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda, walaupun telah diselenggarakan pendidikan untuk rakyat. Mereka mengharapkan pendidikan yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan rakyat. Pendidikan Barat belum tentu sesuai bagi rakyat Indonesia. Apa yang datang dari Barat itu tidak selamanya selaras dengan kehidupan rakyat Sumatera Barat. Sebaiknya pendidikan yang diberikan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pendidikan yang mereka dambakan itu lebih terasa lagi kebutuhannya setelah melihat usaha yang dilakukan beberapa pemimpin di Jawa yang mendirikan sekolah swasta sebagai reaksi terhadap ketidakcocokan unsur pendidikan Barat yang dilaksanakan di Indonesia. Keinginan itu tidak mungkin tercapai kalau sekiranya bangsa Belanda masih berkuasa karena itu, cara memperoleh pendidikan yang baik harus menyingkirkan bangsa Belanda dari Indonesia. Karena pada waktu itu kekuasaan Belanda masih kuat, maka usaha pertama mereka adalah menyusun kekuatan dari orang yang sehaluan dengan tujuan terakhir kemerdekaan Indonesia. Sementara itu mereka berusaha agar rakyat Sumatera Barat mendapat pendidikan dengan sebanyak-banyaknya.

Keinginan yang demikian melahirkan pendidikan Nasional yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia. Golongan ini memperjuangkan nasib untuk mendapat kehidupan yang layak seperti bangsa lain.

3.2.1.2 Motivasi Keagamaan

Semenjak Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke luar Sumatera Barat oleh pemerintah Belanda, maka rakyat kehilangan seorang pemimpin yang mereka hormati dan cintai, lebih-lebih sebagai pemimpin agama. Namun demikian menjelang akhir abad ke-19 orang Sumatera Barat telah diizinkan menunaikan ibadah haji ke Mekah.

Pada waktu itu di Mekah ada seorang Sumatera Barat yang telah lama bermukim di sana dan menjadi salah seorang guru besar di bidang agama Islam, yang bernama Syekh Akhmad Khatib. Beliau selalu memberi petunjuk kepada orang Sumatera Barat yang menunaikan Rukun Islam ke lima itu ke Mekah tentang peraturan agama Islam dan pendidikan Islam. Banyak pemuda Sumatera Barat yang naik haji pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang menjadi murid Syekh Akhmad Khatib di Mekah. Di samping menunaikan rukun Haji mereka juga bermukim di sana selama beberapa tahun sambil menuntut ilmu pengetahuan tentang Islam secara lebih mendalam. Setelah mereka pulang ke Sumatera Barat, mereka melihat pendidikan Islam berbeda dengan yang diajarkan oleh Syekh Akhmad Khatib. Pendidikan Islam dengan sistem halaqah tidak akan mendatangkan kemajuan kepada umat Islam Sumatera Barat. Oleh karena itu, timbul niat mereka untuk mengadakan perbaikan dan pembaharuan di bidang pendidikan Islam Sumatera Barat.

Di antara mereka yang pulang dari Mekah yang menonjol antara lain adalah Syekh Haji Abdullah Ahmad, Syekh H. Abdul Karim Amarullah, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dan Syekh Daud Rasyidi. Mereka merupakan pembaharuan dalam Pendidikan Islam di Sumatera Barat. Walaupun cara mereka ada yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mengenai pembaharuan pendidikan dari sistem halaqah atau sistem surau ke sistem sekolah dengan tetap berdasarkan pada agama Islam sebagai pokok pendidikan. Dari pembaharuan yang dimulai pada awal abad ke-20 itu lahir pendidikan Islam yang bercorak nasional, seperti Sumatera Thawalib, Sekolah Diniah, Sekolah Adabiah, dan sekolah yang dibina oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Perti dan Permi.

Dalam pada itu orang Sumatera Barat yang sebahagian besar menganut agama Islam masih menjalankan praktek yang sebetulnya dilarang oleh agama Islam. Apabila keadaan yang demikian tetap dibiarkan, maka umat Islam Sumatera Barat tetap tertinggal dari perkembangan zaman. Bagi para pembaharuan perkembangan Agama Islam dengan pergerakan kemerdekaan, merupakan perpaduan yang menimbulkan semangat melaksanakan pembaharuan di bidang pendidikan Islam. Mereka melihat hasil pendidikan Barat yang diberikan pemerintah Hindia Belanda tidak begitu mendatangkan manfaat, hasil pendidikan itu telah menghilangkan moral ke-Timuran. Keadaan itu jika dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan kehidupan orang Sumatera Barat yang pada umumnya menganut agama Islam. Oleh karena itu, mereka berusaha mengimbangi dengan mengadakan pembaharuan pendidikan Islam bagi anak Sumatera Barat. Pendidikan Islam tersedia untuk semua anak, baik mereka yang tergolong berpangkat, pegawai Belanda, maupun berasal dari orang kebanyakan. Supaya dapat dengan segera memberikan pendidikan menurut cara Barat, mereka memberikan kemudahan dalam memasuki sekolah Islam tersebut seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dengan demikian sekolah yang bercorak Islam dengan cepat dapat berkembang ke seluruh daerah Sumatera Barat sampai ke daerah yang terpencil sekalipun. Itulah sebabnya perkumpulan politik Islam yang mengasuh sekolah mendapat sambutan dari rakyat Sumatera Barat.

Usaha dari tokoh pembaharu pendidikan Islam itu mendapat dukungan dan sambutan dari masyarakat Sumatera Barat, karena sudah lama mereka nantikan.

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak menaruh kecurigaan kepada usaha ini, karena kelihatannya hanya bergerak di bidang pendidikan. Kemudian setelah mereka mengikuti kegiatan politiknya, barulah langkah mereka itu dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda.

Pendidikan Pergerakan Nasional di Sumatera Barat dimulai dengan lembaga pendidikan Islam yang dipelopori oleh Syekh-Syekh Islam, yaitu ulama Islam yang telah membawa faham baru dari Mekah dan Mesir. Sedangkan lembaga pendidikan pergerakan nasional yang bukan bercorak Islam kemudian munculnya di Sumatera Barat.

3.2.2 Kelembagaan

3.2.2.1 Sekolah Adabiah

Pendidikan Islam sebelum tahun 1909 dilaksanakan dengan sistem surau tanpa diadakan pembahagian kelas yang terpisah serta belum mempergunakan meja, kursi, papan tulis, kapur, dan lain-lain seperti yang dipergunakan dalam sekolah saat ini. Murid duduk bersila di sekitar atau di hadapan guru, semua murid terdiri dari laki-laki saja dan belum ada murid perempuan.

Mulai tahun 1909 keadaan tersebut mengalami perubahan dengan didirikannya Sekolah Adabiah (*Adabiah School*) di Padang oleh Syekh Abdullah Ahmad. Sekolah Adabiah merupakan pelopor perubahan dan pembaharuan yang pertama kali dilakukan di Sumatera Barat dalam bidang pendidikan Islam dan pendidikan pada umumnya, dari sistem surau ke pendidikan yang mempergunakan sistem sekolah seperti dilakukan oleh pendidikan Belanda. Dalam pendidikan Islam sistem sekolah ini dikenal dengan nama sistem madrasah.

Sekolah Adabiah betul-betul telah mengganti sistem pendidikan Islam yang bukan lagi diartikan berusaha mengetahui segala ajaran agama Islam dengan sedalam-dalamnya tanpa memperhatikan tingkat kecerdasan, umur, dan lingkungan muridnya. Pendidikan itu sudah diartikan sebagai pendidikan umum terhadap murid untuk melatih cara berpikir logis dan kritis guna menghadapi keadaan sekitarnya atau lingkungan kehidupannya.

Untuk mencapai tujuan itu Sekolah Adabiah juga memberikan pengetahuan umum seperti menulis, membaca, berhitung, ilmu bumi, dan bahasa, di samping pengetahuan tentang agama Islam. Tujuan pelajaran bukan lagi untuk memompakan pengetahuan Islam sebanyak-banyaknya, melainkan diarahkan untuk melatih kecerdasan murid. Murid yang diterima juga dipilih dari anak umur sekolah dasar antara 7-8 tahun, dan orang dewasa tidak lagi diterima seperti pada pendidikan surau.

Materi pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kecerdasan murid, dimulai dengan pelajaran yang mudah terus dilanjutkan secara berangsur sampai selesai tingkat pengetahuan dasar.

Cara penyajian juga sudah disusun sedemikian sehingga mudah dipahami oleh anak-anak.

Murid dikelompokkan menurut kelas masing-masing dengan usia anak yang hampir sama. Pada Sekolah Adabiah sudah terdapat pembahagian kelas, seperti kelas I, II, III, dan seterusnya. Murid yang baru diterima ditempatkan pada kelas satu dan tahun berikutnya apabila sudah dapat memahami pelajaran dinaikkan ke kelas dua dan begitu seterusnya sampai kelas terakhir.

Pengaturan duduk murid dalam kelas juga berbeda dengan cara duduk sistem surau di mana murid menduduki bangku (kursi dan meja) yang sudah diatur menghadap ke satu arah. Di hadapan murid terdapat meja dan kursi guru serta papan tulis sebagai alat bantu pengajaran. Murid dalam satu kelas langsung dapat mendengarkan pelajaran yang diberikan guru, sedangkan murid disuruh menyimak. Tidak lagi seperti sistem surau di mana murid diberi pelajaran satu persatu, kelas tidak lagi ribut, karena murid-murid tidak diperkenankan berbicara selama pelajaran berlangsung.

Pelajaran juga telah diatur dalam suatu jadwal tertentu dan teratur. Satu hari hanya belajar kira-kira 5 jam yang diselingi oleh beberapa kali waktu istirahat. Di dalam waktu yang 5 jam itu dibagi lagi dalam tiga bahagian dan masing-masing bahagian diselingi oleh waktu istirahat secukupnya. Ke dalam bahagian itu dimasukkan 3 atau 4 mata pelajaran yang akan diberikan untuk satu hari. Jadwal pelajaran disusun perminggu, artinya dalam satu minggu semua jenis materi pelajaran harus diberikan dan minggu depan kembali lagi seperti minggu sebelumnya dengan materi pelajaran lanjutan minggu sebelumnya. Materi pelajaran tidak boleh menyimpang dari bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Untuk menentukan seorang murid naik atau tinggal kelas diadakan ujian atau ulangan terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Prestasi seorang murid dinyatakan dalam bentuk angka 0 sampai sepuluh. Nilai 10 menyatakan prestasi murid terbaik, sebaliknya nilai 0 menyatakan prestasi yang paling buruk yang dicapai oleh seorang murid.

Dalam menentukan kemampuan seorang murid berbeda dengan sistem surau, pada madrasah kemampuan murid diukur hanya penguasaan bahan pelajaran selama satu tahun saja sedangkan pada tahun terakhir dari pendidikannya diadakan ujian umum. Pengukuran kemampuan murid dilakukan secara bertahap tidak sekaligus seperti pada sistem surau. Penyelenggaraan Sekolah Adabiah betul-betul sudah merupakan perkembangan baru dalam pendidikan di Sumatera Barat, khususnya dalam pendidikan Islam.

Jika diperhatikan situasi dan kondisi politik pemerintah Belanda di Indonesia pada waktu itu, khususnya dalam politik pendidikan, maka pendirian Sekolah Adabiah tidak bertentangan dengan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Mulai pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda banyak melakukan perbaikan terhadap politik sebelumnya dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Khusus di bidang pendidikan banyak lembaga pendidikan didirikan seperti Sekolah Desa, Sekolah Kelas Dua, Sekolah Kelas Satu, Vokschool, Vervolgschool, HIS, MULO, AMS, HBS, Stovia, THS, RHS, dan lain-lain.⁴⁾ Di Sumatera Barat hanya didirikan sekolah sampai tingkat AMS dan HBS saja, yaitu sampai tingkat sekolah menengah atas, yang paling banyak adalah Sekolah Kelas Dua.

Walaupun jumlah sekolah makin bertambah, bagi rakyat Sumatera Barat hampir tidak mempunyai arti untuk masuk sekolah itu sulit bagi rakyat biasa. Sekolah itu bertujuan untuk mendapatkan tenaga terlatih yang murah untuk mengerjakan kepentingan Belanda. Murid yang dapat diterima pada sekolah tersebut terbatas jumlahnya.

Situasi dan kondisi pendidikan seperti itu merupakan faktor pendorong bagi Haji Abdullah Ahmad untuk mendirikan Sekolah Adabiah di Padang. Calon murid tidak dibatasi kepada anak orang berpangkat atau terpandang saja, tetapi juga bagi anak rakyat biasa. Semua anak yang sudah patut bersekolah dapat ditampung pada waktunya tanpa mendapat rintangan. Makin banyak anak mendapatkan pendidikan yang tepat, makin mudah memperbaiki penghidupan masyarakat di kemudian hari.

4). Jaka Sutan Sati, *Wawancara*, Solok, September 1980.

3.2.2.2 Madrasah School

Sesudah Syekh H. Abdullah Ahmad mendirikan Sekolah Adabiah di Padang pada tanggal 4 Nopember 1910, Syekh M. Thaib Umar mendirikan pula sebuah sekolah yang bernama *Madras School* di Sungayang, Batusangkar. Sekolah itu hanya satu kelas saja, tetapi sesudah 3 tahun kemudian terpaksa ditutup kembali karena kekurangan tempat.

Berbeda dengan Sekolah Adabiah, *Madras School* hanya membuka satu kelas saja yaitu kelas yang telah tinggi tingkatannya untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab yang besar/tebal saja seperti tingkat tinggi pada Pengajian Kitab pada masa peralihan sebelumnya, tetapi dengan memakai sistem madrasah.

Murid yang satu kelas pada *Madras School* diajak berdiskusi tentang mata pelajaran yang diajarkan. Kitab-kitab besar yang dimaksud adalah buku-buku yang tebal yang belum dipelajari pada tingkatan sebelumnya. Selama satu tahun itu mereka disuruh berdebat tentang isi buku tersebut sampai mereka mengerti dan memahaminya dengan baik. Kepada mereka tidak dipompakan lagi pengetahuan tentang Islam, tetapi mereka sendiri yang mencarinya dengan berdiskusi di bawah bimbingan guru. Tamatan *Madras School* menjadi ulama yang luas pandangannya tentang Islam dan kehidupan manusia.

Calon murid *Madras School* diterima dari tamatan pendidikan surau atau dari ulama yang ingin memperdalam ilmunya. Semua murid sudah merupakan orang yang berpengalaman di lapangan, baik sebagai guru maupun sebagai mubalig. Mereka masuk *Madras School* hanya untuk memperkuat ilmu yang telah mereka miliki. Walaupun hanya satu tahun lama pendidikannya, tetapi hasilnya mereka peroleh sangat banyak.

3.2.2.3 Madrasah Diniah

Pada tahun 1915 Zainuddin Labai Al-Yunusi mendirikan Madrasah Diniah di Padang Panjang dengan nama "*Diniah School*".⁵⁾

5). Mahmud Yunus, *op. cit.*, hal. 58.

Menurut HMD Datuk Palimo Kayo alasan pendirian Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut :

”Dengan hasil pemikiran yang mendalam, pada tanggal 15 Oktober 1915, tuan Zainuddin Labai El-Yunani meresmikan pendirian sebuah sekolah Islam yang baru dengan metode yang baru bersama *Diniyah School* atau *Madrasatuddiniyah*. Selain dari mengajarkan pelajaran agama sebagaimana biasa, juga mengajarkan pelajaran yang biasa disebut vak umum, seperti menulis, membaca, berhitung, Ilmu Falak, Ilmu Bumi, Ilmu Alam, Ilmu Kesehatan, Ilmu Tumbuh-tumbuhan dan Ilmu Pen-didikan. Sesungguhnya hebat dan mengagumkan. Itulah perguruan Islam yang termodern dewasa ini, dengan bangku, meja, dan kelas-kelas yang teratur, walaupun dengan cara yang sederhana.”⁶⁾

Berdasarkan keterangan HMD Datuk Palimo Kayo itu, dapat dikatakan bahwa Sekolah Diniyah merupakan sekolah Islam kedua di Sumatera Barat yang memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya seperti yang dilakukan pada sekolah Belanda. Namun antara Sekolah Adabiah dengan Sekolah Diniyah terdapat perbedaan. Sekolah Adabiah merupakan pelopor pembaharuan pendidikan Islam dengan sistem sekolah, sedangkan Sekolah Diniyah melakukan pembaharuan pendidikan agama dengan menambahkan mata pelajaran umum kepada mata pelajaran agama yang telah ada. Dengan demikian mata pelajaran pada Sekolah Diniyah lebih banyak dari Sekolah Adabiah dan dari sekolah agama lain maupun dari sekolah pemerintah Hindia Belanda.

Pada umumnya Sekolah Diniyah terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas tujuh. Tetapi di desa-desa yang tidak mempunyai guru yang cukup, maka kelas Sekolah Diniyah hanya sampai kelas empat atau kelas lima saja, sedangkan untuk melanjutkan mereka harus pergi ke Sekolah Diniyah yang mempunyai kelas yang cukup sampai kelas tujuh.

Sekolah ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat Sumatera Barat, sehingga dalam waktu yang singkat sekolah Diniyah

6). HMD Datuk Palimo Kayo, Pidato peringatan Ulang Tahun ke-55 Thawalib Padang Panjang tanggal 11-9-1966, hal. 8 (ketikan).

sudah tersebar ke seluruh daerah Sumatera Barat yang merupakan cabang dari Sekolah Diniyah Padang Panjang atau berdiri sendiri dengan memakai sistem Sekolah Diniyah. Hingga tahun 1922, yaitu 7 tahun sesudah didirikan, maka didirikanlah perkumpulan murid Sekolah Diniyah seluruh daerah Sumatera Barat dengan nama Persatuan Murid-murid Diniyah School disingkat dengan PMDS dan berpusat di Padang Panjang.

Pada tahun 1923 Rangkyo Rahmah Al-Yunusiah, saudara perempuan Zainuddin Labai Al-Yunusi, mendirikan Madrasah Diniyah Putri yang bertempat di Padang Panjang juga. Tetapi dua belas tahun sesudah Sekolah Diniyah Putri didirikan, yaitu pada tahun 1935 Sekolah Diniyah Putra Padang Panjang yang sebelumnya sangat pesat perkembangannya terpaksa ditutup karena masalah politik. Namun Sekolah Diniyah Putri tetap berdiri dan berkembang sampai sekarang, bahkan menjadi sebuah sekolah yang disukai oleh orang tua di Sumatera Barat untuk memasukkan anak putri mereka ke sana.

3.2.2.4 Arabiah School

Pada tahun 1918 Syekh Abbas Ladang Lawas Bukittinggi mendirikan sebuah madrasah dengan nama "*Arabiah School*" di Ladang Lawas, Bukittinggi. Ruang pendidikannya terdiri atas tiga lokal berdinding bambu atas rumbia, tetapi sudah mempunyai bangku, meja, papan tulis, dan kapur.⁷⁾

Arabiah School adalah gagasan dari Syekh Abbas Ladang Lawas yang kemudian menjadi pendorong berdirinya Persatuan Tarbiah Islamiah (PERTI) yang mengusahakan beberapa sekolah.

Materi pelajaran agama Islam Sekolah Adabiah tidak sama dengan materi pelajaran Sekolah Diniyah walaupun tingkat dan kelasnya sama, apalagi dengan Madras School. Antar sekolah Diniyah sendiripun tidak ada yang sama materi pelajarannya, misalnya mata pelajaran Sekolah Diniyah di Padang Panjang tidak sama dengan mata pelajaran dengan Sekolah Diniyah Bukittinggi. Penetapan mata pelajaran atau kurikulum pada masing-masing sekolah sangat tergantung pada seseorang yang

7). Madrasah Rakyat, No. 1, Tahun I, Badan Penerbit Madrasah Jakarta, Jakarta, 5 Juli 1957, hal. 10.

mendirikan sekolah itu. Keadaan itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Di samping itu Sekolah Adabiah sudah memberikan mata pelajaran umum dalam porsi yang lebih banyak, walaupun pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran utama, tetapi Madras School dan Sekolah Diniyah seluruh mata pelajarannya masih berpangkal dari agama Islam yang ditambahkan dengan mata pelajaran umum.

3.2.2.5 Sekolah Thawalib

Sistem pendidikan surau masih tetap dilanjutkan, walaupun telah terjadi pembaharuan dalam pendidikan Islam. Namun demikian ada juga beberapa buah surau yang tidak mau ketinggalan dengan perkembangan madrasah. Surau pertama yang telah memakai sistem kelas dengan mempergunakan meja, kursi, papan tulis dan alat bantu pelajaran adalah surau Jembatan Besi di Padang Panjang.

Surau Jembatan Besi didirikan pada tahun 1914 oleh Syekh H. Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amarullah atau yang lebih terkenal dengan nama Haji Rasul ikut menjadi guru. Setelah Syekh Abdullah Ahmad pindah ke Padang, Haji Rasul menggantikan sebagai pimpinan Surau Jembatan Besi yang membawa banyak perubahan atau pembaharuan. Pada tahun 1915 pada Surau Jembatan Besi didirikan Koperasi Pelajar atas inisiatif Haji Habib, dan setahun kemudian koperasi itu diperluas lagi oleh Haji Hasyim.

Dengan didirikannya sebuah koperasi pada Surau Jembatan Besi kelihatanlah bahwa surau tersebut mempunyai sifat terbuka dan mau menerima sesuatu yang baru, karena pengaturan koperasi sudah dipengaruhi oleh pengetahuan Barat. Tetapi karena koperasi dianggap berguna dan menguntungkan, maka gagasan pendirian koperasi itu dapat diterima. Pada waktu itu koperasi merupakan sesuatu yang baru pada lembaga yang dikelola oleh Islam.

Pada tahun 1913 Zainuddin Labai Al-Yunusi kembali ke Padang Panjang setelah menuntut ilmu dengan Syekh Abbas Padang Panjang, Payakumbuh. Zainuddin Labai Al-Yunusi juga ikut menyumbangkan tenaganya sebagai guru pada surau tersebut dan tahun 1915 dia

mendirikan Sekolah Diniah. Terpengaruh oleh sistem pendidikan yang dipergunakannya pada sekolah Diniah, maka dengan persetujuan Haji Rasul, Zainuddin Labai Al-Yunusi mengajak pelajar-pelajar Surau Jembatan Besi membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan "*Makaratul Ichwan*", untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam dan berusaha menyelesaikan masalah Agama secara ilmiah dan persahabatan antara sesama penganut agama Islam.⁸⁾

Pada tahun 1918 Zainuddin Labai Al-Yunusi, Jalaluddin Thaib dan Injik Mandua Basa merubah nama Koperasi Pelajar Jembatan Besi dengan nama "*Sumatera Thawalib*" dengan memperluas ruang lingkup kegiatannya. Perubahan nama ini sekaligus merubah nama Surau Jembatan Besi menjadi nama Sumatera Thawalib. Perubahan nama tersebut diilhami oleh organisasi pemuda "*Jong Sumatranen Bond*" yang waktu itu sudah membuka cabangnya di Bukittinggi dan Padang, sedangkan Sumatera Thawalib juga berarti Organisasi Pelajar Sumatera.

Setelah Surau Jembatan Besi mengalami banyak pembaharuan, maka pada tahun 1918 Haji Rasul memperkenalkan sistem kelas pada Sumatera Thawalib dan semenjak itu sistem pendidikan surau yang selama ini dianut oleh Surau Jembatan Besi sudah berubah menjadi Sumatera Thawalib yang mempergunakan sistem sekolah. Sesudah sistem pendidikannya berubah, maka Haji Rasul menyusun kembali kurikulum, metode mengajar, dan buku yang akan dipergunakan pada Sumatera Thawalib dengan memasukkan mata pelajaran umum.

Sementara itu Surau Parabek yang didirikan oleh Syekh Ibrahim Musa yang bergerak ke arah pembaharuan dalam bidang pendidikan yang diikuti pula oleh beberapa surau lainnya.

Pada tanggal 15 Januari 1919, dengan mengambil tempat di surau Syekh Muhammad Jamil Jambek Tengah Sawah di Bukittinggi diadakan pertemuan antara pelajar Sumatera Thawalib dengan pelajar Parabek. Hasil pertemuan ini adalah dibentuknya sebuah persatuan antara kedua pelajar lembaga pendidikan itu, yang dinamai "*Sumatera Thawalib*", dengan tujuan memperdalam ilmu dan mengembangkan agama Islam.

8). *Ibid.*, hal. 6.

Pada tahun 1921 Syekh Ibrahim Musa Parabek memperkenalkan sistem madrasah pada Surau Parabek seperti yang dilaksanakan pada Sumatera Thawalib dan semenjak itu surau Parabek sudah berubah namanya menjadi Sumatera Thawalib Parabek. Selanjutnya surau di Padang Japang, Maninjau, dan Batusangkar juga merubah nama dengan Sumatera Thawalib seperti yang dilakukan oleh Surau Jembatan Besi atau Surau Parabek.

Sementara itu pengaruh Pergerakan Nasional Indonesia sudah terasa di Sumatera Barat. Pengaruh itu bukan saja di kalangan politisi, tetapi juga memasuki lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan pembaharuan. Pengaruh ini membawa perubahan dalam memperbaiki kehidupan lembaga pendidikan di Sumatera Barat.

Pengaruh Pergerakan juga masuk ke tubuh Sumatera Thawalib terutama dengan tersebarnya sekolah Sumatera Thawalib di daerah Sumatera Barat yang mendorong pelajar untuk membentuk suatu organisasi yang dapat mempersatukan seluruh pelajar. Pada tanggal 22 Januari 1922, atas undangan pelajar Sumatera Thawalib Padang Panjang diadakan pertemuan antara wakil seluruh sekolah Sumatera Thawalib. Pertemuan itu memutuskan membentuk satu kesatuan organisasi pelajar Sumatera Thawalib di bawah satu Dewan Pusat dengan cabangnya di daerah-daerah. Kesatuan pelajar itupun dinamakan Persatuan Pelajar Sumatera Thawalib dan pusat kegiatannya terdapat di Padang Panjang.

Dengan adanya organisasi pelajar Sumatera Thawalib, maka mulai tahun 1923 terlihat perkembangan baru. Sumatera Thawalib yang selama ini hanya bergerak di bidang pendidikan mulai ikut kegiatan politik yang menyebabkan pembaharuan yang telah dilaksanakan seperti :

- 1) Merubah sistem (halaqah) menjadi sistem sekolah.
- 2) Memperpendek masa belajar yang berkepanjangan pada sistem surau dengan beberapa tahun ajaran.
- 3) Mengatur penyajian pelajaran sedemikian rupa sehingga sesuai dengan perkembangan berfikir anak-anak.
- 4) Mengatur buku yang akan dipakai pada kelas tertentu, tidak lagi memberikan buku yang tebal untuk anak.

- 5) Mengatur guru menurut keahlian masing-masing dan guru hanya mengajar sesuai dengan keahliannya itu, tidak dapat lagi seorang guru mengajar untuk semua mata pelajaran seperti pada sistem surau.
- 6) Mengatur jadwal pelajaran dalam satu daftar pelajaran yang tetap dan guru harus menyesuaikan waktu mengajarnya dengan daftar tersebut, guru tidak boleh lagi mengajar menurut kemampuannya.
- 7) Memungut uang muka untuk masuk sekolah dan memungut uang sekolah per bulan.
- 8) Mengatur honorarium guru dan petugas sekolah lainnya seperti penjaga sekolah.
- 9) Mengadakan tenaga administrasi yang akan mengelola administrasi sekolah tersebut.

Sistem ini sebelumnya juga telah dilakukan oleh Sekolah Adabiah dan Sekolah Diniyah pembaharuan dilaksanakan pada sekolah yang baru sama sekali, artinya dibuat sekolah baru untuk melaksanakan pembaharuan itu. Sumatera Thawalib melakukan sistem baru itu pada sekolah yang sudah ada dalam bentuk surau dengan murid yang sudah ada pula yang sebelumnya sudah mendapat pendidikan dengan sistem surau. Sumatera Thawalib sekaligus juga merubah sikap dan cara berfikir murid-muridnya, suatu hal yang pada waktu itu sangat sukar dilakukan mengingat banyak murid yang fanatik terhadap yang pernah dimilikinya dan sukar merubah kebiasaannya.

Sumatera Thawalib dapat melakukan perubahan sistem pendidikan, karena semangat pengarah telah masuk ke Sumatera Barat dan mempengaruhi Sumatera Thawalib. Murid maupun guru Sumatera Thawalib mendapat dorongan untuk segera mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dalam waktu yang singkat untuk disumbangkan kepada pergerakan kebangsaan. Kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan sangat meningkat pada Sumatera Thawalib, sehingga gagasan pembaharuan yang masuk ke Sumatera Thawalib mendapat sambutan hangat.

Guru Sumatera Thawalib seperti Haji Rasul, Zainuddin Labai Al-Yunusi, Haji Hasyim, Haji Habib, Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim,

dan lain-lain bukanlah orang yang fanatik, mereka adalah orang yang terbuka dan suka menerima pembaharuan, serta luas pandangannya. Menurut mereka untuk memperbaiki kehidupan yang paling cepat adalah melalui pembaharuan pendidikan.

Pada tahun 1918 majalah Al-Munir yang didirikan oleh Syekh H. Abdullah Ahmad di Padang sudah berdiri pula cabangnya di Sumatera Thawalib. Kantor majalah Al-Munir penuh dengan surat kabar dari seluruh Indonesia sebagai balasan pengiriman majalah Al-Munir. Di kantor Al-Munir itulah berkumpul murid Sumatera Thawalib bersama gurunya di waktu senggang untuk membaca surat kabar. Hal ini mempercepat luasnya pandangan mereka, baik mengenai situasi pendidikan, maupun mengenai situasi politik dalam dan luar negeri. Keadaan itu masih ditambah lagi dengan seringnya dilakukan diskusi di kantor tersebut yang menyebabkan penglihatan mereka semakin tajam terhadap suasana yang sedang mereka hadapi.

Suasana yang demikian didukung pula dengan adanya penerbitan beberapa surat kabar dan majalah pada beberapa pendidikan Sumatera Thawalib yang berada di luar Padang Panjang, seperti majalah Al-Bayan di Parabek, Al-Basyar di Batusangkar, Al-Ittqah di Maninjau dan Al-Iman di Padang Panjang sendiri. Semua media itu berlomba menyiarkan agama Islam dan perkembangan baru tentang ilmu pengetahuan. Keadaan itu menyebabkan para pembacanyapun ikut menjadi orang yang suka dan haus pada pembaharuan.

Dipilihnya surau sebagai basis pembaharuan pendidikan Islam oleh tokoh muda Islam seperti Haji Rasul dengan teman-temannya bukanlah merupakan suatu hal yang kebetulan saja, melainkan memang dilakukan dengan sengaja, karena beberapa hal seperti yang dikatakan oleh Deliar Noor sebagai berikut :

1. "Anak yang mengaji dan bermalam di surau sejak usia 7 tahun mendapatkan didikan agama, sembahyang berjemaah serta membaca Al-Quran. Dengan demikian pendidikan agama itu menjadi darah daging bagi mereka sampai dewasa dan di hari tuanya, meskipun mereka sudah berpangkat tinggi kemudian harinya.

2. Anak yang mengaji di surau bergaul dengan temannya di bawah pimpinan gurunya, dengan demikian terbentuklah uchuwah Islamiah semenjak kecil.
3. Didikan surau menghasilkan pelajar yang berakhlak Islamiah.
4. Didikan surau berdasarkan ikhlas karena Allah semata dengan tidak mengharapkan gaji atau pangkat dan uang. Uang datang sendirinya dan bukan menjadi tujuan utama.
5. Didikan surau tidak terpengaruh oleh didikan Barat yang berdasarkan materialis. Sebab itu didikan surau adalah didikan asli Islam.⁹⁾

Dengan menjadikan surau sebagai titik pangkal pembaharuan pendidikan Islam banyak masalah yang sudah dapat di tanggung lagi terlebih dahulu, misalnya masalah biaya pendidikan, tempat belajar, dasar keislaman murid yang sudah kuat. Walaupun pendidikan surau itu berubah nama menjadi Sumatera Thawalib yang banyak terdapat di Sumatera Barat, mereka bukanlah merupakan madrasah yang bernaung pada satu induk. Banyak di antaranya yang berdiri sendiri dengan pendidikan masing-masing serta pelaksanaan yang berbeda pula, yang sama hanyalah nama saja yaitu Sumatera Thawalib. Masing-masing sekolah mempunyai kurikulum, menyusun materi pelajaran, melaksanakan metode mengajar sendiri. Sekolah itu sebelumnya memang sudah berdiri sendiri juga kebiasaan itulah yang terbawa terus. Walaupun banyak terdapat perbedaan dalam menyelenggarakan pendidikan, tetapi dalam berlomba mencari kemajuan, karang mengarang mengenai ilmu pengetahuan Islam maupun pengetahuan umum, dan berlomba memberikan dakwah Islam kepada masyarakat tentang pembaharuan pendidikan Islam.

Sekolah Sumatera Thawalib terdiri atas 7 kelas seperti pada Sekolah Diniyah. Pada kelas I dan II hanya diberikan dua mata pelajaran, di kelas III sudah diberikan 6 mata pelajaran. Mulai kelas IV sudah diberikan semua mata pelajaran yang ada pada sekolah itu. Dari semua mata pelajaran, mata pelajaran agama Islam hanya terdapat 7 buah saja, diajarkan pada setiap kelas tiap tahun dengan memper

9). Deliar Noer, *Pembaharuan Sesudah Tahun 1900*, Seminar masuknya Islam di Minangkabau, paper, Padang, 1969, hal. 2.

baharui buku yang dipelajari. Mata pelajaran Fikih yang dipelajari murid sekurangnya harus membaca 7 buah buku yang berbeda pengarangnya. Walaupun sudah ditambah dengan mata pelajaran umum, kedalaman materi agama Islam tidak berkurang. Dapat dibayangkan betapa beratnya belajar pada sekolah Thawalib, tambahan lagi mulai kelas tiga sudah diajarkan ilmu Tauhid dan Tafsir.

Pada umumnya Sekolah Diniyah mempergunakan buku keluaran Mesir, sedangkan Sumatera Thawalib memakai buku keluaran Mekah. Buku Mesir sudah dipengaruhi oleh pandangan baru mengenai Islam, sedangkan buku lama keluaran Mekah masih menunjukkan sifat asli Mekah, belum banyak pengaruh perkembangan firikan baru. Mengenai kedalaman pengajaran Islam, pada sekolah Sumatera Thawalib lebih mendalam dibandingkan dengan sekolah Diniyah. Banyak di antara murid Sekolah Diniyah yang pindah ke Sekolah Sumatera Thawalib mulai dari kelas IV atau V untuk memperdalam ilmu mereka tentang Islam. Oleh karena itu, sebahagian sekolah Diniyah hanya mempunyai kelas sampai kelas IV, V, atau VI saja, sebab sesudah itu muridnya akan pindah ke Sumatera Thawalib. Hanya Sekolah Diniyah di Padang Panjang yang masih tetap mempunyai kelas sampai tujuh buah. Tamatan Sumatera Thalib merupakan orang yang dalam ilmunya tentang Islam, mereka merupakan pemimpin Islam yang kuat pendirian nya dan berpegang teguh pada ajaran Islam ahli Mekah. Sedangkan tamatan Sekolah Diniyah agak kurang mendalam pengetahuan Islam, tetapi mereka merupakan pemimpin masyarakat yang luas pandangannya dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru. Mereka kelihatan lebih lincah di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan tamatan Sumatera Thawalib. Namun, walaupun demikian dalam kehidupan sehari-hari kedua alumni sekolah itu merupakan tokoh masyarakat yang diikuti dan dihormati, karena mereka dapat hidup saling berdampingan dan saling mengisi sehingga masyarakat tidak begitu merasa dan melihat adanya perbedaan itu.

Tahun 1930 perbedaan itu dapat diakhiri, karena kedua sekolah tersebut sudah sama-sama membutuhkan hal yang baru terutama untuk menghadapi Belanda dalam pergerakan kebangsaan. Mereka saling bantu dalam mencari sumber baru yang akan dijadikan bahan bacaan di sekolah, karena mereka juga sadar bahwa tanpa bahan bacaan baru

pengetahuan mereka akan terbatas, sedangkan pergerakan Indonesia menuntut pengetahuan yang tinggi dari putra-putrinya.

Alumni Sekolah Thawalib banyak yang terjun ke masyarakat dan menjadi pemimpin masyarakat yang diikuti dan dihormati. Tetapi pada hakekatnya bukanlah hal tersebut yang menjadi tugas pokok mereka. Kebanyakan di antaranya diangkat menjadi guru pada sekolah agama yang tersebar di Sumatera Barat.

Kebanyakan di antara mereka diangkat menjadi guru pada kelas yang rendah tingkatnya, misalnya kelas I, II, III dan IV, karena pada kelas yang lebih tinggi akan diajar langsung oleh para Syekh. Di samping menjadi guru pada Sekolah Thawalib dan Sekolah Diniah dan sekolah agama, para alumni Sumatera Thawalib, dan Sekolah Diniah, tidak ada yang mengajar pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Sebahagian lagi ada yang membuka sekolah sendiri di kampung dan mengajar di sana serta menyatakan diri sebagai cabang dari Sumatera Thawalib di Padang Panjang.

Tamatan Sekolah Sumatera Thawalib dan Sekolah Diniah, tidak ada yang menganggur. Begitu mereka tamat ada-ada saja kerja yang akan menunggu mereka atau mereka ciptakan.

Murid Sumatera Thawalib dan Sekolah Diniah, selama belajar juga diberikan pelajaran akhlak dan cara berfikir serta hidup mandiri. Hal tersebut diberikan melalui contoh yang nyata dari kehidupan guru sehari-hari, baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Kejujuran, ketinggian budi pekerti, kegigihan memperjuangkan kebenaran, kegigihan dalam memperjuangkan hidup, keuletan berusaha, sesuai kata dengan perbuatan, diberikan melalui contoh dalam praktek kehidupan guru sehari-hari. Murid dapat meniru teladan yang diberikan guru dan masyarakat umum, dengan contoh yang nyata. Hal itu dapat membentuk kepribadian murid yang kuat dan militan dalam segala perjuangan hidup, pantang menyerah. Jika tidak ada sekolah yang dapat menampungnya jadi guru, mereka membuka sendiri sekolah. Kemauan bekerja keras sudah dilatih semenjak berada di bangku sekolah. Menganggur mendatangkan perasaan bersalah dan berdosa kepada murid sekolah tersebut, guru maupun masyarakat.

Guru tamatan Sekolah Thawalib dan Sekolah Diniyah mendapat sambutan dari masyarakat ke manapun mereka pergi di daerah Sumatera Barat, karena masyarakat sudah yakin betul dengan kemampuan mereka. Di samping menjadi guru mereka juga menjadi pemimpin masyarakat yang memang sudah dipersiapkan. Apa yang mereka terima di bangku sekolah sesuai dengan tugas yang mereka hadapi dalam masyarakat kemudian.

Pada awal abad ke-20 di Sumatera Barat Sekolah Adabiah, Sekolah Diniyah, dan Sekolah Sumatera Thawalib merupakan pelopor di bidang pendidikan.

Walaupun sudah banyak sekolah Islam yang mempergunakan sistem persekolahan, tidak berarti seluruh pendidikan Islam berubah semuanya. Masih banyak sekolah yang mempergunakan sistem surau (halaqah) dalam pengelolaan pendidikan, terutama yang berada di kampung-kampung. Munculnya sistem madrasah pada pendidikan Islam tidak menghilangkan sistem surau sama sekali. Sesudah Kemerdekaan Islam sistem surau sama sekali. Sesudah Kemerdekaan Indonesia sistem surau mulai berangsur hilang, karena lembaga pendidikan Islam di Indonesia harus mengikuti sistem yang telah diatur oleh Pemerintah.

3.2.2.6 Pendidikan Islam di Luar Sekolah

Sebelum tahun 1900 di Sumatera Barat pendidikan Islam hanya diberikan kepada anak dan pemuda yang datang ke surau-surau. Pendidikan Islam untuk orang dewasa, petani, saudagar-saudagar tidak diadakan.

Pada tahun 1911 sewaktu Syekh H. Abdullah Ahmad mendirikan majalah Al-Munir di Padang, pada kulit luarnya dituliskan kata-kata: "Majalah Islam pada Pelajaran, Pengetahuan, Perkhabarkan".¹⁰⁾

Dengan pencantuman kata-kata tersebut pada kulit luar majalah itu, dapat dilihat bahwa penerbitan majalah tersebut sengaja untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat umum tentang pengetahuan Islam dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran Islam dalam masyarakat.

10). Mahmud Yunus, *op. cit.*, hal. 69.

Majalah Al-Munir cepat populer di tengah masyarakat, karena ditulis dalam bahasa Melayu yang mudah di mengerti oleh rakyat banyak. Majalah Al-Munir merupakan salah satu wadah yang sangat baik untuk memberikan pelajaran Islam kepada anggota masyarakat yang tidak sempat datang ke surau melalui tulisan dan gambar yang mudah dimengerti. Di samping majalah Al-Munir masih banyak majalah Islam lainnya yang beredar di Sumatera Barat pada waktu itu. Melalui majalah itulah para pemimpin Islam berusaha menyebar luaskan ajaran Islam ke tengah masyarakat. Namun demikian tidak semua orang dapat dicapai oleh majalah Al-Munir, karena tidak banyak orang yang dapat membaca, sebahagian besar anggota masyarakat masih buta huruf. Dengan demikian pendidikan Islam melalui jalur ini terbatas pula pada orang itu saja, tidak sampai kepada seluruh anggota masyarakat.

Atas usaha Syekh M. Jamil Jambek pada tahun 1911 dilakukan usaha pendidikan terhadap masyarakat melalui tablig, pidato, dan khotbah. Beliau menyadari bahwa tidak semua masyarakat Islam dapat masuk ke surau untuk belajar, seperti orang dewasa yang selalu sibuk dengan usahanya. Ajaran agama Islam yang dilaksanakan mereka adalah seperti apa yang pernah dikatakan oleh orang tua atau guru serta imam di kampungnya dan mereka tidak mau merubah. Pengetahuan mereka yang sempit itu mereka praktekan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam yang mereka praktekan adalah sebagai hasil pengetahuan dari mulut ke mulut, tidak langsung mengambil dari sumbernya, yaitu Kitab Suci Al-Quran. Banyak praktek Islam yang mereka jalankan bertentangan dengan ajaran Islam menurut Al-Quran dan hadis nabi Muhammad, karena mereka tidak mengetahui. Penganut Islam yang beginilah yang banyak terdapat di Sumatera Barat pada waktu itu. Kepada merekalah pendidikan Islam melalui tablig, pidato, dan khotbah akan diberikan oleh Syekh M. Jamil Jambek.

Untuk melaksanakan tablig dan pidato Syekh M. Jamil Jambek sendiri pergi mendatangi kampung sampai jauh ke daerah pedalaman Sumatera Barat. Di tempat itu beliau memberikan tablig dan pidatonya yang berisi ajaran-ajaran pokok Islam, bagaimana seharusnya seorang

Islam sejati bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan rukun Islam dan rukun iman dalam kehidupan, tidak boleh mencampurkan antara yang halal dengan yang haram, yang dilarang oleh agama Islam supaya benar-benar dijauhi dan menjalankan dengan sebaik-baiknya yang diperintahkanNya. Melalui pidato dan tablig inilah Syekh M. Jamil Jambek melaksanakan pendidikan Islam dari luar jalur pendidikan formal, karena wadah yang khusus untuk itu memang belum ada.

Yang perlu diketahui adalah usaha yang dirintis oleh Syekh M. Jamil Jambek dilakukan dengan penuh kesadaran dan sudah direncanakan dari semula. Orang karena itu usaha beliau dapat dikatakan sebagai usaha pendidikan Islam di luar sekolah pada waktu itu.

Usaha Syekh M. Jamil Jambek ini mendapat perhatian dan dukungan dari tokoh Islam Sumatera Barat lainnya dan mereka mengikuti jejak beliau, sehingga Tablig dan pidato agama Islam pada bahagian pertama abad ke-20 dilakukan dengan sangat meriah sekali dan merupakan salah satu sarana pendidikan luar sekolah yang sangat cepat memberikan hasil tanpa mengeluarkan dana yang besar.

Kesempatan yang dipergunakan untuk mengucapkan tablig dan pidato dipilih pada waktu diadakannya upacara peringatan Islam, seperti upacara peringatan Maulud Nabi Muhammad, Isyrak dan Mikraj, Khatam Quran, dan upacara keagamaan lainnya.

Sebelum tahun 1911 acara pada hari tersebut diisi dengan berzanji, marhaban dan lagu kasidah yang kesemuanya diucapkan dalam bahasa Arab yang kurang dapat dimengerti, sehingga hampir semua yang mendengarkan tidak mengerti apa yang diucapkan itu, Mereka hanya mendengarkan irama lagunya tanpa mengerti apa yang diucapkan : Tetapi karena hal ini telah menjadi kebiasaan pada waktu itu, tidak ada yang melarang pelaksanaannya sedangkan orang yang datang hanya untuk ikut meramaikan saja.

Syekh M. Jamil Jambek berusaha merubah kebiasaan tersebut secara berangsur dengan mengisinya melalui tablig dan pidato tentang riwayat hidup nabi Muhammad, peristiwa Isyrak dan Mikradj, wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepahlawanan

para sahabat Nabi Muhammad, dan ajaran Islam yang benar. Semua diuraikan secara populer sehingga mudah dimengerti oleh para pendengarnya, bahkan kalau perlu memakai bahasa daerah.

Dalam tablig dan pidato itu rakyat tidak segera disuruh menghentikan semua pekerjaan mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi melalui contoh kehidupan sehari-hari, rakyat disuruh mengambil kesimpulan sendiri. Rakyat tidak dipaksa, tetapi melalui contoh mereka mengakui sendiri kesalahannya dan berjanji akan merubahnya di kemudian hari sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Kesempatan yang paling baik untuk melakukan pidato dan tablig itu adalah pada bulan puasa, karena rakyat banyak yang mengunjungi mesjid dari hari biasa untuk melakukan ibadah. Kesempatan ini dipergunakan oleh Syekh M. Jamil Jambek dengan teman-temannya untuk memberikan penerangan tentang agama Islam sebelum dan sesudah sembahyang tarawih. Walaupun usaha Syekh M. Jamil Jambek dan kawan-kawannya tidak melembaga dan dilakukan dengan sukarela, tetapi usaha mereka merupakan suatu usaha pendidikan untuk masyarakat, dan hasilnya akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Jalur lain yang dilaksanakan oleh Syekh M. Jamil Jambek dalam usaha memberikan pendidikan Islam pada masyarakat adalah melalui khotbah Jumat, khotbah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Sebelum tahun 1911 di Sumatera Barat isi khotbah di bacakan dalam bahasa Arab seluruhnya tanpa dimengerti oleh para pendengarnya. Menurut Syekh M. Jamil Jambek hal tersebut kurang sesuai dengan tujuan khotbah, karena khotbah Jumat itu justru harus dipergunakan untuk menjelaskan ajaran Islam kepada anggota masyarakat. Jika mereka tidak mengerti apa yang diucapkan dalam khotbah itu, pelajaran apa yang dapat mereka ambil dari padanya.

Keadaan itulah yang dirubah oleh Syekh M. Jamil Jambek dan teman-temannya, yang bukan merubah bentuk khotbahnya tetapi merubah isi dan bahasa khotbahnya. Khotbah diucapkan dalam bahasa Melayu dan isinya tentang kehidupan sehari-hari menurut ajaran Islam yang benar. Dengan demikian orang yang mendengar khotbah dapat mengerti apa yang didengarnya yang isinya berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

3.2.2.7 Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI)

PGAI didirikan pada tahun 1919, tetapi baru mendapat pengesahan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920. Pelopor pendiri PGAI adalah Syekh M. Abdullah Ahmad, tokoh pembaharu pendidikan di Sumatera Barat. Di samping itu tokoh-tokoh Islam Sumatera Barat lainnya banyak yang ikut mendorong pendirian organisasi ini, baik dari golongan muda maupun dari golongan tua. Di antara mereka yang ikut mendirikan PGAI itu seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya tahun 1921 terdapat ulama besar Sumatera Barat seperti Syekh M. Jamil Jambek dari Bukittinggi, Zainuddin Labai Al-Yunusi dari Padang Panjang, H. Abdul Karim Amarullah dari Padang Panjang, Haji Sutan Ibrahim Parabek dari Bukittinggi, Haji Abdul Rusydi dari Maninjau, dan lain-lain yang semuanya berjumlah 15 orang.¹¹⁾

Tujuan PGAI seperti tercantum dalam Anggaran Dasar tahun 1921 adalah menjaga martabat, memperbaiki nasib, dan memberikan pertolongan kepada guru agama Islam, memajukan dan memperbaiki pengajaran agama Islam. Mendirikan sekolah Islam, mengusahakan kebebasan dalam pengembangan agama Islam dan lain-lain sebagainya.

Pada tahun 1929 PGAI membeli tanah seluas 5,5 ha di Jati, Padang dan tahun berikutnya membangun Sekolah Normal Islam lengkap dengan asrama dan sebuah gedung untuk memelihara anak yatim.

Pada tanggal 1 April 1931 diresmikanlah pembukaan Sekolah Normal Islam yang dalam bahasa Arabnya disebut *Kulliatul Mu'allimin Islamiah*. Normal Islam merupakan sekolah lanjutan tingkat atas, dan murid yang diterima berasal dari sekolah Sumatera Thawalib, Diniah, Tarbiah, dan lain-lain sekolah Islam yang setingkat.

Sebagai pemimpin PGAI ditunjuk Mahmud Yunus yang baru kembali dari Mesir, sebulan sebelumnya ia sudah mendirikan pula ruang pendidikan *Al-Jamiah Islamiah* di Sungayang Batusangkar dengan tiga tingkat, yaitu *Ibtidaiah* 4 tahun, *Sanawiah* 4 tahun, dan *Aliyah* 4 tahun.

Sekolah Normal Islam merupakan sekolah umum yang bercorak Islam, karena dari 17 buah mata pelajaran, hanya sekitar 12% saja

11). Perguruan Besar PGAI Padang, *Anggaran Dasar PGAI Tahun 1921*.

mata pelajaran Islam dan bahasa Arab. Tetapi kalau dilihat dari jumlah jam pelajaran maka jam pelajaran untuk mata pelajaran agama dan bahasa Arab berjumlah 41%, mata pelajaran umum lebih banyak dari mata pelajaran agama.

Sekolah Normal Islam diasuh oleh guru yang ahli di bidang mata pelajaran agama dan bahasa Arab oleh guru didikan Mesir. Guru yang mengajarkan mata pelajaran umum diambil dari tamatan HIK atau AMS atau HBS, sekolah yang dibina oleh Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat. Dari mereka itu yang diambil hanya ilmunya saja, sedangkan kebiasaan Barat sedapat mungkin tidak diperhatikan di dalam lingkungan Normal Islam.

Sekolah Normal Islam bertujuan memperluas pengetahuan pemuda Islam yang tamat dari Sekolah Sumatera Thawalib, Diniah, dan Tarbiah, yang telah memperoleh pengetahuan Islam dengan agak mendalam. Itulah sebabnya jumlah mata pelajaran umum lebih banyak di sekolah Normal Islam. Dengan demikian diharapkan pengetahuan mereka menjadi luas dan seimbang.

Bahasa Inggris dan Belanda juga diajarkan di Normal Islam, yang belum pernah terjadi pada sekolah Islam sebelumnya di Sumatera Barat. Dengan kemahiran bahasa Inggris dan Belanda memudahkan mereka untuk mengetahui masalah luar negeri dan mengambil manfaat dari padanya. Dengan mengetahui bahasa tersebut mereka menjadi lebih luas mengenal masalah luar negeri. Dengan pengetahuan yang mendalam dan luas murid tamatan Normal Islam lebih mudah menyesuaikan diri dengan pergerakan kebangsaan yang sedang meningkat.

Tamatan Sekolah Normal Islam disukai dan dihormati oleh masyarakat Sumatera Barat, karena di samping menjadi guru mereka juga menjadi pemimpin masyarakat di mana mereka mengajar. Mereka tidak dicurigai oleh masyarakat, karena mereka juga orang yang taat menjalankan ajaran Islam serta ibadah dan tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama. Mereka bersifat terbuka kepada masyarakat suka menolong, dan tidak sombong.

Alumni Sekolah Normal Islam tersebar ke daerah Indonesia, malahan sampai ke Semenanjung Melayu (Malaysia), karena ada murid

yang berasal dari sana. Tamatan Sekolah Normal Islam, juga tidak ada yang menganggur dan tidak ada yang bekerja dengan pemerintah Hindia Belanda.

Satu hal yang patut ditiru oleh generasi sekarang dari Normal Islam adalah bahwa tamatannya tidak ada yang menggantungkan nasib pada pemerintah waktu itu, karena masalah tersebut telah ditekankan betul sewaktu masih belajar, baik di dalam kelas maupun di asrama. Asrama Normal Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana pendidikan non-formal di luar sekolah. Guru betul-betul mendidik dengan sepenuh hati, bukan hanya memompakan pelajaran, melainkan betul-betul mendidik dalam artian yang luas.

Keberhasilan tamatan Normal Islam bukan hanya pada nilai ijazah saja, tetapi juga kemampuannya untuk mengajarkan dan menyampaikan pelajaran kepada masyarakat. Penilaian masyarakat sulit memperoleh nya, karena harus bekerja dahulu beberapa tahun untuk memperoleh penghargaan masyarakat.

Tugas tamatan Sekolah Normal Islam di samping menjadi guru juga merupakan tokoh pembaharu dalam kehidupan masyarakat, dan pelopor pergerakan nasional.

Selain menyelenggarakan Sekolah Normal Islam PGAI juga bergerak di bidang pembinaan anak yatim. Pada tahun 1931 dibuka tempat pemeliharaan anak yatim yang tempatnya berdekatan dengan Sekolah Normal Islam. Para pengurus PGAI tergugah hatinya melihat banyaknya anak yatim yang terlantar, dan tidak mendapat pendidikan. Menurut ajaran agama Islam anak yatim harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan mendapat bimbingan seperti anak lainnya. Kewajiban itulah yang mendorong PGAI membangun gedung untuk menampung anak yatim tersebut.

Anak yatim itu diajar membaca, menulis, berhitung, membaca Al-Quran, dan kerajinan tangan. Pendidikan disesuaikan dengan tingkat kecerdasan anak tersebut. Bagi anak yang sudah memasuki masa sekolah dikirimkan ke sekolah Islam, seperti Ibtidaiyah, Sanawiah dan seterusnya.

Untuk menyelenggarakan rumah yatim ini PGAI mendapat bantuan tetap dari Pemerintah Hindia Belanda setiap bulannya. Pengelolaan anak yatim itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu lembaga pendidikan formal dengan kurikulum dan perlengkapan yang sudah disediakan sebelumnya. Namun demikian, pendirian rumah pemeliharaan anak yatim adalah untuk mendidik anak yang tidak mempunyai orang tua, supaya mendapat layanan pendidikan seperti anak lainnya. Pendidikan diberikan secara Islam, sebagai usaha pendidikan Islam.

PGAI tidak hanya bergerak di bidang pendidikan menengah, tetapi juga di bidang pendidikan tinggi. Tanggal 9 Desember 1940 di Kompleks PGAI Jati, Padang, didirikan pula dua fakultas, yaitu Fakultas Syariah (Agama) dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Staf pengajar diambil dari orang yang ahli di bidangnya, misalnya Syekh Ibrahim Musa Parabek mengajar Ilmu Agama Islam; Mr. Abu Bakar Jaar mengajar Ilmu Kemasyarakatan; S.M. Latief mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang dikoordinasi oleh Mahmud Yunus.

Para pemimpin Islam yang tergabung dalam PGAI menyadari betul bahwa perbaikan nasib suatu bangsa hanya dapat dilakukan oleh bangsa itu sendiri, pendidikan bukan saja memperluas pandangan tetapi juga akan dapat merubah cara berpikir yang penting untuk menghadapi hidup. Melalui pendidikan mereka akan diajar berpikir menurut logika dan akan menjauhi hal yang tidak masuk akal, kecuali yang berhubungan dengan kepercayaan agama.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pada tahun 1940 PGAI mendirikan Sekolah Islam Tinggi dengan dua fakultas. Mahasiswa kedua perguruan tersebut dipersiapkan menjadi guru agama Islam pada sekolah Islam yang tersebar di daerah Sumatera Barat.

Sekolah Islam Tinggi juga bertujuan memasukkan nafas Islam dalam pergerakan nasional Indonesia di Sumatera Barat. Mereka juga dipersiapkan menjadi pemimpin yang dapat membawa rakyat mencapai tujuan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, dengan berlandaskan Islam.

Sekolah Islam Tinggi ini tidak dapat hidup lama, karena sewaktu Jepang menduduki Sumatera Barat, mereka tidak mengizinkan mendirikan perguruan tinggi, sekolah Normal Islam dapat jalan terus.

3.2.2.8 Muhammadiyah

Di daerah Sumatera Barat cabang pertama Muhammadiyah terdapat di Maninjau yang dibawa dan diprakarsai oleh Syekh H. Abdul Karim Amarullah (Haji Rasul), pada tahun 1925. Pada tahun itu juga didirikan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Sesudah itu berdiri cabang Muhammadiyah di Simabur Batusangkar (1927), Bukittinggi (1928), Payakumbuh (1928), Kurai Taji, Pariaman (1929), Padang (1930), Solok (1935), dan seterusnya ke seluruh daerah Sumatera Barat.

Karena salah satu tujuan Muhammadiyah adalah untuk memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam, seperti tercantum dalam Anggaran Dasarnya pasal I, ayat 1,¹²⁾ maka mereka giat bergerak di bidang pendidikan Islam. Seluruh sekolah Muhammadiyah sudah berbetuk madrasah, bahkan ada yang sama dengan sekolah pemerintah Hindia Belanda. Dalam mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam, Muhammadiyah memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntutan agama Islam.

Melalui Majelis Tablig Muhammadiyah berusaha menyadarkan rakyat Sumatera Barat akan pentingnya pendidikan untuk memperbaiki nasib dan kehidupan manusia sekarang dan di hari depan. Masalah pendidikan bukanlah peroranga, melainkan merupakan masalah besama umat manusia. Muhammadiyah siap memberikan pembinaan bimbingan dan pengarahan yang dibutuhkan.

Untuk dapat mendirikan sebuah ranting Muhammadiyah cukup dengan lima orang, tetapi untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu ranting itu harus mendirikan sebuah sekolah minimal tingkat Ibtidaiyah (SD Islam). Jumlah kelas tidak menjadi masalah, walaupun

12) A.R. Sutan Mansyur, *Pokok Pergerakan Muhammadiyah*, Central Depot Padang Panjang, 1940. hal. 72.

hanya satu kelas dengan beberapa orang murid, sudah cukup untuk mendapat pengesahan sebagai satu ranting Mudamadiyah. Muhammadiyah mempercepat proses berdiri dan penyebaran lembaga pendidikan Islam tingkat dasar di Sumatera Barat.

Selanjutnya menyatukan ranting yang banyak itu menimbulkan masalah. Beberapa ranting yang berdekatan dapat disatukan untuk memudahkan kontrol dari Muhammadiyah Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang. Persatuan dari beberapa ranting dapat membentuk sebuah cabang Muhammadiyah.

Untuk mendirikan sebuah cabang Muhammadiyah ada beberapa syarat misalnya harus sudah ada beberapa ranting terlebih dahulu. Ranting Muhammadiyah di kewedanaan tidak dengan sendirinya menjadi sebuah cabang kalau sekiranya di kewedanaan itu hanya ada sebuah ranting saja. Apabila beberapa ranting yang berdekatan dengan ranting kewedanaan suda sepakat membentuk sebuah cabang, maka dapat dirikan cabang dengan ranting di kewedanaan menjadi pusat. Batas administrasi pemerintahan yang berlaku waktu itu tidak merupakan halangan bagi pembentukan sebuah cabang Muhamadiyah. Dalam sebuah kewedanaan boleh saja berdiri beberapa buah cabang atau dalam satu daerah kewedanaan hanya ada sebuah ranting saja. Dalam sebuah nagari dapat saja didirikan sebuah cabang Muhammadiyah jika persyaratan sudah mencukupi, misalnya merupakan pusat kegiatan dari beberapa ranting nagari di sekitarnya. Muhammadiyah tidak terikat dengan batas-batas daerah administrasi pemerintahan yang berlaku pada waktu itu.

Salah satu syarat untuk dapat disahkannya sebuah cabang Muhammadiyah apabila cabang tersebut sudah mempunyai sebuah sekolah Menengah Islam seperti Tsnawiah atau yang sederajat.

Muhammadiyah mendirikan sekolah atau madrasah disangkutkan dengan pendirian ranting atau cabang walaupun ranting dan cabang Muhammadiyah itu tugas pokoknya bukan masalah pendidikan saja, tetap masalah sosial dan juga politik. Kurikulum dan mata pelajaran sekolah Muhammadiyah sama untuk semua tingkat yang paralel, karena diatur secara sentral, bukan seperti Sekolah Islam lainnya.

Dengan cara itu Muhammadiyah lebih berhasil menanamkan rasa persatuan dan kesatuan kepada anak didik dan masyarakat.

Ranting dan cabang Muhammadiyah berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mendirikan sekolah secara gotong-royong. Dengan demikian persyaratan mendirikan ranting Muhammadiyah yang kelihatannya berat justru mendorong masyarakat untuk mendirikan sekolah. Sampai tahun 1942, di Sumatera Barat Muhammadiyah telah mempunyai murid Ibtidaiyah sebanyak 35.000 orang dengan 1.500 orang guru serta dapat mendirikan Tsanawiyah yang tersebar di daerah Sumatera Barat. Perincian Tsanawiyah sebelum pendudukan Jepang adalah 16 buah di Tanah Datar, 10 buah di Pariaman, 10 buah di pasaman, 9 buah di Solok, 8 buah di Agam, 6 buah di Lima Puluh Kota, 6 buah di Pesisir Selatan, dan 4 buah di Sawah Lunto Sijunjung.

Sekolah Muhammadiyah, yang didirikan sampai pecah Perang Dunia II sebagai berikut :

1) Sekolah Agama Islam

Jenis sekolah ini terdiri dari dua macam, yaitu Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, titik berat pelajaran adalah tentang agama Islam, mata pelajaran umum hanya sebagai tambahan. Namun demikian sudah hampir seluruh sekolah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. Ibtidaiyah hampir terdapat di semua nagari di Sumatera Barat karena pada waktu itu jumlah Ibtidaiyah seluruhnya adalah 300 buah.

2) Sekolah Umum

Sekolah umum yang didirikan Muhammadiyah terdiri dari Sekolah Desa, Sekolah Sambungan, Sekolah Schakel, dan HIS Muhammadiyah. Perbedaan sekolah umum Muhammadiyah dengan sekolah umum yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat adalah bahwa pada sekolah Muhammadiyah diberikan 20% pelajaran agama Islam sedangkan pada sekolah Belanda mata pelajaran agama hanya merupakan sebuah mata pelajaran saja. Di samping itu sekolah Muhammadiyah berstatus swasta.

Pembukaan sekolah umum Muhammadiyah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak Sumatera Barat untuk mendapatkan pendidikan umum. Sekolah umum ini didirikan sebenarnya merupakan reaksi terhadap sistem persekolahan Belanda yang sangat membatasi penerimaan murid dari anak-anak bumiputra. Hal itulah yang ditembus oleh Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah, karena banyak anak tinggal di desa, maka Sekolah Muhammadiyah lebih banyak didirikan di desa dengan nama Sekolah Desa dan Sekolah Sambungan. Sampai tahun 1942 Muhammadiyah sudah berhasil mendirikan sekolah umum ini di Sumatera Barat sebanyak 30 buah. Murid yang dapat diterima dari segala lapisan. Kenyataannya yang masuk sekolah tersebut adalah anak petani, saudagar, dan anak rakyat biasa yang beragama Islam. Anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, anak orang yang bekerja dengan Belanda lebih suka masuk ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. HIS Muhammadiyah juga dimasuki oleh anak rakyat biasa, sekolah tersebut juga dinamakan "*HIS met de Quran*", yaitu HIS yang mempegunakan Al-Quran yang menunjukkan perbedaan dengan HIS pemerintah. Sebelum Jepang masuk ke Sumatera Barat HIS Muhammadiyah telah berdiri di Simabur, Batusangkar, Padang Panjang, Maninjau, Pariaman, Padang, Bukittinggi, dan Solok.

3) Sekolah Guru

Karena pesatnya perkembangan sekolah yang diasuh Muhammadiyah akhirnya mereka kekurangan tenaga guru. Pada mulanya masalah ini tidak merupakan persoalan bagi Muhammadiyah, karena pengurus ranting dan cabang setempat menjadi guru. Tetapi kemudian sesudah sekolah bertambah banyak maka tenaga guru makin berkurang.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru Muhammadiyah mendirikan sekolah guru, untuk guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Sekolah guru itu terdiri dari bermacam-macam pula, yaitu :

a) Sekolah Guru Muhammadiyah (SGM).

SGM didirikan pada tahun 1953 di Padang dengan lama pendidikannya 4 tahun. Pada mulanya SGM bernama *Normal School*

Muhammadiyah tetapi karena ada larangan dari pemerintah Belanda bahwa sekolah swasta tidak boleh memakai nama sekolah pemerintah, akhirnya nama Normal School Muhammadiyah ditukar dengan nama Sekolah Guru Muhammadiyah (SGM). Murid SGM berasal dari Sekolah Skekel dan HIS Muhammadiyah. Sampai tahun 1942 SGM telah dapat menghasilkan tenaga guru sebanyak 105 orang.¹³⁾ Dengan hasil tersebut secara berangsur-angsur dapat diisi kekurangan tenaga guru pada sekolah yang berada di bawah asuhan Muhammadiyah.

b) *Kulliatul Muballigin*

Pada tahun 1931 di Padang didirikan sebuah sekolah dengan nama "*Tablig School*" di bawah pimpinan Hamka. Tujuan sekolah ini untuk mencetak mubalig Islam yang akan disebar ke daerah Sumatera Barat. Tetapi pada tahun berikutnya Sekolah Tablig mengalami hambatan, karena Hamka ditugaskan Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan. Atas desakan para tamatan Sekolah Thawalib, Diniah, dan lain-lain akhirnya Sekolah Tablig disempurnakan kembali untuk menghasilkan mubalig dan guru serta kader pimpinan Muhammadiyah.

Melalui beberapa perundingan selama beberapa tahun, maka pada tahun 1936 dalam Kongres Muhammadiyah Minangkabau ke-11 di Maninjau diputuskan untuk menjadikan Sekolah Tablig menjadi Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah dengan nama *Kulliatul Muballigin* bertempat di Padang Padang di bawah pimpinan Yakub Rasyid.¹⁴⁾ Yakub Rasyid sebelumnya adalah pimpinan SGM. Lama belajar Sekolah Tablig hanya 2 tahun, Kulliatul Muballigin dijadikan 3 tahun.

Kulliatul Muballigin segera mendapat sambutan dari masyarakat Sumatera Barat. Murid-murinya selalu bertambah dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 1942 sekolah tersebut telah dapat menghasilkan alumni sebanyak 111 orang.¹⁵⁾

Karena murid Kulliatul Muballigin ada yang berasal dari Aceh, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, maka alumninya juga ada yang

13) Putusan Kongres Muhamamdiyah Sumatera Barat tanggal 3 - 6 Nopember 1946 di Padang Panjang.

14) *Ibid*, hal. 38

15) *Ibid*, loc. cit

tersebar ke daerah tersebut. Di samping itu hampir di seluruh Sumatera Barat alumni Kulliatul Muballigin tersebar, karena banyaknya per-mintaan guru dari sekolah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh daerah Sumatera Barat.

Tamatan Kulliatul Muballigin di samping menjadi guru, juga ditugaskan memimpin ranting atau cabang Muhammadiyah yang ada di tempat mereka mengajar.

Sebelumnya pengurus ranting atau cabang Muhammadiyah diambil dari pemuka agama setempat yang ditugaskan di sekolah Muhammadiyah. Setelah banyak tamatan Kulliatul Muballigin yang bertugas sebagai guru, kepada mereka diminta untuk memimpin ranting atau cabang Muhammadiyah setempat. Hasil pendidikan Islam makin lama makin meningkat, hasil pendidikan Muhammadiyah, secara tak langsung juga dapat dinikmati oleh rakyat umum, karena Muhammadiyah bergerak di bidang sosial.

Tujuan pendirian Kulliatul Muballigin antara lain adalah membentuk mubalig yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi khatib Jumat, menghasilkan guru sekolah menengah tingkat Tsana-wiyah dan membentuk kader kepemimpinan Muhammadiyah dan pimpin-an masyarakat pada umumnya.

Melihat pada tujuan tersebut Muhammadiyah telah mempersiapkan tenaga yang selalu berdiri di garis depan, seperti guru atau pimpinan sekolah, imam, dan pemimpin masyarakat. Untuk menjadi guru mereka praktek pada sekolah Ibtidaiyah Muhammadiyah, untuk menjadi imam mereka praktek di Surau Muhammadiyah, untuk menjadi pimpinan masyarakat mereka praktek pada gerakan pemuda Muhammadiyah yang bernama *Hisbul Wathan* (Kepanduan Muhammadiyah). Setiap murid Kulliatul Muballigin harus melalui latihan atau praktek tersebut. Untuk latihan atau praktek dipergunakan waktu sore hari untuk kepanduan, malam hari untuk tablig, pagi hari untuk praktek di sekolah.

c) *Kweeksschool Istri (KSI).*

Putri-putri tamatan Tasnawiyah Putri, Diniyah Putri, Sekolah Desa, Sekolah Sambungan, HIS Muhammadiyah, dan lain-lain

baghagian putri tidak mau ketinggalan dari Putra. Mereka mendatangi pimpinan Muhammadiyah untuk minta didirikan sebuah sekolah guru putri tingkat menengah untuk menampung mereka melanjutkan sekolah.

Aisyiah sebagai salah satu anak organisasi Muhammadiyah, bagian putri menanggapi permintaan tersebut secara positif. Berkat ketekunan para pengasuh Aisyiah dan melalui berbagai halangan, akhirnya tahun 1937 dapat didirikan *Kweeksschool Istri* di Bukittinggi yang disingkat dengan KSI, diasuh Aisyiah cabang Bukittinggi.

Berdasarkan permintaan yang masuk, maka dibuka dua bahagian, yaitu :

KSI A khusus mendidik guru mata pelajaran agama Islam, lama belajar 3 tahun. Murid yang diterima adalah tamatan Tsanawiyah putri, Diniyah Putri, dan Sekolah Thawalib. Sedangkan KSI B khusus mendidik guru mata pelajaran umum. Murid yang terima adalah tamatan Sekolah Desa, Sekolah Sambungan dan HIS Muhammadiyah. Di samping itu dapat juga diterima murid yang berasal dari sekolah Gubernemen Belanda. Semua anak yang telah memenuhi Syarat tanpa melihat asul usul dapat diterima pada KSI. Hanya saja yang didahulukan adalah sekolah yang langsung diasuh Muhammadiyah sendiri.

Hambatan utama dalam pendirian KSI pada waktu itu adalah pandangan masyarakat Bukittinggi, terutama dari orang yang telah mendapatkan pendidikan Barat. Mereka menganggap orang Muhammadiyah adalah orang Siak (alim ulama) atau orang surau yang tidak akan mampu mengusahakan sekolah guru yang membutuhkan pengalaman ilmiah. Namun demikian Rangkayo Rukayah Rasyad, yang ditugaskan Aisyiah untuk membentuk sekolah tersebut tidak mau mundur dari usahanya. Demikianlah dengan melalui onak dan duri di tengah perjalanannya sampai dengan tahun 1942 KSI masih dapat menghasilkan 31 orang guru putri, 19 orang untuk mata pelajaran agama Islam dan 12 orang untuk guru mata pelajaran umum.¹⁵⁾

Dari hasil yang dapat dicapai oleh KSI dapat dilihat betapa gigihnya perjuangan Aisyiah menyelenggarakan pendidikan guru untuk

15) *Ibid, loc. cit*

putri di Sumatera Barat pada waktu itu. Dengan ketabahan yang luar biasa dan keuletan yang tinggi, akhirnya mereka yang pada mulanya bersikap negatif itu mau tidak mau mengakui juga bahwa orang Siak juga mempunyai kemampuan.

d) *Kulliatul Muballighat*

Pada tahun 1938 di Padang Panjang didirikan pula *Sekolah Tablig School Istri* dengan H.A. Malik Ahmad sebagai kepala Sekolahnya. LSI, rupanya belum dapat menampung perminatan yang membanjiri pimpinan Muhammadiyah, karena itu perlu untuk didirikan Tablig School Istri di Padang Panjang, lama pendidikan hanya 2 tahun. Dalam jangka waktu 3 tahun saja sesudah berdirinya sekolah itu sudah mempunyai murid sebanyak 557 orang dan pada tahun 1942 sudah menghasilkan alumni sebanyak 56 orang.¹⁶⁾

Seperti halnya dengan Sekolah Tablig Putra yang akhirnya berubah menjadi Kulliatul Muballigin, Sekolah Tablig Istri inipun pada tahun 1941 bertukar nama menjadi *Kulliatul Muballighat*, yaitu sekolah tingkat menengah atas khusus mendidik guru wanita. Pada tahun 1942 sekolah tersebut terpaksa ditutup, karena Balatentara Jepang sudah masuk ke Sumatera Barat. Tidak ada lagi orang tua yang mengizinkan anaknya meneruskan sekolah, karena takut dengan kekejaman Balatentara Jepang.

Muhammadiyah memberikan corak baru terhadap pendidikan di Sumatera Barat, yaitu dibukanya sekolah umum yang bercorak Islam. Pada sekolah itu diajarkan 80% mata pelajaran umum dan 20% mata pelajaran agama Islam. Pada sekolah khusus Islam diberikan 60% mata pelajaran Agama Islam dan 40% mata pelajaran umum. Walaupun dinamakan sekolah umum, corak Islamnya tidak ditinggalkan untuk membedakan dengan sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda.

Sebelum Muhammadiyah mendirikan sekolah umum sudah ada juga sekolah umum Islam di Padang, yaitu Sekolah Adabiah, tetapi hanya terbatas di kota Padang. Muhammadiyah mempopulerkan sekolah umum di daerah Sumatera Barat dengan corak dan cara baru.

16) Ibid, loc. cit.

3.2.2.9 Persatuan Muslimin Indonesia (Permi)

Pada tahun 1926 gedung Sumatera Thawalib runtuh karena gempa besar yang terjadi pada waktu itu disebabkan meletusnya Gunung Merapi. Sumatera Thawalib Padang Panjang saja tidak sanggup memperbaiki, oleh karena itu, diadakanlah musyawarah Sumatera Thawalib seluruh Sumatera Barat bertepat di Batusangkar. Musyawarah berlangsung selama dua hari, 20-21 Mei 1929. Di samping membicarakan usaha membangun kembali gedung yang runtuh itu, juga dibicarakan pembaharuan kurikulum, perbaikan sistem penyelenggaraan sekolah, dan akan mengadakan konferensi seluruh Sekolah Sumatera Thawalib, yang ada di Sumatera Barat, Tapanuli, Aceh, dan Bengkulu.

Sementara itu banyak orang Sumatera Barat yang pulang dari Mekah dan Mesir yang menggabungkan diri dengan Sumatera Thawalib, seperti H. Ilyas Yakub. Di samping pengaruh semangat Pergerakan Kebangsaan, ada lagi orang Sumatera Barat yang kembali dari Jawa seperti Muhammad Yamin yang menjelaskan perjuangan di Jawa dan bagaimana cara memperjuangkannya. Oleh karena bermacam pengaruh tersebut keadaan politik di Sumatera Barat semakin panas dan menunjukkan kematangan.

Pada Konperensi Sumatera Thawalib tanggal 20-21 Mei 1930 di Bukittinggi banyak pembicara yang mengemukakan masalah politik dari masalah Sumatera Thawalib.

Di antara pembicara yang besemangat mengemukakan masalah politik itu adalah H. Ilyas Yakub, Muhammad Yamin, dan Duski Samad. Akibatnya terjadi perubahan besar dalam tubuh Sumatera Thawalib, dengan berubah nama menjadi Persatuan Muslimin Indonesia yang disingkat dengan PMI yang kemudian lebih dikenal dengan nama Permi.¹⁷⁾

Perubahan nama itu berarti bahwa Sumatera Thawalib sudah terbuka untuk umum dan sudah bersifat nasional tidak lagi bergerak di bidang sosial dan pendidikan saja, tetapi sudah ikut bergerak di bidang politik Pergerakan kebangsaan Indonesia.

17) Taufik Abdullah, *School and Politics, the Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, Monograph Series University, Ithaca, New York, 1971, hal. 130.

Munculnya Permi pada tahun 1930 menunjukkan bahwa Sumatera Thawalib sudah matang untuk ikut dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Sebelum Konferensi tahun 1930 Pengurus Sumatera Thawalib di Padang Panjang sudah sering membicarakan masalah politik di Indonesia pada waktu itu dan bagaimana menggalang persatuan di antara rakyat Sumatera Barat, tetapi pembicaraan itu dilakukan secara sembunyi. Karena itulah Sumatera Thawalib dapat menerima pergantian nama dan arah perjuangan dari bidang pendidikan ke lapangan politik. Sesudah Permi muncul maka organisasi itu tampil sebagai salah satu eksponen politik di Sumatera Barat.

Walau Permi sudah menjadi organisasi politik, mereka tidak meninggalkan basis perjuangannya, yaitu masalah pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam merupakan jalur pertama dari perjuangan Permi di samping jalur politik.

Usaha Permi di bidang Pendidikan adalah didirikannya Tsanawiyah di Payakumbuh dan Bukittinggi serta *Islamic College* di Padang pada tahun 1931. Di samping itu Permi juga membina lebih dari 50 buah Thawalib yang sudah ada yang tersebar di daerah Sumatera Barat.

Islamic College, di samping menghasilkan ulama yang berpengetahuan luas juga dimaksudkan untuk menjembatani golongan intelektual Barat dengan golongan Islam. Permi ingin menarik orang tersebut untuk dapat diajak berjuang. Supaya mereka mau diajar bermusyawarah, maka orang yang akan melakukan itu harus yang mempunyai pendidikan lebih atau setingkat dengan mereka.

Dengan dukungan para intelektual Barat menambah kekuatan golongan Islam yang dapat melemahkan pihak Belanda.

Sebelumnya golongan intelektual Barat selalu memandang rendah kepada golongan intelektual Islam, tetapi Permi melihatnya dari segi lain. Bagaimanapun tingginya pengetahuan dan kedudukan mereka, mereka itu masih tetap orang Indonesia yang masih dijajah oleh bangsa Belanda. Oleh karena itu mereka harus disasarkan dan untuk menyadarkan mereka harus didekati dan dirangkul serta dibangun semangatnya. Harus ditekankan pada mereka bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang mempunyai hak hidup sama dengan bangsa

Belanda. Bangsa Indonesia harus membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Untuk itu seluruh bangsa Indonesia harus bersatu, jangan ada yang ikut membantu Belanda.

Untuk tugas menyadarkan golongan intelektual Barat itulah diserahkan kepada tamatan Islamic College. Di samping itu Permi juga menerbitkan majalah dan surat kabar, yang terutama bertujuan untuk membentuk pendapat umum tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Di antara surat kabar yang langsung diterbitkan Permi adalah :

1) Medan Rakyat

Medan Rakyat diterbitkan di Padang dan diasuh oleh H. Ilyas Yakub, yang mulai diterbitkan pada bulan September tahun 1932. Medan Rakyat merupakan corong resmi Permi yang menjelaskan tujuan perjuangan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 1933 Medan Rakyat sudah dilarang terbit oleh pemerintah Hindia Belanda, karena menganggap isi Medan Rakyat menghasut rakyat menentang pemerintahan Hindia Belanda.

2) Barisan Kita

Barisan Kita terbit di Payakumbuh di bawah pimpinan Fachruddin Hs, pada tahun 1932. Tetapi Barisan Kita tidak sampai berumur satu tahun, karena sudah dilarang pula penerbitannya oleh pemerintah Hindia Belanda dengan alasan yang sama dengan Medan Rakyat.

3) Kris

Kris terbit di Bukittingi pada tahun 1932 di bawah pimpinan Saiburahman dan H. Ibrahim Rahman. Usia Kris sempat mencapai dua tahun sebelum dilarang oleh pemerintah Belanda. Alasan tidak boleh terbit adalah karena berita-berita Kris dianggap Belanda sangat membahayakan kedudukan mereka, khususnya di Sumatera Barat.

Di samping surat kabar yang diterbitkan Permi sebagai organisasi Politik, sekolah dan organisasi yang berada di bawah naungan Permi juga menerbitkan surat kabar seperti berikut :

a) Medan Putri

Medan Putri terbit di Bukittinggi pada tahun 1932 di bawah pimpinan Syamsidar Yahya, yang diterbitkan oleh pengurus Normal Islam Putri di Bukittinggi. Tetapi pada tahun 1934 Medan Putri terpaksa pula gulung tikar.

b) Semangat Muda

Semangat Muda terbit di Padang pada tahun 1932 diusahakan oleh pelajar *Islamic College* di bawah pimpinan Tamar Jaya. Semangat Muda hidup agak lama dari surat kabar lainnya, sesudah Permi dibubarkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937, Semangat Muda berganti nama dengan Raya dan oleh karenanya masih dapat hidup beberapa tahun lagi.

c) Pahlawan Muda

Pahlawan Muda terbit pada tahun 1932 di bawah pimpinan Syafei dan diterbitkan oleh Himpunan pimpinan Islam Indonesia. Pada akhir tahun 1932 itu juga Pahlawan Muda berganti nama dan berubah menjadi majalah bulanan.

Dengan media massa itulah Permi dan beberapa organisasi yang berada di bawah naungannya menyampaikan gagasan perjuangan mereka kepada masyarakat Sumatera Barat. Mereka berusaha menyadarkan rakyat untuk berjuang dalam pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Dengan alasan Permi menghasut rakyat Sumatera Barat untuk memberontak, maka seluruh surat kabar dan majalah yang berada di bawah naungannya ditutup oleh Belanda.

Karena tindakan pimpinan Permi yang radikal maka pemerintah Belanda mulai mengawasi kegiatan Permi, baik di bidang pendidikan maupun di bidang politik. Pada tanggal 27 Desember 1932 Rasuna Said sebagai salah seorang tokoh pimpinan Permi ditangkap dan dipenjarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, karena dituduh menghasut rakyat dengan pidatonya. Selanjutnya Rasimah Ismail, Fatimah HM, Ratna Sari, Ali Nurdin Kimin ditangkap dan dipenjarakan pula oleh Belanda, dan mereka adalah tokoh Permi yang aktif bergerak di bidang politik. Tahun berikutnya Mukhtar Lutfi, H. Ilyas Yakub, dan H. Jalaluddin Thaib juga ditangkap Belanda dan tahun berikutnya

mereka dibuang ke Boven Digul bersama pimpinan pergerakan lainnya. Beberapa guru Thawalib dilarang mengajar oleh Belanda, seperti Zainal Abidin Ahmad, Burhanuddin Sutan Pamuncak, Burhan, dan TM Jamaris. Pimpinan Permi selanjutnya dipegang oleh H. Syuib el-Yunusi, kemudian diganti oleh HMD Datuk Palimo Kayo. Walaupun Permi masih dibiarkan hidup oleh pemerintah Belanda, tetapi pada tahun 1933 itu semua kegiatan Permi dilarang oleh pemerintah Belanda. Tetapi karena Permi di bawah pimpinan HMD Datuk Palimo Kayo masih melakukan kegiatan, maka pada tahun 1935 HMD Datuk Palimo Kayo ditangkap oleh pemerintah Belanda dan pada tahun 1937 Permi dibubarkan.

3.2.2.10 INS Kayutanam

1) Dasar Pendidikan INS

INS Kayutanam didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926¹⁸⁾, sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Reaksi yang demikian di Sumatera Barat juga menunjukkan dirinya dengan nyata dalam berbagai gerakan. INS Kayutanam adalah merupakan salah satu bentuk gerakan tersebut, yang lahir sebagai reaksi bangsa Indonesia di Sumatera Barat melalui M. Syafei dalam bidang pendidikan.¹⁹⁾

M. Syafei mempunyai pandangan bahwa Kemerdekaan Indonesia tidak mungkin diperoleh hanya dengan perjuangan beberapa orang pemimpin saja, tetapi harus didukung oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, rakyat juga harus ikut berjuang. Agar perjuangan dapat mencapai tujuan, maka rakyat perlu ditingkatkan kecerdasannya. Untuk meningkatkan kecerdasan rakyat, pendidikan harus ditingkatkan pula, yaitu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan mencapai Indonesia Merdeka.

18) M. Syafei, *Sejarah INS Kayutanam*, Harian Angkatan Bersenjata Edisi Padang, 2 November 1966, hal. I.

19) Abdul Mukti A. H., *Panji Masyarakat*, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1966, No. 41, hal. 41.

INS juga memberikan pendidikan yang sesuai dengan masyarakat, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang hanya ingin mendapatkan tenaga terdidik yang murah untuk kepentingan mereka. M. Syafei menyadari, walaupun jumlah sekolah banyak didirikan Belanda, tetapi pada hakekatnya adalah untuk kepentingan mereka. Cara tradisional dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan intelektualistis semata, tidaklah sesuai dengan perkembangan jiwa anak Indonesia. Sistem tersebut hanya akan mendidik anak Indonesia menjadi robot pemerintah Hindia Belanda yang melaksanakan kepentingan Belanda di Indonesia. Otak anak didik hanya diisi dengan bermacam pengetahuan yang kegunaannya bagi kehidupan masyarakat Indonesia belum tentu manfaatnya. Dasar pendidikan tersebut jauh berbeda dengan kenyataan hidup masyarakat Indonesia, pendidikan yang diselenggarakan Belanda tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Hal inilah yang akan diubah oleh M. Syafei melalui INS.

Bahan pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia, di samping teori yang mendasari ilmu pengetahuan tersebut, prakteknya diberikan dengan seimbang. Dengan demikian apabila tingkatan teori kurang tinggi dapat diimbangi oleh praktek yang baik. Dengan dasar pandangan yang demikian INS melaksanakan secara seimbang antara teori dan praktek dengan tujuan akhir diletakkan pada kemampuan untuk melaksanakan teori tersebut sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu pelajaran diberikan sesuai dengan harus dipupuk dengan baik dan diberikan latihan yang sesuai supaya dapat dikembangkan secara optimal.

M. Syafei ingin menghilangkan penyakit pendidikan pada waktu itu, yaitu verbalisme.

Verbalisme dalam pendidikan akan menghasilkan anak ibarat orang membuat kue, bagaimana bentuk cetakannya bagitulah bentuk kuenya. Sistem pendidikan yang begini akan menghasilkan manusia yang sempit alam pikirannya atau akan menghasilkan anak didik yang serba tanggung menghadapi kehidupan masyarakat dan pendidikan yang demikian tidak berguna dan tidak dibutuhkan masyarakat. Anak didik latih dengan bekerja sambil belajar, kecerdasan berpikir anak

Dalam hal ini M. Syafei mengatakan sebagai berikut :

"..... kami mendapat keyakinan bahwa partai politik baru kuat, kalau anggota-anggotanya mempunyai idiologi politik, kalau tidak demikian tidak akan bisa menghadapi penjajahan dengan baik. Keyakinan ini mendorong kami untuk mendirikan perguruan, di mana dilakukan pembentukan kader-kader untuk gerakan Nasional Indonesia, mencapai tujuan, yaitu Kemerdekaan."²⁰⁾

Walaupun keyakinan M. Syafei ini dikemukakan sesudah 40 tahun didirikannya INS, tetapi hal tersebut dapat dipegang sebagai suatu keyakinan M. Syafei yang menjadi dasar untuk mendirikan INS pada tahun 1926.

Keyakinan INS Kayutanam yang selalu dipegang teguh oleh M. Syafei dalam mengelola INS dari tahun ke tahun adalah :

- a) mendidik rakyat ke arah kemerdekaan
- b) memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c) mendidik pemuda-pemuda supaya berguna bagi masyarakat.
- d) menanamkan kepercayaan pada diri sendiri dan berani bertanggung jawab
- e) tidak mau menerima bantuan yang mengikat.²¹⁾

Semboyan M. Syafei adalah "cari sendiri dan kerja sendiri."²²⁾

Tujuan pertama INS adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, merupakan landasan keyakinan M. Syafei untuk mendirikan INS. Apabila rakyat Indonesia telah mengerti arti kemerdekaan dan dapat melihat kehidupan rakyat terjajah, maka mereka ikut secara sadar dalam setiap gerakan mencapai Indonesia Merdeka. Melalui pendidikan rakyat dapat mempunyai idiologi politik dan dapat mengetahui sasaran yang diperjuangkan. Pendidikan kemerdekaan yang diberikan M. Syafei melalui INS adalah kemerdekaan dalam arti yang luas, yaitu kemerdekaan berfikir, berbuat, menentukan pilihan, dan berfikir berdasarkan kenyataan.

20) *Ibid, loc. cit*

21) *Aliran-aliran Baru dalam Pendidikan dan pengajaran, Percetakan Dagang Usaha, Payakumbuh, 1958, hal. 91.*

22) *Ibid, loc. cit.*

Tujuan lain INS yaitu menanamkan kepercayaan pada diri sendiri dan berani bertanggung jawab, merupakan tujuan pendidikan INS. Sistem ini akan memupuk kepribadian anak didik dengan kepribadian Indonesia, bukan kepribadian Barat. Anak didik akan mempunyai jiwa yang dinamis, percaya pada diri sendiri, berani berbuat, dan berani bertanggung jawab. Dengan tujuan ini M. Syafei membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

INS berusaha mendidik supaya anak dapat berdiri sendiri dalam keadaan yang bagaimanapun. Tujuan ini merupakan reaksi langsung terhadap sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang selalu membuat hasil didikannya tergantung kepada mereka.

Segala bantuan yang mengikat tidak diterima, karena kerja sendiri, dan usaha sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan sistem belajar sambil bekerja. M. Syafei berusaha membangkitkan watak yang baik terhadap anak didiknya di samping aktif, kreatif dan efisien dalam bekerja. Bahan serta alat pelajaran diambilkan dari lingkungan dan mudah memperolehnya. Anak didik dibiasakan bekerja dengan alat sederhana untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kenyataan yang berlaku pada waktu itu dalam dunia pendidikan yaitu pendidikan yang bersifat umum dan intelektualitas, hanya mementingkan kecerdasan otak semata dan kurang memperhatikan serta membina bakat yang dimiliki anak didik. Terpengaruh oleh cita-cita Dewey dengan pragmatisme dan Kerschensteiner dengan *Arbeitschule* serta didorong oleh keinginan sendiri bahwa Tuhan tidak sia-sia menjadikan manusia dan alam lainnya, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia mesti berguna sesuai dengan kodrat kejadian bumi dan isinya oleh Tuhan. Kalau sekiranya manusia dan alam lainnya itu tidak berguna, hal itu disebabkan karena manusia itu sendiri yang tidak pandai mempergunakannya.²³⁾

23). Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia*, Propinsi Sumatera Tengah, hal. 778.

Dasar dan tujuan pendidikan INS dapat dilihat beberapa hal penting :

- 1) INS jelas bersifat nasional dan tujuan akhir yang hendak dicapai ialah dapat berdiri sendiri tanpa perlu mendapat bantuan dari siapapun.
- 2) M. Syafei adalah seorang pendidik sejati, karena dari dasar dan tujuan pendidikan INS jelas terlihat cita-cita pedagogisnya. M. Syafei secara demokratis ingin memberi kesempatan kepada anak didiknya untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing yang telah ditentukan oleh bakat dan pembawaan anak tersebut. Melalui pertumbuhan dan perkembangannya anak didik tersebut dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari orang lain.²⁴⁾
- 3) INS lahir sebagai reksi M. Syafei terhadap sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) Sistem pendidikan INS merupakan sistem yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pandangan dan tujuan pendidikan tersebut di atas, M. Syafei mendirikan ruang pendidikan di Kayutanam yang terletak kira-kira 55 km dari sebelah utara Padang. Ruang pendidikan itu diberi nama dengan "*Indonesische Netherlandasche Scholl*" (INS).

Nama INS ini dipertahankan terus sampai sekarang. Waktu Jepang menduduki Indonesia nama INS tetap bertahan walaupun dengan mengalami perubahan seperti "*Indonesia Nippon Sekolah*". Di zaman kemerdekaan Indonesia kepanjangannya berubah lagi dengan "*Indonesia Nationale School*" dengan singkatannya INS. Sekarang ini orang lebih mengenal nama singkat dari pada nama lengkapnya dengan menambahkan kata Kayutanam di belakangnya, yaitu INS Kayutanam,²⁵⁾ walaupun INS lain tidak ada lagi di Indonesia.

24. Bandingkan dengan Prof. Soegarda Perbakawitja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Medeka MCMLXX*, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal. 212.

25. A.A. Navis, *Wawancara*, Mei 1980, Padang

Dipilihnya Kayutanam sebagai pusat pendidikan INS bukanlah suatu hal yang kebetulan saja, tetapi memang telah dipilih dengan sengaja. Alamnya sangat baik untuk menyelenggarakan pendidikan, udaranya sedang tidak dingin seperti Padang Panjang dan tidak panas seperti Padang. Di samping itu Kayutanam merupakan sebuah daerah yang tenang, jauh dari kesibukan kota. Suasana yang tenang merupakan salah satu kondisi yang dapat menunjang kebersihan pendidikan. Ketenangan Kayutanam bukanlah ketenangan yang mati, melainkan merupakan sebuah ketenangan yang hidup, karena terletak di tengah lalu lintas antara Bukittinggi dan Padang. Waktu itu lalu lintas dilaksanakan dengan kereta api, dan melalui jalur lalu lintas inilah suasana kehidupan dibawa ke Kayutanam, terutama untuk kehidupan pendidikan, dalam ketenangan terdapat dinamika kehidupan.

2) Sejarah Singkat INS Kayutanam

Membicarakan sejarah INS tidak terlepas dari sejarah pendirinya, karena antara keduanya erat hubungannya.

M. Syafei lahir pada tahun 1899, anak Marah Sutan seorang guru dan pengarang. Mula-mula M. Syafei belajar di sekolah guru di Bukittinggi, setelah tamat dia bekerja sebagai guru pada Sekolah Kartini di Jakarta selama 6 tahun.

M. Syafei tidak menyukai pendidikan kolonial pada waktu itu dan berkeinginan mengubahnya sesuai dengan kepribadian Indonesia, agar dapat melakukan perubahan ia harus menambah ilmu pengetahuan. Untuk menambah ilmu pengetahuan tak mungkin dilakukan di Jakarta dengan orang kolonial yang tidak disukainya. Karena itu dia pergi di negeri Belanda sebagai pusat pengetahuan orang kolonial di Indonesia, karena belajar di sana lebih bebas dari di Jakarta.

Tanggal 21 Mei 1922 M. Syafei pergi ke negeri Belanda untuk belajar di bidang seni musik, menggambar, pekerjaan tangan, seni drama dan lain-lain. Selama di negeri Belanda dia berkesempatan pula mengunjungi negara Eropa lainnya dalam rangka menambah pengetahuan di bidang pendidikan.

Di samping belajar ke negeri Belanda, M. Syafei mendapat tugas khusus dari ayahnya untuk menyelidiki dan mengetahui di mana letak kekuatan bangsa Belanda yang dapat menguasai Indonesia.

Di negeri Belanda M. Syafei menetap selama 4 tahun 7 bulan dan berhak memperoleh ijazah dalam 4 bidang, yaitu Guru Eropa, menggambar, pekerjaan tangan, dan musik. Bulan September 1926 dia kembali ke Indonesia dan pada bulan berikutnya, yaitu tanggal 31 Oktober 1926 ia sudah mendirikan INS di Kayutanam.

Pada mulanya INS berasal dari sekolah yang diasuh oleh organisasi Pegawai Kereta Api di Tambang Ombilin, sekolah ini bertempat di Kayutanam. Pada sekolah inilah M. Syafei bersama dengan ayahnya, Marah Sutan, melaksanakan gagasannya di bidang pendidikan, dan Sekolah Pegawai Kereta Api itulah yang dijadikan INS.

INS mulai dengan 75 orang murid dengan dua kelas dan gurunya adalah M. Syafei sendiri. Perlengkapan sekolah masih kurang, meja dan kursi untuk guru dan murid tidak cukup, tetapi hal tersebut bagi M. Syafei bukan masalah berat. Yang penting ada murid dan ada kemauan untuk belajar dan bekerja, semua alat dan keperluan sekolah dan pelajaran sederhana sekali. Jika bangku tidak cukup murid bersila saja di atas tikar, bahan yang dipergunakan membuat alat diambil dari alam sekitarnya.

Berkat kerja keras M. Syafei bersama muridnya, INS mulai berkembang, tahun 1932, pekarangan INS sudah mencapai luas 462 M², dan dua tahun kemudian sudah menjadi 2.310 m².

Walaupun sampai tahun 1934 INS dapat dikembangkan secara pisik, tetapi M. Syafei sendiri belum puas dengan letak INS pada waktu itu, yaitu di tengah kesibukan pasar Kayutanam. Oleh karena itu, M. Syafei bermaksud memindahkan ke tempat yang lebih baik tenang. Itulah sebabnya pada tahun 1935 M. Syafei membeli tanah di Pelabihan seluas 18 bau (= 106,447,35 m²) yang terletak kira-kira 3 km dari pasar Kayutanam, dan begitu tanah dibeli maka usaha pemindahan INS segera dimulai. Demikian giatnya usaha pemindahan ini dilakukan, maka pada ulang tahun INS yang ke-10 sudah dapat dilaksanakan pada kompleksnya yang baru dan setahun kemudian INS sudah pindah semuanya ke Pelabihan.

Pada tahun 1937 INS sudah memiliki : 3 buah rumah guru, sebuah asrama dengan kapasitas 300 orang murid, 600 orang murid, sebuah ruangan makan, sebuah lapangan tenis, sebuah danau buatan tempat rekreasi dan praktek, sebuah taman bacaan, dan sebuah gedung olah raga.

Perkembangan INS mengalami kemajuan yang pesat menurut ukuran waktu itu, segala sesuatunya diusahakan sendiri secara gotong royong antara guru dan murid. Dana dikumpulkan dari pertunjukkan sandiwara, pameran hasil karya murid INS, dan penjualan hasil kerajinan tangan. Prinsip cari sendiri dan usahakan sendiri betul-betul dipraktekkan dan dipegang teguh dalam mengembangkan diri. Rasa persatuan dan kesatuan dalam tubuh INS kuat sekali dan kompak. Keadaan ini membantu usaha pembangunannya, sehingga tidak ada sesuatu pekerjaan yang dirasakan berat. Dalam pembangunan dan pengembangan dirinya, INS tidak mau menerima tawaran bantuan pemerintah Belanda karena bantuan yang demikian tidak sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh oleh INS selama ini, yaitu tidak mau menerima bantuan pemerintah Belanda karena bantuan yang demikian tidak sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh oleh INS selama ini, yaitu tidak mau menerima bantuan yang mengikat, baik mengikat secara material maupun moral. Hanya pemberian yang betul-betul tidak mengikat dan diberikan secara ikhlas yang dapat diterima, walaupun jumlah pemberian itu kecil seperti berbentuk selebar papan, sehelai atap seng, dan sebagainya.

Cara kerja yang demikian ditenamkan M. Syafei secara mendasar. Pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam pelajaran melalui perbuatan nyata.

Contoh dengan perbuatan, lebih baik untuk membentuk watak anak didik dari pada berteori saja di depan kelas. Alumni INS kemudian menjadi orang yang penuh pengalaman dan membantu untuk hidup mandiri di tengah masyarakat.

Supaya INS menjadi milik masyarakat, maka pada tahun 1937 INS diwakafkan kepada masyarakat di hadapan notaris. Dengan demikian INS jelas tidak merupakan milik pribadi M. Syafei yang dapat diwariskan seperti harta pusaka lainnya di Sumatera Barat. Anak

kemenakannya tidak akan dapat menuntut di kemudian hari, karena telah diserahkan menjadi milik masyarakat. Hanya saja selama M. Syafei masih hidup dialah yang akan memimpin terus.

Penyerahan INS kepada masyarakat menunjukkan pandangan M. Syafei mengenai pembahagian harta waris. Di Sumatera Barat harta dibagi dua, yaitu harta pusaka dan harta pencaharian. Harta pusaka merupakan milik bersama suatu kaum dan diwariskan kepada kemenakan sedangkan harta pencaharian merupakan milik suami istri yang bersangkutan dan boleh diwariskan kepada anak. Sehubungan dengan pembahagian harta waris itulah yang ditakutkan oleh M. Syafei, karena INS merupakan jerih payahnya bersama ayah angkatnya, jadi dapat dianggap sebagai harta pencaharian yang dapat diwarisi oleh kemenakan maupun anaknya. Supaya jangan terjadi silang sengketa di kemudian hari antara keluarga yang ditinggalkan, maka INS disumbangkan kepada masyarakat.

Sebelum Jepang masuk ke Sumatera Barat kompleks INS sudah diduduki oleh Belanda dan dijadikan basis pertahanan untuk menghadapi Balatentara Jepang yang datang dari arah utara. Akibat pendudukan tersebut INS tidak dapat menyelenggarakan pelajaran dan kegiatannya terhenti sama sekali, dan mulailah masa suram bagi INS.

Kegiatan INS dapat dihidupkan kembali sesudah Jepang menduduki Sumatera Barat di awal tahun 1942, tetapi keadaan INS sudah parah, beberapa bangunan mengalami kerusakan berat akibat pendudukan tentara Belanda sebelumnya. Walaupun Jepang mengizinkan dibukanya kembali INS, tetapi mereka mempergunakan tempat tersebut sebagai tempat latihan tentara. Dengan demikian INS belum dapat juga menyelenggarakan pendidikan dengan tenang, karena terganggu latihan militer Jepang.

Pada waktu Jepang menduduki Sumatera Barat INS tidak jalan karena rakyat diwajibkan menjalankan hal yang menguntungkan kepentingan perang Jepang, seperti bergotong royong menanam jarak, jagung, ubi dan sebagainya yang semua hasilnya harus diserahkan kepada Jepang. Di samping itu kehidupan rakyat pada umumnya menderita dan sengsara, orang tidak sanggup buat menyediakan biaya

untuk ongkos sekolah anaknya. Dengan demikian jumlah muris INS sangat berkurang, dan prinsip INS yang dipegang teguh sejak semula tetap dijalankan, yaitu tidak mau menerima bantuan dari siapa juga, walaupun dari Jepang yang sedang berkuasa.

Hampir seluruh bangunan INS mengalami kerusakan berat dan tidak sempat diperbaiki karena keadaan tidak mengijinkan.

Sesudah Jepang kalah INS mulai bergerak kembali dengan memperbaiki bangunan yang rusak. Pada awal kemerdekaan sukar mengumpulkan biaya karena semua daya dicurahkan untuk menghadapi musuh.

Karena keadaan INS belum dapat diperbaiki sesudah kemerdekaan, maka M. Syafei berusaha mengalihkan kegiatannya ke Padang Panjang dengan mendirikan Ruang Pendidikan dan Pengajaran (RPPK). Seluruh peralatan diambilkan dari peralatan INS yang masih dapat dipakai.

Pada waktu terjadi Agresi II Belanda, INS dibumi hanguskan pada tahun 1948, sewaktu kekuatan pihak Belanda tidak dapat ditahan lagi. M. Syafei terpaksa menyetujui walaupun dengan perasaan yang berat, demi untuk kepentingan bangsa. Sewaktu tentara Belanda menduduki Kayutanam dan INS, maka musibah yang menimpa INS makin bertambah. INS sebagai pusat kekuatan Belanda di Kayutanam harus digempur oleh tentara Republik, sehingga kerusakan INS bertambah. Di samping itu bangunan RPPK di Padang Panjang juga mengalami nasib yang sama.

Kehancuran fisik INS tidak ikut menghancurkan cita-cita yang terkandung di dalamnya. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1950, reruntuhan INS mulai dibangun kembali, dimulai dengan 30 orang murid laki-laki dan 16 orang murid wanita. Karena melihat keadaan muridnya pada waktu itu, M. Syafei bersedia menerima bantuan Pemerintah Indonesia sebesar Rp. 75,- untuk setiap murid INS. Penerimaan bantuan ini tidak melanggar prinsip INS, karena yang memberikan bantuan adalah Pemerintah Indonesia dan tidak mengikat.

Pada tanggal 31 Oktober 1952 INS dijadikan SGB Pemerintah Istimewa di bawah pimpinan M. Syafei, sistem yang berlaku pada

SGB itu agak berlainan dengan SGB lainnya. Ciri-ciri khas INS jelas terlihat pada SGB Istimewa itu.

Pada tahun 1952 INS mendirikan Percetakan Sridharma dan majalah Sendi merupakan terbitan bulanan di bawah pimpinan M. Syafei, yang membawa cita-cita M. Syafei di bidang pendidikan dengan Ruang Pendidikan INS Kayutanam. Majalah ini merupakan usaha M. Syafei untuk lebih cepat menyebarluaskan gagasan pendidikannya ke tengah masyarakat.

Pada tahun 1953, atas desakan Gubernur Sumatera Tengah waktu itu, Ruslan Mulyoharjo, INS mendapat bantuan sebanyak Rp. 125.000,- dari Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Dengan bantuan uang tersebut INS membangun kembali dengan kemampuan yang masih terbatas itu.

Pada tahun 1957 M. Syafei bersama beberapa orang pengasuh INS mengungsi ke pedalaman Sumatera Barat sehubungan dengan terjadinya peristiwa PRRI. Mulai tahun tersebut sampai tahun 1966 merupakan masa yang suram dalam sejarah INS, karena selama hampir delapan tahun INS tidak terpelihara dan terlantar. Walaupun peristiwa PRRI hanya berjalan beberapa tahun saja, tetapi INS selama 8 tahun tidak dapat bergerak. Sebenarnya kemauan untuk bergerak dari para pengasuh INS masih tetap ada, tetapi kesempatan untuk itu belum ada. Pada tahun 1967 M. Syafei kembali ke Kayutanam dan mulai membenahi bekas reruntuhan INS.

M. Syafei pergi ke Jakarta untuk mencari dana, agar INS dapat dibangun secara menyeluruh. Dengan izin pemerintah M. Syafei menghubungi NOVIB (Nederlandsche Organisatie Voor International Bijstand) di negeri Belanda. Tetapi sayang sebelum bantuan NOVIB datang, pada tanggal 5 Maret 1969 M. Syafei meninggal dunia.

Walaupun M. Syafei sudah tiada, namun cita-citanya tetap diteruskan oleh penggantinya A. Hamid. Di Jakarta dibentuk sebuah Yayasan yang bernama Yayasan Penyantunan Cita-cita Pendidikan INS Kayutanam dengan anggota pengurus sebagai berikut :

Ketua Umum	: Chaidir
Ketua I	: Kolonel Noor Nasution

Ketua II	: Anwar Nurin
Ketua III	: Mayor Lat Masfar Jamin
Sekretaris I	: Drs. B. Ridwan Lintang
Sekretaris II	: Abwar Syam
Bendahara I	: D. Jalins
Bendahara II	: Drs. Yanuar Yunus
Pembantu Umum I	: Drs. Yunus Akbar
Pembantu Umum II	: Hasan Basri
Pembantu Umum III	: L. Mainuras
Pengawas	: Nasrun A.S
	Anwar Tamin
	Drs. M. Said ²⁶⁾

Melalui usaha Yayasan tersebut pada tanggal 9 Februari 1971 Direktur NOVIB, Van Vlijmen memberikan bantuan sebanyak seratus juta rupiah dalam jangka 4 tahun. Mulai tahun itu juga pembangunan INS sudah dilaksanakan. Pada tahun 1980 INS sudah berjalan kembali sebagaimana biasa dan pembangunannya dilanjutkan dengan bantuan Pemerintah Republik Indonesia. Sekarang (1980) dapat dilihat di Pelabuhan Kayutanam sebuah kampus INS berdiri dengan megahnya.

3) Sistem Pendidikan INS

Prinsip pertama yang dipegang teguh oleh M. Syafei dalam menyelenggarakan pendidikan adalah "belajar, bekerja, dan berbuat". Apabila murid hanya mendengarkan saja ilmu pengetahuan yang diajarkan guru melalui kata-kata yang kadang-kadang tidak dimengerti, tidak akan berguna bagi murid karena mereka tidak tahu dan tidak akan pandai mempergunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan atau untuk memperbaiki tingkat kehidupannya kelak di kemudian hari sesudah tamat belajar. Murid hanya akan dipenuhi oleh bermacam pengetahuan yang tinggi dan muluk-muluk, tetapi apabila sudah memasuki kehidupan masyarakat yang sesungguhnya mereka akan bingung dan serba tanggung, sebab mereka tidak pandai mempergunakan ilmu yang banyak mereka miliki itu. Dengan demikian ilmu yang

26. Haji Anwar Tamin, *Wawancara*, Padang, September 1980.

telah diperoleh tidak bermanfaat bagi murid, dan orang lain, ibarat sepotong emas yang terbenam di dalam lumpur.

Sistem pendidikan yang demikian hanya akan membuat murid menjadi orang suka meniru, karena sudah dibiasakan barang siapa yang pandai menirukan apa yang dikatakan gurunya, dialah yang akan mendapatkan nilai yang tinggi atau dianggap tinggi prestasinya. Orang yang berprestasi demikian di dalam kelas, dalam masyarakat belum tentu berhasil. Pendidikan yang demikian akan melahirkan bangsa yang suka meniru tanpa berpikir dan bangsa itu tidak akan dapat menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang demikian tergantung hidupnya terhadap bangsa lain, tidak dapat mengambil inisiatif sendiri.

M. Syafei menghendaki supaya pendidikan itu didapat melalui pengalaman yang terus-menerus untuk dapat membentuk kebiasaan. Supaya kebiasaan yang akan diperoleh murid sesuai dengan yang diharapkan, maka pendidikan yang akan dialaminya itulah yang diarahkan. Kurikulum sekolah harus disesuaikan dengan kebiasaan murid yang diharapkan itu. Kebiasaan yang sudah membaku pada diri seorang murid, menyebabkan mereka terbiasa pula berpikir secara terpola, karena kebiasaan yang sudah membaku itu didapatnya melalui pengalaman yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Jadi, dengan memberikan pengalaman dengan berulang-ulang akan menimbulkan kebiasaan dan kebiasaan ini akan menimbulkan cara berpikir yang lebih aktif, karena pikirannya sudah biasa dilatih melalui pengalaman yang terarah secara terus-menerus.

Supaya anak berpikir secara aktif dan kritis, bagi M. Syafei nilai anak didiknya tidak menjadi masalah yang nomor satu. Yang diutamakan adalah bagaimana proses kerja untuk mencapai hasil tersebut. Melalui pengalaman suatu proses kerja yang telah dilalui dan diketahui dengan baik dapat pula dipergunakan untuk mengerjakan hal lain yang sejenis. Lebih diharapkan apabila proses kerjanya baik dan hasil kerjanya juga baik. Dengan demikian M. Syafei mempergunakan dalam sistem pendidikannya proses kerja yang baik dengan hasil yang baik.

Pengalaman, kebiasaan, dan berpikir aktif serta kritis yang paling tepat dilatih melalui pekerjaan tangan kata M. Syafei, bukan dengan pelajaran yang melulu mengutamakan teori saja.

Pekerjaan tangan dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan cara, seperti menggambar, kerajinan tangan, bertukang, dan sebagainya. Tentu saja pemberiannya kepada murid harus dilihat tingkatan umurnya, makin rendah umur murid makin rendah dan sederhana tingkat kesukaran pekerjaan tangan yang diberikan kepadanya.

Menurut M. Syafei pada setiap manusia terdapat tiga hal pokok yang dapat dikembangkan untuk mendidik manusia itu ke arah yang dikehendaki, yaitu : melihat (45%), mendengar (25%) dan bergerak (35%). Apabila melihat saja yang dilatih selama masa pendidikan, murid akan merupakan orang yang tidak berdaya dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari, karena mereka tidak akan dapat berbuat. Begitu juga dengan mendengar saja, akan membentuk manusia peniru yang baik tanpa kesadaran. Sebaliknya apabila unsur bergerak yang dikembangkan berarti sekaligus ketiga unsur itu dikembangkan, karena untuk dapat bekerja dan berbuat orang harus dapat melihat dan mendengar. Dengan bekerja dan berbuat dalam pendidikan sekaligus dapat mengembangkan seluruh pancainderanya dengan aktif.

Dalam sistem pendidikan semacam ini tugas guru hanya sebagai pengontrol saja sesudah memberitahukan bagaimana proses mengerjakannya, sedangkan dalam proses pengerjaan seluruhnya tergantung kepada aktifitas murid sendiri. Murid diberikan kebebasan untuk mengerjakan, boleh sama dengan yang diajarkan guru dan boleh juga berbeda sama sekali. Yang penting adalah bahwa proses pengerjaannya harus benar dan tepat. Dengan demikian murid akan terbiasa bekerja secara aktif, efektif, dan efisien mengingat waktu yang diberikan untuk mengerjakan sesuatu terbatas.

Dengan sistem yang demikian M. Syafei berusaha menanamkan watak yang teguh dan pendirian yang kuat terhadap murid-muridnya serta merupakan pekerja yang ulet dan pantang menyerah. Hal demikianlah yang menyebabkan tamatan INS selalu berhasil dalam setiap bidang usahanya dalam masyarakat.

Pengalaman yang diberikan M. Syafei terhadap anak didiknya bukan saja dalam proses belajar mengajar, tetapi juga dalam setiap kegiatan murid selama mereka belajar di INS. Proses belajar sudah dimulai waktu murid bangun tidur di pagi hari. Dia harus

membersihkan tempat tidur di pagi hari. Dia harus membersihkan tempat tidurnya serapi mungkin sebelum ke luar pergi mandi, selimut harus dilipat, tempat tidur harus dirapikan, dan sesudah itu baru mandi dan sembahyang. Sesudah itu membersihkan kamar dan mempersiapkan sarapan, piring dan gelas harus dicuci sendiri sesudah makan. Dengan demikian ditanamkan pendidikan untuk hidup sendiri, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dilakukannya dan dengan sendirinya ikut menjamin ketenteraman hidup orang lain.

Dalam pelajaran di sekolah juga dilakukan demikian, misalnya dalam masalah pertukangan. Sebelum murid memulai pelajarannya, mereka harus memeriksa alat pertukangan yang akan dipergunakannya terlebih dahulu, apakah ada yang rusak atau kotor yang akan dapat mengganggu kelancaran pekerjaan/pelajaran, misalnya dalam membuat sebuah kursi. Guru hanya menjelaskan bagaimana cara membuat kursi dan alat apa saja yang dapat dipergunakan serta bagaimana mempergunakan alat tersebut. Mula-mula guru membuat sebuah disain kursi, artinya apa yang mau dikerjakan harus direncanakan terlebih dahulu, tidak boleh asal bekerja saja, karena hasilnya tidak akan baik dan memenuhi kebutuhan. Sesudah itu murid disuruh mengerjakan menurut gambar masing-masing. Yang diutamakan bukanlah hasilnya, tetapi bagaimana proses pengerjaan kursi tersebut dari awal sampai selesai. Guru hanya mengawasi saja dalam waktu yang telah ditetapkan. Sesudah selesai bekerja murid harus membersihkan alat pertukangan-nya dan memperbaiki yang rusak sesudah itu disimpan pada tempatnya kembali dengan rapi. Begitu juga dilakukan terhadap mata pelajaran lainnya sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaan.

Dengan pengalaman demikian murid bukan saja mendapat pengetahuan teori dan praktek, tetapi juga tentang bagaimana merawat dan memelihara alat yang dipergunakan. Murid dibiasakan membuat rencana, mengetahui pelaksanaannya, dan dapat merawat sesuatu yang mereka kerjakan secara efisien dan praktis. Apabila pengalaman yang demikian sudah menjadi kebiasaan dan mendarah sangat membantunya nanti dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Kebiasaan yang demikian juga menimbulkan cara berpikir yang teratur pula.

Sistem pendidikan INS prinsipnya adalah pendidikan harus diberikan melalui pengalaman sendiri dan melalui pengalaman itu akan terbentuk kebiasaan yang akan membentuk kepribadian murid yang berwatak teguh dan berpendidikan kuat. Kebiasaan itu juga akan membentuk cara berpikir yang terpola. Hal itu semua paling tepat diberikan melalui mata pelajaran pekerjaan tangan dengan bekerja sambil belajar.

4) Jenjang pendidikan dan Isi Pelajaran

a) Jenjang Pendidikan

1) Ruang Bawah

Ruang Bawah merupakan tingkat Sekolah Dasar, lama belajar 7 tahun. Pada tingkat ini pelajaran teori diberikan 75% dari seluruh jam pelajaran, sedangkan yang 25% lagi diisi dengan pelajaran praktek. Perbandingan ini diberikan mengingat bahwa murid tersebut belum sanggup bekerja sambil belajar lebih banyak dari 25% itu, karena mereka masih kecil. Pelajaran bukan saja diberikan pada pagi hari, tetapi juga pada sore hari. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mudah karena sebahagian besar murid tinggal di asrama.

2) Ruang Atas

Ruang Atas ini merupakan tingkatan sekolah menengah, baik Sekolah Lanjutan Pertama maupun Sekolah Lanjutan Atas, lama pendidikan 6 tahun. INS tidak mempergunakan tingkatan sekolah yang berlaku pada waktu itu, yaitu MULO 3 tahun dan AMS 3 tahun dengan tempat yang terpisah.

Pada Ruang Atas ini pelajaran teori dan praktek diberikan sama banyak yaitu 50% dan 50%. Sesudah tamat dari tingkat ini murid tidak melanjutkan lagi, melainkan langsung diterjunkan dalam masyarakat untuk menyumbangkan tenaganya bagi kepentingan masyarakat. Tetapi tidak ada larangan bagi mereka yang berkeinginan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi walaupun tidak diasuh lagi oleh INS.

b) Isi Pelajaran

Menggambar merupakan pelajaran yang sangat penting pada sekolah INS sekolah INS Kayutanam dan tujuan utama dari mata pelajaran menggambar bukanlah untuk menjadikan murid seorang ahli gambar atau pelukis yang pandai, melainkan untuk membuat anak menjadi seorang yang aktif dalam mencipta dan merasa. Pelajaran menggambar diberikan secara bebas tidak terlampau mengikat anak dengan aturan gambar secara kaku. Dengan mengikat murid dengan peraturan yang kaku, inisiatif dan jiwa murid tidak akan berkembang, sedangkan yang akan dikembangkan dengan mata pelajaran menggambar ini adalah masalah aktivitas, inisiatif, dan jiwa yang merdeka. Guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan memimpin murid ke arah menggambar bebas, bukan untuk menetapkan gambar apa yang akan dibuat murid.

Menggambar bebas akan melatih emosi dan spontanitas murid, walaupun hasil gambarnya tidak berapa bagus, tetapi gambar tersebut adalah hasil cipta murid itu sendiri, yang orisinil, bukan jiplakan. Pendidikan dengan cara ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa murid. Mereka akan dapat menjadi manusia yang berwatak teguh serta kuat pendiriannya.

Pelajaran menggambar terdiri dari banyak ragamnya, seperti menggambar bebas, menggambar menurut contoh, menggambar di luar kepala, menggambar kerangka, menggambar gelas, kotak, dan sejenisnya, menggambar dengan garis lurus, menggambar dengan cat air, menggambar itu diberikan kepada murid menurut tingkatan umurnya. Memilih dan menetapkan bahan pelajaran merupakan masalah yang penting, karena jika keliru memberikannya akan dapat memutar balikan tujuan pelajaran, sehingga apa yang ingin dicapai tidak dapat dilaksanakan.

Pelajaran musik juga merupakan pelajaran pokok pada INS, pelajaran yang diberikan adalah latihan seni suara, main biola, gitar suling, seni tari, dan latihan sandiwara. Pelajaran musik, sama halnya dengan pelajaran menggambar, diberikan langsung oleh M. Syafei.

Pelajaran pekerjaan tangan memegang peranan penting pada INS yang meliputi seluruh mata pelajaran yang ada pada INS, artinya pelajaran teori diberikan tidak terpisah dengan pelajaran praktek. Setiap

ada pelajaran teori muri langsung diajarkan pelajaran praktek, karena dalam kehidupan masyarakat nanti justru prakteknya inilah yang sangat membantu murid dalam setiap tindakannya. Pengetahuan antara teori dan praktek harus seimbang. Pada sekolah INS akan terlihat kesibukan yang tinggi dalam bengkel latihan dan ruang kerja lainnya, karena walaupun ditetapkan 50% untuk pekerjaan praktek, tetapi dalam kenyataannya lebih banyak. Anak-anak tidak mau berhenti apabila mereka belum menguasai betul prakteknya itu. Ke dalam pekerjaan tangan termasuk pekerjaan membersihkan kebun, membersihkan halaman sekolah, dan membersihkan sekolah.

Hasil pekerjaan tangan ada yang dapat dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan sekolah. Pendidikan Jasmani atau olah raga tidak kalah pentingnya dengan pelajaran lainnya. Olah raga seperti sepak bola, senam, tenis, renang mendapat perhatian secukupnya dari INS, supaya kondisi anak yang sedang belajar di sana selalu berada dalam keadaan baik.

Pelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah pelajaran budi pekerti atau kesusilaan. Manusia yang mempunyai pengetahuan dan kecakapan tinggi tanpa memiliki budi yang luhur mungkin tidak akan berguna hidupnya dalam masyarakat, bahkan mungkin mendatangkan bahaya atau gangguan terhadap masyarakat, sebab ilmu yang dimiliki itu mungkin tidak akan terkontrol oleh jiwanya yang kosong dari budi dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, antara pelajaran budi pekerti dengan pelajaran lainnya harus seimbang. Dengan demikian hasil pendidikannya juga akan merupakan manusia yang selaras dan serasi hidupnya dengan lingkungannya.

Dari jenjang pendidikan dan isi pelajaran pada INS kelihatan bahwa INS didirikan betul-betul merupakan reaksi terhadap pendidikan kolonial Belanda, semuanya justru bertentangan dengan apa yang dilakukan Belanda. Bahkan M. Syafei telah menciptakan suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

3.2.2.11 Kerajinan Amai Setia

Kerajinan Amai Setia didirikan pada tanggal 1 Pebruari 1912 di Bukittinggi oleh Rohana Kudus, dengan tujuan untuk memberikan

pendidikan khusus untuk wanita. Pada waktu itu kehidupan wanita Minangkabau hanya di dapur dan jarang bekerja di luar rumah, karena kurang baik menurut pandangan adat Minangkabau. Wanita hanya untuk berhiasan rumah saja dan memberikan anak untuk keluarganya, belum ada wanita pada waktu itu yang ikut bergerak di bidang pendidikan, berdagang, dan pegawai, semua pekerjaan itu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, pantang menurut adat dilakukan oleh wanita. Wanita waktu itu hanya untuk hidup di lingkungan dan di dalam rumah tangga saja.

Keadaan yang demikianlah yang menyebabkan Rohana Kudus tidak dapat berpangku tangan. Dia menginginkan wanita juga harus dapat dan boleh mengerjakan pekerjaan yang selama ini dinggap tidak baik, tidak sopan, pantang dikerjakan oleh wanita, wanita menurut Rohana Kudus mempunyai kemampuan yang hampir sama dengan laki-laki, hanya saja kepada wanita selama ini tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya karena sibuk dalam kehidupan keluarga. Pendidikan menurut Rohana Kudus merupakan jalan yang terbaik untuk melakukan emansipasi wanita, yang juga berhak mendapat pendidikan yang layak seperti kaum laki-laki.

Kerajinan Amai Setia merupakan wadah yang melaksanakan emansipasi wanita tersebut. Pada waktu itu pekerjaan kerajinan tangan yang diajarkan di luar rumahnya sendiri sudah merupakan suatu keadaan yang luar biasa, karena sebelumnya tidak pernah dibiasakan demikian, apalagi dengan ruang pendidikan Kerajinan Amai Setia yang sengaja dilakukan di luar rumah. Hal ini menimbulkan beberapa pertentangan dari masyarakat sekitarnya, apa yang mereka lakukan beramai-ramai di sana, apakah mereka tidak melakukan hal-hal yang terlarang, orang yang melanggar adat isitadat, dan sebagainya. Pertanyaan itu akhirnya sampai menjadi prasangka yang kurang baik, dugaan berbuat serong, dan fitnahan dari masyarakat sekitarnya. Kalau sekiranya Rohana Kudus tidak mempunyai pendirian yang kuat dan semangat juang yang tinggi serta keuletan berusaha dan bekerja, barangkali usahanya itu sudah ditutup. Untunglah Rohana Kudus merupakan seorang wanita yang tidak kenal menyerah, putus asa, dan pantang mundur. Apapun yang dikatakan orang tentang usahanya itu

tidak dimasukkannya dalam hati, bahkan sebaliknya dia berusaha memberikan penjelasan dan menerangkan maksud usahanya itu karena orang yang selalu menaruh curiga. Ada beberapa orang tua yang pada mulanya melarang anak gadisnya ikut Kerajinan Amai Setia, tetapi akhirnya mereka terpaksa merelakannya kembali setelah mendapat penjelasan dari Rohana Kudus. Dengan demikian akhirnya usaha Rohana Kudus dapat berjalan juga walaupun pada mulanya mendapat tantangan.

Pada Kerajinan Amai Setia diberikan pelajaran kerajinan tangan seperti menjahit, membuat kue, pelajaran agama Islam terutama untuk kaum wanita, yang bagaimana seharusnya seorang wanita Islam bertindak dalam masyarakat. Bagi wanita yang ikut Kerajinan Amai Setia menganggap bahwa adat yang kolot dan kaku merupakan penghalang kemajuan manusia, karena sedikit saja keluar dari kebiasaan yang sudah ada sudah dianggap tidak beradat atau melanggar adat. Di samping mengurus rumah tangga wanita hendaknya juga diberi hak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa masalah dalam kampungnya atau nagarnya, karena justru kaum laki-laki yang membuat supaya peraturan adat dalam nagari tidak boleh dijalankan oleh wanita, pada hal mereka bersama ikut menjalankan atau melaksanakan adat itu.

Bagi laki-laki Bukittinggi pelajaran yang diberikan Rohana Kudus dianggap menghasut kaum wanita untuk melawan laki-laki, tetapi bagi Rohana Kudus dengan teman-temannya adalah merupakan suatu usaha untuk memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan wanita.

Pendidikan Kerajinan Amai Setia sudah mulai semenjak tahun 1896, di waktu masa Rohana Kudus baru berumur 12 tahun, ia sudah mulai mengajarkan teman-tamannya menulis dan membaca dalam bahasa dan huruf Arab dan Latin. Di waktu Rohana berumur 21 tahun ia telah mendirikan Sekolah Gadis di Koto Gadang, Bukittinggi dengan pelajaran utama Kerajinan Wanita, enam tahun kemudian didirikannya Kerajinan Amai Setia. Karena kekerasan kemudian Rohana Kudus Kerajinan Amai Setia yang pada mulanya hanya bersifat kursus saja akhirnya dapat dijadikan sebuah sekolah khusus untuk wanita dengan nama Kerajinan Amai Setia.

Tahun 1912 dalam usahanya memperjuangkan emansipasi wanita Rohana Kudus mendirikan surat kabar Soenting Melayu yang khusus buat wanita dengan Rohana Kudus bertindak sebagai Pemimpin Redaksi. Dengan demikian maka Rohana Kudus merupakan wartawan wanita pertama di Indonesia, karena sebelumnya belum ada seorang wartawan wanita Indonesia. Dalam situasi yang demikian, yaitu pada tahun 1912 di mana segala sesuatu masih tabu dilakukan oleh wanita Sumatera Barat, Rohana Kudus sudah dapat mendirikan sebuah sekolah dan sebuah surat kabar dalam usahanya mempertinggi kedudukan dan derajat wanita di tengah masyarakat laki-laki. Walaupun buah pikiran Rohana Kudus belum banyak yang dapat diungkapkan, tetapi dengan keadaan yang sudah diketahui saja rasanya sudah pantas menempatkan Rohana Kudus ke dalam barisan pelopor bangsa.

3.2.2.12 Taman Siswa

Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dengan nama "National Onderwijs Institut Taman Siswa".²⁷⁾ Tingkat pendidikan yang pertama didirikan adalah Taman Indrya (Taman Kanak-kanaknya Taman Siswa)²⁸⁾.

Taman Siswa lahir sebagai perlawanan (reaksi) terhadap Pendidikan Kolonial Belanda²⁹⁾ yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda waktu itu di Indonesia.

Taman Siswa menamai cita-cita pendidikannya dengan Pancadharma atau Lima Kewajiban, yaitu Dasar Kodrat Alam, Dasar Kemerdekaan, Dasar Kebudayaan, Dasar Kebangsaan, dan Dasar Kemanusiaan.³⁰⁾

Ketika Pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932, Taman Siswa mendapat dukungan partai politik dalam menentang Ordonansi tersebut, sehingga perhatian

27. Majelis Luhur Taman Siswa, *Pendidikan dan Pembangunan, 50 Tahun Taman Siswa*, Yogyakarta, 1976, hal. 249.

28. Prof. Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXX, 1970. hal. 217.

29. Djaka Cs., *Rangkuman ilmu Pendidikan 9, Sejarah Pendidikan (II)*. Penerbit Mutiara, Jakarta, 1965, hal. 124.

30. *Ibid.*, hal. 124-125.

rakyat terhadap Taman Siswa bertambah besar. Mulai semenjak itu sayap Taman Siswa mulai menjalar ke daerah-daerah. Permintaan untuk mendirikan Taman Siswa makin bertambah banyak.

Sesudah tahun 1932 itu di Sumatera Barat mulai berdiri cabang Taman Siswa di Sungai Puar, Batusangkar, Bukittinggi, Payakumbuh, Bangkinang, Padang, Pariaman, Kuranji, Talu dan Solok.

Pada setiap daerah Taman Siswa dipimpin oleh seorang Wakil Majelis Luhur bersama-sama dengan Majelis Daerah, pada waktu itu Wakil Majelis Luhur di Sumatera Barat adalah Sujanarko. Sebelum Perang Dunia II setiap gerak gerik Taman Siswa di Sumatera Barat selalu diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Larangan mengajar dan keluar daerah menjadi hambatan untuk kemajuan Taman Siswa di daerah. Inspeksi pemerintah selalu mengawasi dan mendatangi sekolah Taman Siswa dan mereka selalu mencari-cari alasan untuk menindak Taman Siswa. Jika tidak terdapat alasan untuk menindak, maka Taman Siswa selalu diburuk-burukan Belanda dengan mengatakan sekolahnya tidak memenuhi syarat dan selalu dinilai kurang supaya tidak dapat berkembang.

Taman Siswa di Sumatera Barat sukar hidupnya karena selalu dihalang-halangi pihak Belanda perkembangannya. Namun demikian, Taman Siswa tetap jalan terus tanpa mengenal takut, karena Taman Siswa didirikan justru untuk mengadakan kontra terhadap sistem pendidikan Hindia Belanda.

Setelah Jepang menduduki Sumatera Barat tidak banyak perubahan pada Taman Siswa, karena mempunyai sikap yang keras terhadap sekolah yang ada dengan pengawasan yang ketat dan bahasa Jepang mulai masuk ke dalam tubuh Taman Siswa.

Pada zaman perang kemerdekaan banyak sekolah Taman Siswa di Sumatera Barat yang dijadikan Markas Laskar Rakyat dan Dapur Umum. Hanya beberapa cabang saja yang dapat dibuka, karena kekurangan guru dan murid, yang menghadapi Belanda. Bahkan gedung Taman Siswa di Payakumbuh dijadikan tempat mengibarkan Sang Saka Merah Putih pertama di Payakumbuh.

Pada tahun 1950 setelah penyerahan kedaulatan Taman Siswa di Padang dan daerah Sumatera Barat lainnya belum dapat belajar karena ketiadaan gedung sekolah yang tetap. Sebelumnya Taman Siswa selalu berpindah-pindah tempat belajar, karena tempatnya menyewa.

Di Padang Taman Siswa mendapat tanah yang resmi dari pemerintah baru pada tahun 1963. Bermodalkan tanah tersebut serta uang bantuan Departemen Sosial dan orang tua murid dapatlah didirikan 6 lokal dan dibukalah kembali bagian Taman Muda. Pada tahun 1965 Taman Siswa Padang menjadi Sekolah Bersubsidi sebagai satu-satunya Perguruan Taman Siswa yang berstatus subsidi sebagai Pilot Proyek dari Majelis Luhur Taman Siswa.

Selama 5 tahun yaitu sampai tahun 1970 pembangunan Taman Siswa terhenti karena berbagai kesulitan. Sesudah tahun 1970 itu pembangunan Taman Siswa Padang dapat dimulai kembali, lebih-lebih setelah bantuan guru Pemerintah mulai datang. Dengan adanya guru negeri tersebut, uang sekolah dari murid dapat dipergunakan untuk keperluan lain terutama untuk pembangunan lokal belajar. Berkat keuletan pimpinan Taman Siswa Padang makin lama makin banyak juga perbaikan yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan dirinya dengan baik.

Perkembangan Taman Siswa sampai tahun 1980 sebagai berikut:

Jumlah murid	: 2642 orang
Jumlah Pamong	: 38 orang tenaga tetap 94 orang tenaga tidak tetap.
Jumlah lokal	: 48 buah
Jenis Sekolah	: sebuah Taman Mudah (SD) Sebuah Taman Dewasa (SMP) Sebuah Taman Madya (SMA) Sebuah Taman Karya Madya (STM)

Mengingat kesulitan tanah dan kebutuhan jumlah lokal belajar yang banyak, maka Taman Siswa Padang mengambil keputusan untuk membangun gedung bertingkat yang pada tahun 1980 dengan 16 lokal yang sudah selesai dan sedang dilanjutkan untuk menyelesaikan tingkat berikutnya yang akan mencakup sebanyak 64 lokal belajar/

laboratorium/bengkel/keterampilan elektronik/kantor/aula dengan biaya 160 juta rupiah lebih.

Kelihatannya sampai saat ini Taman Siswa mendapat kesukaran untuk membangun Taman Indrya, karena sangat banyaknya Taman Kanak-Kanak yang ada di Padang sedangkan Taman Ilmu memang belum dibuka dan belum ada rencana membukanya dalam waktu dekat ini.³¹⁾

3.2.2.13 Training College

Kota Payakumbuh tidak ketinggalan pula dalam Usaha Pendidikan Pergerakan Nasional karena pada tahun 1935 di Payakumbuh didirikan sebuah lembaga pendidikan dengan tingkat pendidikan semi akademi. Dikatakan semi akademi adalah karena calon murid diterima dari tamatan Alliah (SMA Islam) dan yang sederajat sedangkan pendidikannya hanya sampai tingkat Sarjana Muda dengan tidak memberikan ijazah.

Tujuan pendidikan *Training College* antara lain adalah untuk membentuk kader pemimpin masyarakat yang berpengetahuan tingkat tinggi guna segera diterjunkan ke tengah masyarakat sehubungan dengan makin meningkatnya Pergerakan Kemerdekaan Indonesia.

Para pendiri Training College melihat bahwa kebanyakan anggota masyarakat tidak mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Apabila keadaan ini dibiarkan terus tidak menunjang perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu rakyat harus dibimbing ke arah yang benar dan disadarkan akan adanya penjajahan Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut harus dipersiapkan pemimpin yang cakap dan Training College merupakan wadah yang tepat untuk menggodok calon pemimpin masyarakat tersebut.

Dengan tujuan yang demikian Training College bukan saja memberikan ilmu pengetahuan yang tinggi kepada muridnya, tetapi juga mendidik para pejuang kemerdekaan yang akan memimpin masyarakat sekitarnya menghadapi penjajahan Belanda.

31. Yusuf Nur, Ketua Perguruan Taman Siswa Padang, *Wawancara*, Agustus 1980 di Padang.

Pendirian Training College ini mendapat sokongan dari masyarakat dan tokoh politik pada waktu itu. Banyak orang yang datang belajar ke sana, bukan hanya dari daerah Payakumbuh saja melainkan juga dari daerah Sumatera Barat lainnya.

3.2.3 Tokoh dan Pemikirannya.

Pada bahagian ini diuraikan riwayat hidup beberapa tokoh pendidik terkenal di Sumatera Barat mereka itu termasuk barisan pelopor dan tokoh pembaharu di bidang pendidikan. Di antara beberapa tokoh itu adalah :

3.2.3.1 Syekh Haji Abdullah Ahmad

Syekh Abdullah Ahmad lahir pada tahun 1878 di Padang Panjang, yang berasal dari keluarga terkemuka di Padang Panjang dan taat menjalankan agama. Ayahnya bernama H. Ahmad adalah seorang guru pada Pengajian Al-Quran di Padang Panjang, saudara tua ayahnya, Syekh Abdul Halim, seorang ulama Islam yang terkenal waktu itu di Padang Panjang dan Padang.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh Syekh Abdullah Ahmad adalah Sekolah Melayu di Padang Panjang, di samping ia mendapat didikan langsung dari ayahnya.

Pada tahun 1895 Syekh Abdullah Ahmad pergi ke Mekah menunaikan rukun Haji dan menetap di sana kira-kira selama 4 tahun guna memperdalam ilmunya tentang agama Islam. Di sana dia menuntut ilmu pada Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama besar Islam asal Sumatera Barat yang telah lama bermukim di Mekah.

Tahun 1899 Syekh Abdullah Ahmad kembali ke Sumatera Barat dan terus ke Padang Panjang. Tahun 1904 mendirikan Surau Jembatan Besi dan mengajar di sana sebagai guru agama dan pengajian Al-Quran, kemudian Syekh Abdullah Ahmad pindah ke Padang setelah Syekh Abdul Halim meninggal dunia dan menggantikannya sebagai Pengurus Mesjid Ganting.

Semenjak kembali dari Mekah pikiran Syekh Abdullah Ahmad sudah penuh dengan cita-cita tentang pendidikan agama Islam yang

akan dilaksanakannya di Sumatera Barat. Menurutnya pendidikan Islam yang ada harus diperbaiki. Prinsip yang dipegang adalah bahwa penghidupan masyarakat tidak akan dapat diperbaiki hanya dengan mempelajari Ilmu Fikih atau ilmu yang hanya mementingkan kehidupan di hari kemudian. Sebelum sampai ke akhirat kita hidup di dunia yang penuh dengan pergolakan kehidupan. Kehidupan di dunia menjadi jembatan untuk kehidupan di hari kemudian, kehidupan di akhirat tergantung dari amal yang dilakukan selama hidup di dunia.

Sistem pendidikan Islam yang sedang dijalankan perlu diperbaiki sehingga dapat bermanfaat dan membantu manusia dalam menanggulangi penghidupan di dunia.

Untuk melaksanakan cita-citanya Syekh Abdullah Ahmad mengambil contoh kepada cara yang dilakukan orang Belanda yang telah lama berhasil di bidang pendidikan.

Dengan pandangan yang demikianlah Syekh Abdullah Ahmad mendirikan Sekolah Adabiah pada tahun 1909 di Padang dengan nama pada waktu itu : "*Adabiah School*". Untuk memperkuat pembinaan sekolah itu, maka pada tahun 1914 Syekh Abdullah Ahmad mendirikan Serikat Usaha, yaitu suatu badan usaha yang bergerak di bidang "mencari" dan mengumpulkan dana buat Sekolah Adabiah. Disamping itu badan ini juga ikut mengatur bagaimana mata pelajaran umum dan agama diberikan pada Sekolah Adabiah.

Atas prakarsa badan ini yang diketuai sendiri oleh Syekh Abdullah Ahmad, pada tahun 1915 Sekolah Adabiah dijadikan HIS Adabiah. Walaupun sudah menjadi HIS yang sama dengan sekolah dasar Hindia Belanda, tetapi pendidikan agama Islam tidak ditinggalkan, karena inilah yang membedakan HIS Adabiah dengan HIS Belanda.

Syekh Abdullah Ahmad merupakan salah seorang tokoh pembaharu pendidikan di Sumatera Barat dan betul-betul merupakan seorang pendidik sejati. Dia tidak mau mencampurkan masalah pendidikan dengan masalah politik dan tidak pula menjadi tokoh politik seperti kebanyakan teman-temannya. Oleh karena itu dia dapat dinggap sebagai tokoh pendidik murni.

Di samping itu Syekh Abdullah Ahmad mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam beserta ajarannya. Berdasarkan tulisan dan usahanya dalam majalah Al-Munir, Syekh Abdullah Ahmad juga merupakan seorang wartawan kawakan dan pujangga besar di zamannya itu. Syekh Abdullah Ahmad adalah penggerak jiwa masyarakat Sumatera Barat menuju pembaharuan di bidang pendidikan. Berkat usaha Syekh Abdullah Ahmad itulah kemudian muncul pemuda Sumatera Barat sebagai pemimpin masyarakat.

Cita-cita Syekh Abdullah Ahmad adalah mendirikan sekolah, mulai dari tingkat rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi yang dikelola berdasarkan pendidikan Islam. Cita-cita itu berdasar pada keadaan pendidikan yang berlaku pada waktu itu. Walaupun sekolah gubernemen banyak didirikan pada waktu itu, tetapi kesempatan untuk memasukinya bagi rakyat biasa terbatas.

Karena pelaksanaan cita-cita tersebut merupakan pekerjaan besar dan tugas yang berat untuk dijalankan seorang diri, maka Syekh Abdullah Ahmad ingin mengundang seluruh ulama Islam Sumatera Barat untuk membicarakan cita-cita tersebut guna mendapat bantuan sepenuhnya.

Pada tahun 1920 diundanglah seluruh ulama Islam yang sefaham dan sejalan untuk mengadakan suatu pertemuan besar guna merealisasikan cita-citanya tersebut. Dalam pertemuan tanggal 7 Juli 1920 dapat disepakati untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang dinamakan Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI). Sebagai Ketua PGAI yang baru dibentuk itu terpilih Syekh Abdullah Ahmad yang dia pegang sampai saat meninggalnya pada tanggal 25 Nopember 1933. Melalui PGAI, cita-cita Syekh Abdullah Ahmad dilaksanakan. Tetapi karena beberapa kesulitan, sekolah yang dapat didirikan hanya sampai tingkat menengah saja, tingkat perguruan tinggi belum dapat dilaksanakan.

Dalam tahun 1926 Syekh Abdullah Ahmad bersama dengan Syekh Abdul Karim Amarullah pergi ke Mesir untuk menghadiri Kongres Islam Sedunia. Selama di Mesir kedua ulama ini mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo sebagai pengakuan terhadap keahlian kedua orang itu tentang Islam.³²⁾

32. Lihat Taman Jaya, *Pustaka Indonesia*, G. Kolff & Co, Bandung 1951, hal. 290-298 dan HAMKA, *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*, Tinta Mas, Jakarta, 1961, hal. 8-12.

Sekolah Adabiah sampai sekarnag masih berdiri dan berkembang meneruskan cita-cita Syekh Abdullah Ahmad dengan ruang pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas di Kota Padang. Adabiah sekarang ini merupakan sekolah bersubsidi yang sangat digemari oleh rakyat Sumatera Barat, karena mutu pendidikannya tidak kalah dengan sekolah negeri. Begitu juga PGAI sampai sekarang masih berjalan dan ikut mengurus sekolah agama di Sumatera Barat, terutama mengenai masalah gurunya.

Sebagai tanda penghargaan bagi Syekh Abdullah Ahmad maka bertepatan dengan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1974 dengan Surat Keputusan No. 4-117/csb/1974 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat memberikan Piagam Penghargaan kepada Dr. Haji Abdullah Ahamad sebagai Pahlawan Daerah yang pernah berjuang pada masa lampau.

Sebagai madrasah Adabiah hanya berdiri sampai tahun 1914, karena pada tahun 1915 Adabiah sudah menjadi HIS dengan jenjang pendidikan, kurikulum hampir sama dengan sekolah Belanda, bedanya hanya terletak pada pelajaran Agama Islam yang merupakan ciri khusus.

Sekolah Adabiah hanya terbatas di kota Padang saja, tetapi ide pembaharuannya masuk ke seluruh daerah Sumatera Barat.

3.2.3.2 Rohana Kudus

Rohana Kusus dilahirkan pada tanggal 28 Desember 1884 di Koto Gadang, Bukittinggi, Ayahnya bernama Muhammad Rasyad Maharaja Sutan yang bekerja sebagai Jurutulis. Rohana Kudus adalah seorang wanita Islam yang taat menjalankan ibadah, dan seorang wanita Minangkabau yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita dengan segala usaha yang pada waktu itu mendapat tantangan sangat kuat dari masyarakat Minangkabau. Dia merupakan seorang pendidik yang outodidak yang berusaha memperbaiki kedudukan wanita di tengah masyarakat wanita pada waktu itu dianggap kurang sopan dan kurang baik untuk mengerjakan sesuatu di luar rumah tanpa sepengetahuan keluarganya. Tetapi semua hal tersebut ditembus oleh Rohana Kudus, dia tidak segan memperbaiki adat Minangkabau yang dianggapnya

menghambat kemajuan, terutama untuk kemajuan wanita. Menurut adat banyak pekerjaan yang pantang dikerjakan wanita, seperti ke luar rumah sendirian, menjadi pegawai, berbincang sesama kaumnya di luar rumah, apalagi ikut mengerjakan pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh laki-laki saja. Wanita dianggap pantas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja atau dipingit sampai dia kawin untuk mengabdikan kepada suaminya. Semua ini ditentang oleh Rohana Kudus dengan beberapa tindakan nyata dalam masyarakat.

Dalam usahanya memperjuangkan emansipasi wanita Rohana Kudus banyak mendapat halangan dan rintangan dari masyarakat sekitarnya, bahkan sampai diajukan ke meja hijau dengan tuduhan akan membawa kepada kesesatan, menyebabkan wanita tidak pandai memasak lagi. Dengan mendirikan sekolah Khusus untuk wanita saja sudah dianggap melanggar adat pada waktu itu, karena menurut adat tugas wanita adalah mengurus rumah tangga dan anak-anak. Tetapi semua itu bagi Rohana Kudus hanya merupakan fitnahan saja yang tidak perlu dihiraukan. Dia merupakan seorang yang kuat pendiriannya, tidak mengenal menyerah dalam perjuangan, dan berani menentang kemauan kaum laki-laki yang berkuasa pada waktu itu.

Usaha yang dilakukan Rohana Kudus sudah dimulainya sewaktu dia masih tergolong anak-anak, yaitu ketika berumur 12 tahun dengan mengajar teman-temannya membaca dan menulis dalam huruf Latin dan Arab di rumahnya sendiri. Larangan ayah dan orang sekitarnya tidak dihiraukan Rohana Kudus. Setelah ia meningkat dewasa (21 tahun) Rohana Kudus mendirikan Sekolah Gadis di Kota Gadang dengan memberikan pelajaran tentang kerajinan wanita yang pada waktu itu belum ada dilakukan oleh wanita Minangkabau. Enam tahun sesudah itu dia mendirikan sebuah perkumpulan wanita Minangkabau yang diberinya nama dengan "Kerajinan Amai Setia". Pada sekolah ini Rohana Kudus mendirikan kaum wanita menuju emansipasi.

Usaha Rohana Kudus bukan sampai di situ saja, karena pada tahun 1912 dia mendirikan sebuah harian yang bernama *Soenting Melayu* dan dia sendiri Pemimpi Redaksi. Melalui harian ini Rohana Kudus mengemukakan pandangannya tentang bagaimana sebaiknya

wanita Indonesia bertindak dalam masyarakat yang pada waktu itu dikuasai oleh kaum laki-laki saja.³³⁾

3.2.3.3 Syekh Haji Muhammad Thaib Umar

Syekh Haji Muhammad Thaib Umar dilahirkan tahun 1874 di Sungayang Batusangkar, lingkungan keluarganya termasuk keluarga yang taat menjalankan agama. Ayahnya bernama Umar bin Abdul Kadir seorang guru mengaji yang mula-mula mendidik Thaib Umar membaca Al Quran. Mamaknya juga ikut mendidiknya membaca Al Quran sewaktu berumur 7 tahun dan sesudah satu tahun belajar sudah pandai membaca Al Quran. Di waktu berumur 8 tahun pendidikannya diserahkan kepada Haji Muhammad Yasin di Surau Sawah Tengah Sungayang, Syekh Haji Abdul Manan di Surau Talao Padang Ganting Batusangkar, dan Syekh M. Salih di Surau Padang Kandis Suliki, Payakumbuh.

Setelah selesai palajarannya di Sumatera Barat, Thaib Umar, pergi menunaikan ibadah Haji ke Mekah. Bersama ayahnya dia bermukim di sana selama 5 tahun dan menuntut ilmu pada Syekh Akhmad Khatib.

Setelah merasa cukup memperoleh pengetahuan Islam, Syekh H. Muhammad Thaib Umar kembali ke Indonesia dan menetap di kampung halamannya Sungayang. Di sana dia membuka Pengajian Kitab bertempat di Surau Tanjung Pauh Sungayanag pada tahun 1897, sewaktu berumur 25 tahun. Sebelum tahun 1908 Syekh H. Muhammad Taib Umar sudah dapat menamatkan beberapa murid ulama Islam seperti Syekh Haji Abdul Manaf di Batusangkar, Syekh Abdul Wahid Tabat Gadang, Padang Japang, Syekh Machubum dari Solok, Djalaluddin dari Sicincin Payakumbuh. Sesudah tahun 1908, yaitu sesudah pendidikan Islam mengalami pembaharuan di Sumatera Barat banyak pula murid yang ditamatkan oleh Syekh Haji Muhammad Thaib Umar, di antaranya adalah Djunaid dari Simalanggang, Payakumbuh, Laut dari Lintau, Payakumbuh, Mu'in dari Sianok Bukittinggi, Ahmad dari Sumanik Batusangkar, Mahmud Yunus dari Sungayang Batusangkar, Adam dari Pantai Sikat Padang Panjang.

33. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Cetakan ketiga. Penerbit "Cerdas" Bandung-Jakarta, Bandung - Bogor, Juni 1962, hal. 128-129.

Selama ia memperdalam ilmu agama Islam, Haji Muhammad Thaib Umar juga merupakan seorang pengarang dari majalah Al-Munir.³⁴⁾

3.2.3.4 Syekh Abdul Karim Amarullah

Syekh Haji Abdul Karim Amarullah lahir pada tanggal 10 Pebruari 1879 di Maninjau, lingkungan keluarganya termasuk terkenal di Sumatera Barat dan taat menjalankan ajaran agama. Ayahnya seorang guru agama Islam di Maninjau sekaligus dia belajar mengaji Al-Quran untuk pertama kalinya. Setelah tamat mengaji Al-Quran terus dilanjutkan dengan pelajaran Ilmu Nahu dan Ilmu Syaraf dengan ayahnya kemudian melanjutkan pelajarannya kepada Tuanku Sultan Muhamad Yusuf di Sungai Rokan Pariaman untuk mempelajari Ilmu Fikih dan Ilmu Jalalain.

Pada usia 15 tahun, dia pergi untuk menunaikan ibadah haji sambil memperdalam pengetahuan tentang agama Islam dengan ulama terkenal di Mekan, seperti Syekh Akhmad Khatib, Syekh H. Thahir Jalaluddin, Syekh Usman Serawak, selama tujuh tahun. Setelah dianggap cukup ilmu yang dimilikinya, pada tahun 1901 dia kembali ke Indonesia dan menetap di Sungai Batang Maninjau, di tempat kelahirannya sebagai orang guru agama Islam. Tetapi tidak lama kemudian dia pergi kembali ke Mekah mengantarkan adik-adiknya dan bermukim di sana selama 5 tahun lagi sambil memperdalam ilmunya tentang agama Islam.

Pada tahun 1914 dia pindah lagi ke Pandang Panjang dan mengajar di Surau Jembatan Besi, yaitu surau pertama di Sumatera Barat yang pertama mengadakan pembaharuan pendidikannya dari sistem pendidikan surau ke sistem pendidikan sekolah/madrasah. Rupana di sini dia mendapat tempat yang cocok untuk mengembangkan gagasan pembaharuannya yang telah didapatnya selama di Mekah. Di sini dia mengajar dengan sungguh-sungguh sambil memberikan fatwa Islam yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan dakwah Islam dia pergi jauh masuk ke desa-desa, karena orang di sanalah yang harus diutamakan mendapat penerangan agama. Selama ini mereka telah melakukan pelaksanaan agama Islam yang berlawanan dengan ajaran Islam yang sebenarnya karena ketidaktahuan mereka.

34) Mahmud Yunus, *Op. cit.*, hal. 124-130.

Pada tahun 1918 Syekh Haji Abdul Karim Amarullah mendirikan Sumatera Thawalib sebagai perkumpulan pelajar madrasah sekaligus mengubah sistem pendidikan Sumatera Thawalib bersama teman-temannya yang ada di Sumatera Thawalib.

Syekh Haji Abdul Karim Amarullah adalah seorang penganjur Islam yang tekun dan gigih dalam memperjuangkan cita-citanya. Selain sebagai guru dan penganjur Islam dia juga seorang pengarang yang digemari tulisannya oleh para pembaca, lebih-lebih karangannya yang dimuat dalam Majalah Al-Munir. Dia juga banyak mengarang buku tentang agama Islam dan pembaharuan mengenai ajaran Islam.

Sesudah kira-kira 5 tahun mengajar di Sumatera Thawalib dia meninggalkan Sumatera Thawalib dan kembali ke kampungnya dan mengajar di sana sambil mengarang buku-buku tentang Islam. Pada tahun 1926 dia pergi ke Mesir Menghadiri suatu Kongres Umat Islam dan mendapat gelar Doktor Honoris Kausa dari Universitas Kairo bersama-sama dengan Syekh Haji Abdullah Ahmad. Semenjak itu dia tetap tinggal di Sungai Batang sampai tahun 1941 sampai dia diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Sukabumi. Pengasingan oleh Pemerintah Hindia Belanda ini mungkin karena ketajaman tulisannya menghantam pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Karena Belanda menganggapnya berbahaya jika terus tinggal di Sumatera Barat, maka Belanda mengambil keputusan mengasingkannya ke Sukabumi. Untunglah tidak lama sesudah itu Balatentara Jepang menduduki Indonesia, Syekh H. Abdul Karim Amarullah bebas dari pengasingan.

Semenjak itu dia menetap di Jakarta menyiarkan agama Islam sampai tanggal 2 Juni 1945 dia meninggal dunia. Dengan meninggalnya Syekh Haji Abdul Karim Amarullah tidaklah berarti bahwa gagasan pembaharuannya tentang agama Islam ikut hilang pula, melainkan dilanjutkan oleh para penggantinya yang sudah banyak bermunculan, baik di Sumatera Barat maupun di Jakarta.³⁵⁾

35) Disarikan dari Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1960, hal. 131 - 135 dan dari HAMKA, Ayahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amarullah dan perjuangan kaum Agama di Sumatera, Cetakan Ketiga, Jayamurni Jakarta, 1967.

3.2.3.5 Syekh Muhammad Jamil Jambek

Jamil Jambek lahir di Bukittinggi pada tahun 1860, yang bersekolah sampai Sekolah Dasar, yaitu sekolah Gubernemen Belanda. Setamat Sekolah Dasar dia tidak melanjutkan lagi pada sekolah Belanda, tetapi hidup sebagai penganggur sampai tahun 1882. Selama menganggur dia hidup sebagai jagoan yang menurut istilah Minangkabau disebut "*parewa*" atau "*pareman*". Kehidupannya tidak menentu sering mengganggu orang lain, sehingga banyak orang yang takut kepadanya.

Pada tahun 1882, pintu hatinya mulai terbuka dan dia mulai tobat dengan meninggalkan perbuatannya pada masa lampau. Dia mulai mengaji Al-Quran, belajar Ilmu Syaraf, Nahu, dan kemudian Ilmu Fikih dan sembahyang tidak lagi dilupakannya. Dia baru mulai belajar agama pada umur 32 tahun yang memperkuat keimanannya sesudah tobat.

Sesudah 13 tahun tobat, Jamil Jambek pergi ke Mekah bersama ayahnya dan bermukim di sana selama 9 tahun. Selama di sana dia memperdalam pengetahuannya tentang Islam, seperti memperbaiki bacaan Al-Quran, Ilmu Syaraf, Ilmu Nahu, Ilmu Fikih, Ilmu Tafsir, Ilmu Falak, dan lain-lainnya. Kemudian dia menjadi seorang ahli Ilmu Falak yang termasyhur di Sumatera Barat sesudah kembali dari Mekah. Imsakiah yagn dibuat Syekh Muhammad Jamil Jambek menjadi ikutan bagi seluruh daerah Sumatera Barat. Di Mekah Syekh Muhammad Jamil Jambek juga mengajar Ilmu Falak kepada orang yang datang dari Indonesia, seperti dari Sumatera Barat, Palembang, Jawa, dan Kalimantan.

Dia kembali lagi ke Sumatera Barat setelah berumur 43 tahun dan sudah menjadi ulama Islam yang sangat dalam ilmunya tentang Islam. Dia menetap di Bukittinggi yaitu di tempat kelahirannya dan mengajar di Surau Tengah Sawah.

Sebagai seorang guru agama dia lebih banyak mengajarkan Ilmu Falak, karena itu sangat berguna dalam menentukan awal bulan Puasa secara tepat, mengetahui gerhana bulan dan matahari yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pengajarannya mengenai penetapan

bulan Puasa sampai sekarang masih dipergunakan oleh muridnya di Sumatera Barat.

Di samping menjadi seorang guru agama Islam, Syekh Muhammad Jamil Jambek juga merupakan seorang mubalig besar yang giat melaksanakan dakwah Islam. Dialah yang memulai cara berdakwah tidak melalui surau tempat pengajian saja, tetapi juga di tempat terbuka, seperti di pasar, bioskop dan tempat umum lainnya dan tidak saja hanya di kota-kota, tetapi juga masuk sampai ke desa-desa.

Syekh Muhammad Jamil Jambek merupakan pelopor cara ini yang kemudian banyak diikuti oleh ulama Islam lainnya di Sumatera Barat. Yang diutamakan di dalam tablig itu adalah merubah pandangan penganut agama Islam yang melakukan ajaran Islam secara membabi-buta dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Banyak penganut Islam yang sangat mempercayai gurunya sehingga sampai pada anggapan bahwa guru tersebut dapat membebaskan dosa mereka sendiri. Gurunya dianggap mempunyai kekuatan gaib karena kedalaman ilmunya tentang Islam, dan banyak lagi kepercayaan lainnya yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya menurut Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad. Orang-orang yang demikian kebanyakan terdapat di daerah pelosok yang terpencil. Karena itulah Syekh Muhammad Jamil Jambek pergi ke daerah itu untuk meluruskan mereka terhadap agama Islam yang sesungguhnya. Dalam melakukan dakwah itu Syekh Muhammad Jamil Jambek tidak mengharapkan imbalan apa-apa, bahkan usaha itu dibiayainya sendiri

Dia adalah seorang penganjur agama Islam yang gigih dan ulet yang selalu mengajak umatnya kembali kepada ajaran Islam seperti terdapat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad, karena di dalam Kitab itulah dan pada contoh teladan yang diberikan Nabi itulah terletak ajaran agama Islam yang sesungguhnya, bukan pada apa yang dikatakan oleh guru. Guru hanya sebagai pembuka atau penunjuk jalan ke arah yang benar, bukan untuk diikuti secara membabi-buta atau secara taklik.

Tugas Syekh Muhammad Jamil Jambek sebagai seorang Mubalig Islam terkenal di Sumatera Barat dijalankannya semenjak tahun 1911

sampai akhir hayatnya di saat dia sudah 87 tahun. Syekh Muhammad Jamil Jambek adalah juga pendiri perkumpulan Tsamaratul Ikhwan yang mempunyai sebuah percetakan untuk mencetak buku tentang Islam. Di samping itu dia juga menjadi Ketua Majelis Islam Tinggi Minangkabau pada waktu Jepang berkuasa di Sumatera Barat, yang kemudian menjadi Majelis Islam Tinggi Sumatera (MIT Sumatera)³⁶

3.2.3.6. Zainuddin Labai El-Yunusi

Zainuddin Labai El-Yunusi dilahirkan di Padang Pandang pada tahun 1890, dia berasal dari keluarga Islam yang taat menjalankan agama. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus yang menjadi guru agama Islam di Padang Panjang. Di waktu berumur 8 tahun Zainuddin Labai El-Yunusi masuk sekolah Gubernemen Belanda, tetapi hanya sampai pada kelas IV saja, mungkin merasa kurang cocok sekolah di sana. Selanjutnya dia belajar dengan ayahnya, tetapi di waktu dia berumur 14 tahun ayahnya meninggal dunia. Mungkin karena kesedihan yang sangat mendalam disebabkan kematian ayahnya tersebut, Zainuddin Labai El-Yunusi hidup menganggur selama dua tahun dengan tidak tentu arah sampai berusia 16 tahun. Di waktu itulah ibunya memberi nasehat supaya dia mengaji kembali, karena orang yang tidak belajar mengaji tidak akan selamat hidupnya. Orang seperti itu tidak ada pegangan, hidupnya akan terumbang-ambing dalam masyarakat dan apabila tidak dapat mengendalikannya akan menimbulkan bencana bagi manusia.

Demikianlah dia pergi mengaji kepada Syekh Abdullah Ahmad, tetapi karena tidak ada kecocokan di Padang, dia kembali ke Padang Panjang lagi. Kemudian dia pergi ke Padang Japang, di Payakumbuh untuk belajar dengan Syekh Haji Abbas Abdullah seorang ulama Islam terkenal di Payakumbuh pada waktu itu. Rupanya di Padang Japang tersebut Zainuddin Labai El-Yunusi mendapat kecocokan, baik dengan guru maupun dengan suasana lingkungan, maka dia belajar dengan tekun dan rajin. Tetapi karena Zainuddin Labai El-Yunusi merupakan seorang murid yang pintar dan cerdas, dia sering berselisih pendapat dengan gurunya, karena dia tidak mau menerima begitu saja apa yang

36. Mahmud Yunus, *Op Cit*, hal. 141--143..

dikatakan gurunya, sebaliknya dia sering sekali mendebat dan berdebat dengan gurunya itu. Karena gurunya juga mengetahui Zainuddin Labai El-Yunusi bukan hanya asal mendebat dan membantah saja, melainkan karena dia ingin mengetahui segala sesuatunya, bahkan tidak lama sesudah belajar di sana Zainuddin Labai El-Yunusi di angkat gurunya menjadi guru bantu yang membantu pekerjaan gurunya sehari-hari dalam mengajar.

Sewaktu Zainuddin Labai El-Yunusi berumur 23 tahun, dia kembali ke Padang Panjang dan mengajar di Surau Jembatan Besi yang merupakan sebuah surau perintis pengembangan pembaharuan pendidikan Islam di Sumatera Barat. Selama mengajar di Surau Jembatan Besi itu Zainuddin Labai banyak mendapat pengalaman dari tokoh Islam Sumatera Barat yang sebelumnya sudah mengajar di sana, seperti Syekh Haji Abdul Karim Amarullah dan teman-temannya. Dia termasuk tokoh muda yang ikut menulis pada majalah Al-Munir, terutama tentang perjuangan pemuda Islam dalam menghadapi penjajahan Belanda. Tetapi karena tulisannya dianggap keras menentang Belanda dan banyak bertentangan dengan kaum tua pada waktu itu, maka banyak ulama Sumatera Barat yang belum begitu maju pandangannya, menentang dan menyerang pendapat yang tersebar pada majalah Al-Munir di mana terdapat tulisan Zainuddin Labai El-Yunusi. Supaya Al-Munir jangan ikut terbawa dan terkena serangan kaum tua tersebut yang mungkin akan menyebabkan kematiannya, maka Zainuddin Labai El-Yunusi mendirikan sendiri sebuah majalah baru yang diberinya nama dengan Al-Akbar, untuk membela pendapat tokoh Islam yang sudah maju pandangannya tentang Islam, terutama kaum muda. Dengan demikian pendapat baru mengenai Islam, yang sudah maju pandangannya tentang Islam, terutama kaum muda. Dengan demikian pendapat baru mengenai Islam, terutama mengenai masalah pendidikan Islam mendapat dukungan dari kaum muda Islam sendiri yang tergabung di dalam majalah Al-Akbar yang dipimpin oleh Zainuddin Labai El-Yunusi.

Zainuddin Labai El-Yunusi tidak senang melihat lambannya perkembangan pendidikan Islam apa waktu itu di Padang Panjang yang menjadi pusat pengembangan Islam Sumatera Barat waktu itu.

Pada tahun 1915 ia mendirikan sekolah sendiri yang dinamakannya "*Diniah School*", yang membawakan cita-cita tentang pembaharuan pendidikan Islam.

Sekolah Diniah mempunyai tujuh kelas seperti HIS Belanda, sistem penyelenggaraan sekolah tersebut hampir menyamai sistem sekolah Belanda, tetapi isinya adalah mengenai agama Islam.

Di samping merupakan seorang organisator dalam penyelenggaraan sekolah, Zainuddin Labai juga merupakan seorang pengarang buku yang produktif sekali, terutama yang berhubungan dengan pelajaran agama Islam. Hampir semua buku yang dipakai pada Sekolah Diniah tingkat Sekolah Dasar dipakai buku-buku karangannya sendiri, untuk tingkat sekolah menengah dipakai buku keluaran Mesir. Sayangnya Zainuddin Labai El-Yunusi tidak berumur panjang, dia meninggal pada umur 34 tahun, hanya 11 tahun lamanya dia dapat menyumbangkan tenaganya untuk pembaharuan bidang pendidikan Islam.

Tetapi walaupun dia sudah meninggal, cita-citanya masih tetap dijalankan terus, bahkan sampai sekarang sebahagian yang diinginkan Zainuddin Labai El-Yunusi masih tetap diteruskan pada Sekolah Diniah Putri Padang Panjang yang dirikan oleh adik perempuannya Encik Rahmah El-Yunusiah.

3.2.3.2 Syekh Ibrahim Musa Parabek

Syekh Ibrahim Musa Parabek dilahirkan pada tahun 1884 di Parabek, Bukittinggi, yang terletak di kaki Gunung Singgalang, kira-kira 20 km dari Bukittinggi. Dia mulai belajar agama Islam ketika berumur 11 tahun, selama delapan tahun dia menuntut ilmu tentang Islam di Sumatera Barat. Karena dia merasa kurang puas dengan ilmu yang diperolehnya di Sumatera Barat, pada waktu berumur 18 tahun dia pergi ke Mekah untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam sambil menunaikan rukun Haji. Syekh Ibrahim Musa salah seorang gurunya di Mekah dan hampir 8 tahun lamanya dia berada di Mekah. Sesudah merasa cukup ilmunya, dia kembali ke Sumatera Barat dan menetap di Parabek.

Mula-mula dia mengajarkan agama Islam dengan sistem surau (halaqah) selama sebelas tahun. Sistem itu sudah mulai ditinggalkan oleh ulama Islam keluaran Mekah dan Mesir. Karena pengaruh teman-temannya yang juga berada di Padang Panjang, maka pada tahun 1921 dia mengubah sistem surau menjadi Sekolah Thawalib seperti Sekolah Thawalib di Padang Panjang, walaupun masing-masing beridri sendiri.

Nama Parabek yang melekat pada nama Syekh Ibrahim Musa karena dia menjadi guru agama Islam di Parabek tempat kelahirannya, sedangkan di Sumatera Barat banyak orang yang bernama Ibrahim Musa. Untuk membedakan Ibrahim Musa yang lain, maka diberikanlah tambahan Parabek di belakang nama Syekh Ibrahim Musa tersebut, sehingga orang dengan mudah mengetahui orang yang mana yang dimaksudkan. Lagi pula pada waktu itu di Sumatera Barat sudah biasa seorang Syekh disebutkan dengan menambah nama tempat di mana dia mengajar.

Pada tahun 1940 Syekh Ibrahim Musa Parabek mendirikan lanjutan dari Sekolah Thawalib Parabek yang pada mulanya hanya sampak 7 kelas saja. Lanjutan itu dinamakan "*Kulliahtul Diyanah*". Lama Pendidikannya 3 tahun. Pada tingkat lanjutan ini, di samping mata pelajaran agama juga diajarkan pengetahuan umum. Pada waktu itu sudah lazim pengetahuan umum diajarkan pada sekolah agama Islam di Sumatera Barat. Tingkatan Kulliatul Diyanah ini kira-kira sama dengan tingkatan Sekolah Menengah Atas. Sesudah tamat dari sekolah ini murid-muridnya dapat menyambung ke sekolah Islam yang lebih tinggi.

3.2.3.8 Syekh Daud Rasyidi

Syekh Daud Rasyidi dilahirkan di Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yaitu sebuah kampung yang terletak di lereng Gunung Singgalang. Ia keturunan alim ulama dan ahli adat di Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang Tuanku, yaitu suatu gelar lain bagi seorang yang ahli dalam agama Islam di Sumatera Barat. Sejak kecil Daud Rasyidi adalah anak yang melarat hidupnya dan hal ini terbawa sampai dia menjadi seorang tokoh Islam di Sumatera Barat. Walaupun

sudah terkenal dia tetap hidup sederhana dan tidak mau menerima sedekah yang bagaimanapun bentuknya dan dari siapapun datangnya, karena dia beranggapan masih banyak orang lain yang berhak menerimanya dari dia yang masih sanggup mencari kebutuhan hidupnya sekeluarga. Dia seorang yang sangat tabah menerima cobaan dan terkenal sangat jujur dalam hidupnya, dia lebih kenal dengan sebutan Inyik Daun dari nama lengkapnya.

Syekh Daud Rasyidi mulai belajar agama Islam ketiga berumur 7 tahun, yang pertama kali belajar membaca Al-Quran dengan ayahnya. Sesudah itu dia belajar di Muara Labuh dengan Syekh Mustafa Sungai Pagu, untuk belajar Ilmu Saraf, Nahu, dan Fikih.

Seperti kebanyakan pelajar Islam yang belajar di luar kampungnya, Daud Rasyidi juga ikut mencari nafkah sendiri dengan menerima upah jahit. Pekerjaan ini dilakukannya karena ia tidak mau dibantu orang lain seperti yang dilakukan oleh murid lainnya.

Pada tahun 1895 dia dibawa kakaknya, Haji Abdul Latif, ke Mekah untuk menunaikan ibadah Haji. Di Mekah selain menunaikan Haji dia dapat memperdalam bacaan Al-Quran saja, karena tidak lama bermukim di sana. Hal itu disebabkan karena dia kekurangan biaya, dan terpaksa ikut pulang bersama kakaknya kembali.

Sesampai di kampungnya kembali hidupnya gelisah karena sedikitnya ilmu yang dimiliki. Dia hanya mahir dalam bacaan Al-Quran, sedangkan pengetahuannya tentang Islam masih sedikit. Oleh karena itu, Daud Rasyidi berusaha lagi meninggalkan kampungnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Walaupun pada mulanya dia mendapat halangan dari ibunya yang sudah tua, tetapi berkat kegigihan dan kesungguhannya, akhirnya dia diizinkan juga pergi untuk menuntut ilmu ke luar kampungnya dengan hanya membawa sebungkus nasi sebagai bekal untuk di jalan, karena hanya itulah yang disanggupi oleh ibunya. Bagi Syekh Daud Rasyidi hal tersebut tidak menjadi masalah, karena yang diperlukannya adalah doa restu dan izin ibunya, sedangkan yang lainnya dapat diselesaikan sendiri.

Tempat yang ditujunya adalah kota Padang, karena dia mendengar bahwa ulama di Padang sudah luas pandangannya dan sudah

maju cara berpikirnya mengenai agama Islam. Di Padang antara lain dia belajar dengan Haji Muhammad Thaib, dan Haji Zabidi, semua buku mengenai Islam dipelajarinya dengan tekun sehingga cepat mendapat kemajuan. Sesudah dua tahun belajar dia mulai mengajar pemuda di sekitar tempat tinggalnya dengan pengetahuan Islam yang telah diperolehnya.

Pada tahun 1093 Syekh Daud Rasyidi pindah mengajar ke Surau Jembatan Besi di Padang Panjang menggantikan kakaknya yang sudah sakit-sakitan. Syekh Daud Rasyidi adalah seorang yang haus akan ilmu pengetahuan dan berhasrat memperdalam pengetahuan tentang Islam. Hal ini mungkin disebabkan karena dia belum pernah belajar dengan Syekh yang ternama. Kemudian dia mendengar ada seorang ulama besar di Sungai Batang yang baru pulang dari Mekah, yaitu Syekh Haji Abdul Karim Amarullah. Walaupun waktu itu dia sudah menjadi guru agama Islam, tetapi dia tidak segan belajar lagi dengan orang yang lebih dari dia sendiri. Demikianlah dia belajar dengan Syekh Haji Abdul Karim Amarullah dengan cara pulang-pergi dari Padang ke Maninjau, banyak pengetahuan yang diperolehnya dari gurunya yang baru itu. Dalam diskusi dengan gurunya dapatlah diketahuinya bahwa sumber ilmu pengetahuan Syekh Haji Abdul Karim Amarullah dari Syekh Ahmad Khatib di Mekah yang dapat dikatakan menjadi guru dari seluruh ulama Islam Sumatera Barat. Oleh karena itu, Syekh Daud Rasidi juga berkeinginan untuk mendapatkan sendiri ilmu pengetahuan dari Syekh Akhmad Khatib itu.

Demikianlah sesudah dua tahun lamanya belajar dengan Syekh Haji Abdul Karim Amarullah, pada tahun 1908 dia pergi ke Mekah, atas bantuan yang besar dari Syekh Haji Abdul Karim Amarullah dan dari kakaknya Haji Abul Latif. Bersama dia dibawanya anak kakaknya yang bernama Muhtar Luthfi, anaknya Mansur Daud. Empat tahun lama dia belajar dengan Syekh Ahmad Khatib di Mekah, banyak pengetahuan tentang Islam yang diperolehnya dan akhirnya dia diberi ijazah untuk menjadi guru agama Islam oleh Syekh Ahmad Khatib. Dengan demikian kedudukannya sudah sama dengan ulama Islam lainnya di Sumatera Barat yang pernah menjadi murid Syekh Akhmad Khatib di Mekah.

Pada tahun 1913, sewaktu dia berumur 31 tahun, Syekh Daud Rasyidi kembali dari Mekah dengan pengetahuan Islam yang lebih dalam. Dia mengajar di kampungnya, Balingka, karena kakaknya Haji Abdul Latif sudah tutup usia ketika dia masih di Mekah. Orang kampungnya secara bergotong royong membuatkan sebuah surau tempat dia mengajar. Tetapi sayangnya surau tersebut hanya berumur tiga tahun, karena sesudah tiga tahun surau tersebut dihancurkan oleh banjir besar yang melanda kampungnya Balinga.

Pada tahun 1917, bersama Haji Abdul Karim Amarullah dia pergi ke Malaya untuk melihat para perantau Minangkabau yang ada di sana. Tetapi karena orang Inggris yang berkuasa di sana menganggap kedatangan kedua orang itu dapat membahayakan kedudukan mereka di Malaya, maka mereka selalu dikejar-kejar oleh tentara Inggris Malaya. Oleh karena itu, ke mana saja mereka pergi selalu dibayangi tentara Inggris dengan ketat. Akhirnya setelah merasa puas berada di Malaya mereka kembali ke Sumatera Barat.

Sekembalinya ke Sumatera Barat Syekh Daud Rasyidi tidak menetap lagi di Balinga melainkan ikut dengan Syekh Muhammad Jamil Jambek melakukan dakwah ke daerah pedesaan. Hampir seluruh mesjid yang ada mereka kunjungi untuk mengadakan tablig besar di sana. Tempat beribadat yang kurang bersih atau kurang terawat dianjurkan untuk dirawat dengan baik karena tempat itu merupakan tempat dimana manusia menemui Tuhannya. Jika tempatnya tidak bersih Tuhan tidak akan mendengarkan permintaan umatnya. Dengan demikian banyak tempat beribadat yang sudah diperbaiki atas anjuran mereka berdua.

Masalah yang terutama diusahakan memperbaikinya oleh Syekh Daud Rasyidi adalah dalam pelaksanaan ajaran Islam oleh masyarakat yang antara lain adalah masalah Bid'ah, Khurafah, Takhyul, Kejahilan yang kesemuanya bertentangan dengan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.

Syekh Daud Rasyidi orangnya lemah lembut, ramah taman, baik terhadap lawan dan kawan, di samping itu dia juga seorang pejuang yang gigih memperjuangkan cita-citanya dan banyak akal untuk menundukkan lawannya serta pantang menyerah menghadapi rintangan

yang bagaimanapun. Kalau Syekh Muhammad Jamil Jambek banyak memberikan penerangan kepada orang desa yang tidak tahu kekeliruan dalam beribadat, Syekh Daud Rasyidi sengaja menghadapi dan menyadarkan orang yang tergolong parewa. Orang begitu biasanya menganggap ulama Islam itu hanya bekerja di surau saja dan masalah dunia tidak usah dicampuri, berzikir sajalah setiap hari supaya cepat ke akherat. Bagi Syekh Daud Rasyidi justru orang semacam inilah yang akan ditobatkannya, karena apabila mereka dapat ditobatkan, tenaga mereka sangat berguna dalam pembangunan Islam selanjutnya. Mereka biasanya mempunyai anak buah yang banyak yang akan dapat membantunya, sekurang-kurangnya anak buahnya itu saja yang diawasinya sehingga tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya lagi. Di samping itu Syekh Daud Rasyidi juga menghadapi golongan Tharikat yang kokoh pada pendiriannya serta sangat banyak pengikutnya yang fanatik terhadap gurunya.

Seorang ulama Tharikat Naksyabandi yang bernama Syekh Abdullah yang juga berkediaman di Balinga, banyak pengikutnya, ia menentang ajaran yang diberikan Syekh Daud Rasyidi. Tetapi melalui cara kekeluargaan yang mendalam Syekh Daud Rasyidi selalu mendatangi umat Tharikat tersebut dan mengajaknya berdiskusi mengenai agama Islam secara mendalam dengan melihat langsung kepada Al-Quran dan Hadis Nabi serta melihat kelemahan yang dijalankan kaum Tharikat selama ini. Akhirnya ulama Tharikat tersebut dapat ditundukkan dan menjadi pengikut Islam Ahlul Sunah Waljamaah yang setia dan selalu membantu memperjuangkan cita-cita Syekh Daud Rasyidi untuk disadarkan. Jika belum cukup sekali, pengikutnya yang juga telah mengikuti jejak gurunya.

Di samping itu orang parewa dalam suatu nagari yang tidak mengenal sembahyang juga didatangi oleh Syekh Daud Rasyidi untuk disadarkan. Jika belum cukup sekali didatangi sepuluh kali dan apabila belum cukup akan didatangi sampai yang bersangkutan dapat disadarkan dan bertobat terhadap segala dosa yang telah dilakukannya.

Tugas Syekh Daud Rasyidi lebih banyak diarahkan untuk menundukkan para "parewa", dan sesudah tobat mereka merupakan penganut Islam yang taat dan merupakan benteng untuk mempertahankan ajaran Islam.

Pada tahun 1919 Syekh Daud Rasyidi ikut membentuk Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Sumatera Barat, di mana ia banyak berhubungan dengan ulama Islam lainnya dan secara bersama mereka berusaha memajukan pendidikan Islam.

Syekh Daud Rasyidi juga ikut dalam pergerakan Indonesia seperti ulama lainnya. Dia bergabung dengan organisasi Muhammadiyah, karena tertarik dengan dakwahnya dan pemeliharaan anak yatim yang baik. Kemenakannya Haji Mukhtar Lutfi, anaknya Mansur Daud Datuk Palimo Kayo, dan menantunya Haji Jalaluddin Thaib adalah pejuang kemerdekaan di Sumatera Barat yang ditakuti Belanda, sehingga mereka ditangkap Belanda dan diasingkan ke tempat lain di luar Sumatera Barat.

Syekh Daud Rasyidi meninggal pada tahun 1948 dan dimakamkan di samping makam Syekh Muhammad Jamil Jambek.

3.2.3.9 Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo

Mansur Daud dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1907 di Balingka, termasuk tokoh Islam angkatan muda.

Pendidikan pertama yang ditempuhnya adalah sekolah gubernemen Belanda 5 tahun. Sesudah itu dia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Thawalib Padang Panjang yang pada waktu itu dibawah pimpinan Syekh Haji Abdul Karim Amarullah atau Haji Rasul. Setamat dari Thawalib Padang Panjang dia melanjutkan ke Parabek di bawah asuhan Syekh Ibrahim Musa Parabek, pada tahun 1923 dia sudah menamatkan pendidikannya di Parabek.

Setelah selesai pendidikan di Sumatera Barat, Mansur Daud mengembara di luar negeri dalam usahanya menambah ilmu pengetahuannya. Tujuh tahun lamanya dia mengunjungi tempat terkenal untuk menambah ilmu pengetahuan tersebut, seperti India, Mekah, Turki, Cina, Jepang, Pilipina, Malaysia, dan di Mekah dia menunaikan ibadah Haji. Selama 7 tahun itu banyaklah ilmu pengetahuan yang diperolehnya, bukan saja mengenai Islam, tetapi juga tentang pengetahuan umum sehingga dia menjadikan orang yang luas pandangannya.

Dalam pergerakan kebangsaan, Mansur Daud tidak kurang jasanya, dia turut membentuk dan memimpin partai politik Permi, dan dia juga menjadi Pemimpin majalah Medan Rakyat yang diterbitkan oleh Permi. Sewaktu Haji Ilyas Yakub pemimpin Permi ditangkap dan dibuang Belanda, Mansur Daud mengambil alih pimpinan Permi. Ia juga ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Medan pada penjara Sukamulya selama (24/9/1935-24/9/1936). Sesudah ke luar dari penjara dia aktif di bidang Dakwah di Sumatera Selatan, terutama di Bengkulu dan Palembang, yang dilakukannya sampai dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942.

Alasan dia mengalihkan kegiatannya ke Sumatera Selatan, kalau kembali ke Sumatera Barat dia akan ditangkap kembali oleh pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat, sebab dia dianggap berbahaya bagi Belanda di daerah ini karena kegiatannya menentang kekuasaan Belanda. Di Sumatera Selatan dia beralih ke bidang dakwah, karena kegiatan politiknya dilarang oleh Belanda. Namun demikian bidang dakwah tersebut dijadikannya sebagai wadah untuk mencapai cita-cita yang diperjuangkannya pada Premi. Dengan berdakwah itu Belanda tidak mempunyai alasan lagi untuk menangkapnya, karena masalah yang terkemuka dalam segala kegiatannya adalah dakwah Islam. Dengan demikian di Sumatera Selatan gerakannya mendapat kebebasan jika dibandingkan dengan di Sumatera Barat.

Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Mansur Daud tidak berkurang. Dia ikut membentuk Majelis Islam Tinggi Minangkabau yang kemudian menjadi Majelis Islam Tinggi Sumatera. Dia menduduki jabatan Sekretaris Umum sedangkan Ketuanya pada waktu itu adalah Syekh Muhammad Jamil Jambek. Di samping itu dia juga bertindak sebagai badan pengurus Badan Koordinasi Alim Ulama se-Sumatera yang bertugas mempertahankan agama, Bangsa, dan Tanah Air dari penindasan Jepang. Dalam menjalankan tugas ini tidak sedikit penderitaan yang diterima Mansur Daud, tetapi kesemuanya itu diterimanya dengan ketabahan yang luar biasa.

Di Zaman Kemerdekaan Indonesia Mansur Daud meneruskan perjuangannya di bidang politik yang sekarang ditujukan untuk membangun dan mengisi Indonesia Merdeka. Setelah Majelis Islam Tinggi Sumatera melakukan fusi dengan partai politik Masyumi,

Mansur Daud diangkat menjadi Sekretaris Umum Masyumi se Sumatera yang pusat kedudukannya terletak di Pematang Siantar. Jabatan ini dipegangnya selama dua tahun, sesudah itu dia diangkat menjadi Ketua Umum Masyumi Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Pada waktu itu Sumatera telah dibagi menjadi tiga propinsi, yaitu Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan. Karena kecakapannya selama menjadi Sekretaris Umum Masyumi Sumatera, maka sewaktu pembentukan tiga propinsi dilakukan, dia ditunjuk sebagai Ketua Masyumi Sumatera Tengah. Jabatan ini dipegangnya selama 8 tahun. Pada tahun 1956 dia pindah ke Jakarta terpilih menjadi anggota DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955. Pada tahun 1956 itu juga dia diangkat menjadi Duta Besar untuk Kerajaan Iraq yang berkedudukan di Bagdad yang dipegangnya selama 4 tahun. Setelah pulang kembali ke Indonesia dia diangkat menjadi Ketua Umum Masyumi daerah Jakarta Raya selama satu tahun, sampai tahun 1961 ketika Masyumi dibubarkan Mansur Daud Datuk Palimo Kayo memilih kegiatan melakukan dakwah Islam untuk daerah Jakarta Raya, dan bidang inilah yang sesungguhnya profesi Mansur Daud Datuk Palimo Kayo. Dalam kegiatannya ini dia tidak mendapat rintangan sama sekali.

Pada zaman Orde Baru Mansur Daud Datuk Palimo Kayo ikut membentuk Dewan Dakwah Islamiah Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Natsir, sedangkan Mansur Daud menjadi Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiah Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pada tahun 1968 dia ikut membentuk Majelis Ulama Sumatera Barat yang akhirnya terpilih menjadi Ketua yang dipegangnya sampai tahun 1980.

Pada waktu ini, walaupun Mansur Daud Datuk Palimo Kayo sudah berumur 73 tahun lebih, dia tetap melakukan tugasnya, aktif melakukan dakwah di daerah Sumatera Barat di samping menjadi Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat.

3.2.3.10 Haji Udin Rahmani

Udin Rahmani dilahirkan pada tahun 1901, di masa kecil belajar mengaji di Maninjau sampai tahun 1916. Di waktu berumur 17 tahun dia menjadi guru Sekolah Thawalib dan Sekolah Diniyah di Padang

Panjang, di samping seorang mubalig Islam yang terkenal di Sumatera Barat.

Pada tahun 1919 sewaktu dia berumur 18 tahun ia sudah ikut mendirikan Sumatera Thawalib dan menjadi anggota Pengurus sampai tahun 1923. Tahun berikutnya dia menjadi anggota Serikat Islam selama tiga tahun, dan sesudah itu dia menjadi anggota PSII selama 5 tahun (1928-1933), tetapi karena kegiatan politiknya dianggap berbahaya oleh Belanda, maka pada tahun 1918 dia ditangkap Belanda dan dibuang ke Digul bersama-sama dengan pemimpin Indonesia lainnya selama sembilan tahun. Kedatangan tentara Jepang tidak ikut membebaskannya dari tawanan Belanda, dia terus berpindah-pindah ke beberapa tempat sampai ke luar negeri seperti ke Australia, pada tahun 1943 di Quinsland dia diangkat menjadi tentara Australia yang bertugas di front belakang. Tahun 1944 dipindahkan lagi dan dilatih dengan latihan kemiliteran oleh Belanda secara paksa dalam rangka usaha Belanda menjajah Indonesia kembali.

Walaupun dia berada dalam tawanan Belanda bersama pemuda Indonesia lainnya yang ikut dilarikan Belanda ke Australia, tetapi di dalam tawanan Haji Udin Rahmani masih tetap berusaha membakar semangat teman-temannya sesama tawanan. Akibat usaha Haji Udin Rahmani dalam tawanan Belanda itu banyak usaha Belanda untuk kembali ke Indonesia dapat disabot. Karena itu dia dipindahkan ke Holandia, (Jayapura sekarang) tetapi kemudian dipindahkan lagi ke Morotai. Setelah itu bersama tentara Australia ia dipindahkan ke Tarakan di Kalimantan. Pada bulan Juni 1945 kembali dibawa ke Australia bersama tentara Australia dan di sana dia ditugaskan mengajarkan agama Islam kepada orang Indonesia dan Malaya yang dibawa lari oleh Belanda sebelumnya, yang berjumlah 3.000 orang.

Haji Udin Rahmani bersama teman-temannya yang diajarnya itu ditempatkan di Sidney, di sana Haji Udin Rahmani terus menggembleng pemuda Indonesia yang berada di situ supaya mereka tidak lupa bahwa mereka masih dijajah bangsa asing. Penggemblengan itu masih terus dilakukan sampai akhir tahun 1945 sesudah beberapa bulan Proklamasi Kemerdekaan. Mungkin mereka yang berada di Australia itu belum mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka karena berita kemerdekaan itu selalu ditutup Belanda.

Tetapi walaupun bagaimana Belanda menutupi berita kemerdekaan Indonesia itu, akhirnya orang Indonesia yang ada di sana mengetahui juga dan mereka berusaha untuk kembali ke Indonesia. Karena kesamaan pendapat dengan pihak Belanda tidak diperoleh mengenai kepulangan orang Indonesia itu, akhirnya Pemerintah Australia turun tangan menyelesaikannya. Pada tahun 1946 dipulangkanlah orang Indonesia itu dalam dua rombongan. Dengan demikian Haji Udin Rahmani sudah berada kembali di Indonesia pertengahan tahun 1946, dia menetap di Purwokerto dan masuk menjadi anggota Masyumi. Tahun berikutnya dia pulang ke Sumatera Barat. Setahun sesudah ke Sumatera Barat dia diangkat menjadi Ketua Masyumi Sumatera Barat dan tahun berikutnya menjadi anggota staf Bupati Kabupaten Agam di Bukittinggi. Menjadi staf Bupati Militer Agam dipegangnya sampai tahun 1950, sesudah itu Haji Udin Rahmani menjadi ketua DPR Kabupaten Agam yang berkedudukan di Bukittinggi. Dari tahun 1951-1958 dia menjadi Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Agam. Selanjutnya sesudah terjadi pergolakan daerah Sumatera Barat dia menjadi anggota majelis Ulama Sumatera Barat.

3.2.3.11 Muhammad Syafei

Muhammad Syafei dilahirkan pada tahun 1899, di waktu masih kecil dia diangkat menjadi anak angkat oleh Marah Sutan seorang guru dan pengarang pada waktu itu di Sumatera Barat. Pendidikan Muhammad Syafei adalah Sekolah Guru di Bukittinggi dan sesudah dari sana menjadi guru Sekolah Kartini di Jakarta. Pada tahun 1922 dia pergi ke Eropa melanjutkan sekolahnya dan mendapat ijazah : Guru Eropa, Menggambar, Pekerjaan Tangan, dan Musik. Pada tanggal 31 Oktober 1931 dia mendirikan INS Kayutanam dengan prinsip pendidikan “Berdiri sendiri tanpa mau menerima bantuan yang mengikat dan semua alat-alat serta ruang sekolah dibuat sendiri oleh murid-murid”.

Pada tahun 1946 dia menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di bawah Kabinet Syahrir II, kemudian sesudah berhenti menjadi Menteri dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada tahun 1950 menjadi anggota Parlemen Indonesia.

Cita-cita pendidikannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak-anak perlu dibiasakan "belajar bekerja" supaya pandai mempergunakan tangan di samping otak. Kepada anak diajarkan suatu pekerjaan sesuai dengan pembawaan dan kemauan hidupnya kelak. Semua ini merupakan reaksi terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda pada waktu itu.
- 2) Ingin membentuk manusia Indonesia yang bertanggung jawab, berani berdiri sendiri, membuka perusahaan sendiri, hidup bebas, dan tak tergantung pada orang lain.
- 3) Menentang sistem pendidikan yang intelektualisme, karena hanya merupakan pembentukan akal saja.
- 4) Di dalam pendidikan manusia sebagai kesatuan jiwa raga, kesatuan individu, dan kesatuan masyarakat harus diperhatikan perkembangannya.

Sayangnya Muhammad Syafei tidak dapat dengan tenang menyelenggarakan INS Kayutanam, karena selalu mendapat cobaan, kompleks INS yang dibangunnya dengan susah payah hancur menjadi puing yang tidak dapat dipergunakan lagi. Tetapi berkat keuletan dan kegigihan Muhammad Syafei berjuang, akhirnya atas usahanya juga di atas puing itu dapat dibangun kembali sebuah kompleks INS yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya.

BAB IV

PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG DAN INDONESIA MERDEKA

4.1. Pendidikan Zaman Pendudukan Jepang

4.1.1 Pendidikan Pemerintah

Pada dasarnya pendidikan di Sumatera Barat sewaktu Jepang berkuasa tidak teratur. Sekolah Dasar yang agar teratur diberikan pelajaran sekali atau dua kali seminggu hanya di kota-kota saja, seperti Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Pariaman, Batusangkar, dan Padang Panjang. Sedangkan sekolah di tempat lainnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, guru dan murid masing-masing sibuk mengurus dirinya sendiri, bahkan banyak murid yang meninggalkan bangku sekolah tanpa dapat diawasi oleh guru atau Kepala Sekolah.

Di Kota-kota pelaksanaan sekolah tidak berjalan lancar, karena banyak murid yang dipaksa ikut bergotong royong membuat jalan baru atau berkebuh di sekitar sekolah untuk menambah atau mencukupi kebutuhan Jepang akan bahan makanan yang mereka perlukan untuk keperluan perang.

Jenis sekolah yang banyak waktu itu di Sumatera Barat adalah Sekolah Dasar 6 tahun, Jepang menyeragamkan seluruh Sekolah dasar menjadi Sekolah Dasar 6 tahun dengan nama Sekolah Nippon Indonesia (S N I) atau dalam bahasa Jepang disebut "*Kokumin Gakko*".

Dengan penyeragaman itu, maka Sekolah Dasar 6 tahun hampir terdapat di seluruh daerah Sumatera Barat, terutama di daerah yang dahulunya menjadi ibukota Keresidenan, Kewedanan, Kedemangan, dan nagari-nagari yang menjadi ibukota Kelarasan. Bagi daerah yang dianggap Jepang tidak mampu atau terlampau jauh dari pengawasan seperti daerah pegunungan, sekolahnya dihapuskan saja dan muridnya disuruh menggabung kepada Sekolah Dasar yang terdekat dengan daerah tersebut.

Sedangkan pendidikan Menengah di Sumatera Barat hanya terdapat di Bukittinggi dan Padang, Jepang membatasi jumlah Sekolah Menengah dengan maksud supaya mudah melakukan pengawasan. Yang boleh masuk Sekolah Menengah Jepang ini hanyalah orang yang terpilih melalui Kepala Sekolah Dasar setempat. Orang yang dipilih adalah pemuda yang tegap badannya dan sehat jasmaninya, karena di samping belajar mereka juga disuruh mengerjakan beberapa pekerjaan lain untuk kepentingan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang Sekolah Menengah tidak dibagi dua seperti sekarang, yaitu Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, melainkan Sekolah Menengah saja. Sebaliknya Sekolah Kejuruan memang agak banyak macamnya walaupun hanya terdapat di Padang dan Bukittinggi saja. Sekolah Kejuruan yang ada pada waktu itu adalah Sekolah Pertanian, Sekolah Teknik, Sekolah Polisi, Sekolah Pamong. Sekolah itu banyak jumlahnya adalah karena dibutuhkan oleh Jepang dalam memberikan bantuan terhadap keberhasilan perangnya. Tenaga mereka diperbantukan pada kantor Jepang atau dilatih dengan latihan kemiliteran untuk kemudian dibawa ke medan perang.

Perguruan Tinggi pada waktu itu memang tidak ada di Sumatera Barat sesuai dengan kebijaksanaan Jepang yang hanya mengizinkan Perguruan Tinggi di Jawa saja.

Sekolah non-formal pada waktu Jepang berkuasa di Sumatera Barat agak banyak didirikan oleh Jepang melalui organisasi kepemudaan seperti *Seinendan*, *Kaibodan*, *Bogodan*, yang dilatih secara kemiliteran. Pendidikan untuk mereka dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan diri menjaga kampung mereka masing-masing, tetapi

sesungguhnya mereka dipersiapkan sebagai tenaga cadangan apabila tentara Jepang sudah kurang. Disamping itu ada perkumpulan wanita yang bernama *Hahanokai* yang bertugas pada dapur umum atau menghibur tentara yang sedang berjuang di garis depan. Tetapi kebanyakan tugas dari *Hahanokai* adalah mempersiapkan perbekalan bagi tentara Jepang dan menghibur orang-orang Jepang, terutama para opsir Jepang yang baru kembali dari garis depan.

Masalah pendidikan pada waktu Jepang berkuasa di Sumatera Barat ini membawa akibat yang baik dan yang buruk. Buruknya adalah anak tidak diberi pelajaran sebagaimana mestinya, tetapi disuruh kerja bakti atau gotong royong mengerjakan kepentingan Jepang. Beberapa kali seminggu anak-anak disuruh gotong royong menanam ubi, lebih-lebih setelah dekat kekalahannya terhadap Sekutu. Moral anak-anak menjadi rusak, karena tindakan tentara Jepang yang tidak mendidik seperti memarahi seorang guru di hadapan muridnya. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak-anak yang sedang berkembang itu. Mereka serta merta dapat meniru perbuatan Jepang tersebut terhadap orang lain, walaupun terhadap orang yang lebih tua sekalipun. Karena keadaan seperti itu tidak ada yang melarang, lama-lama anak-anak menjadi biasa dengan perbuatan tersebut, bahkan tidak jarang seorang anak melawan kepada orang tuanya karena masalah yang kecil saja. Di samping itu anak-anak sekolah termasuk juga orang dewasa dipaksa mengikuti dan menirukan kebiasaan orang Jepang seperti "*seikere*" menghadap ke Jepang (matahari terbit) setiap pagi, diwajibkan menyanyikan lagu-lagu Jepang di sekolah, memberi hormat kepada orang Jepang walaupun pangkatnya rendah. Hal tersebut ada hubungannya dengan maksud Jepang untuk men-Jepangkan orang Indonesia seperti yang mereka lakukan di Mansyuria. Tetapi akibatnya bagi anak-anak Sumatera Barat mereka dapat melupakan kebudayaan dan kebiasaan mereka sendiri yang telah merupakan warisan turun-temurun. Dalam melakukan kebiasaan itu, orang Jepang memerintahkan dengan keras, barang siapa yang tidak mau melaksanakan segera dihukum di hadapan khalayak ramai dengan jalan menamparnya berulang-ulang. Akibat pendidikan seperti itulah yang sangat buruk pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak-anak.

Sebaliknya akibat yang baik dari pendidikan zaman Jepang adalah menyeragamkan seluruh tahun ajaran Sekolah Dasar. Hal ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia semenjak Indonesia dijajah oleh Belanda. Dengan adanya keseragaman dalam waktu pendidikan, masalah penyelenggaraan dan pengawasan sekolah mudah dilakukan serta kurikulumnya dapat dibuat dengan lebih baik dan seragam. Dengan demikian pengetahuan murid Sekolah Dasar pada waktu Jepang itu dalam teorinya sama di manapun sekolah itu diadakan. Tetapi sayangnya isi pelajaran waktu itu sangat rendah mutunya, walaupun kebanyakan dari guru adalah yang telah berpengalaman semenjak zaman Belanda dahulu. Rendahnya mutu sekolah disebabkan Jepang banyak campur tangan dengan memberikan latihan kemiliteran dan menyuruh bergotong royong sehingga tidak ada kesempatan bagi guru mengajar dengan baik. Kalau tidak bergotong royong atau latihan kemiliteran, anak-anak hanya diajar menyanyikan lagu-lagu Jepang yang sangat mengganggu jam pelajaran di sekolah. Murid-murid yang tidak datang kesekolahpun tidak mendapat teguran sama sekali dari majelis guru, karena mereka tidak berdaya sama sekali. Keseragaman sekolah yang baik itu tidak diisi Jepang dengan materi pelajaran yang cocok buat anak didik yang sedang berkembang itu. Keadaan seperti ini akan jauh pengaruhnya sesudah Indonesia merdeka, karena pada waktu itulah anak-anak yang mendapat pendidikan Jepang itu mengalami masa dewasanya dan ikut menyelenggarakan kehidupan bangsanya.

Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi di kantor dan di sekolah. Hal ini baik untuk perkembangan bahasa Indonesia di kemudian hari. Dengan berkembangnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, rasa persatuanpun dengan mudah dapat digalang dan dibina dengan baik di tengah masyarakat, karena sekarang mereka dengan mudah dan dimengerti orang lain untuk mengemukakan perasaan dan buah pikirannya. Dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, keuntungan bukan saja dalam pengembangan bahasa itu saja, tetapi dapatnya dibina kesatuan bangsa dengan cepat, suatu kondisi yang diperlukan dalam mencapai Indonesia merdeka.

Di samping pendidikan formal yang diberikan Jepang di sekolah kepada rakyat Sumatera Barat, juga diberikan pendidikan non-formal

yang merupakan pendidikan kemiliteran. Kepada pemuda diajarkan peraturan baris berbaris dan disiplin militer. Lembaga pendidikan khusus untuk pendidikan militer ini seperti Heiho dan Gyugun yang terdapat di Padang dan Bukittinggi.

Dalam Gyugun pemuda Sumatera Barat ditempa secara fisik dengan berat yang menyebabkan mereka menjadi orang yang berhati keras. Banyak di antara mereka yang dilatih dalam Gyugun kemudian menjadi pemimpin sampai sekarang. Pada awal kemerdekaan Indonesia mereka itulah yang membimbing rakyat Sumatera Barat ke arah perjuangan yang benar sehingga keamanan dapat dipertahankan di Sumatera Barat. Waktu Perang Kemerdekaan mereka jugalah yang membina dan mengatur perlawanan rakyat yang menguntungkan bagi rakyat Sumatera Barat.

4.1.2 Pendidikan Swasta

Sekolah swasta tidak berkembang selama Jepang menduduki Sumatera Barat, karena mereka mengawasi sekolah swasta itu dengan sangat ketat sekali. Sekolah swasta yang dapat dibuka apabila mendapat pengawasan langsung dari Jepang atau diselenggarakan oleh Jepang sendiri. Sekolah swasta yang dibuka sudah kehilangan kepribadian. *Kinrohosi, seikere* menghadap Tokyo, menyanyikan lagu-lagu Jepang, belajar bahasa Jepang terpaksa dilakukan.

Kebanyakan sekolah swasta yang dibuka hanya tingkatan Sekolah Dasar seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah. Landasan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang adalah mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dengan Jepang untuk mencapai kemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang selalu didengung-dengungkan melalui gerakan militer. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah mendapat tenaga cuma- cuma dan prajurit untuk membantu peperangan yang sedang dilakukan.

Berdasarkan landasan dan tujuan pendidikan itu Jepang melakukan dan menyelenggarakan latihan kemiliteran dan gotong royong serta kerja bakti.

4.2 Pendidikan Indonesia Merdeka

Di waktu Indonesia sudah merdeka sistem pendidikan yang berlaku di Sumatera Barat berubah sama sekali landasan dan tujuannya.

Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara atau landasan ideal bagi seluruh aktifitas rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Struktural bagi Negara Indonesia. Pendidikan harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, sebagai suatu Negara Kesatuan hal itu berlaku umum bagi seluruh daerah dan rakyat Indonesia.

Tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan tujuan negara yang baru merdeka dan sedang menghadapi perjuangan menghadapi Belanda ialah penanaman semangat patriotisme. Tujuan yang hendak dicapai supaya seluruh rakyat Indonesia bersatu padu menghadapi ancaman Belanda.

Landasan, dasar, tujuan, dan sasaran pendidikan itu juga berlaku untuk daerah Sumatera Barat seperti daerah Indonesia lainnya.

Lembaga pendidikan yang ada di Sumatera Barat waktu itu adalah Sekolah Dasar 6 tahun yang sudah ada semenjak zaman pendudukan Jepang. Lembaga pendidikan yang lebih tinggi baru sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang permulaannya ada di Bukittinggi sebagai kelanjutan dari *Chu Gakko* yang sudah ada pada zaman pendudukan Jepang.

Pembentukan SMP di daerah lain hampir sama kejadiannya, yang bermula pada tahun 1946. Pada tahun 1946 di setiap Kabupaten telah dibuka sebuah SMP. Sekolah Dasar itu langsung dijadikan sebuah SMP dengan mengganti atau mendirikan sebuah Sekolah Dasar baru sebagai gantinya. Dengan demikian SMP di Sumatera Barat tidak sama tahun didirikannya tergantung dari kesanggupan daerah masing-masing. Kebanyakan pendirian SMP itu tergantung dari inisiatif daerah tingkat II, karena bantuan pemerintah belum sepenuhnya dapat diharapkan sehubungan banyaknya tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dalam keadaan kekurangan. Sekolah swasta yang ada adalah sekolah Muhammadiyah dan Taman Siswa dan beberapa Sekolah Islam.

Di waktu Belanda telah menduduki Padang dalam Agresi pertama di Bukittinggi didirikan sebuah Sekolah Menengah Atas atas prakarsa beberapa orang dari kalangan pemerintahan. Pendirian SMA ini disebabkan karena tamatan SMP sudah mulai banyak, sedangkan penampungan mereka untuk melanjutkan sekolahnya masih belum ada.

Bukittinggi pada waktu itu merupakan pusat kedudukan Pemerintahan propinsi Sumatera Barat. Pada awal kemerdekaan Indonesia di Bukittinggi sudah didirikan dua buah SMA, yaitu SMA I dan SMA II. Di samping itu pada tahun 1946 didirikan pula Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Sekolah Guru A dan Guru B. PSM yang telah didirikan semenjak tahun 1918 juga mendirikan sebuah SMA Swasta. Selanjutnya di Bukittinggi didirikan pula Sekolah Bidan, Sekolah Perawat, dan Sekolah Assisten Apoteker.

Dengan dibukanya SMA itu, maka sekolah Islam juga ikut membuka sekolah setingkat dengan SMA. Sistem ujian pada waktu itu adalah sistem terpusat untuk ujian akhir SMP dan SMA, soal ujian datang dari Pusat dan sekolah swasta dapat menggabungkan diri dalam ujian tersebut melalui pendaftaran sekolahnya. Dengan demikian ujian akhir SMP dan SMA seragam untuk seluruh daerah Indonesia.

Pada Agresi kedua sekolah di Sumatera Barat banyak yang tutup karena terpaksa mengungsi ke daerah pedalaman. Waktu itu terdapat dua macam sekolah yaitu Sekolah Federal yang didirikan oleh Belanda yang menduduki kota-kota di Sumatera Barat dan Sekolah Republik yang didirikan oleh Pemerintah Republik di pedalaman. Walaupun keadaan sangat sukar waktu itu untuk menyelenggarakan sekolah di pedalaman, tetapi semua pelajaran dapat berjalan dengan lancar di sela-sela dentuman meriam Belanda. Sedangkan sekolah Federal pada umumnya dibuka karena terpaksa saja mengikuti sekolah tersebut karena tidak sempat mengungsi ke daerah pedalaman, hanya sebahagian kecil dari mereka yang betul-betul memihak Belanda.

Pada waktu itu alat sekolah seperti kertas, pensil dan buku-buku pelajaran kurang sekali. Murid SMP dan SMA biasanya mempergunakan satu atau dua buah buku tulis untuk semua mata pelajaran. Apabila

buku tersebut sudah penuh dengan catatan, maka buku itu direndam dalam air abu semalam untuk menghilangkan bekas tulisannya, lalu dikeringkan dan sesudah kering dipergunakan lagi untuk catatan pelajaran yang baru. Sebahagian besar murid datang ke sekolah tidak memakai sepatu atau memakai terompa kayu. Yang memakai sepatu ke sekolah pada waktu itu di Sumatera Barat menjadi bahan olok-olok teman-temannya. Sekolah pada waktu itu hanya didorong oleh semangat yang tinggi saja, karena alat tidak ada atau tidak cukup.

Pada waktu itu tenaga guru kurang terutama guru Sekolah Dasar, karena banyak guru yang meninggalkan pekerjaannya untuk menggabungkan diri dengan kesatuan Lasykar. Untuk mengisi kekurangan tenaga guru ini di Sumatera Barat dibuka Sekolah Guru B (SGB) dan Sekolah Guru A (SGA). Supaya murid mau masuk sekolah guru maka mereka diberikan tunjangan Ikatan Dinas yang harus dibayar dengan berdinis sebagai guru setelah tamat. Dengan demikian sekolah guru disenangi oleh murid-murid, untuk mendapat biaya dari pemerintah, karena sebahagian besar dari mereka merupakan anak yang tidak mampu.

Sesudah pengakuan kedaulatan pada tahun 1950, keadaan pendidikan di Sumatera Barat mulai diatur kembali, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas. Sedangkan Perguruan Tinggi pertama di Sumatera Barat adalah Perguruan Tinggi Hukum (PTH) Pancasila yang berstatus swasta di Padang yang didirikan oleh Yayasan Sriwijaya yang diketuai oleh M. Syafei. Perguruan Tinggi Pemerintah baru ada pada tahun 1954 setelah didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar. Pada tahun 1956 didirikan pula Universitas Andalas di Padang dan PTH Pancasila menggabungkan diri ke dalamnya, menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Sesudah itu sekolah didirikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesanggupan pemerintah pusat dan daerah. Sesudah Orde Baru, Sumatera Barat juga dapat membina sekolah dan perguruan tinggi secara terarah sampai saat ini.

Beberapa hal pokok yang perlu dijelaskan adalah : Pada tahun 1949 Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan, UUD

1945 diganti dengan Undang Undang Dasar Sementara, walaupun dasarnya tetap sama, tetapi tujuan pendidikan mengalami perubahan. Sesudah keluar Undang-Undang No. 4 tahun 1950, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia atau warganegara yang bersusila, cakap, demokratis, dan bertanggung jawab. Seluruh sistem persekolahan di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan tujuan tersebut. Mengenai jenjang persekolahan hampir sama dengan masa sebelumnya hanya saja sekarang lebih terarah lagi mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar 6 tahun dan diteruskan ke SLTP Umum 3 tahun atau SLTP Kejuruan 3 tahun dan diteruskan lagi ke SLTA Umum 3 tahun atau SLTA Kejuruan 3 tahun, selanjutnya ke Perguruan Tinggi atau Akademi. Sedangkan sekolah swasta harus menyesuaikan diri dengan pola penjenjangan pendidikan tersebut.

Kesempatan belajar diberikan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan rakyat dengan melihat perbedaan golongan sehingga menimbulkan persoalan baru lagi bagi pemerintah, yaitu ruang kelas yang ada tidak sanggup lagi menampung murid yang ingin masuk.

Berdasarkan penjenjangan pendidikan demikian maka di Sumatera Barat terdapat jenis sekolah : Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SMP, ST, SMEP, SKP, SGB, SMA, STM, SMEA, SGA, SGTK, SCKP, SGPD. Sekolah ini makin lama makin dikembangkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan perbaikan mutu lulusan. Semenjak itu masalah pendidikan di Sumatera Barat selalu diperbaiki terus sampai sekarang ini.

Perkembangan sekolah di Sumatera Barat sesudah 33 tahun Indonesia Merdeka.

1. Taman Kanak-Kanak

Jumlah Sekolah	318	buah
Jumlah murid	19.022	orang
Jumlah guru	726	orang

2. Sekolah Dasar

	SD Negeri	SD Subsidi	SD Swasta
Jumlah sekolah	2.579 buah	20 buah	108 buah
Jumlah murid	303.203 orang	7.920 orang	24.905 orang
Jumlah guru	15.153 orang	178 orang	491 orang

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

	SMP	SMEP	ST	SKKP
Sekolah Negeri	152	17	35	11
Murid Negeri	71.465	1.553	4.839	1.124
Guru Negeri	2.094	247	575	173
Sekolah Swasta	14	-	-	-
Sekolah Subsidi	62	4	2	2

4. Sekolah Lanjutan Atas

	SMA	SMEA	STM	SKKA	SPG	SPMASTMA
Murid Negeri	16.373	5.915	10.092	297	3.163	270 97
Sekolah Negeri	22	9	7	1	8	8 1
Guru Negeri	563	223	306	30	197	15 43
Sekolah Subsidi	4	-	2	-	1	- -
Sekolah Swasta	14	4	9	4	2	- -

	SAKMA	SMF	SAA	SPK	Penmasy	Swad.P. Mas
Guru	272	109	110	78	142	182
Sekolah	1	1	1	1	20	31
Murid	43	2	2	3	454	718

	Penggerak Keg. Bel. Penmasy.	PKK Penmasy.	Swadaya Penmasy.
Guru	229	496	2.332
Sekolah	25	47	338
Murid	597	1.381	10.793

5. Sekolah Agama

a. Negeri			
MIN	MTsN	MAN	
Guru	91	444	124

Sekolah	7	52	19
Murid	1.022	10.469	2.810

b. Swasta

	Raudatul	MIS	Diniyah	MTsN	MAN	Pnd. Pesantren
Guru	2	304	89	303	95	1.481
Sekolah	3	221	66	209	98	64
Murid	84	22.629	4.424	14.752	6.993	17.299

6. Perguruan Tinggi Negeri

	UNAND	IKIP PD.	IAIN	ASKI	APDN
Dosen Tetap		490	236	75	7
Dosen Tidak Tetap	385	206	122	20	15
Assisten Dosen	35	137	53	7	8
Mahasiswa	3.917	3.163	3.713	107	131

7. Perguruan Tinggi Swasta

	ITSB	SOSPOL I. Bonjol	ABA	ATI	Muham- madiyah
Dosen Tetap	36	4	14	-	21
Dosen Tidak Tetap	13	23	3	43	-
Assisten Dosen	3	1	4	-	-
Mahasiswa	189	419	262	461	622*)

Dari gambaran di atas dapat dilihat bagaimana kemajuan perkembangan pendidikan di Sumatera Barat. Masing-masing sekolah mengalami perkembangan sendiri.

Dengan uraian tersebut diakhirilah laporan singkat tentang sejarah pendidikan Sumatera Barat yang masih perlu dilengkapi lagi uraiannya.

*) Bahan diambil dari : Sumatera Barat Dalam Angka 1978, Kerjasama BAPPEDA - Kantor Sensus dan Statistik Sumatera Barat.

Daftar Sumber

Buku bacaan

Abdullah, Taufik, *School and Politics, the Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927 - 1933)*, Monograph Series University, Ithaca, New York, 1971.

..... *Aliran-Aliran Baru dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Percetakan Dagang Usaha, Payakumbuh, 1958.

Alumni INS Jakarta, *Sumbangan Fikiran bagi Pola Pendidikan dan Pengajaran Nasional*, Jakarta, 1968.

Basa, A. Mukhsis Dt. Bandaro, *Perkembangan Pendidikan di Sumatera Barat*, Ketikan.

BP3K, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, Buku I, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

BP3K, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, Buku II, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

BP3K, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979.

Djaka dan Amri Djaka, S.H., *Rangkuman Ilmu Pendidikan 9, Sejarah Pendidikan (II)*, Cetakan Ketiga, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1965.

Djumhur I. dan Drs. H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Cetakan ke-7, Penerbit C.V. Ilmu, Bandung, 1976.

Gazalba, Sidi, *Mesdjid*, C.V. Antara, Jakarta, MCMIXII.

Hamid, A., *Pidato Ulang Tahun Ruang Pendidikan INS ke-43 tahun 1969*.

Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat*, Cetakan Ketiga, Jayamurni, Jakarta, 1967.

Hamka, Prof. Dr., *Muhammadiyah di Minangkabau*, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1974.

....., *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*, Tinta Mas Jakarta, 1965.

Ibrahim, Thalib, *Pendidikan Mohd. Syafei : INS Kayutanam*, Saduran, Penerbit Mahabudi, Jakarta, 1978.

INS Kayutanam, *Bapak Pendidikan M. Syafei dengan Sekolah INS Kayutanam*, Brosur, Agustus 1970.

Jaya, Umar, *Pustaka Indonesia*, G. Kolff & Co, Bandung, 1951.

Kayo. H.M.D. Datuk Palimo, *Pidato Peringatan Ulang Tahun Ke 55 Thawalib Padang Panjang tanggal 11-9-1966*, (Ketikan).

....., *Riwayat Ringkas Daud Rasyidi (1880-1946)*, ketikan khusus setebal 11 halaman.

Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, *Laporan Tahunan 1976*, Jilid II, Padang, 1977.

Kartodirjo, Sartono, Dr., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

....., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Tengah*.

Kongres Pemuda Pelajar Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 3 - 6 Nopember 1946 di Padang Panjang.

Kontjaraningrat, Prof. Dr., *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, P.T. Gramedia Jakarta, 1974.

....., (Redaksi) *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 1971.

Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, *Pendidikan dan Pembangunan*, 50 Tahun Taman Siswa, Juli, 1976.

Mansoer, Drs. M.D., et. al., *Sejarah Minangkabau*, Bratara, Jakarta, 1970.

Maria, Ulfah Santoso S.H., Ny. dan Dr. Ny. Ihromi S.H., M.A., Ed., *Peranan Wanita dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1978.

Nasrun, Prof. Mr. M., *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1971.

Noer, Deliar, *Pembaharuan Setelah Tahun 1900*, Seminar Masuknya Islam di Minangkabau, Paper, Padang, 1969.

....., *The Modernist Muslim Movement, Muslim Indonesia 1900 - 1942*, Oxford University Press, London, 1970.

Penghulu, I.H. DT. R., *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Sekretariat LKAAM Sumatera Barat, Padang, 1968.

Pengurus Besar PGAI Padang, *Anggaran Dasar PGAI 1921*, Padang, 1921.

Poebakawatja, Soegarada, Pof., *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXX, 1970.

Rasyid, Mr. S.M., *Sejarah Perjuangan Kemedekaan Indonesia di Minangkabau 1945-1950*, Jilid Pertama, Penerbit Bidang Pemurnian Sejarah Indonesia - Minangkabau (BPSIM), Jakarta, 1978.

Sumatera Barat Dalam Angka (West Sumatera in Figures) 1978, Kerjasama BAPPEDA dan Kantor Sensus dan Statistik Sumatera Barat Padang, 1979.

Soepomo, Prof. Dr., *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid I, Percetakan Jembatan, Jakarta, 1954.

Syafei, Mohd., *Arah Aktif*, J.B. Wolters, Jakarta.

....., *Sejarah Ringkas INS tentang terbentuknya Dasar-Dasar pada Perguruan Ruang Pendidikan INS Kayutanam Sumatera Barat*, Padang, 1968.

Syamsul Bahar, *Ringkasan Riwayat Hidup M. Syafei yang sangat Ringkas*, INS Kayutanam.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1960.

Skipsi/Tesis

Azmi, *Sejarah Pembaharuan dan Pemurnian Islam di Sumatera Barat sebelum Tahun 1942*, Skripsi, Jurusan Sejarah FKPS-IKIP Padang 1967.

Bustamam, *Peranan Organisasi Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) sebelum dan Sesudah Kemerdekaan R.I. di Sumatera Barat* Tesis, Jurusan Sejarah FKPS-IKIP Padang, 1977.

Manan, Abd., *Peranan Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Sumatera Barat*, Tesis, Jurusan Sejarah FKPS-IKIP Padang, 1980.

Syafruddin, *Sumbangan Perti pada Pendidikan Agama Islam di Sumatera Barat*, Suatu Tinjauan Sejarah tentang Peranan Perti dalam Pendidikan, Tesis, Jurusan Sejarah FKPS-IKIP Padang, 1978.

Syaiful Islamy, *Perjuangan Persatuan Muslim Indonesia (Permi) di Sumatera Barat*, Tesis, Jurusan Sejarah FKPS-IKIP Padang, 1970.

Welly, Farida, *Sistem Pendidikan INS dan Peranannya pada Hari Depan Pendidikan Sumatera Barat*, Skripsi, Jurusan Sejarah FKPS-IKIP Padang, 1973.

Yanuar A.D., *Sejarah Pergerakan Islam di Sumatera Barat (1918-1942)*, Tesis, Jurusan Sejarah FKPS-IKIP Padang, 1971.

Harian/Majalah/Buletin.

Buletin Suara Keluarga INS, No. 4 Tahun I, Jakarta, Juli 1967.

Emzita, *Perguruan Tinggi College Payakumbuh dan Pembentukan Bangsa*, Harian Pelita, Jakarta, 13-15 Agustus 1977.

Majalah Madrasah Rakyat, No. I. Tahun I, Badan Penerbit Madrasah Rakyat, Jakarta, I Juli 1957.

Majalah Madrasah Rakyat, No. I, Tahun I, Badan Penerbit Madrasah Rakyat, Jakarta, 1957.

Mukti, Abdul, S.H., *Panji Masyarakat*, No. 41, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1966.

Riwayat Ringkas Sekolah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Bagian Putri Bengkawas Bukittinggi, Penerbit Madrasah Rakyat, Jakarta, 1 Juli 1957.

Majalah Sendi, Sridharma, Padang, 1952.

Syafei, Mohd., *Sejarah INS Kayutanam*, Harian Angkatan Bersenjata, Edisi Padang, 2 Nopember 1966, hal. I.

Lampiran

S T A T U S
PERSATOEAN GOEROE-GOEROE AGAMA ISLAM
BERDIRI DI PADANG 1921 *)

Fatsal 1
Nama, Tempat dan lamanja

- a. Perkoempoelan ini bernama (Persatoean Goeroe-goeroe Agama Islam), berdiri di Padang, dan meadakan tjabang-tjabang di Hindia Nederland dimana jang dirasa perloe.
- b. Perkoempoelan ini berdiri lamanya 29 tahoen, moelai terhitung dapat rechtperseon.

Fatsal 2
Maksoednja

Maksoed perkoempoelan ini :

- a. Akan menjaga hak dan kehormatannya goeroe-goeroe agama Islam menoeroet keharoesan agama itu;
- b. Akan memperbaiki hal dan nasibnja goeroe-goeroe Agama Islam menoeroet djangji-djangji jang telah ditetapkan pemerintah tentang memelihara kesoetjian agama Islam dan kemerdekaan goeroe-goeroe jang mengembangkan agama itoe.
- c. Akan memadjoekan dan memperbaiki keadaan pengadjaran agama Islam.
- d. Akan berdajaoepaja memberi pertolongan atas kesengsaraan hidoepnja goeroe-goeroe agama Islam jang mana dirasa perloe oleh perkoempoelan.
- e. Akan mengoesahkan dan menoendjang pendirian sekolah-sekolah tempat mempeladjari agama Islam.

*) Pengurus Besar PGAI Sumatera Barat, Padang.

- f. Akan berikhtiar mencari kesempatan atas menyampaikan atau menjempeornakan keperluan agama Islam.

Maksoed-maksoed jang terseboet, akan dijadikan semata-mata dengan mengingat serta menoeroet oendang-oendang pemerintah negeri dan keselamatan umum.

Fatsal 3 **Leden Perkumpulan ini**

Yang menjadi lid perkumpulan ini :

Hanya guru-guru agama Islam bangsa bumi putera penduduk tanah Hindia Nederland, asal berumur sekurang-kurangnya 10 tahun dibenarkan oleh perkumpulan, yang bahasa mereka itu telah boleh menjadi guru mengajarkan kitab-kitab agama Islam ataupun mengajarkan Quran.

Lid perkumpulan ini terdiri dari :

- a. Lid dimuliakan;
- b. Lid yang dimuliakan;
- c. Lid dermawan.

Akan menjadi lid yang dimuliakan dan lid dermawan, boleh juga diterima penduduk bangsa Islam di tanah Hindia Nederland yang bukannya bangsa bumi putera.

Fatsal 4 **Menjadi lid dan keberhentiannya**

Barang siapa berkehendak menjadi lid perkumpulan ini, hendaknya menyampaikan maksudnya itu dengan surat kepada Hoofdbestuur atau kepada bestuur Cabang, jika pada tempat itu ada berdiri Cabang. Jika permintaannya ditolak, maka Hoofdbestuur atau Bestuur Cabang tidak perlu menjelaskan sebab-sebabnya.

Lid yang dimuliakan hendaklah Algoeme Vergadering yang mensahkan, tetapi lid dermawan boleh ditetapkan oleh Hoofdbestuur atau Bestuur cabang.

Tiap-tiap lid hilang haknya menjadi lid sebab :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaannya sendiri
- c. Diperhentikan karena tidak setia kepada perkumpulan atau karena tidak menurut kehendak statuten perkumpulan ini.

Hal ini dijalankan oleh Hoofdbestuur.

Fatsal 5 **Cabang-cabang Perkumpulan**

Perkumpulan ini boleh mendirikan cabang-cabang di mana-mana tempat yang dirasa perlu oleh Hoofdbestuur.

Lid-lid yang bertempat pada kedudukan sesuatu cabang atau yang lebih dekat kepada salah satu cabang, hendaklah menjadi lid pada cabang itu.

Cabang-cabang itu akan berusaha menyampaikan maksud-maksud perkumpulan sahaja.

Fatsal 6 **Kedatangan uang**

Adapun kedatangan uang perkumpulan ini :

- a. Uang Entree
- b. Uang Contributie
- c. Uang derma dan uang wasiat
- d. Dan lain-lain yang didapat dengan jalan halal, sedang yang membayar entree dan Contributie leden dari biasa.

Uang entree wajib menjadi uang kas Hoofdbestuur begitu juga 25% dari uang contributie leden dari tiap-tiap Cabang, adapun uang wasiat dan uang derma, diturut kehendak orang yang berwasiat dan orang yang berderma, sedang pendapatan yang lain-lain akan terserah kepada putusan Hoofdbestuur.

Fatsal 7 **Hoofdbestuur**

PGAI ini di kepalai oleh Hoofdbestuur sekurang-kurangnya 9 dan sebanyak-banyaknya 15 orang terdiri atas : President, Vice President, Secretaris, Adj. Secretaris, Thesaurier, 4 Advisiur dan 6 Commissarist. Adviseur dan Commisaris boleh dikurangkan dari banyaknya yang tersebut. Leden Hoofdbestuur selamanya harus ganjil, President, Secretaris dan Thesaurie wajiblah berkedudukan pada satu tempat (negeri).

Fatsal 8 **Bestuur Cabang**

Pada tiap-tiap cabang perkumpulan ini dikepalai oleh bestuur terdiri dari atas : President, Vice President, Secretaris, Thesaurie dan tiga Commissaris.

Fatsal 9 **Angkatan Hoofdbestuur dan Bestur Cabang**

Dalam bulan Maret tiap-tiap tiga tahun mulai dari tahun perkumpulan ini, di kantor Hoofdbestuur diadakan sebuah Bus yang dilak, kedalam Bus itu dimasukkan oleh lid-lid surat undian yang ditulis nama yang akan menjadi lid Hoofdbestuur itu.

Selambat-lambatnya pada 10 April tahun itu Bus itu dibuka di muka rapat percampuran yang dihadiri oleh Hoofdbestuur dan beberapa saja dari Bestuur Cabang, tetapi jika lid itu menjadi lid pada sesuatu cabang, maka surat undian itu hendaklah dimasukkan ke dalam Bus yang disediakan pada tiap-tiap kantor Bestuur Cabang, dan pada tiap-tiap 1 April pada tahun memilih itu.

Orang yang terpilih yang sebanyak-banyaknya dapat suara, dijadikan lid hoofdbestuur, mereka itulah yang menentukan jabatan-jabatan masing-masing dan mereka itu menjalankan jabatan itu pada 1 Mei dan dimulai dari 11 April sampai penghabisan April, mereka itu harus belajar menjalankan pekerjaannya kepada Hoofdbestuur yang lama.

Bestuur cabang hendaklah Hoofdbestuur yang menetapkan menurut undian yang terbanyak pada cabang itu, keterangan ini hendaklah dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sesudah Hoofdbestuur menjalankan jabatannya. Tetapi jika ada di antara leden Hoofdbestuur atau Bestuur Cabang yang berhenti sebelum sampai gelerannya, maka hoofdbestuur atau Bestuur Cabang yang tinggal, berhak mengadakan gantinya buat pencukupi yang berhenti itu.

Fatsal 10

Keberhasilan Hoofdbestuur dan Bestuur Cabang

Pada tiap-tiap 30 April tahun yang ketiga dari tahun perkumpulan, sekalian leden Hoofdbestuur berhenti dari jabatannya dan hendaklah leden Hoofdbestuur itu menyerahkan pekerjaan perkumpulan kepada leden Hoofdbestuur yang baharu yang terpilih menurut aturan fatsal 9, sedangkan keberhasilan Bestuur Cabang, ialah pada tiap-tiap 31 Mei dari tahun yang ketiga dari tahun perkumpulan.

Lid Hoofdbestuur atau Bestuur Cabang yang telah sampai gelerannya boleh juga dipilih kembali menjabat pekerjaan menjadi Bestuur.

Fatsal 11

Rapat (Vergadering)

Sekurang-kurangnya hendaklah sekali setahun Hoofdbestuur mengadakan Algemeene Vergadering yang bernama Alg. Vergadering tahunan yang mana pada waktu itu wajiblah Hoofdbestuur menunjukan peretongan-peretongan uang dan verslag tentang pekerjaan perkumpulan sepanjang tahun yang lalu, dan Bestuur Cabang diwajibkan tiap-tiap 6 bulan mengadakan Alg. Vergadering.

Fatsal 12

Algemeene Vergadering

Alg. Vergadering baharu disahkan kalau dihadiri oleh sekurang-kurangnya $1/2$ dari utusan cabang-cabang PGAI, serta seboleh-

bolehnya dihadiri juga oleh seantero leden, tetapi ALG Fergadering tiap-tiap Cabang, baharu disahkan apabila dihadiri oleh 1/2 dari banyak leden Cabang itu serta seboleh-bolehnya dihadiri oleh salah seorang lid Hoofdbestuur.

Kepada Bestuur Cabang diwajibkan juga mengunjukan segala sesuatu rupa peretongan yang terjadi pada cabangnya, sekurang-kurangnya sekali setahun, yaitu pada tiap-tiap tahun perkumpulan yang diadakan oleh Bestuur.

Fatsal 13 **Rapat Hoofdbestuur dan Bestuur Cabang**

Hoofdbestuur dapat mengadakan rapat seberapa perlunya. Rapat Hoofdbestuur disahkan kalau dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari leden Hoofdbestuur, begitu juga Bestuur Cabang boleh mengirim salinan notulennya kepada kantor Hoofdbestuur.

Fatsal 14 **Huishoudelij Reglement**

Barang siapa yang perlu bagi melakukan kemajuan statuten ini, akan diatur di dalam houdelij reglement sedang hoisahoudijk reglement itu ditetapkan oleh Hoofdbestuur.

Barang apa perkara yang tidak dapat keputusannya dalam statuten atau dalam huishoudelij reglement, boleh diputuskan oleh Hoofdbestuur menurut suara terbanyak.

Fatsal 15 **Yang menanggung**

Hoofdbestuur, menjadi wakil yang menanggung keselamatan perkumpulan baik di dalam atau di luar pengadilan, pekerjaannya dijalankan oleh President dan Secretaris.

Fatsal 16 **P e r u b a h a n**

Perubahan statuten dan melanjutkan perkumpulan ini, melalui melainkan boleh ditetapkan oleh alg. vergadering tahunan atau oleh salah satu alg. vergadering lain yang diadakan oleh Hoofdbestuur untuk keperluan ini, perubahan statuten dan melanjutkan perkumpulan itu, ditetapkan menurut sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir, tetapi buat mematikan perkumpulan kalau alg. vergadering itu tidak dihadiri oleh sebanyak yang diwajibkan pada fatsal 12, maka kemudian 15 hari dari itu, hoofdbestuur boleh mengadakan rapat yang kedua, rapat kedua ini disahkan dengan seberapa lid-lid yang hadir.

Kalau perkumpulan ini dimatikan maka ketinggalan hak milik perkumpulan sesudah menjalankan hutang-hutangnya hendaklah diserahkan kepada salah satu manfaat umum yang ditetapkan oleh alg. vergadering atau rapat yang kedua.

Fatsal 17 **Mengambil Penolong**

Atas menjalankan maksud hal yang penting dan berat, Hoofdbestuur boleh mengangkat orang yang ahli dalam suatu keperluan itu atas tanggungan PGAI.

Fatsal 18

President dan Secretaris diberi kuasa memasukan reguist kepada seri penduka yang dipertuan Besar CC dari Hindia Nederland dan akan meubai mana-mana yang dikehendaki pemerintah sehingga sampai mendapat hak Rechtpersoon.

Fatsal 19 **Bestuur yang Pertama**

Bestuur yang pertama mula didirikan PGAI ini :

Haji Abdullah Ahmad
Syech Mohd. Djamil

Guru agama di Sekolah MULO, Presiden
Guru agama GDK, Vice President.

Djambek

Abdul Madjid Karim
Zainuddin Labai

Guru agama Padang, Secretaris
Guru agama Padang Panjang, adj.
Secretaris.

Hadji Ahmad Joenoes
Haji Abdul Karim
Amarullah

Guru Padang Thesaurier.
Guru agama Padang Panjang, Adviseur.

Hadji Sutan Ibrahim

Guru agama FDK, Adviseur.

Parabek

Tuanku Imran Limbukan

Guru agama Payakumbuh, Adviseur.

Syekh Kadir Mohammad

Guru agama Air Bangis, Adviseur.

Hadji Ahmad

Guru agama KT (FKD), Commissaris.

Haji Abdul Rasjid

Guru agama di Maninjau, Commissaris.

Syikh Mohammad Zen

Guru agama LB (Fv/d C), Commissaris.

Imam

Hadji Moh. Noer Kadli

Guru agama Sumpur, Commissaris.

Pakih Machudum

Guru agama Solok, Commissaris.

Hadji Sutan Darab

Guru agama Pariaman, Commissaris.

ANGGARAN DASAR BARU PGAI YANG DISAHKAN*) OLEH RAPAT UMUM PADA TANGGAL 21-7-1959

Nama dan Tempat Kedudukan Fasal 1

Perkumpulan ini bernama Persatuan Guru-Guru Agama Islam atau disingkatkan PGAI dan berkedudukan di Padang.

Masa Berdiri Fasal 2

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 7 Juli 1920 (.....) tahun seribu sembilan ratus dua puluh dan masa berdirinya diperpanjang sampai 29 (dua puluh sembilan) tahun sesudah disetujuinya anggaran dasar ini oleh pemerintah.

T u j u a n Fasal 3

Tujuan dari perkumpulan ini adalah :

- a. Menjaga hak dan kehormatan guru-guru agama Islam di Indonesia terutama dari mereka yang menjadi anggota-anggota perkumpulan ini dan membantu mereka memperjuangkan perbaikan penghargaan, keadaan dan nasib sebagai guru-guru agama Islam pada pemerintah maupun partikular, satu dan lain menurut keharusan dalam agama Islam.
- b. Memperbaiki serta memajukan keadaan dan kesempatan mengajar-kan serta memperkembangkan agama Islam.
- c. Memperbaiki/mengusahakan dan membantu pembangunan sekolah-sekolah dan lain-lain tempat mempelajari agama Islam.
- d. Menjalankan usaha-usaha lain guna kejayaan agama Islam, semua ini dengan tidak melanggar undang-undang negeri dan tidak merusak ketertiban umum dan tata sosial rakyat Indonesia.

*) Pengurus Besar PGAI Sumatera Barat, Padang.

Keanggotaan

Fasal 4

Sebagai anggota perkumpulan hanya dapat diterima warganegara Indonesia yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun (delapan belas tahun) bertempat tinggal di Sumatera Tengah dan menurut pendapat pengurus tergolong guru agama atau mempunyai cukup pengetahuan untuk mengajarkan Quran ataupun kitab-kitab agama Islam lainnya.

Fasal 5

Permintaan untuk diterima jadi anggota harus dimajukan dengan surat kepada pengurus pusat atau kepada pengurus cabang dalam resor mana calon anggota bersangkutan mempunyai tempat tinggal. Pengurus pusat atau pengurus cabang yang menerima surat permintaan menyampaikan kepada yang bersangkutan dalam tempo sesingkat mungkin putusannya tentang pengabulan atau penolakan permintaan untuk diterima jadi anggota itu, yaitu dengan surat yang tidak perlu memuat alasan-alasan.

Fasal 6

Selain dari anggota-anggota, biasanya yang dinamakan secara singkat "anggota" dapat perkumpulan menerima seseorang sebagai anggota luar biasa, anggota dermawan atau anggota kehormatan. Anggota-anggota luar biasa adalah mereka yang tinggal di luar daerah Sumatera Tengah akan tetapi memenuhi syarat-syarat seperti yang berlaku bagi anggota-anggota biasa menurut pasal 4, kecuali tentang tempat tinggal. Anggota-anggota dermawan adalah anggota yang secara tetap memberi perkumpulan sokongan uang yang besarnya ditetapkan dalam peraturan rumah tangga. Anggota-anggota kehormatan adalah mereka yang telah banyak berbuat jasa terhadap perkumpulan atau untuk masyarakat Islam di Indonesia. Segala peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota biasa berlaku juga bagi anggota luar biasa, kecuali dalam hal anggaran dasar ini ada menetapkan ketentuan lain.

Pemerintah atau pengangkatan seseorang jadi anggorta luar biasa, anggota kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Fasal 7

Seorang berhenti jadi anggota, anggota luar biasa, anggota dermawan, atau anggota kehormatan jika dan pada waktu :

- a. Ia meninggal dunia
- b. Ia berhenti/diberhentikan atas putusan Pengurus Pusat.
- c. Surat pernyataannya berhenti diterima oleh Pengurus Pusat.

Seorang anggota biasa, anggota luar biasa juga dianggap keluar dari perkumpulan jika ia tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan menurut anggaran dasar ini.

Seseorang anggota, anggota luar biasa dan anggota dermawan dapat diperhentikan dari keanggotaannya itu oleh pengurus Pusat karena tidak memenuhi kewajiban keuangannya terhadap perkumpulan sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau karena menurut tindakan-tindakannya mencemarkan nama baik dari perkumpulan.

Cabang-Cabang **Fasal 8**

Perkumpulan ini dapat mendirikan cabangnya di mana-mana dirasa perlu oleh Pengurus Pusat. Tugas cabang-cabang adalah menjalankan usaha-usaha perkumpulan di dalam resor masing-masing di bawah pimpinan pengurus cabang dan dengan mematuhi perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari pengurus Pusat.

Anggota-anggota yang bertempat tinggal di dalam resor sesuatu cabang sendirinya tergabung dalam organisasi cabang dan tunduk kepada pengurus cabang yang bersangkutan, sedangkan anggota-anggota lainnya semua anggota luar biasa anggota dermawan dan anggota kehormatan tunduk langsung pada pengurus pusat.

Keuangan dan Perbendaharaan **Fasal 9**

Anggota-anggota biasa dan anggota luar biasa diwajibkan membayar uang masuk dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah ia diterima jadi anggota dan uang iuran sebanyak dan pada waktu-waktu yang

ditetapkan dalam peraturan rumah tangga. Selain iuran uang masuk dimaksudkan di atas dan uang bantuan dari anggota-anggota dermawan dapat perkumpulan menerima sokongan-sokongan, derma-derma dan lain-lain pemberian yang halal dari pihak manapun dan selanjutnya dapat perkumpulan mengusahakan keuangan dan mengumpulkan harta segala untuk dipergunakan buat mencapai tujuan-tujuannya perkumpulan, yaitu dengan segala macam jalan dengan tidak melanggar undang-undang negeri dan hukum Islam, ketertiban umum dan tata susila. Seluruh uang-uang masuk dan 25% (dua puluh lima persen) dari uang iuran yang diterima oleh cabang harus diserahkan kepada pengurus pusat.

Pengurus

Fasal 10

Perkumpulan dipimpin oleh satu dewan pengurus atau pengurus pusat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang anggota pengurus, di antaranya seorang ketua, seorang setia usaha, seorang bendahara, dan di mana perlu seorang atau beberapa orang wakil untuk masing-masing jabatan-jabatan tersebut dan selanjutnya seorang atau beberapa orang komisaris atau penasihat. Anggota-anggota pengurus semuanya diangkat dari di antara anggota-anggota oleh rapat umum anggota untuk waktu yang tidak ditetapkan lamanya.

Rapat umum anggota sewaktu-waktu berhak memperhentikan seseorang anggota pengurus dan sedapat mungkin susunan pengurus pusat diperbaharui atau ditetapkan kembali dalam rapat anggota tahunan. Seorang anggota pengurus meletakkan jabatan atau dianggap meletakkan jabatan jika ia meninggal dunia, berhenti jadi anggota perkumpulan, diperhentikan atau dipecat oleh rapat umum anggota ataupun oleh pengurus pusat. Lowongan-lowongan yang terbuka dalam pengurus pusat diisi oleh seseorang yang ditunjuk oleh pengurus pusat sendiri yang memegang jabatan sampai dilakukannya pengangkatan untuk lowongan tadi oleh rapat umum anggota. Bila perkumpulan sama sekali tidak mempunyai pengurus, sedang kepentingan perkumpulan menghendaki segera diadakannya pengurus itu, maka

hakim berhak melakukan pengangkatan anggota-anggota pengurus yang memegang jabatan sampai dilakukannya pengangkatan oleh rapat umum anggota.

Fasal 11

Pengurus pusat diwajibkan memelihara harta benda perkumpulan dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perkumpulan dengan mengindahkan peraturan-peraturan anggaran dasar perkumpulan dan putusan-putusan dari rapat anggota.

Pengurus pusat mewakili perkumpulan baik di luar maupun di dalam pengadilan/hukum dan berhak buat melakukan tindakan-tindakan memiliki untuk serta atas nama perkumpulan, tidak ada kecualinya, asal saja tanpa melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini. Hanya putusan rapat dari pengurus pusat dapat dengan sah.

- a. Dipinjam uang jika jumlahnya sekaligus lebih dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Dibeli/dijual atau dengan jalan-jalan lain diperoleh/dipindahkan hak pilih atas harta tetap ataupun diberati harta tersebut dengan ikatan hypoteek atau dengan ikatan-ikatan lainnya dan
- c. Diikat perkumpulan sebagai barang untuk menjamin pinjaman pihak ketiga.

Pengurus Harian

Fasal 12

Pengurus pusat senantiasa dan dalam segala hal dan terutama untuk pekerjaan sehari-hari dapat diwakili oleh pengurus harian yang terdiri dari ketua, setia usaha dan bendahara, sedangkan pengurus harian sendiri dalam hal mendesak hal mana tidak perlu dibuktikan kepada orang luar maka jabatannya sendirinya dijalankan oleh anggota pengurus yang telah diangkat jadi wakilnya atau ditunjuk untuk itu menurut pembagian tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh pengurus pusat.

Putusan-putusan Pengurus

Fasal 13

Putusan-putusan pengurus pusat dan pengurus cabang diambil dengan suara terbanyak dari antara anggota-anggota pengurus yang duduk dalam badan pengurus yang bersangkutan jika dipungut dengan cara refrendum dan dari anggota pengurus yang hadir dalam rapat itu jika dipungut dalam rapat badan pengurus yang bersangkutan, semua itu kecuali jika anggaran dasar ini ada menetapkan ketentuan lain. Masing-masing anggota yang tidak duduk dalam salah satu badan pengurus itu berhak mengeluarkan satu suara dalam menetapkan putusan badan pengurus bersangkutan. Jika tentang sesuatu hal suara sama banyak, maka putusan ditetapkan dengan undian jika hal tadi mengenai diri seseorang, badan dan dianggap ditolak jika hal itu mengenai soal-soal lain. Rapat gabungan dari anggota-anggota pengurus pusat dan anggota-anggota pengurus cabang dapat diadakan bila dianggap perlu oleh pengurus pusat, dalam rapat mana dapat dikeluarkan untuk seseorang pengurus pusat satu suara untuk masing-masing cabang satu suara. Rapat pengurus pusat dan pengurus cabang diadakan bila dianggap perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya dua orang anggota badan pengurus bersangkutan, akan tetapi sedapat mungkin sekurang-kurangnya sekali dalam masa 6 bulan. Cara memanggil rapat-rapat tersebut dalam pasal ini pimpinannya dan lain-lain hal berkenaan dengan rapat-rapat itu ditetapkan dalam peraturan rumah tangga.

Penutupan buku dan rapat umum anggota tahunan

Fasal 14

Tahun buku perkumpulan adalah menurut tahun taqwin. Pada akhir tiap-tiap tahun ditutup buku-buku perkumpulan. Tiap tahun dalam masanya yang ditetapkan dalam peraturan rumah tangga diselenggarakan oleh pengurus pusat rapat umum anggota tahunan, dalam rapat mana pengurus pusat memberikan laporan tentang keadaan keuangan dan tentang usaha-usaha yang telah dijalankan untuk perkumpulan serta tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pengurus pusat selama tahun yang baru lalu. Rapat umum anggota berhak mengangkat satu komisi terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang

anggota biasa yang ditugaskan memeriksa buku-buku, rekening-rekening dan surat-surat perkumpulan dengan memberi laporan tentang hasil pemeriksaan itu kepada rapat umum anggota. Jika dan sesudah, bagi rapat umum ternyata, bahwa buku-buku ini ada beres dan pengurus pusat ada melakukan kewajibannya dengan baik, maka diberikan oleh rapat umum anggota bagi pengurus pusat tanda pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan perkiraan kembali tentang segala tindakan dan pimpinannya selama tahun yang bersangkutan.

Rapat umum anggota **Fasal 15**

Selain dari rapat umum anggota tahunan dapat diadakan rapat umum anggota tiap kali dianggap perlu oleh pengurus atau di mana sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah anggota yang tidak tergabung dalam suatu cabang, anggota-anggota pengurus pusat dan anggota Pengurus Cabang. Tiap rapat umum anggota baru dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota-anggota dan utusan-utusan cabang yang berhak menghadiri rapat. Jika dalam suatu rapat umum anggota tidak cukup hadir sejumlah anggota-anggota dan utusan-utusan cabang sebagaimana dimaksudkan di atas maka dapat diadakan rapat umum anggota buat kedua kalinya untuk membicarakan hal-hal yang menjadi acara rapat yang pertama, jika secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah rapat yang pertama itu. Rapat yang kedua itu dapat menetapkan putusan-putusan sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota dan utusan cabang yang hadir. Kecuali dalam hal anggaran dasar ada menetapkan ketentuan lain, maka tiap putusan rapat umum anggota ditetapkan dengan suara terbanyak mutlak.

Masing-masing anggota dan utusan cabang dimaksud dalam ayat kedua dari pasal ini yang menghadiri rapat umum anggota berhak mengeluarkan menurut utusan tadi satu suara dan sebanyak jumlah anggota yang tergabung dalam beban bersangkutan, masing-masing anggota yang duduk dalam pengurus pusat selain itu satu suara, sedangkan anggota-anggota luar biasa, anggota-anggota dermawan

dan anggota kehormatan sebagaimana anggota-anggota pengurus cabang hanya berhak mengemukakan pendapat-pendapat dan nasehat-nasehat dalam rapat umum anggota.

Cara memanggil rapat umum anggota menurut suara dalam rapat itu pimpinan dan lain-lain hal berkenan dengan rapat tersebut diatur dalam peraturan Rumah Tangga.

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Fasal 16

Perubahan anggaran dasar dan pembubaran perkumpulan sebelum waktunya yang telah ditetapkan hanya dapat diputuskan dalam rapat umum anggota yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dalam rapat mana harus hadir/diwakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota-anggota biasa, baik yang tergabung dalam cabang maupun tidak ada putusan rapat baru diambil jika disetujui oleh setidaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang ada dalam rapat.

Manakala dalam rapat dimaksud tidak cukup ada sejumlah anggota seperti dimaksudkan di atas, maka rapat ditunda dan selekas-lekasnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah itu diadakan lagi rapat itu dengan melakukan panggilannya terlebih dahulu.

Rapat yang kedua kali diadakan itu berhak mengambil keputusan jika disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) suara yang ada tanpa mengindahkan berapa jumlah anggota biasa yang diwakili dalam rapat itu.

Dalam hal pembubaran perkumpulan maka rapat yang menentukan, mengangkat sekali satu komisi yang ditugaskan melakukan likwidasi dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana harus diperbuat dengan saldo lebih dari kekayaan perkumpulan jika ada sedangkan pembubaran itu baru boleh mulai dilakukan setelah satu bulan lebih dahulu dilakukan pengumuman dalam satu surat kabar, harian yang terbit di Sumatera Tengah.

Peraturan Rumah Tangga
Fasal 17

Hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini dapat ditetapkan oleh rapat umum anggota dalam suatu peraturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini dan undang-undang negeri.

Aturan-aturan Penutup
Fasal 18

Perselisihan paham tentang tafsiran dari peraturan-peraturan dari anggaran dasar dan dari peraturan Rumah Tangga dan hal-hal lain yang dianggap perlu bagi kepentingan perkumpulan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Ketua

Secretaris

dto

dto

(M. Ilyas M. Ali)

(A. Bahrin St. Kayo)

Salah seorang yang hadir

dto

(H. Ma'ani Saleh)

**DAFTAR : Nama/susunan Pengurus PGAI
dari dahulu sampai sekarang *)**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
I.	Periode Pertama (1920-1922)		
	1. Haji Abdullah Ahmad	Voorzitter	
	2. S.M. Jamil Jambek	Vice Voorzitter	
	3. A. Madjid Karim	1. Sekretaris	
	4. Zainuddin Labai	2. Sekretaris	
	5. H. Ahmad Yunus	Theosurier	
	6. H.A. Karim Amarullah	Adviseur	
	7. H. Sutan Ibrahim	Adviseur	
	8. Tuanku Imran	Adviseur	
	9. S. Kader Muhammad	Adviseur	
	10. H. Ahmad KG	Commissaris	
	11. H. Abdul Rasyid	Commissaris	
	12. H. Sutan Darab	Commissaris	
II.	Periode Kedua (1923-1925)		
	1. Haji Abdullah Ahmad	Voorzitter	
	2. SM Jamil Jambek	Vice Voorzitter	
	3. A. Madjid Karim	1. Sekretaris	
	4. Zainuddin Labai	2. Sekretaris	
	5. H.A. Mutalib	Theosurier	
	6. H.A. Karim Amarullah	Adviseur	
	7. H. Sutan Ibrahim	Adviseur	
	8. Haji Siddik	Adviseur	
	9. Tuanku Imran	Adviseur	
	10. H. Ahmad	Commissaris	
	11. H. Sutan Darab	Commissaris	
	12. Tuanku Laut	Commissaris	
	13. H. Muhammad Nur	Commissaris	
	14. H. D a u d	Commissaris	
	15. H. Muhammad Saleh	Commissaris	

*) Pengurus Besar PGAI Sumatera Barat, Padang.

1	2	3	4
III.	Periode Kelima (1932-1935)		
	1. Dr. Haji Abdullah Ahmad	President **)	
	2. S.M. Jamil Jambek	Vice President	
	3. Haji Marah Baharuddin	1. Sekretaris	
	4. H. Muhammad Siddik	2. Sekretaris	
	5. H. Gazali	Thesaurier	
	6. H. St. Ibrahim	Adviser	
	7. H.A. Karim Amarullah	Adviser	
	8. H. D a u d	Commissaris	
	9. H. A h m a d	Commissaris	
	10. H. Muhamamd Arif	Commissaris	
	11. H. Salih Kari Majid	Commissaris	
IV.	Periode Keenam (1935-1938)		
	1. S.M. Jamil Jambek	President	
	2. Syech Ibrahim Musa	Vice President	
	3. Wahab Amin	1. Sekretaris	
	4. H. Khatab Umar	2. Sekretaris	
	5. Pakih Adam	Thesaurier	
	6. Syech Daud Rasyidi	Commissaris	
	7. H.M. Siddik	Commissaris	
	8. H. A h m a d	Commissaris	
	9. H.M. Gazali AB	Commissaris	
	10. Mr. Mahmud Yunus	Commissaris	
	11. H. Ilyas M. Ali	Commissaris	
V.	Periode Ketujuh (1938-1941)		
	1. A.M.K. Sidi Sutan	President	
	2. Syech Ibrahim Musa	Vice President	
	3. A. Wahab Amin	1. Sekretaris	
	4. A. Latif Usman	2. Sekretaris	
	5. Haji Syarif Ganie	Thesaurier	
	6. Syech M. Jamil Jambek	Adviser	
	7. H.M. Siddik	Adviser	
	8. H.M. Arif Panduko	Commissaris	
	9. Adam R. Sulaiman	Commissaris	
	10. Mahmud Yunus	Commissaris	
	11. M. Nur Idris	Commissaris	

**) Sesudah beliau meninggal 1933, jabatan ini dipegang oleh Syekh M. Jamil Jambek

1	2	3	4
VI.	Periode Kedelapan (1941-1944) 1. Syech Ibrahim Musa 2. Syech H.R.I. Zainin 3. Syech H.A. Wahab Amin 4. Syech H. Mahmud Thaib 5. Syech H.M. Syarif Gani 6. Syech M. Jamil Jambek 7. Syech A. Majid Sidi Sutan 8. Syech M. Siddik 9. Syech H. Abdul Rahman 10. Syech M. Nur Idris 11. Syech H. Nasruddin Thaha 12. Syech Adam R. Sulaiman 13. H.M. Kasim Bakri	Ketua Wakil Ketua Penulis I Penulis II Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
VII.	Periode Kesebelas (1951-1954) 1. A. Majid Sidi Sutan 2. Nasruddin Thaha 3. H.A. Wahab Amin 4. Adam R. Sulaiman 5. H. Zainin 6. Syech Haji Siddik 7. Syech Haji Said 8. Imam M. Nur Idris 9. H. Ma'ani Saleh 10. Syech Ibrahim Musa 11. Syech Abbas P.Japang 12. Syech Candung 13. Syech Sutan Mangkuto 14. Dt. Palimo Kayo	Ketua Wakil Ketua Setia Usaha I Setia Usaha II Bendahara Pemeriksa Pemeriksa Pemeriksa Pemeriksa Penasehat Penasehat Penasehat Penasehat Penasehat	
VIII.	Periode Ke Duabelas (1954-1956) 1. H. Ilyas M. Ali 2. Lutan M. Isa 3. Barum St. Kayu 4. Ma'aruf Hamzah St.Makmur 5. Tahin	Ketua Wakil Ketua Setia Usaha Wakil Setia Usaha Bendahara	

1	2	3	4
	6. H. Ma'ani Saleh 7. H. Rivai Yunus 8. Syarief Ali 9. H. Rivai Burhan 10. Syech H.M. Siddik 11. Syech Ibrahim Musa	Komisaris bagian pendidikan Komisaris bagian bangunan Komisaris bagian Yatim Komisaris bagian Umum Penasehat Penasehat	
IX.	Periode Kelimabelas (1963-1966)		
	1. M.H. St. Makmur 2. Drs. Azhari 3. Ibrahim Ujud 4. Jamaran 5. Baharuddin 6. H. Ma'ani Saleh 7. H.M. Dt. Nagari Basa 8. Zainuddin Usman 9. Sy. St. Indra 10. Jamal S 11. H. Anas 12. Julin Suleiman 13. H. Sanin 14. H.A. Wahab Amin 15. M. Zen St. Majolelo 16. Bp. Walikota Padang 17. Mayor A. Burhani Cokrohandoko	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Sekretaris II Bendahara Penasehat Umum/ Keuangan Seksi Pendidikan Seksi Pendidikan Seksi Pendidikan Sebagai Yatim Sebagai Yatim Sebagai Yatim Sebagai bangunan Sebagai bangunan Sebagai bangunan Penasehat Penasehat	
X.	Periode Keenam Belas (1966-1969)		
	1. Prof. Mahmud Yunus 2. Drs. Azhari 3. H.A. Wahab Amin 4. Ibrahim Ujub 5. Ismael Karim BA	Penasehat Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II	

1	2	3	4
	6. H. Zainal Abidin 7. A. Kamal SH 8. Marah Sjöfyan Ramlan 9. Darwis Chatab 10. A. Aziz Arif 11. Dr. A. Wahid Salajan SH 12. Mayor H. Hasnawi Karim BA 13. Burhanuddin Rangkuti 14. Naharuddin 15. Umar Rusjdi	Bendahara Seksi bangunan/ keuangan Anggota Anggota Seksi Pendidikan Anggota Anggota Seksi Sosial Yatim Anggota Anggota	
XI.	Periode Ketujuh Belas (1963-1966)		
	1. Prof. Mahmud Yunus 2. Drs. Azhari 3. A. Rivai Yunus 4. Buya Ismael Laut 5. Drs. Kamaruttaman 6. Burhanuddin Rangkuti 7. Drs. Ismael Karim 8. H. Zainal Abidin 9. Dulma Nur 10. H. Syafri Musa 11. Ibrahim Ujub 12. A. Anis Arif 13. Sy. St. Indra 14. H. Fauzan Muhammad Arif 15. h. Nashruddin Thaha 16. Amiruddin BA 17. Muktar Ali Dt. Batuah 18. H.A. Wahab Amin 19. Marah Syofyan Ramlan SH 20. M. Ibrahim 21. Dra. Kustafa Rusfa 22. Fatimah Latif	Penasehat Penasehat Penasehat Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Seksi Keuangan Seksi Keuangan Seksi Keuangan Seksi Pendidikan Seksi Pendidikan Seksi Pendidikan Seksi dakwah Seksi dakwah Seksi dakwah Seksi Bangunan Seksi Bangunan Seksi Bangunan Seksi Yatim Seksi Yatim	

1	2	3	4
	23. Amiruddin BA 24. Dulma Nur 25. Ismael Karim	Seksi Yatim Seksi Yatim Seksi Yatim	
XII.	Periode Kedelapan Belas (1973-1977)		
	1. Marah Syofyan Ramlan SH 2. Mukhtar Ali Dt. Batuah 3. Ibrahim Ujub 4. Burhanuddin Rangkuti 5. H. Zainin 6. H. Zainal Abidin 7. Syahrial Janaidi 8. H. Munas Manaf 9. Drs. Kamaruttaman 10. Amiruddin BA 11. Julin Suleiman 12. H. Fauzan Muhammad Arif 13. A. Aziz Arif 14. Sy. St. Indra 15. H. Syafri St. R. Ameh Muda 16. Khaidir St. R. Ameh 17. H.A. Wahab Amin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Seksi Dana Daya Seksi Dana Daya Seksi Dana Daya Seksi Yatim Seksi Yatim Seksi Yatim Seksi Pendidikan Seksi Pendidikan Seksi Pendidikan Seksi Bangunan Seksi Bangunan Seksi Bangunan	

ANGGARAN DASAR PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIYAH (P E R T I *)

(Disahkan oleh Kongres Akbar yang berlangsung di Jakarta tanggal 27 Agustus s/d 4 September 1966, serta disesuaikan semenjak Perserikatan ini menanggalkan fungsi politik pada tanggal 5 Januari 1973)

Pasal I

Nama, tanggal berdiri dan tempat

1. Perserikatan ini bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan singkatan PERTI.
2. Didirikan pada tanggal 5 Mei 1928.
3. Berkedudukan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan pusat.

Pasal II

A z a s

Azas Persatuan ini ialah Islam, yang dalam I'tiqat dan kepercayaan menganut faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan dalam syari'at serta ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala.

Pasal III

T u j u a n

Tujuan Perserikatan ini ialah :

- a. Meninggikan Agama Islam dengan arti yang seluas-luasnya.
- b. Menjiwai masyarakat Indonesia dengan ke Islaman.
- c. Membangun masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dan Agama Islam.

Pasal IV

P r o g r a m

Untuk mencapai tujuan, Perserikatan ini berusaha :

1. Memajukan Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam.

*) Pengurus Perti Sumatera Barat, Padang

2. Memperdalam rasa cinta terhadap Agama, Bangsa dan Tanah Air.
3. Memperhebat penyiaran dan pertahanan Agama Islam.
4. Memajukan perekonomian dan mengusahakan perekonomian rakyat.

Pasal V P i m p i n a n

I. Tingkat Pusat :

Pimpinan Tingkat Pusat ini terdiri dari dua badan :

- a. *Majelis Syura* mempunyai wewenang dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di antara dua Kongres.
 2. Membuat keputusan-keputusan dan kebijaksanaan untuk diberikan kepada DPP buat dilaksanakan dengan ketentuan :
 Apabila tidak dilaksanakannya Majelis Syura berhak menegur, sekiranya sampai 3 (tiga) kali ditegur tidak juga melaksanakan, Majelis Syura berhak membubarkan DPP.
 3. Dapat membubarkan DPP dengan keputusan Sidang Pleno yang mencapai quorum dan membentuk DPP baru yang bermasa jabatan sampai Kongres yang akan datang.
 4. Tidak mempunyai stempel dan kepala surat.
- b. *Dewan Pimpinan Pusat* dengan singkatan DPP yang mempunyai tugas serta wewenang executief untuk menjalankan kegiatan-kegiatan Perserikatan serta bertanggung jawab ke luar dan ke dalam.
- c. Majelis Syura dipimpin oleh Rois Aam.
- d. Dalam masalah-masalah prinsipil, DPP harus bermusyawarah dengan Rois Aam, untuk mendapatkan persetujuan.

II. Tingkat Daerah :

- a. Pimpinan Tingkat Daerah terdiri dari :
 1. Dewan Pimpinan Daerah (DPP) untuk daerah Propinsi
 2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk daerah kabupaten.
 3. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) untuk daerah Kecamatan.
 4. Pimpinan Ranting (PRT) untuk daerah Kelurahan, Kenegarian atau yang setingkat dengan itu.
 5. Pimpinan Anak Ranting (PART) untuk daerah Rukun Kampung (RK).
- b. Di tiap-tiap pimpinan Daerah diadakan atau dibentuk Badan Penasehat.
- c. Di tingkat Daerah tidak diadakan Majelis Syura.

- III. Anggota Pimpinan perserikatan ini dipilih dari anggota-anggota yang menjalankan ajaran Agama Islam.

Pasal VI Keanggotaan

1. Yang menjadi anggota Perserikatan ini ialah warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam.
2. Anggota Khusus ialah organisasi dakwah Islam yang sehaluan.

Pasal VII Organisasi Karya

1. Perserikatan ini mendirikan organisasi-organisasi Karya yang bernaung sebagai pendukung atau membantu melaksanakan program perserikatan, yaitu organisasi wanita, pelajar, guru dan lain-lain serta badan-badan yang mengurus kesejahteraan sosial pada umumnya.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi-organisasi karya ini diatur oleh masing-masing organisasi, yang harus mendapat persetujuan dari Kongres PERTI atau sementara DPP PERTI.

3. Organisasi-organisasi Karya ini mempunyai kedudukan otonom (berdiri sendiri) dan bergerak menurut azas dan tujuan Perserikatan serta di bawah pengawasannya.

Pasal VIII

Kekayaan

Kekayaan Perserikatan ini terdiri dari :

1. Uang pangkal para anggota
2. Uang iuran para anggota
3. Sumbangan-sumbangan, wakaf harta dan lain-lain yang tidak mengikat dan halal menurut agama Islam.

Pasal IX

Permusyawaratan

1. Permusyawaratan atau rapat-rapat diatur sebagai berikut :
 - a. Kongres
 - b. Sidang Majelis Syura
 - c. Sidang Pleno Daerah
 - d. Konperensi Daerah
 - e. Konperensi Cabang
 - f. Sidang Musyawarah Anak Cabang
 - g. Rapat Anggota Ranting
 - h. Rapat Anggota Anak Ranting
 - i. Rapat DPP, DPD, DPC, DPAC, PRT dan PART.
2. Permusyawaratan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perserikatan ialah Kongres yang diadakan sekali 3 (tiga) tahun dan diselenggarakan serta dipimpin oleh DPP di bawah bimbingan Rois Aam.
3. Sidang Majelis Syura diadakan sekali dalam setahun.

Pasal X

Anggaran Rumah Tangga

1. Peraturan-peraturan selanjutnya diatur dalam anggaran Rumah Tangga yang disusun oleh DPP dan disahkan oleh Sidang Majelis Syura.

2. Hal-hal yang tidak tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dibuat oleh DPP asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perserikatan ini.

Pasal XI

1. Lambang Perserikatan ini ialah gambar Mesjid dan Menara, warna dasar hijau, sedang warna mesjid dan menara kuning emas.
2. Panji-panji perserikatan dasarnya hijau dalam segi lima yang lancip bagian bawah dan datar bagian atas. Dan berisikan lambang Perserikatan dengan warna kuning emas.
3. Bendera Perserikatan berwarna biru tua (blau) berukuran dua di banding tiga dan di tengah-tengahnya ada bulan sabit dan bintang yang tegak serta tulisan PERTI dekat tiang yang ditulis dari atas ke bawah dengan warna putih.

Pasal XII

Perubahan Anggaran Dasar

Selain pasal II anggaran Dasar boleh diroboh oleh Kongres.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIYAH (PERTI)*)

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1

Macam-macam Anggota

- a. Anggota biasa yaitu anggota yang terdaftar pada anak ranting, ranting atau anak cabang.
- b. Anggota tersiar, yaitu anggota yang terdaftar pada cabang Daerah atau Pusat secara langsung.
- c. Anggota Khusus, yaitu organisasi Dakwah Islam yang dalam gerak perjuangannya berpedoman pada peraturan-peraturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perserikatan serta bersifat otonom.

Pasal 2 Permintaan Menjadi Anggota

Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis bagi :

- a. Anggota biasa kepada Pimpinan Anak Cabang, Ranting, Anak Ranting.
- b. Anggota tersiar kepada Pimpinan Cabang, Daerah yang selanjutnya diteruskan ke Pusat atau langsung kepada DPP.
- c. Anggota khusus langsung kepada DPP.

Pasal 3 Pengesahan Menjadi Anggota

Anggota dianggap sah apabila telah dinyatakan diterima oleh badan organisasi yang tersebut pada pasal 2 ayat a, b, dan c.

*) Pengurus Perti Sumatera Barat, Padang

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban Anggota**

a. Kewajiban Anggota :

1. Melaksanakan program, ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan perserikatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Tunduk kepada disiplin dan menjalankan kewajiban yang dibebankan Perserikatan.
3. Menjalankan dan menepati keputusan yang sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perserikatan.

b. Hak anggota :

1. Mengeluarkan pendapat untuk memajukan perserikatan baik tertulis maupun lisan.
2. Memilih dan dipilih menjadi petugas perserikatan untuk semua jabatan sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 5 **Tindakan Disiplin**

Tindakan disiplin :

- a. Tindakan disiplin dikenakan terhadap anggota-anggota Pengurus yang melanggar peraturan-peraturan dan garis kebijaksanaan yang merugikan Perserikatan.
- b. Sifat tindakan :
 1. Peringatan
 2. Pemberhentian sementara
 3. Pemecatan sebagai anggota
- c. Tindakan disiplin terhadap :
 1. Anggota biasa, anggota pimpinan anak cabang, ranting, anak ranting, dilakukan oleh DPD.
 2. Anggota tersiar dan Pimpinan DPD, dilakukan oleh DPP.

3. Anggota Pimpinan Harian DPP dilakukan oleh Kongres/ Sidang Majelis Syura.
4. Anggota Pleno DPP cukup dilakukan oleh Pimpinan Harian DPP.
- d. Pemberhentian sementara berlaku paling lama satu tahun, selanjutnya dicabut atau dipecat sebagai anggota.
- e. Anggota yang terkena disiplin dapat membela diri atau naik banding pada badan organisasi yang lebih tinggi.

BAB II

Pasal 6

Susunan Pimpinan Tingkat Daerah

- a. Majelis Syura : berwenang legislatif, diketuai oleh Rois Aam dan beranggotakan :
 1. Ulama-ulama yang diangkat oleh Kongres
 2. Anggota Pimpinan Harian DPP.
 3. Ketua-Ketua Karyawan tingkat Pusat masing-masing satu orang.
 4. Utusan dari daerah masing-masing tiga orang yang terdiri dari ulama, Sarjana dan Pimpinan Daerah.
- b. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 1. Ketua Umum dan Ketua (beberapa orang)
 2. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal (beberapa orang)
 3. Bendaharawan.
 4. Ketua-ketua Departemen yang terdiri dari :
 - a. Departemen Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Departemen Ulama dan Da'wah
 - c. Departemen Sosial dan Ekonomi
 - d. Departemen Organisasi dan Penerangan.
 5. Departemen-Departemen dapat mengangkat beberapa orang anggota menurut keperluan.

Pasal 7

Susunan Pimpinan Tingkat Daerah

- a. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari :
 1. Ketua dan wakil-wakil ketua (beberapa orang)
 2. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris (beberapa orang)
 3. Bendahara
 4. Ketua-ketua Departemen, masing-masing memimpin Departemen dan anggota Departemen.
- b. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Pimpinan Ranting (PRT) dan Pimpinan Anak Ranting (PART) terdiri dari :
 1. Ketua dan Wakil-wakil Sekretaris (beberapa orang)
 2. Ketua dan Sekretaris dan Wakil Sekretaris (beberapa orang)
 3. Bendaharawan
 4. Pembantu (beberapa orang)
- c. Badan Penasehat Daerah (BPD) terdiri dari Ulama-ulama, Zuamma-zuamma PERTI yang terkemuka di daerah-daerah. Badan Penasehat Daerah ini berkewajiban memberi nasehat, baik diminta atau tidak diminta.

Pasal 8

Pembentukan dan Pengangkatan Pimpinan

- a. Tingkat Pusat
 1. Rois Aam dan Pimpinan Harian DPP dipilih dan diangkat oleh Kongres.
 2. Pimpinan Harian DPP terdiri dari : Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekjen dan Wakil-wakil serta Bendahara.
 3. Pimpinan Departemen dipilih dan diangkat oleh Pimpinan Harian DPP bersama Rois Aam atas dasar mandat dari Kongres.
- b. Tingkat Daerah :
 1. DPD Harian dipilih oleh konperensi Daerah dan diangkat oleh DPP.

2. DPC Harian dipilih oleh konperensi Cabang dan diangkat oleh DPD.
3. DPAC Harian dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang dan diangkat oleh DPAC.
4. Pimpinan Ranting (PRT) dipilih oleh Rapat Anggota Ranting diangkat oleh DPAC.
5. PART dipilih oleh Rapat Anggota Anak Ranting dan diangkat oleh PRT.

Pasal 9

Tanggung Jawab Pimpinan

A. Tingkat Pusat

- a. Rois Aam sebagai Ketua Majelis Syura Badan Legislatif selain mengawasi kebijaksanaan DPP, baik diminta maupun tidak diminta, berkewajiban memberi petunjuk-petunjuk kepada DPP.
- b. DPP bertanggung jawab kepada Kongres Sidang Majelis Syura, atas aktivitas serta jalannya organisasi perserikatan dalam masa jabatannya.
- c. DPP bertanggung jawab kepada kongres dan berkewajiban mewakili/bertanggung jawab ke luar dan ke dalam.
- d. DPP berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Majelis Syura.
- e. Pembagian tugas DPP
 1. Ketua Umum memegang Pimpinan Umum serta bertanggung jawab keluar ke dalam agar terlaksana segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, serta segala keputusan-keputusan lainnya yang telah diambil oleh rapat DPP.
 2. Ketua-ketua harus membantu Ketua Umum, dapat menggantikan atau mewakili Ketua Umum, bila berhalangan dan bertugas mengkoordinir Departemen-Departemen.

3. Sekretaris Jenderal memegang pimpinan Sekretariat, serta menggantikan atau mewakili Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam tugasnya bila berhalangna.
4. Wakil-wakil Sekjen, harus membantu Sekjen dalam tugasnya dan mewakilinya bila berhalangan.
5. Bendahara, selain memelihara kekayaan Perserikatan mengenai keuangan dan surat-surat berharga, berkewajiban juga mengatur keseimbangan anggaran belanja dalam kelancaran masuknya uang iuran seta uang pangkal sesuai dengan peraturan yang ada.

f. Departemen-Departemen

1. Pendidikan dan Pengajaran : berkewajiban mengatur dan merencanakan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan pengajaran sesuai dengan tujuan dan program perserikatan.
2. Ulama dan Dakwah :
 - a. Berkewajiban memberikan fatwa-fatwa baik diminta, maupun tidak diminta, mengkoordinir ulama-ulama dalam membantu kegiatan-kegiatan perserikatan serta membina keseragama cara dan sikap dalam menghadapi pengaruh kepercayaan yang bersifat merusak agama dan masyarakat.
 - b. Di dalam dakwah berkewajiban membentuk, mengatur dan memelihara lembaga-lembaga dakwah dan majelis ta'lim sesuai dengan tujuan dan program perserikatan.
3. Sosial dan ekonomi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan mengusahakan dana-dana yang diperlukan oleh perserikatan.
4. Organisasi dan penerangan berkewajiban mengurus dan mengatur segala sesuatu yang bersangkutan dengan organisasi serta berkewajiban menyelenggarakan penerbitan, penyiaran-penyiaran perserikatan, mengumpulkan dokumentasi dan menyelenggarakan perpustakaan.

B. Tingkat Daerah

1. DPD bertanggung jawab kepada DPP dan Konperensi Daerah atas terlaksananya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART serta keputusan Kongres/ Majelis Syura dn instruksi DPP di daerahnya masing-masing.
2. DPP berkewajiban membeirkan laporan tertulis kepada DPP mengenai aktivitas daerahnya tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Ketentuan dalam pasal 9 huruf 3 angka 1 s/d 5 pada garis besarnya berlaku juga bagi DPD.

C. Tingkat Cabang dan Seterusnya.

- a. Selain kepada Konperensi, cabang juga bertanggung jawab kepada DPD untuk itu wajib mengirimkan laporan tertulis kepada DPD mengenai daerahnya sekurang-kurangnya sekali dua bulan
- b. Pengolahan dan pembagian tugas dilakukan secara gotong royong dibagi sesuai dengan fungsi masing-masing.
- c. Ketentuan dalam ayat-ayat di atas ini berlaku juga untuk DPAC dan PART disesuaikan dengan tingkatnya masing-masing.

D. Karyawan.

1. Pimpinan Karyawan berkewajiban memajukan organisasinya sesuai dengan AD / ART masing-masing yang telah disahkan oleh DPP.
2. Pimpinan Karyawan bertanggung jawab kepada DPP dan wajib memberikan laporan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10 Tindakan Disiplin

- a. Bagi badan organisasi perserikatan dikenakan tindakan disiplin pembakuan atau pembubaran, dilakukan oleh :
 1. Bagi pimpinan Anak Ranting, Ranting, Anak Cabang, Cabang dilakukan oleh DPD.

2. Bagi DPP dilakukan oleh DPP.
 3. Bagi DPP dilakukan oleh Majelis Syura.
- b. Bagi badan-badan yang dikenakan tindakan disiplin ini dapat mengajukan pembelaan pada badan yang lebih tinggi tingkatnya dari yang melakukan tindakan disiplin tersebut.

BAB III KEUANGAN

Pasal 11 Sumber Keuangan

- a. Untuk mendapatkan keuangan diaturlah sumber-sumbernya :
 1. Uang pangkal para anggota.
 2. Uang iuran para anggota
 3. Sumbangan-sumbangan wajib dari anggota yang mendapatkan penghasilan akibat perserikatan, baik langsung maupun tak langsung.
 4. Sumbangan-sumbangan/usaha lainnya baik dari dalam maupun dari luar yang sifatnya tidak mengikat.
- b. Besarnya uang pangkal dan uang iuran serta sumbangan wajib ditetapkan oleh DPP dalam peraturan tersendiri.
- c. Pembagian uang pangkal dan uang iuran ditetapkan sebagai berikut:
 1. 20% untuk DPP.
 2. 30% untuk DPD.
 3. 25% untuk DPC.
 4. 25% untuk DPAC Ranting dan Anak Ranting.

BAB IV PERMUSYAWARATAN

Pasal 12 K o n g r e s

- a. Kongres diadakan dalam 3 (tiga) tahun sekali.
- b. Kongres diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP di bawah bimbingan Rois Aam.

- c. Anggota Kongres terdiri dari :
 - 1. Anggota DPP
 - 2. Anggota Majelis Syura.
 - 3. Anggota Pimpinan Organisasi Karya tingkat Pusat sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 4. Anggota DPD masing-masing sebanyak 5 (lima) orang.
 - 5. Anggota DPC masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 6. Anggota DPAC yang masing-masing 1 (satu) orang.
- d. Setiap anggota kongres masing-masing mempunyai hak satu suara.
- e. Kongres dianggap sah apabila dihadiri separoh lebih satu dari jumlah anggota.
- f. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum kongres berlangsung harus diberitahu kepada daerah.

Pasal 13

Sidang Majelis Syura.

- a. Sidang Majelis Syura diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- b. Sidang Majelis Syura dianggap sah apabila dihadiri separoh lebih satu dari jumlah Anggota.
- c. Sidang Majelis Syura dapat diadakan atas usul sepertiga dari jumlah anggota atau atas inisiatif Rois Aam bersama DPP.
- d. Peraturan-peraturan yang belum diatur dalam AD/ART ini mengenai Majelis Syura akan diatur dalam peraturan khusus Majelis Syura.

Pasal 14

Konperensi Daerah :

- a. Konperensi daerah diadakan sekali dalam tiga tahun.
- b. Konperensi daerah dapat diadakan atas inisiatif DPD atau atas usul separo lebih satu dari jumlah cabang atau atas instruksi DPD.

- c. Konperensi Daerah dihadiri oleh :
 - 1. Anggota DPD.
 - 2. Anggota DPC sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - 3. Anggota DPAC sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 - 4. Anggota PRT sebanyak-banyaknya satu orang.
 - 5. Anggota Pimpinan tingkat cabang dari organisasi karya sebanyak-banyaknya satu orang.
- d. Setiap peserta konperensi cabang masing-masing mempunyai hak satu suara.
- e. Konperensi cabang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separoh lebih satu dari jumlah cabang.
- f. Sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum konperensi cabang berlangsung harus diberitahukan kepada cabang-cabang.

Pasal 15

Konperensi Cabang

- a. Konperensi Cabang diadakan atas inisiatif cabang atau usul separo lebih satu dari Anak Cabang dan Instruksi DPD.
- b. Konperensi cabang beranggotakan :
 - 1. Anggota DPC
 - 2. Anggota DPAC sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 - 3. Anggota PRT sebanyak-banyaknya satu orang.
 - 4. Anggota PART sebanyak-banyaknya satu orang.
 - 5. Anggota Pimpinan tingkat Cabang dan organisasi Karya sebanyak-banyaknya satu orang.
- c. Setiap peserta konperensi cabang masing-masing mempunyai hak satu suara.
- d. Konperensi cabang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separo lebih satu dari jumlah anak cabang.
- e. Keputusan-keputusan konperensi diambil atas suara terbanyak.
- f. Sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum Konperensi Cabang berlangsung harus diberitahukan kepada Anak-anak Cabang.

Pasal 16

Musyawarah Anak Cabang, Rapat Anggota Ranting dan Anak Ranting.

- a. Sidang musyawarah Anak Cabang beranggotakan, DPRT, dan PRT, dan PART, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atas inisiatif DPAC atau atas instruksi DPC.
- b. Rapat Anggota Ranting diadakan oleh PRT di bawah bimbingan DPAC.
- c. Rapat anggota Anak Ranting diadakan oleh PART bersama PRT atau petunjuk DPAC.

BAB V PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 17

Ketentuan Wilayah :

- a. Berdirinya suatu badan organisasi Perserikatan disesuaikan dengan lingkungan daerah pemerintah.
- b. Khusus untuk kota-kota yang berstatus Propinsi diatur tersendiri.

Pasal 18

Syarat berdirinya :

- a. Untuk berdirinya tingkat daerah sedikitnya diperlukan 4 (empat) Cabang dalam lingkungan Daerah Tingkat I (Propinsi).
- b. Untuk berdirinya Cabang sedikitnya diperlukan 3 (tiga) Anak Cabang dalam lingkungan Daerah Tingkat II (Kabupaten) atau yang setingkat.
- c. Untuk berdirinya Anak Cabang sedikitnya diperlukan 3 (tiga) Ranting dalam lingkungan Daerah Kecamatan atau yang setingkat dengan itu.
- d. Untuk berdirinya Ranting sekurang-kurangnya diperlukan 25 (dua puluh lima) anggota dalam daerah Kelurahan atau yang setingkat dengan itu.

- e. Untuk berdirinya Anak Ranting diperlukan sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) orang anggota dalam lingkungan Rukun Kampung atau yang setingkat dengan itu.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang diperlukan tetapi belum dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur tersendiri oleh DPP bersama Rois Aam.

Cikopo, 15 Juni 1967
Komisi "B" (Organisasi)

K e t u a

Sekretaris,

ttd.

ttd.

(Ahmad HMS. S.H.)

(Zulfahmi Marjohan)

UNDANG-UNDANG DASAR PARTAI ISLAM "PERTI"*)

(Diterima baik oleh Kongres Besar Partai Islam PERTI ke VII yang diadakan di Jakarta sejak tanggal 22 sampai 29 Agustus 1953).

Pasal I

Nama dan Tempat

- a. Partai ini bernama Partai Islam "Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang dipendekkan Partai Islam "Perti".
- b. Tempat kedudukan di tempat Pengurus Besar.

Pasal II

Dari hal Azas

Azas Partai ini ialah agama Islam dalam syariat dan ibadah menurut madzhab Sya'fi Radiallahu'anh, dalam I'tiqad menurut madzhab "Ahlus Sunnah Wal Jama'ah".

Pasal III

Tentang Tujuan Partai

Tentang Tujuan Partai ini : KALIMATUL HIYAL'ULYA (ketinggian Agama Islam) dengan arti kata yang seluas-luasnya.

Pasal IV

Tentang Daya Upaya

Untuk mencapai tujuannya partai ini berdaya upaya :

- a. Memperdalam rasa cinta terhadap agama, bangsa dan tanah air.
- b. Memperhebat penyiaran dan pertahanan Agama Islam.
- c. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia.
- d. Memajukan pengajaran, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
- e. Memajukan perekonomian dan mengusahakan kemakmuran rakyat.
- f. Dan lain-lain

*) Pengurus Perti Sumatera Barat, Padang.

Pasal V **Tentang Anggota**

Yang diterima menjadi anggota partai ini adalah orang Islam, laki-laki dan perempuan yang telah berumur 15 tahun.

Pasal VI **Tentang Pimpinan Partai**

Pimpinan Parti ini terdiri dari :

- a. Dewan Partai Tertinggi
- b. Pengurus Besar
- c. Perwakilan Pengurus Besar di Propinsi
- d. Komisariat Daerah di Kabupaten-kabupaten
- e. Pimpinan Cabang di daerah otonomi terendah
- f. Anak Cabang di nagari-nagari atau yang sama derajatnya dengan itu.
- g. Pengurus Ranting di bahagian-bahagian nagari.
- h. Di mana perlu diadakan kordinator-kordinator dengan tugas yang khusus.

Pasal VII **Tentang Program Perjuangan**

Program perjuangan Partai ini diatur oleh Dewan Partai Tertinggi, menurut keadaan masa dan zaman, yang boleh diubah diperbaiki atau ditetapkan oleh Kongres yang akan datang.

Pasal VIII **Tentang Kekayaan Partai**

Kekayaan Partai ini terambil dari :

- a. Uang masuk anggota
- b. Nafkah bulanan organisasi
- c. Derma, sumbangan, wakaf, harta wasiat, laba usaha dan lain-lain.

- d. Dan lain-lain pengambilan yang halal menurut agama Islam.

Pasal IX

Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar dan Peraturan Rumah Tangga

- a. Undang-undang Dasar Partai ini dan Peraturan Rumah Tangganya hanya boleh diubah oleh Kongres, terkecuali pada pasal II dan III, yang tidak boleh diubah oleh siapa dan bila juapun.
- b. Apabila keadaan memaksa maka persidangan pleno Pengurus Besar boleh mengadakan perubahan sementara menunggu Kongres yang akan datang.

Pasal X

Peraturan Partai selanjutnya diatur dalam Peraturan rumah tangga yang juga harus disyahkan oleh Kongres sebelum dijalankan, dengan mengingat Undang-Undang Dasar ini.

Pasal XI

Tentang Pembubaran Partai

- a. Partai ini tidak boleh dibubarkan, ia harus hidup dari abad ke bada, sebagai benteng pertahanan ahlu Sunnah Wal Jamaah yang bermazhab Syafei.
- b. Apabila keadaan sangat memaksa, maka Rapat Pleno boleh menon-aktifkan asal keputusan diambil dengan suara bulat, sambil menunggu kongres untuk menetapkan pembubaran atau menolaknya.
- c. Kalau Partai ini bubar, maka seluruh kekayaannya diserahkan kepada amal sosial yang ditetapkan oleh Kongres yang menetapkannya.

PROGRAM PERJUANGAN PARTAI

I. Politik

A. Keluar :

1. Menyokong usaha-usaha yang dapat menciptakan perdamaian dunia.
2. Menuntut agar Irian Barat agar segera dikembalikan ke dalam Wilayah RI
3. Menuntut supaya perhubungan status - dunia yang merendahkan derajat bangsa dan Negara Indonesia, antara Indonesia dan Belanda segera dihapuskan.
4. Menjalankan politik yang bebas aktif dalam pergolakan politik internasional dengan arti tidak mengurangkan usaha-usaha untuk mencari perhubungan persahabatan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara Islam.
5. Menyokong usaha-usaha rakyat terjajah, terutama Tunisia Marokko, Algeria, Vietnam, Afrika Utara dan lain-lain dalam usahanya memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa dan negerinya.
6. Menuntut agar penjajahan dalam segala bentuknya dihapuskan di dunia, sehingga timbul perhubungan yang harmonis antara bangsa-bangsa yang sama merdeka.

B. Kedalam :

1. Menuntut agar segera diadakan pemilihan umum yang adil, rahasia, terlepas dari segala macam tekanan, untuk mengujudkan Dewan-Dewan Perwakilan, baik untuk pusat, dan maupun untuk daerah-daerah otonom yang terendah.
2. Menuntut agar diberikan pemerintahan otonom yang luas dalam lingkungan negara kesatuan untuk daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia.
3. Menuntut agar keamanan dan kententeraman terjamin sebaik-baiknya oleh alat negara

II. Ekonomi

1. Seluruh pembangunan ekonomi harus dititik beratkan kepada kepentingan rakyat jelata, sehingga kemakmuran itu harus merata antara desa dan kota.
2. Menuntut agar pemerintah menguasai dengan segera perhubungan laut, darat, udara sehingga upah-upah dalam perhubungan itu harus serendah-rendahnya yang mengakibatkan lancarnya perekonomian rakyat.
3. Menuntut agar seluruh perusahaan yang vital dinasionalisasikan sehingga pemerintah leluasa selain menguasai juga menampung rakyat-rakyat yang menganggur.
4. Menuntut agar pemerintah menyelesaikan hutang-hutangnya kepada rakyat, seumpama pinjaman-pinjaman obligasi, pinjaman nasional dan hutang-hutang lainnya.
5. Menuntut supaya kemakmuran rakyat desa ditinggikan dengan jalan mengadakan bank-bank desa guna kepentingan rakyat tani desa dengan arti harus terlepas dari riba kecil dan besar.

III. Sosial

1. Menuntut agar pemerintah menjamin kehidupan keluarga korban revolusi, dan mengusahakan agar seluruh invaliden dikembangkan/dikembalikan ke masyarakat dengan jalan memberikan pendidikan yang sesuai dengan keadaannya.
2. Menuntut pemberantasan pelacuran dan mengusahakan agar mereka tersebut dikembalikan ke masyarakat dengan jalan memberikan pekerjaan yang layak dan pendidikan rohani yang sebaik-baiknya.
3. Menuntut agar pemerintah mengusahakan kesempurnaan kehidupan rakyat dengan memperlengkapi alat-alat perumahan, pakaian dan kesehatan.
4. Mengadakan pemberantasan buta huruf di seluruh Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

5. Menuntut agar kepada rumah-rumah sekolah agama dan mesjid-mesjid yang rusak karena agresi diberikan ganti kerugian.

IV. Agama

1. Dalam keadaan sifat negara sebagai sekarang, menuntut agar pemerintah menjaga dengan baik, sehingga setiap warga negara, baik perseorangan dan maupun bersama mempunyai kemerdekaan secukupnya untuk beribadat dan melaksanakan ibadatnya menurut kepercayaan masing-masing.
2. Menuntut agar pemerintah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah agama, tidak pandang aliran dan secara adil, dan juga kepada mesjid, serta pegawai-pegawainya.
3. Memperhebat pendidikan budi dan mencegah demoralisasi.

SUSUNAN PENGURUS BESAR PARTAI ISLAM PERTI

(Menuntut Keputusan Kongres Besar ke VII yang diadakan di Jakarta pada tanggal 22 s/d. 29 Agustus 1953 dan disempurnakan dalam Rapat Pleno Pengurus Besar tanggal 14 s/d. 15 Oktober 1953 di Bukittinggi).

I. Dewan Partai Tertinggi

A. Bagian tetap/Pengurus Harian :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Haji Sirajuddin Abas | : Ketua |
| 2. H. Chairuddin Syaukani | : Juru bicara/Publikasi |
| 3. Syofyan Siraj | : Juru bicara/Publikasi |
| 4. H. Daniyal Ayub | : Anggota/Bag. Perundang undangan |
| 5. Zubir Salam | : Anggota/Bag. Luar Negeri |
| 6. Idrus Ahmad | : Anggota/Bag. Perhubungan dan Pertanian. |

B. Bahagian tersiar dengan tugas-tugas khusus :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Haji Rusli Abdul Wahid | : Buat Sumatera Tengah |
| 2. Amran Tuanku Marahajo | : Buat Sumatera Tengah |

- | | |
|--------------------------|--|
| 3. Haji Asymawi | : Buat Sumatera Selatan |
| 4. Zaidin Burhani | : Buat Sumatera Selatan |
| 5. Khatib Basri | : Buat Sumatera Selatan |
| 6. Nyak Dewan | : Buat Sumatera Utara |
| 7. Tengku Usman Pauh | : Buat Sumatera Utara |
| 8. S.A. Dt. Tan Pahlawan | : Buat Sumatera Utara |
| 9. A. Fattah, M.A. | : Buat Sulawesi dan
Kepulauan
Sunda Kecil. |
| 10. Tengku Bay | : Buat Daerah Riau |
| 11. Ma'rifat Marjuni | : Buat Daerah Riau |

II. Pimpinan Umum

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Haji Rusli Abdul Wahid | : Ketua Umum |
| 2. T.S. Marjohan | : Ketua I |
| 3. Hajjah Syamsiah Abbas | : Ketua II |
| 4. Abdur Rahma | : Sekretaris Jenderal |
| 5. Badaruddin Abbas | : Sekretaris |
| 6. Syekh Sulaiman Ar. Rusli | : Ketua Dewan Fatwa |
| 7. Syekh Muhammad Said
Bonjol | : Ketua Dewan Thariqat |
| 8. Haji Mansyur | : Ketua Dewan Pendidikan |
| 9. Ilyas Yatim | : Ketua Dewan Penerangan |
| 10. Datuk Rajo Dubalang | : Ketua Dewan Penerangan |
| 11. Amran Tuanku Marajo | : Ketua Dewan Ekonomi |
| 12. Haji A'lawiyah Zen | : Ketua Dewan Sosial |
| 13. T. M. Damanhuri Said | : Ketua Dewan Pemuda |

III. Dewan-Dewan

A. Dewan Fatwa :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Syekh Sulaiman Ar Rusli | : Ketua |
| 2. Haji Yunus Yahya | : Sekrataris |
| 3. M.H. Dt. Maninjuan | : Anggota |
| 4. Syekh Yunus Sasak | : Anggota |
| 5. K. Tuanku Tuah | : Anggota |

- | | |
|--------------------|-----------|
| 6. B. Said Alimin | : Anggota |
| 7. Sy. Lai Sati | : Anggota |
| 8. Haji Umar Bakri | : Anggota |
| 9. Pakanuddin | : Anggota |

B. Dewan Thariqat :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Syekh Muhammad Said
Bonjol | : Ketua |
| 2. Syekh Jaji Abdul Majid | : Sekretaris |
| 3. Syekh Haji Yunus Sasak | : Ketua I |
| 4. Syekh Haji Ma'shum | : Ketua II |
| 5. Syekh Abdul Gani Batu Basa | : Anggota |
| 6. Syekh Muda Balubus | : Anggota |
| 7. Syekh Adam Palembayan | : Anggota |

C. Dewan Penerangan :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ilyas Yatim | : Ketua |
| 2. S.A. Dt. Tan Pahlawan | : Sekretaris |
| 3. Zaidalani Khatib | : Anggota |
| 4. Z.A. Ajmy | : Anggota |
| 5. Sutan Manji Arief | : Anggota |

D. Dewan Pendidikan dan Pengajaran :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Haji Mansyur | : Ketua |
| 2. Tengku Gazali | : Sekretaris |
| 3. Hajjah Syamsiah Abbas | : Anggota |
| 4. M.H. Dt. Maninjun | : Anggota |
| 5. Ya'cub Kari | : Anggota |
| 6. Abdul Aziz Saleh | : Anggota |

E. Dewan Keuangan :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Datuk Rajo Dubalang | : Ketua |
| 2. Kuasini Sabil | : Sekretaris |
| 3. Syahrudin Rusli Candung | : Anggota |
| 4. Rusli Abdullah | : Anggota |

5. Datuk Penghulu Kayu : Anggota
- F. Dewan Sosial :
1. Haji Alawiyah Zein : Ketua
 2. Marhamah Ismael : Sekretaris
 3. Rosma Idris : Anggota
 4. Ummi Hajjah Salim : Anggota
 5. Syarifah Azma : Anggota
 6. Nurma Abdul Wahid : Anggota
 7. Hajjah Rabi'ah Jamil : Anggota
- G. Dewan Ekonomi :
1. Amran Tengku Marajo : Ketua
 2. Rusli Abdullah : Sekretaris
 3. Abu Hasan P.S.K. : Anggota
 4. Abdul Aziz Tuanku Mudo : Anggota
 5. Sidi Bujang : Anggota
 6. Raja Oewa : Anggota
 7. Abdul Rahman : Anggota
 8. Muhar Pakih Bagindo : Anggota
- H. Dewan Pemuda :
1. Tuanku Mudo Damanhuri : Ketua
Said
 2. Mustafa : Sekretaris
 3. Ismael Hasan : Anggota
 4. Kusaini Sabil : Anggota

PERATURAN KHUSUS MAJELIS SYURA PERSATUAN TARBIAH ISLAMİYAH

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, HAL DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

- a. Majelis Syura adalah badan legislatif yang mempunyai kekuasaan tertinggi antara dua Kongres serta mengawasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam melaksanakan tugasnya untuk memimpin dan membawa Persyerikatan ketujuannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Majelis Syura dalam mengawasi DPP ini mempunyai hak sebagai berikut :
 1. Mengajukan Pertanyaan
 2. Meminta keterangan/penjelasan
 3. Mengadalkan penyelidikan
 4. Mengajukan amandemen
 5. Mengajukan pertanyaan, pendapat atau usul-usul lainnya, Hak. 1 s/d. 5 dilakukan dalam sidang Majelis Syura.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota Majelis Syura terdiri dari :

- a. Ulama-ulama Besar, Ulama-ulama, Tokoh-tokoh Persyerikatan Sarjana dan Wakil Pimpinan Pusat Organisasi Karya.
- b. Ulama-ulama Besar ialah Alim Ulama yang ditunjuk oleh Kongres. Ulama-ulama ialah rohaniawan yang mempunyai keahlian agama (warisatul ambia) di daerah-daerah.
- c. Tokoh-tokoh Persyerikatan ialah para pimpinan persyerikatan baik di pusat maupun di daerah.
- d. Sarjana ialah mereka yang mempunyai keahlian dalam ilmiah tertentu, sekurang-kurangnya tingkat Sarjana Muda atau yang setingkat.
- e. Wakil, organisasi karya tingkat Pusat ialah seorang dari Pucuk Pimpinan yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam majelis Syura.

Pasal 3

Perincian Anggota Majelis Syura sebagai berikut

- a. Rois Aam
- b. Ulama-ulama Besar 7 (tujuh) orang
- c. Pimpinan Harian DPP yang diangkat oleh Kongres
- d. Pimpinan organisasi Karya tingkat Pusat masing-masing satu orang.
- e. Utusan dari masing-masing daerah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 1. Seorang dari ulama
 2. Seorang dari DPD
 3. Seorang dari Sarjana.

Pasal 4

- a. Anggota Majelis Syura diangkat oleh Rois Aam atas usul instansi yang mewakilinya.
- b. Seorang anggota dapat diberhentikan :
 1. Atas permintaan sendiri
 2. Meninggal dunia
 3. Atas usul penarikan dari instansinya
 4. Berkianat terhadap persyerikatan atau melakukan tindakan kriminal.
 5. Setiap lowongan dari 1 s/d. 4 di atas dapat diganti sesuai dengan unsur-unsur yang diwakilinya melalui prosedur ayat a pada pasal ini.

BAB III

KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 5

- a. Majelis Syura dipimpin langsung oleh Rois Aam.
- b. Dalam masa sidang-sidang Majelis Syura dapat menunjuk diri salah seorang Sekretaris yang diambil dari yang ada.
- c. Kewajiban ketua yang terutama ialah :
 1. Memimpin sidang Majelis Syura dengan menjaga ketertiban Rapat, menjaga supaya peraturan khusus ini dipatuhi, memberi izin untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengucapkan pidatonya dengan bebas tanpa gangguan.

2. Mengumpulkan pokok persoalan yang akan diputuskan.
3. Mengawasi DPP dalam menjalankan tugasnya.

BAB IV PERSIDANGAN

Pasal 6

- a. Sidang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- b. Undangan untuk menghadiri sidang dilakukan oleh Rois Aam bersama DPP.
- c. Sidang-sidang dapat diadakan di tempat DPP ataupun di tempat lain yang ditentukan oleh Rois Aam bersama DPP.
- d. Sidang Majelis Syura bersifat tertutup.

Pasal 7

- a. Sidang sah bila mencapai quorum.
- b. Putusan-putusan sidang dianggap sah apabila mencapai separo lebih satu dari jumlah yang hadir.
- c. Khusus mengenai pembubaran DPP dapat dianggap sah apabila mencapai jumlah suara $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum disebut di sini dapat diatur dalam tata tertib Sidang Majelis Syura.

Cikopo, 15 Juni 1967

SIDANG KE I MAJELIS SYURA P.I. PERTI
KOMISI B/ORGANISASI

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Ahmad HMS. S.H.

Zulfahmi Marjohan

**STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM MADRASAH TARBIYAH
ISLAMİYAH BAHAGIAN TSANAWIYAH 4 TAHUN**

No.	Mata Pelajaran	K e l a s				Keterangan lain-lain
		I	II	III	IV	
	A. A G A M A					
1.	Qur'an	3	3	3	3	Agama & 'Ara- biyah 25 jam pelajaran (63%) Umum 15 jam pelajaran (37%)
2.	Hadist	1	1	1	1	
3.	Musthalah	1	1	1	1	
4.	F i q h	3	3	3	3	
5.	Ushul Fiqh	2	2	2	2	
6.	T a u h i d	2	2	2	2	
7.	Tarich Islamy	2	2	2	2	
8.	A c h l a q	1	1	1	1	
	B. ARABIYAH					
1.	Muthola'ah/Muhadasah	2	2	2	2	
2.	N a h w u	3	3	3	3	
3.	S h a r a f	2	2	2	2	
4.	Insya'/terjemah	1	1	1	1	
5.	Mahfushat	1	1	1	1	
6.	Imla'/Khat 'Arab	1	1	1	1	
	C. U M U M					
1.	Bahasa Indonesia	2	2	2	2	
2.	Bahasa Inggris	2	2	2	2	
3.	Ilmu Bumi	1	1	1	1	
4.	Sejarah	1	1	1	1	
5.	Ilmu Hayat/Ilmu Kesehatan	1	1	1	1	
6.	Ilmu Alam	1	1	1	1	
7.	Aljabar/Ilmu Ukur	1	1	1	1	
8.	Seni Suara/Menggam- bar Pekerjaan tangan	1	1	1	1	
9.	Pendidikan Jasmani	1	1	1	1	
10.	Tata Negara/Civics	-	-	-	1	
11.	Administrasi	-	-	-	1	
12.	Ilmu Pendidikan/ Ilmu Jiwa	-	-	-	2	
J u m l a h		36	36	36	36	

**STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM MADRASAH TARBIYAH
ISLAMIYAH BAHAGIAN 'ALIYAH 3 TAHUN**

No.	Mata Pelajaran	K e l a s			Keterangan lain-lain
		I	II	III	
	<i>A. A G A M A</i>				
1.	Qur'an/Tafsir	3	3	3	Agama & Arabiyah 21 jam pelajaran (70%). Umum 15 jam pelajaran (30%).
2.	Hadist/Mushala	2	2	2	
3.	Tarikh Tasyri'	-	1	1	
4.	Fiqh/Faraid	4	4	4	
5.	Ushul Fiqh	3	3	3	
6.	T a u h i d	2	2	2	
7.	Manthiq	1	1	1	
8.	Per. Agama	1	1	1	
9.	Sejarah Islam/Keb.	2	1	1	
10.	A k h l a q	1	1	1	
	<i>B. ARABIYAH</i>				
1.	N a h w u	2	2	2	
2.	S h a r a f	2	2	2	
3.	Muthalaah	2	2	2	
4.	Insyak/Muhadatsah	2	2	2	
5.	Balaghah	1	1	1	
6.	Mahfuzhat	1	1	1	
	<i>C. U M U M</i>				
1.	Bahasa Indonesia	1	1	1	
2.	Bahasa Inggris	2	2	2	
3.	Ilmu Bumi	1	1	1	
4.	Sejarah	1	1	1	
5.	Tata Negara/Civics				
6.	Ilmu Pendidikan/Jiwa	2	2	2	
7.	Ilmu Kes./Tub. Manusia	1	1	1	
8.	Anthropologi/Budaya	1	1	1	
9.	Pendidikan Jasmani	1	1	1	
J u m l a h		40	40	40	

Lampiran

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DARI PERSATUAN MUSLIMIN INDONESIA

(Disahkan/ditetapkan oleh Conferentie PMI Ke I
Pajakoemboeh pada tanggal 5-9 Agoestoes 1930)

DENGAN NAMA ALLAH YANG PENGASIH DAN PENYAYANG

PENDAHULUAN

Kekuasaan Tuhan atas adanya perobahan Alam ini dengan isi dan penduduknya. Manusia adalah sebahagian penduduk alam yang banyak sekali menerima dan menanggung arus percobaan itu.

Mata hari yang mulanya terbit memancarkan sinarnya di sebelah Timur, petang hari dia terbenam di sebelah Barat dan moga-moga besok dia akan bersinar lagi di sebelah Timur asal jangan Alam Timur itu berselimut dengan awan yang gelap.

Sifat manusia mula-mula barang apa perobahan Alam ini, terbitlah dahsyat dan tercengangnya; kemudian barulah terbit fikiran dan kemauannya untuk menyelidiki, terkadang-kadang ternyata barang itu berguna baginya.

Dunia barat sekarang dengan kemajuan penduduknya mula-mula mendashyatkan kepada penduduk Timur. Tetapi kemajuan yang diperdapat dari tenaga biasa saja, apa lagi terang pula bahasa asal-asal kemajuan itu dari dunia Timru jua adanya. (Siapa yang menyelidiki tarech, niscaya akan membenarkan hal ini).

Hari pagi, siang telah mulai mengibarkan terangnya, dari segala tempat penjuru, manusia berbangkit mejinggalkan tempat ketidurannya, semisal orang mati sama hidup kembali. Maka begitulah keadaan hidup semangat Timur yang sama bangkit akan mengejar kemajuan yang sudah "tercece" dari dunia Barat itu.

Indonesia yang terkenal dari beberapa kepulauan, adalah sebahagian Dunia Timur yang penduduknya lebih dari 80 persen beragama Islam. Maka dengan berdasarkan Islam dan Kebangsaaannya, mereka memburu kemajuan untuk merebut hak kemanusiaanya yang membawa kesentosaan dan kemuliaan mereka hidup dalam pergaulan bersama.

“Sumatera Thawalib” yang mulanya didirikan oleh beberapa pelajar saja pada masa Sepuluh tahun yang lalu, telah merasa dirinya jadi pemuda yang akan duduk dikalangan bangsanya. Maka pada Kongresnya yang pertama kali di Bukittinggi pada penghasilan tahun 1348 Hidjarah, disampaikanlah cita-citanya; dengan cara bulat-bulat diambillah ketetapan bahasa “Sumatera Thawalib” dibubarkan dan diganti dengan (P) Persatuan (M) Moeslimin (I) Indonesia”, yang mana anggaran Dasar dan Anggaran Tetangganya adalah seperti tersebut di sebelah ini.

ANGGARAN DASAR DARI (P)ERSATUAN (M)USLIMIN (I)NDONESIA

1

Perkumpulan ini bernama "Persatuan Muslimin Indonesia" dengan singkatannya "P.M.I." kedudukan pengurus besarnya di mana dirasa perlu.

2

Maksud perkumpulan ini, ialah mengusahakan kemajuan yang membawa kepada kesentosaan dan kemuliaan dengan jalan yang sah.

3

Azas perkumpulan ini, ialah : ISLAM DAN KEBANGSAAN.

4

Akan menyampaikan maksud-maksud itu PMI mengusahakan dan membagi pekerjaannya kepada beberapa bahagian (Departemen).

- a. Bahagian Pelajaran dan bagi-baginya
- b. Bahagian Perusahaan dan bagi-baginya
- c. Bahagian Penyiraan dan pertahannya.
- d. Bahagian Kepanduan.

5

Anggota perkumpulan ini terjadi dari :

- a. Anggota biasa (Putra dan Putri Muslimin Indonesia yang sudah dewasa).
- b. Anggota yang terhormat (siapa yang berjasa besar kepada perkumpulan ini dan diangkat oleh rapat anggota).
- c. Anggota Dermawan (siapa yang suka membantu perkumpulan ini dengan bantuan yang ditentukan).

6

Penghasilan perkumpulan ini adalah :

- a. Uang permulaan (entree)
- b. Uang iyruran (contributie)
- c. Uang derma dan pendapat lain-lainnya yang halal.

7

Keberhentian anggota disahkan oleh :

- a. Permintaan sendiri
- b. Berpulang keramatullah
- c. Dilepas oleh pengurus besar atau pengurus cabang yang disahkan oleh rapat anggota di tempat itu.

8

Perkumpulan ini mendirikan cabang dan anak cabang di tempat yang dirasa patut di Indonesia.

9

Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI ini ditetapkan dan diroboh oleh rapat anggota Umum (Pengurus Besar dengan utusan cabang).

10

Setelah hal yang tidak tersebut dalam Anggaran Dasar, Anggaran Tetangga dan tidak pula diputuskan oleh Rapat Anggota Umum maka Pengurus Besarlah yang berhak memutuskannya.

11

Perkumpulan ini dipimpin oleh Pengurus Besar, yang anggotanya paling kurang Tujuh orang. Satu Ketua, satu Juru Surat atau Bendahara dan empat anggota.

12

Pengurus Besar menanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan dari segala peraturan perkumpulan ini.

13

Perkumpulan ini tidak boleh dibubarkan, kecuali kalau tiga perempat dari jumlah anggota menghendakinya.

14

Apabila Perkumpulan ini dibubarkan maka segala harta bendanya jatuh kepada pergerakan rakyat ditentukan oleh satu "Badan" yang diangkat oleh rapat besar untuk menetapkan kebubaran itu.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
(P)ERSATUAN (M)USLIMIN (I)NDONESIA**

1

Dari hal anggota biasa

1. Barang siapa yang hendak menjadi anggota biasa, haruslah lebih dahulu memasuki surat permintaan kepada pengurus di mana tempat tinggalnya, dan kalau pada tempat tinggalnya itu belum ada cabang maka dia boleh menyampaikan surat permintaan itu kepada pengurus besarnya.
2. Jika permintaan itu sudah dikabulkan, maka dia selekas-lekasnya diberi surat tanda menjadi anggota.
3. Jika permintaan menjadi anggota itu ditolak oleh Pengurus Besar atau pengurus cabang, maka yang meminta itu tidak berhak menuntut cabang, maka yang meminta itu tidak berhak menuntut alasan-alasannya.
4. Tiap-tiap anggota diwajibkan membayar uang permulaan sekurang-kurangnya F. 0,50 (lima puluh sen) dan pada tiap-tiap bulan membayar uang iuran sekurang-kurangnya F. 0,10 (sepuluh sen) yang diserahkan kepada pengurus di mana dia masuk.
5. Anggota yang berbahaya kepada perkumpulan atau tidak mencukupi kewajibannya sampai enam bulan dan tidak membayar sesudah diminta, maka dia akan dikeluarkan dari perkumpulan.
6. Anggota-anggota yang diberhentikan yang merasa dirinya tidak bersalah di dalam hal ini, boleh memasukan surat pembelaan kepada Pengurus Besar. Pengurus Besar berembuk dengan pengurus cabang dan keputusan haruslah disampaikan kepadanya.
7. Tiap-tiap anggota biasa mempunyai hak bersuara dalam rapat anggota di mana tempatnya.

2

ANGGOTA DERMAWAN

1. Semua orang dengan tidak pandang bangsa dan agama boleh menjadi anggota ini, asal saja dia suka membantu perkumpulan

ini sekurang-kurangnya seharga F 100 (seratus ribu) buat sekali bayar atau sekurang-kurangnya R.5,- (lima rupiah) tiap-tiap bulan.

2. Perkumpulan boleh diterima menjadi anggota Dermawan.
3. Akan menjadi anggota Dermawan, haruslah memberitahukan kepada pengurus cabang tempatnya atau kepada Pengurus Besar dan dia haruslah dengan selekas-lekasnya dapat surat keterangan jadi anggota itu.
4. Di dalam rapat anggota, anggota Dermawan boleh bersuara sebagai memberi nasehat saja.

3

ANGGOTA YANG TERHORMAT

1. Yang boleh diangkat menjadi anggota yang terhormat, yaitu siapa orang yang berjasa besar kepada perkumpulan ini dan diangkat oleh rapat anggota.
2. Anggota terhormat juga berhak sebagai anggota Dermawan dalam semua rapat anggota.

4

1. Pengurus besarlah yang memegang jalannya pimpinan dari semua cabang dan anak cabang dan menanggung aturan perkumpulan ini.
2. Anggota Pengurus besar ditanam buat lamanya dua tahun dan boleh dipilih kembali.
3. Tempat kedudukan Pengurus besar diputuskan oleh rapat anggota umum dengan mengingat keselamatan perkumpulan.
4. Anggota Pengurus Besar dipilih dari anggota biasa oleh utusan-utusan cabang dengan suara terbanyak.
5. Kalau salah seorang anggota berhenti waktunya maka Pengurus Besar boleh menanam akan Pengurus Besar gantinya sementara menunggu pilihan baru, dan Pengurus Besar harus memberitahukan tanaman itu kepada pengurus-pengurus cabang.

6. Pengurus Besar boleh menentukan beberapa orang dari anggotanya menjadi pengurus Harian, sekurang-kurangnya tiga orang.
7. Pengurus Besar harian itu melakukan segala pekerjaan harian, yaitu segala hal yang datang tiba-tiba dan tidak dapat dinantikan rapat pengurus besar.
8. Pengurus besar boleh mengangkat Juru nasehat dan angkatan itu harus diberitahukan kepada seantero cabang.

5

KETUA

1. Ketua pengurus besar memimpin rapat umum dan rapat pengurus besar.
2. Menanda tangani surat-surat perkumpulan yang penting, bersama Juru surat.
3. Mewakili PMI dalam segala urusan perkumpulan.

6

KETUA MUDA

Ketua Muda mewakili Ketua dan boleh dikuasakan oleh Ketua buat melakukan pekerjaannya.

7

JURU SURAT

1. Mendaftarkan nama anggota
2. Menulis dan membacakan buah dan keputusan kerapatan
3. Menulis dan membacakan berita tahunan
4. Mendaftarkan dan menyimpan segala surat-surat dan buku-buku perkumpulan.
5. Memegang dan mengerjakan buku-buku urusan uang dan harta benda perkumpulan.
6. Kalau Juru surat diadakan lebih dari satu, maka pembahagian pekerjaan hendaklah dimufakati antara keduanya.

8

BENDA HARI

1. Mengusahakan dan menanggung harta benda perkumpulan
2. Menerima uang iuran, derma dan lain-lain
3. Mengeluarkan uang menurut yang ditentukan oleh kerapatan pengurus besar atau rapat umum.
4. Surat menyurat dalam urusan uang
5. Memegang urusan uang dan harta benda perkumpulan.

9

JURU PERIKSA (ANGGOTA P. BESAR)

1. Menjaga supaya aturan perkumpulan berjalan dengan baik
2. Ketua atau Ketua muda boleh mewajibkan juru periksa itu melakukan pekerjaan perkumpulan dan apa-apa yang telah dilakukannya itu haruslah diberitahukan kepada P. Besar.

10

DARI HAL CABANG

1. Seperti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar fasal 8 maka di suatu tempat yang dirasa patut di Indonesia ini hanya boleh mengadakan satu cabang buat laki-laki.
2. Akan mendirikan cabang, hendaklah memajukan permintaan dengan surat kepada Pengurus Besar.
3. Jika permintaan itu diterima, Pengurus Besar memberi surat pengakuan sah berdirinya cabang itu.
4. Tiap-tiap cabang wajib memberikan sekali tiga bulan kepada pengurus besar tentang keadaan anggota dan bagaimana jalannya perkumpulan di tempat itu.
5. Seluruh cabang wajib bersama-sama memikul belanja guna keperluan umum dari perkumpulan ini.

11

PENGURUS CABANG

1. Pengurus cabang menjadi sambungan pengurus besar dengan anggota-anggota di tempat cabang itu.
2. Pengurus cabang memimpin semua jalan cabangnya yang setuju dengan maksud ini perkumpulan.
3. Pengurus cabang dipilih oleh rapat anggota di tempat itu menurut suara terbanyak.
4. Kalau cabang mengadakan aturan di tempatnya, tidak berlawanan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga perkumpulan ini.
5. Semua ketentuan dari hal Pengurus Besar dalam Anggaran Tetangga ini, berlaku juga buat pengurus cabang menurut haknya.
6. Semua perbuatan pengurus cabang yang tidak diizinkan atau tidak disahkan oleh Pengurus Besar adalah menjadi tanggungan Pengurus cabang sendiri.
7. Kalau satu urusan guna umum di tempat satu cabang maka pengurus besar boleh memperserahi tanggungan itu kepada pengurus cabang tersebut.
8. Pertalian cabang dengan anak cabang seperti pertalian pengurus besar dengan pengurus cabang.

12

DARI HAL BAHAGIAN (DEPARTEMEN)

1. Bahagian pelajaran (mengatur bagaimana terjadinya tempat-tempat pelajaran dan bagaimana majunya pelajaran dari yang rendah sampai yang tinggi dan mengatur segala hal yang bersangkutan dengan urusan pelajar itu).
2. Bahagian Perusahaan (mengatur bagaimana terjaminnya bermacam-macam badan perusahaan yang baik dan bagaimana majunya satu-satu perusahaan itu serta menyusun badan perusahaan itu dengan sempurna).

3. Bahagian penyiaran Islam (mengatur supaya Islam difahamkan dan diamalkan oleh umat Islam dengan mengadakan tempat-tempat da'wah dan serta menyeru dan membela Islam kepada bangsa yang belum Islam dengan mengadakan seruan (Da'wah) di mana yang dirasa perlu).
4. Bahagian pandu (mendidik kepada pemuda-pemuda Islam dan anak-anak Islam itu dapat dijalankannya dengan tangkas dan teratur).

Segala perkara yang tidak termasuk dalam salah satu bahagian yang sudah ada, termasuk ke dalam urusan pengurus besar. Tiap-tiap bahagian itu mengadakan anggaran sendiri-sendiri yang tidak berlawanan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga dari perkumpulan ini dan anggaran itu disahkan oleh pengurus besar.

13

HAL UANG

1. Semua keperluan umum PMI ditanggung oleh cabang bersama-sama.
2. Keperluan satu cabang yang mengenai urusan sendiri maka ongkosnya ditanggung oleh cabang tersebut.

14

DARI HAL KAS

1. Pengurus Besar mempunyai kas yang dinamai kas perkumpulan yang terpegang oleh Bendahari Pengurus Besar. Semua uang yang diterima oleh pengurus besar dan uang tanggungannya P. Besar, haruslah dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari kasnya P. Besar itu.

Keperluan yang terjadi tanggungannya P. Besar, ialah keperluan umum dan keperluan itu tempat.

2. Bahagian-bahagian, mempunyai kas sendiri yang dinamakan kas sementara; semua uang yang diterima oleh bahagian haruslah disetorkan kepada pengurus besar, selain persediaan menurut

kepentingan yang akan digunakannya. Dan kalau kurang boleh minta tambah dan kalau lebih harus disetor pada P. Besar.

3. Cabang-cabang mempunyai kas yang dinamai Kas cabang. Semua uang yang diterima oleh cabang atau yang keluar guna keperluan cabang dimasukan dalam dan dikeluarkan dari kas cabang. Tiap-tiap penghabisan tahun cabang itu haruslah mengirimkan perhitungan masuk keluarnya uang kepada P. Besar bersama berita tahunan kalau cabang itu mengadakan bahagian pula, maka pengurus cabang mengatur kas bahagian itu secara yang tersebut di atas seperempat dari penerimaan uang permulaan (entree) dan iuran dari cabang, haruslah disetor kepada pengurus besar.

15

DARI HAL RAPAT BESAR

1. Rapat besar (rapat pengurus besar dengan cetusan-cetusan cabang) haruslah diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
2. Waktu, tempat dan lamanya rapat besar itu ditentukan oleh pengurus besar dan sedikitnya dalam tempo satu bulan lebih dahulu P. Besar haruslah memberitahukan pada seantero cabang.
3. Rapat besar itu dianggap sah asal jangan lebih separo dari jumlah cabang meminta supaya diundurkan.
4. Segala pokok yang akan dibicarakan dalam anggaran (agenda) dan apa yang tidak tersebut dalam agenda hanya boleh dibicarakan kalau disepakati oleh rapat besar itu.
5. Yang memimpin rapat besar itu ialah ketua P. Besar atau orang yang mewakilinya.
6. Yang mempunyai hak bersuara buat mengambil putusan (stym) ialah utusan cabang yang hadir pada P. Besar.
7. Utusan-utusan cabang mempunyai satu stym tiap-tiap seratus anggota atau kurang dari enam ratus ke atas enam suara. Tiap-tiap anggota P. Besar mempunyai satu suara.
8. Segala keputusan rapat besar itu menjadi sah, jika diambil dari suara bersama atau suara terbanyak. Waktu stym dan putusan itu berlaku hingga dicabut oleh rapat besar pula.

9. Kalau yang akan diambil putusan terhadap kepada orang atau soal yang penting, maka stym dijalankan dengan kertas dan kalau tidak, boleh dengan isyarat atau suara saja.
10. Kalau didapat suara yang berlawanan sama banyak maka stym diulang kembali dan kalau sama juga dipandang belum ada putusan kalau dengan mufakat rapat boleh diundi saja.

16

PENGGANTI PENGURUS BESAR

1. Buat penggantian anggota pengurus besar maka satu-satu cabang boleh mengajukan candidat dengan surat kepada pengurus besar sedikitnya sebelum rapat besar dilangsungkan untuk itu.
2. Pengurus besar wajiblah membuat nama-nama candidat yang dimajukan oleh Pengurus besar sendiri atau cabang dan dikirim kepada semua cabang. Uang yang tidak tersebut di dalam candidat tidak boleh dipilih.
3. Dalam rapat besar bermula dipilih semua anggota Pengurus Besar kemudian barulah ditentukan satu-satu kedudukannya.

17

RAPAT PENGURUS BESAR

1. Rapat ini ditentukan oleh Ketua Pengurus Besar dan haruslah diberitahukan sedikitnya satu minggu lebih dahulu kepada anggota Pengurus Besar serta diterangkan waktu tempat dan pokok yang akan diterangkan.
2. Rapat Pengurus Besar ini dipandang sah jika anggota-anggotanya lebih banyak yang berhadir daripada yang tidak berhadir.

18

RAPAT CABANG

1. Rapat anggota cabang diadakan dan dipimpin oleh pengurus cabang dan cara melakukannya adalah seperti rapat besar yang

tersebut di atas dengan mengganti rapat besar dengan rapat anggota cabang.

2. Rapat pengurus cabang harus dilakukan seperti rapat pengurus besar.
3. Duka rapat anggota itu dihadiri kurang dari separoh, maka kerapatan diundurkan dan P. Cabang harus mengedarkan surat undangan yang musti dibubuhi tanda tangan anggota, jika anggota tidak juga berhadir pada kerapatan yang kedua menurut ketentuan rapat, maka kerapatan dipandang sah.

19

TAHUN PERKUMPULAN

Buat memudahkan semua urusan buku-buku dan lain-lain maka tahun yang dipakai ialah tahun Syamsiah dari Januari sampai Desember.

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM*)
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH

No.	Mata Pelajaran	K e l a s					Keterangan
		I	II	III	IV	V	
I.	<i>Agama</i>						
1.	Al Qur'an	6	6	4	2	2	
2.	Fiqh/Ibadat	2	2	2	2	2	
3.	Keimanan/Tauhid	2	2	2	2	2	
4.	T a f s i r	-	-	2	2	2	
5.	H a d i s	-	-	1	1	1	
6.	Tarech	-	-	1	1	1	
7.	Bahasa Arab	-	-	4	8	8	
II.	<i>Umum</i>						
1.	Bahasa Melayu	5	5	4	4	4	
2.	Berhitung	5	5	5	5	5	
3.	Ilmu Bumi	-	-	1	1	1	
4.	Sejarah	-	-	-	1	1	
5.	Ilmu Alam	-	-	-	1	1	
6.	Ilmu Hayat	-	-	-	2	2	
7.	Menulis	2	2	2	2	2	
8.	Menggambar	1	1	1	1	1	
9.	Menyanyi	1	1	1	1	1	
10.	Gerak Badan	1	1	1	1	1	
Jumlah		25	25	31	37	38	

*) Pengurus Besar Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang.

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 4 TAHUN

No.	Mata Pelajaran	Jumlah jam tiap tingkat kelas			
		I	II	III	IV
I.	<i>A G A M A</i>				
	1. Bahasa Arab	6	6	6	6
	2. Tauhid	3	3	3	3
	3. Al Qur'an	2	2	2	2
	4. Tafsir Al Qur'an	4	4	4	4
	5. Fiqh/Usul Fiqh	4	4	4	4
	6. Hadis/Mustahalah Hadist	4	4	4	4
	7. T a r e c h	2	2	2	2
II.	<i>U M U M</i>				
	1. Bahasa Belanda	2	2	2	2
	2. Bahasa Inggris x)	2	2	2	2
	3. Aljabar/Ilmu Ukur	2	2	2	2
	4. Ilmu Bumi/Sejarah	2	2	2	
	5. Ilmu Alam	1	1	1	1
	6. Ilmu Hewan	1	1	1	1
	7. I. Timbuh-tumbuhan	1	1	1	1
	8. Menggambar	1	1	1	1
	9. Menyanyi	1	1	1	1
	10. Adm/Organisasi	1	1	1	1
	11. Bahasa Melayu	2	2	2	2
J u m l a h		41	41	41	41

x) Bahasa Inggris tidak merata pada tiap sekolah, tergantung dari tenaga guru.

**STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM NORMAL SCHOOL
(SEKOLAH GURU MUHAMMADIYAH) PADANG 4 TAHUN**

No.	Mata Pelajaran	K e l a s				Keterangan
		I	II	III	IV	
1.	Al Qur'an	3	3	3	3	
2.	Tauhid	3	2	1	1	
3.	Al Hadist	2	2	2	-	
4.	F i q h	2	2	2	2	
5.	Sejarah Islam	2	2	2	-	
6.	Sejarah Indonesia	1	1	1	1	
7.	Sejarah Dunia	1	1	1	1	
8.	Ilmu Pendidikan	2	2	3	4	
9.	Ilmu Jiwa	2	2	2	2	
10.	Praktek Mengajar	-	-	-	8	
11.	Tata Negara	1	1	1	1	
12.	Ilmu Berhitung	3	4	4	2	
13.	Ilmu Pasti	3	3	3	-	
14.	Ilmu Alam	1	1	1	-	
15.	Ilmu Kesehatan	1	1	1	-	
16.	Ilmu Bumi	1	1	1	-	
17.	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	
18.	Bahasa Belanda	2	2	2	2	
19.	Bahasa Inggris	2	2	2	2	
20.	Bersenam	2	2	2	2	
21.	Menulis/Menggambar	1	1	1	1	
22.	Adm./Organisasi	1	1	1	1	
J u m l a h		40	40	40	40	

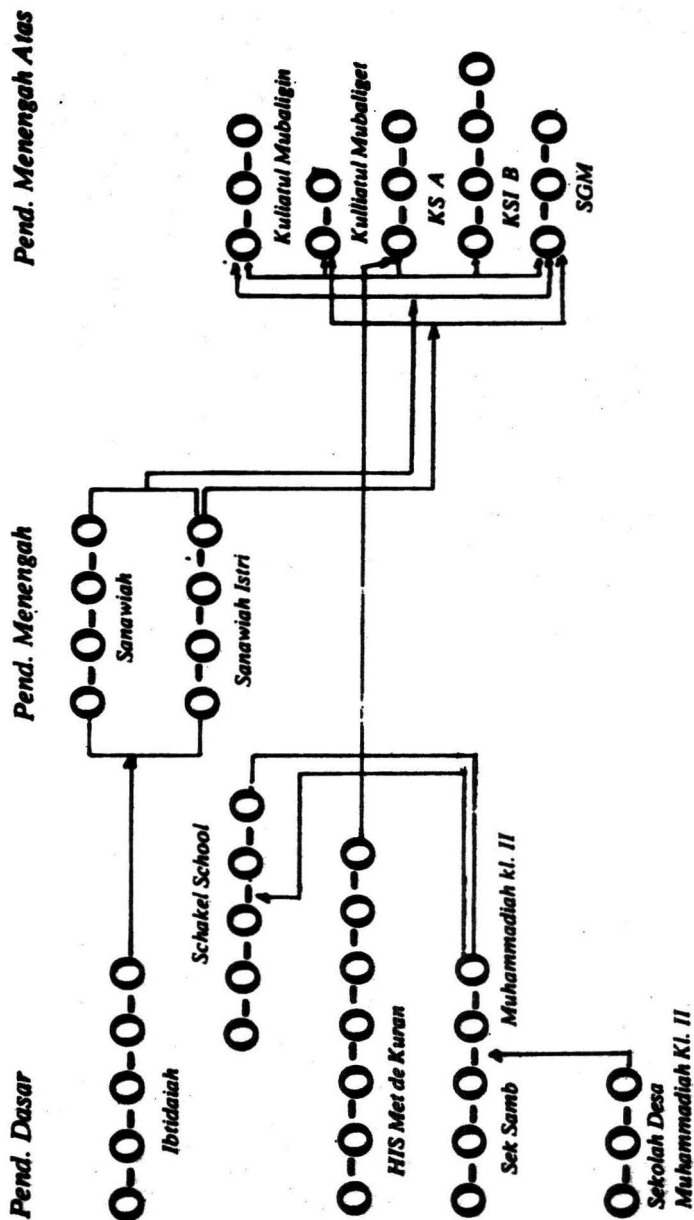
**KURIKULUM KULIYATUL MUBALIGHIN MUHAMMADIYAH
MINANGKABAU 3 TAHUN**

No.	Mata Pelajaran	K e l a s			Keterangan
		I	II	III	
1.	Al Qur'an	3	3	3	
2.	Al Hadist/Musthalah Hadist	4	4	2	
3.	Isl. Theologie	1	1	1	
4.	F i q h	2	2	2	
5.	Usul Fiqh	2	2	1	
6.	Ar. Spre. en Opst	2	2	-	
7.	Ar. Letterkunde	2	2	-	
8.	Ar. Gramatik	2	2	1	
9.	Ar. Lesson	2	2	1	
10.	Isl. Ceschied	2	1	1	
11.	Alg. Ceschied	1	1	1	
12.	Ind. Ceschied	1	1	1	
13.	Opvoed th	3	3	4	
14.	Opvoed Pr.	-	-	6	
15.	Zielkunde	2	2	2	
16.	Staatsiarichting	1	1	1	
17.	Gijaaestieks	1	1	1	
18.	Rekease	2	2	2	
19.	Vermloer	1	1	1	
20.	Natuurkunde	1	1	1	
21.	Natuurlijke N	1	1	1	
22.	Hijgieze	1	1	1	
23.	Asrdrijskunde	1	1	1	
24.	Naleis	2	2	2	
25.	Hollands	2	2	2	
26.	Engels	2	2	2	
27.	Schrijf en Tekesea	-	-	2	
28.	Organisatie	1	1	1	
29.	Administratie	1	1	1	
J u m l a h		45	45	45	

Keterangan : 40 jam di antara jam-jam pelajaran itu dilaksanakan pagi hari, 5 jam lagi sore yaitu : olah raga, Bahasa Belanda, Organisasi dan Administrasi.

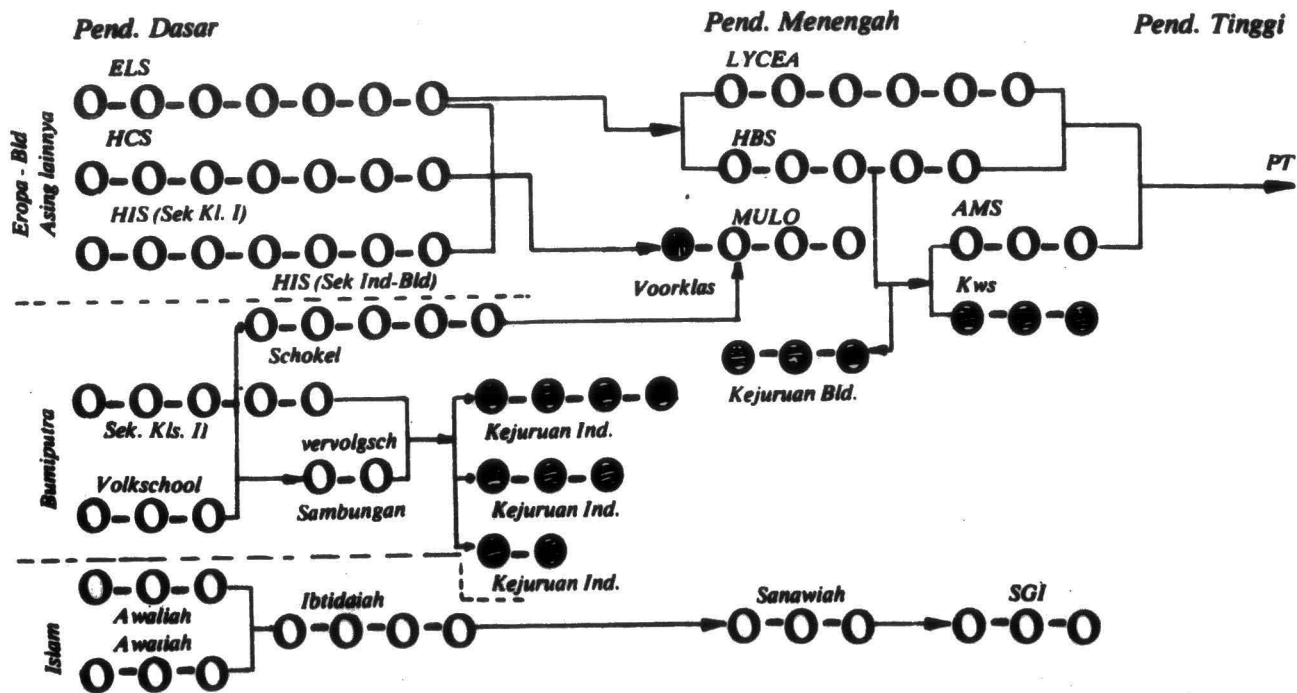
LAMPIRAN : XII

SISTEM PERSEKOLAHAN MUHAMMADIAH DI SUMATERA BARAT TAHUN 1930 - 1945



LAMPIRAN : XIII

PERBANDINGAN DAN GAMBARAN SISTEM PERSEKOLAH UNTUK ORANG BELANDA (EROPA), BUMIPUTRA (INDONESIA), ISLAM DAN PENDUDUK LAINNYA DI SUMATERA BARAT s/d 1942.



**INSTITUT KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
(I K I P) PADANG**

SURAT IZIN SEMENTARA

No. : 27/1/PT37-80

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang, berdasarkan ;

1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 tahun 1974 tanggal 5 Maret 1974;
2. Instruksi Menteri P dan K tanggal 30 Maret 1974 No. : 11/M/1974;
3. Surat permohonan Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat Tanggal 28 April 1980 Nomor 001/G/XXIII/IDKD/80;
4. Surat Persetujuan Dekan-, Tanggal -, No. : -,

sementara menunggu izin dari Departemen P dan K, dengan ini memberi izin kepada :

N a m a	: Drs. Mardjani Martamin
P a n g k a t	: Lektor Kepala Gol. IV/c
J u r u s a n	: Sejarah
F a k u l t a s	: FKPS - IKIP Padang

untuk melakukan kegiatan Penelitian sebagai penanggung jawab Aspek Sejarah Daerah,

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tersebut tidak mengganggu kelancaran tugasnya di IKIP Padang.
2. Kegiatan yang dimaksud hanya dapat dilakukan di luar jam kerja yang bersangkutan di IKIP Padang.
3. Izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Setiap saat izin ini dapat dicabut, apabila pemberian izin ini ternyata mengakibatkan hambatan-hambatan tugas pokoknya yang bersangkutan sebagai Dosen/guru di IKIP Padang.
5. Surat izin ini berlaku mulai tanggal

Demikianlah surat izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1 Mei 1980,-
Rektor Institut Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Padang
u.b.
Pembantu Rektor Bidang Akademis

dto.

Drs. Rustam Nurdin MA
NIP. 130187094

Tembusan :

